

Katalog : 9199007



LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2016



BADAN PUSAT STATISTIK



*LAPORAN
PEREKONOMIAN
INDONESIA
2016*

<http://www.bps.go.id>

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2016

ISSN :1858-0963
No. Publikasi : 07330.1610
Katalog : 9199007
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xx + 210 halaman

Naskah :

Subdirektorat Indikator Statistik

Gambar Kulit :

Subdirektorat Indikator Statistik

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh:

CV. NARIO SARI

Dilarang mengumumkan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah :
Sentot Bangun Widoyono

Editor :
Ali Said
Sofaria Ayuni

Penulis :
Sofaria Ayuni
Chairul Anam
Nia Setiawati
Riyadi
Adwi Hastuti
Putri Larasaty

Pengolahan Data/Penyiapan Draft :
Chairul Anam
Putri Larasaty

Desain/layout :
Zulhan Rudyansyah
Chairul Anam

Kontributor Data :
- Direktorat Neraca Produksi
- Direktorat Neraca Pengeluaran
- Direktorat Statistik Harga
- Direktorat Statistik Distribusi
- Direktorat Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata
- Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

KATA PENGANTAR

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2016 merupakan publikasi rutin tahunan Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini memberikan gambaran perkembangan kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2015 dan yang sedang berjalan di tahun 2016, yang dicerminkan melalui indikator makro terpilih.

Statistik yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari data yang dihimpun oleh BPS dan institusi lain seperti Bank Indonesia (BI), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan instansi lainnya yang dapat memberikan gambaran perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Publikasi ini menyajikan informasi mengenai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, perdagangan luar negeri, perkembangan ekonomi maritim, bidang moneter, investasi, ketenagakerjaan, dan pariwisata.

Akhirnya, penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Saran membangun dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang, dan semoga publikasi ini bermanfaat.

Jakarta, Agustus 2016
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suryamin, M.Sc.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xiii
Penjelasan Umum	xv
Penjelasan Teknis	xvi
Singkatan	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TINJAUAN PEREKONOMIAN DUNIA DAN INDONESIA	11
Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi Global	13
Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Maju	15
Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang	18
Prospek dan Tantangan Perekonomian Dunia	24
Gambaran Umum Perekonomian Indonesia	28
Indeks Daya Saing Indonesia	34
Prospek dan Tantangan Perekonomian Indonesia di Tahun 2016	37
BAB III. PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DAN REGIONAL	41
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat	43
PDB Menurut Lapangan Usaha	44
PDB Menurut Penggunaan	50
Pertumbuhan Ekonomi Spasial	54
PDB Per Kapita	56
Capaian Kinerja Perekonomian Indonesia Triwulan I 2016	57
BAB IV. PERKEMBANGAN POROS EKONOMI MARITIM INDONESIA ...	63
Profil Kemaritiman Indonesia	65
Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) Subsektor Perikanan	66
Produksi Perikanan di Indonesia	68
Potensi Perikanan di Indonesia	72
Sumberdaya Kelautan	73
Penguatan Poros Maritim	75
Gambaran dan Strategi Pengelolaan Perikanan	76
BAB V. INFLASI DAN DAYA BELI MASYARAKAT	79
Inflasi Inti dan Non Inti	81
Perkembangan Inflasi Nasional Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	83
Inflasi Kota-Kota di Indonesia	87

Hubungan Antara Inflasi, Konsumsi, dan Pertumbuhan Ekonomi	91
Tingkat Inflasi Negara ASEAN	92
BAB VI. EKSPOR, IMPOR DAN NERACA PERDAGANGAN INDONESIA..	95
Perkembangan Ekspor.....	97
Perkembangan Impor.....	104
Neraca Perdagangan Indonesia.....	108
BAB VII. KINERJA SEKTOR MONETER	111
Arah Kebijakan yang Dilakukan Pemerintah dan BI di Tahun 2015	113
Perkembangan Uang Beredar (M2)	114
Peredaran Uang Primer dan Komponennya.....	119
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah	123
Pergerakan Suku Bunga.....	128
BAB VIII. PERKEMBANGAN INVESTASI DAN PERDAGANGAN SAHAM ..	135
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).....	137
Penanaman Modal Asing (PMA)	142
Bursa Efek Indonesia (BEI).....	145
Investasi Asing yang Masuk ke Indonesia.....	148
BAB IX. PARIWISATA	151
Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Melalui Pintu Masuk/Bandara	154
Profil Wisatawan Mancanegara	157
Penerimaan Devisa dari Wisatawan Mancanegara	159
Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	163
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Lama Menginap	165
BAB X. KONDISI KETENAGAKERJAAN	171
Peningkatan Angkatan Kerja Beriringan dengan Peningkatan Jumlah Pengangguran di Indonesia.....	173
Variasi Kondisi Ketenagakerjaan di 33 Provinsi Indonesia.....	180
Kualitas Pendidikan Pekerja Indonesia	182
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Masih Menjadi Lapangan Usaha Andalan Penyerapan Tenaga Kerja	183
Upah Sebagai Gambaran Tingkat Kesejahteraan Pekerja.....	185
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Belum Mampu Menciptakan Lapangan Kerja Memadai.....	190
Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Terus Meningkat	191
Pergeseran dari Sektor Informal ke Sektor Formal.....	194
BAB XI. PENUTUP	199

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Penerimaan dan Pengeluaran APBN (miliar rupiah), Tahun 2012–2016	5
Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN (persen), Tahun 2011–2015	17
Tabel 2.2. Laju Inflasi Dunia, Negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN (persen), Tahun 2011–2015	20
Tabel 2.3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Dunia, Negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN (persen), Tahun 2016–2017	25
Tabel 2.4. Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Indonesia, Tahun 2011–2015	30
Tabel 2.5. Perbandingan Peringkat Indeks Daya Saing Indonesia Dengan Beberapa Negara Lainnya ¹ , Tahun 2012/2013–2015/2016.....	35
Tabel 2.6. Nilai dan Peringkat Indeks Daya Saing Indonesia Menurut Pilar Daya Saing, Tahun 2013/2014–2015/2016	36
Tabel 2.7. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Indonesia (persen), Tahun 2016 dan 2017	38
Tabel 3.1. Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2012–2015	47
Tabel 3.2. Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan, Tahun 2012–2015	53
Tabel 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (persen), Tahun 2013–2015	54
Tabel 3.4. Peranan Wilayah Dalam Pembentukan PDB Nasional (persen), Tahun 2013–2015	55
Tabel 3.5. Produk Domestik Bruto per Kapita (ribu rupiah), Tahun 2011–2015	57
Tabel 3.6. Nilai, Struktur, Laju dan Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha, Triwulan I–2016	58
Tabel 3.7. Nilai, Struktur, Laju dan Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran, Triwulan I–2016 ...	59
Tabel 4.1. Nilai PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDB Atas Dasar Harga Konstan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Tahun 2012 - 2015.....	67
Tabel 4.2. Volume dan Nilai Produk Perikanan Indonesia, Tahun 2011-2015	71
Tabel 4.3. Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WDP) (dalam ribu ton/tahun)	72

Tabel 4.4.	Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap, Tahun 2011-2014	74
Tabel 4.5.	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan, Tahun 2011–2015.....	75
Tabel 4.6.	Jumlah Kapal Pengawas yang Dimiliki Indonesia, Tahun 2012-2015	76
Tabel 5.1.	Inflasi dan Sumbangan Inflasi Inti dan Non Inti, Tahun 2013–2015	82
Tabel 5.2.	Laju Inflasi Indonesia Gabungan 82 Kota Menurut Kelompok Barang Kebutuhan (2012=100) (persen), Tahun 2013–2016	85
Tabel 5.3.	Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Nasional (persen), Tahun 2014 dan 2015.....	86
Tabel 5.4.	Laju Inflasi 82 Kota di Indonesia ¹ (2012=100), Tahun 2012–2015	88
Tabel 5.5.	Laju Inflasi Negara ASEAN (persen), Tahun 2013-2015	92
Tabel 6.1.	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Migas dan Non-Migas (juta US\$), Tahun 2011–2016	98
Tabel 6.2.	Nilai Ekspor Komoditi Penting Indonesia (juta US\$), Tahun 2014–2016	100
Tabel 6.3.	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (juta US\$), Tahun 2011–2016.....	101
Tabel 6.4.	Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan (juta US\$), Tahun 2011–2016	103
Tabel 6.5.	Nilai Impor Indonesia Menurut Migas dan Non-Migas (juta US\$), Tahun 2011–2016	104
Tabel 6.6.	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang Ekonomi (juta US\$), Tahun 2011–2016	105
Tabel 6.7.	Nilai Impor Indonesia (CIF) Menurut Golongan Barang SITC (juta US\$), Tahun 2011–2016	106
Tabel 6.8.	Impor Indonesia Menurut Negara Asal (juta US\$), Tahun 2011–2016	107
Tabel 6.9.	Neraca Perdagangan Indonesia (juta US\$), Tahun 2011–2016	109
Tabel 7.1.	Perkembangan Uang Beredar (miliar rupiah), Tahun 2014 – Maret 2016.....	117
Tabel 7.2.	Perkembangan Uang Primer (miliar rupiah), Tahun 2014 – Maret 2016.....	120
Tabel 7.3.	Perkembangan Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah di Bank Indonesia, Tahun 2014–Maret 2016	124
Tabel 7.4.	Perkembangan Suku Bunga PUAB, SBI, BI Rate, dan Volume SBI, Tahun 2014-Maret 2016	131

Tabel 8.1.	Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor (miliar rupiah), Tahun 2013– 2015	138
Tabel 8.2.	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Pulau (miliar rupiah), Tahun 2013– 2015	140
Tabel 8.3.	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor (juta US \$), Tahun 2013– 2015	142
Tabel 8.4.	Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang Disetujui Pemerintah Menurut Pulau (juta US\$), Tahun 2013– 2015	144
Tabel 8.5.	Transaksi dan Indeks Saham di Bursa Efek Indonesia, Tahun 2011–2015	146
Tabel 8.6.	Jumlah dan Nilai Perdagangan Saham yang Dilakukan oleh Investor Asing di Bursa Efek Indonesia, Tahun 2010–2015	148
Tabel 9.1.	Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia (orang), Tahun 2010–2016	155
Tabel 9.2.	Profil Wisatawan Mancanegara (orang), Tahun 2009–2014	158
Tabel 9.3.	Penerimaan Devisa dari Wisatawan Menurut Negara Tempat Tinggal, Tahun 2010–2014	161
Tabel 9.4.	Wisatawan yang Datang ke Indonesia Menurut Negara Tempat Tinggal, Tahun 2010–2014	163
Tabel 9.5.	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Menurut Negara Asal (US\$), Tahun 2012–2015	164
Tabel 9.6.	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Menurut Provinsi (persen), Tahun 2011–2015	166
Tabel 9.7.	Rata-Rata Lama Menginap Tamu Pada Hotel Bintang Menurut Provinsi (hari), Tahun 2011–2015	169
Tabel 10.1.	Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2012–2016	174
Tabel 10.2.	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2012–2016	176
Tabel 10.3.	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2012–2016	177
Tabel 10.4.	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Provinsi, Tahun 2013–2016	181
Tabel 10.5.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2012–2016	182
Tabel 10.6.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Tahun 2012–2016	184
Tabel 10.7.	Rata-Rata UMP, KHL dan Pertumbuhan UMP (ribu rupiah), Tahun 2007–2016	186

Tabel 10.8. Distribusi Pekerja Menurut Upah dan Daerah (persen), Tahun 2013–2016	187
Tabel 10.9. Distribusi Pekerja Menurut Upah dan Jenis Kelamin (persen), Tahun 2013–2016	189
Tabel 10.10. Elastisitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Tahun 2013–2015	190
Tabel 10.11. Produktivitas Menurut Provinsi dan Komoditas (juta rupiah per pekerja), Tahun 2011–2014	192
Tabel 10.12. Produktivitas Menurut Lapangan Pekerjaan (juta rupiah per pekerja), 2012–2015	193
Tabel 10.13. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Kegiatan Formal/Informal dan Jenis Kelamin, Tahun 2012–2016.....	195

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1.	Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara Maju, dan Negara Berkembang, serta ASEAN (persen), 2011–2015.....	14
Gambar 2.2.	Perkembangan Laju Inflasi Dunia, Negara Maju, dan Negara Berkembang, serta ASEAN (persen), 2011–2015	15
Gambar 2.3	Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara ASEAN (persen), 2011–2015	22
Gambar 2.4	Perkembangan Laju Inflasi di Beberapa Negara ASEAN (persen), 2011–2015	23
Gambar 2.5	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara Maju dan Negara Berkembang, serta ASEAN (persen), Tahun 2016 dan 2017	26
Gambar 2.6	Proyeksi Inflasi Dunia, Negara Maju dan Negara Berkembang, serta ASEAN (persen), 2016 dan 2017	27
Gambar 2.7.	Perbandingan Peringkat Indeks Daya Saing Indonesia dengan Beberapa Negara Berkembang di kawasan ASEAN, Tahun 2013/2014–2015/2016	34
Gambar 2.8.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Indonesia Menurut IMF (persen), Tahun 2016 dan 2017	39
Gambar 3.1.	Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2012–2015	45
Gambar 3.2.	Kontribusi PDB Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2015	46
Gambar 3.3.	Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan, Tahun 2012–2015	50
Gambar 3.4.	Kontribusi PDB Menurut Penggunaan (persen), Tahun 2015	51
Gambar 4.1.	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (persen), Tahun 2011-2015	66
Gambar 4.2.	Distribusi PDB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Tahun 2015	68
Gambar 4.3.	Volume Produksi Perikanan di Indonesia, Tahun 2011-2015	68
Gambar 4.4.	Nilai Produksi Perikanan di Indonesia, Tahun 2011-2014	69
Gambar 4.5.	Potensi Lahan Budidaya di Indonesia	73
Gambar 4.6.	Jumlah Perahu/Kapal Perikanan laut, Tahun 2011-2014	74
Gambar 4.7.	Jumlah Perahu/Kapal Perikanan Laut Menurut Jenis Perahu/Kapal, Tahun 2011 - 2014	75
Gambar 5.1.	Laju Inflasi Indonesia, Tahun 2015–2016	84
Gambar 5.2.	Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Indonesia (persen), Tahun 2014 dan 2015	87
Gambar 5.3.	Laju Inflasi Negara ASEAN (persen), Tahun 2013-2015	93
Gambar 6.1.	Nilai Ekspor Indonesia, Tahun 2011–2015	98
Gambar 6.2.	Pertumbuhan, Distribusi dan Nilai Ekspor Indonesia Menurut Sektor Komoditas, Tahun 2015	99
Gambar 6.3.	Pertumbuhan, Distribusi dan Nilai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang, Tahun 2015	102

Gambar 6.4.	Pertumbuhan, Distribusi dan Nilai Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan, Tahun 2015.....	104
Gambar 6.5.	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang Ekonomi, Tahun 2015	105
Gambar 6.6.	Pertumbuhan, Distribusi dan Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang, Tahun 2015	106
Gambar 6.7.	Pertumbuhan, Distribusi dan Nilai Impor Indonesia Menurut Negara Asal, Tahun 2015	108
Gambar 7.1.	Jumlah Uang Beredar (miliar rupiah), Tahun 2010–2015	115
Gambar 7.2.	Perkembangan Nilai Tukar Mata Uang Asing, Tahun 2015 – Maret 2016	124
Gambar 7.3.	Perkembangan PUAB Rupiah Pagi, BI Rate, Tahun 2015 – Maret 2016.....	129
Gambar 7.4.	Perkembangan SBI, BI Rate, dan Volume SBI, Tahun 2015 – Maret 2016.....	133
Gambar 8.1.	Nilai Investasi PMDN yang Terealisasi Menurut Sektor (persen), Tahun 2015	139
Gambar 8.2.	Nilai Investasi PMDN yang Terealisasi Menurut Pulau, (persen), Tahun 2015	141
Gambar 8.3.	Nilai Investasi PMA yang Terealisasi Menurut Sektor (persen), Tahun 2015	143
Gambar 8.4.	Nilai Investasi PMA yang Terealisasi Menurut Pulau (persen), Tahun 2015	145
Gambar 8.5.	Jumlah dan Nilai Transaksi Saham di Bursa Efek Indonesia, Tahun 2012–2015.....	147
Gambar 9.1.	Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Melalui Bandara (orang), Tahun 2011–2015	156
Gambar 9.2.	Persentase Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Tujuan Kunjungan, Tahun 2014	159
Gambar 9.3.	Penerimaan Devisa dari Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia (juta US\$), Tahun 2010–2014	160
Gambar 9.4.	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada Hotel Berbintang di 17 Provinsi (persen), Tahun 2015	167
Gambar 9.5.	Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Indonesia Pada Hotel Berbintang di 17 Provinsi (hari), Tahun 2015	168
Gambar 10.1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin (persen), Tahun 2012–2016	177
Gambar 10.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), Tahun 2012–2016	179
Gambar 10.3.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2012–2016	183
Gambar 10.4.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal dan Jenis Kelamin, Tahun 2012–2016	196

PENJELASAN UMUM

Tanda-tanda yang digunakan dalam publikasi ini, adalah sebagai berikut :

Data belum tersedia : ...

Data tidak tersedia : -

Data dapat diabaikan : 0

Tanda desimal : ,

<http://www.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS

1. Daya saing menurut *World Economic Forum* (WEF) adalah daya saing suatu negara/ekonomi dengan pendekatan makro. Indeks daya saing diukur dari 12 pilar dan dikelompokkan ke dalam tiga kelompok faktor, yaitu persyaratan dasar, penopang efisiensi, dan inovasi dan kecanggihan bisnis.
2. Penghitungan PDB atas dasar harga konstan yang sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000, sejak tahun 2015 menggunakan tahun dasar 2010. Penghitungan PDB dengan tahun dasar baru tersebut telah dihitung mundur sampai dengan tahun 2010.
3. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.
4. Mulai bulan Januari 2014, Indeks Harga Konsumen (IHK) dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup (SBH) di 82 kota tahun 2012 yang mencakup sekitar 225-462 komoditas. Sedangkan sebelum Januari 2014 masih menggunakan pola konsumsi hasil SBH di 66 ibukota provinsi tahun 2007 yang mencakup sekitar 284-441 komoditas.
5. Uang Kartal: adalah uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah.
6. Uang Giral: Simpanan rupiah milik penduduk pada sistem moneter yang terdiri atas rekening giro, kiriman uang (*transfer*) dan kewajiban segera lainnya antara lain simpanan berjangka yang telah jatuh waktu.
7. Uang Kuasi: Simpanan rupiah milik penduduk pada sistem moneter yang untuk sementara waktu kehilangan fungsinya sebagai alat tukar. Uang kuasi terdiri dari deposito berjangka, tabungan dalam rupiah dan valuta asing, dan giro dalam valuta asing.
8. M1 : adalah uang beredar dalam arti sempit yaitu meliputi uang kartal dan uang giral.
M2 : adalah uang beredar dalam arti luas yaitu meliputi uang kartal, uang giral ditambah dengan uang kuasi.
9. Pencatatan Statistik Ekspor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang tertentu (PEBT), dan pencatatan Statistik Impor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), yang diterima BPS dari kantor-kantor Bea dan Cukai.
10. Sistem pengolahan adalah *Carry over* yaitu dokumen dari satu bulan tertentu penerimaannya ditutup setelah satu bulan pada bulan berikutnya, dokumen yang datang sesudah tanggal penutupan dianggap sebagai transaksi bulan berikutnya.

11. Beberapa Klasifikasi jenis/kelompok barang yang digunakan dalam statistik Ekspor dan Impor adalah:
 - a. *Harmonized System* (HS), untuk keperluan pengenaan tariff.
 - b. *Standard International Trade Classification* (SITC), penyusunannya ditekankan untuk keperluan Statistik Ekonomi.
 - c. *International Standard Industrial Classification* (ISIC), untuk mengelompokkan lapangan usaha yang ada dalam kegiatan ekonomi atau asal lapangan usaha suatu komoditi dihasilkan.
 - d. *Broad Economic Category* (BEC), untuk mengetahui penggunaan akhir dari suatu barang yaitu barang konsumsi, bahan baku dan penolong, dan barang modal.
12. Sejak September 2007, Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) digabung (*merger*) menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).
13. Tamu Asing adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh suatu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi.
14. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel adalah banyaknya malam kamar yang dihuni dibagi dengan banyaknya malam yang tersedia dikalikan 100 persen.
15. Rata-rata lamanya tamu menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya tamu yang datang menginap ke akomodasi.
16. Pengeluaran wisatawan mancanegara adalah rata-rata uang yang dikeluarkan/dibelanjakan oleh wisatawan mancanegara selama berkunjung di Indonesia, baik sepanjang masa kunjungan per orangnya maupun per harinya.
17. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun lebih.
18. Pekerja adalah seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau membantu memperoleh pendapatan/keuntungan, paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu yang lalu, kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
19. Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase angkatan kerja (pekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.

21. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
22. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu negara atau wilayah. TKK diukur sebagai persentase orang yang bekerja terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.
23. Produktivitas pekerja menurut propinsi diukur dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk yang bekerja di setiap provinsi.
24. Produktivitas pekerja menurut lapangan pekerjaan diukur dengan membagi PDB pada masing-masing lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk yang bekerja di setiap lapangan pekerjaan.

<http://www.bps.go.id>

SINGKATAN

ADB	:	<i>Asian Development Bank</i>
ADO	:	<i>Asian Development Outlook</i>
ACFTA	:	<i>ASEAN China Free Trade Agreement</i>
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	:	<i>Association South East Asia Nation</i>
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BEI	:	Bursa Efek Indonesia
BI	:	Bank Indonesia
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
bps	:	<i>basis points</i>
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
CIF	:	<i>Cost Insurance and Freight</i>
DTW	:	Daerah Tujuan Wisata
GKG	:	Gabah Kering Giling
IHK	:	Indek Harga Konsumen
IHSG	:	Indek Harga Saham Gabungan
IMF	:	<i>International Monetary Fund</i>
I - O	:	Input - Output
KHM	:	Kebutuhan Hidup Minimum
KHL	:	Kebutuhan Hidup Layak
NTP	:	Nilai Tukar Petani
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PUAB	:	Pasar Uang Antar Bank
SBI	:	Sertifikat Bank Indonesia
SBH	:	Survei Biaya Hidup
SITC	:	<i>Standard International Trade Classification</i>
TKK	:	Tingkat Kesempatan Kerja
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPK	:	Tingkat Penghunian Kamar
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
UMP	:	Upah Minimum Provinsi
Valas	:	Valuta Asing (<i>Foreign Currency</i>)
WEO	:	<i>World Economic Outlook</i>
Wisman	:	Wisatawan Mancanegara



1

Pendahuluan

Presiden terpilih pada awal tahun 2015 tepatnya tanggal 8 Januari telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang merupakan visi, misi dan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang 5 tahun ke depan. Pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah (tahun 2015-2019) baru saja dimulai pada tahun 2015, program-program kerja pemerintah baru sudah digulirkan yaitu mengusung sembilan agenda kerja yang disebut nawacita. Sembilan agenda prioritas itu merupakan penjabaran dari konsep “Trisakti” Bung Karno yakni berdaulat dalam politik serta mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya. Prioritas program pembangunan fokus pada tiga hal yaitu porsi perhatian besar pada pembangunan maritim, pangan, dan energi. Target selanjutnya adalah peningkatan pembangunan infrastruktur yaitu dimulai dengan pembangunan sejumlah pelabuhan di beberapa wilayah dan tersedianya listrik sebesar 25 ribu mega watt.

Seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian di tahun 2015, kebijakan ekonomi diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan difokuskan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang dapat menjamin pemerataan yang mampu mengurangi jumlah penduduk miskin dan ketimpangan antar penduduk serta ketimpangan wilayah antara Jawa dan Luar Jawa. Pemerintah dalam pembiayaan penganggaran perencanaan pembangunan ke depan memprioritaskan pada (1) mewujudkan kedaulatan pangan dalam mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, serta peningkatan produksi ikan nasional; (2) membangun infrastruktur (bandara dan penyelesaian pembangunan jalan tol Trans Sumatera); (3) mendukung industri kedirgantaraan yang bertujuan sebagai modal kerja, dan (4) membangun industri pertahanan nasional.

Sejalan dengan dimulainya pemerintahan baru, Indonesia juga menghadapi persaingan perekonomian yang semakin ketat, utamanya dalam menghadapi pasar bebas diantaranya mulai diberlakukan Pasar Bebas Asia Tenggara (MEA) pada akhir tahun 2015 ini. Permasalahan baru yang akan dihadapi Indonesia ke depan adalah masuknya barang/komoditas impor yang sejenis dengan produk lokal yang akan mengancam industri dalam negeri. Harapannya industri di dalam negeri mampu menghasilkan barang yang berkualitas dan bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri serta menjadi produk unggulan yang dapat bersaing dengan produk luar dan dapat diekspor ke luar negeri. Pemerintah dan para pelaku usaha harus mampu mengantisipasi dengan diberlakukannya MEA karena nantinya akan tercipta kesatuan pasar dan basis produksi yang akan membuat arus barang, investasi, dan tenaga kerja secara bebas dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Semoga Indonesia tidak hanya menjadi tujuan pasar dari negara lain tetapi juga mampu memasarkan produknya ke negara lain di kawasan ASEAN.

Perencanaan keuangan yang sudah disusun dalam APBN 2015 mengalami perubahan dalam perjalanannya, disebabkan karena pengaruh atau kondisi perekonomian global dan faktor-faktor eksternal dan internal yang

terjadi. Berbagai tantangan perekonomian Indonesia di tahun 2015 adalah belum stabilnya perekonomian global serta negara-negara mitra dagang utama Indonesia diikuti dengan penurunan harga komoditas global terutama harga minyak mentah dunia. Tantangan lain adalah sektor pertanian yang akan semakin tertekan sebagai dampak perubahan iklim, ketimpangan pendapatan, persaingan perdagangan internasional dan liberalisasi yang makin terbuka, dan defisit neraca perdagangan akibat impor khususnya produksi pangan pokok. Ketergantungan Indonesia akan pangan impor harus mulai dikurangi, dan pemerintah harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan sebagai bentuk kemandirian ekonomi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok berdampak pada menurunnya kinerja ekspor Indonesia ke negara tersebut. Ekspektasi kebijakan kenaikan suku bunga *the Fed* di Amerika Serikat juga berpengaruh pada pasar keuangan di sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia, dan tren penurunan harga komoditas dunia. Dalam menghadapi kondisi perekonomian di luar dan di dalam negeri di tahun 2015 membuat pemerintah mengusulkan perubahan atas asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2015, menjadi :

1. Pemerintahan Jokowi menetapkan pertumbuhan ekonomi sama dengan yang tertuang dalam APBN 2015 yaitu sebesar 5,7 persen.
2. Pemerintah bersama BI melakukan pengendalian di tingkat pusat, dimana inflasi pada APBN 2015 ditetapkan sebesar 4,4 persen, pada APBN 2015 diperkirakan mencapai 5,0 persen atau tetap berada pada rentang $4,0 \pm 1,0$ persen.
3. Rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan berada pada kisaran Rp 12.500 per US \$ yang semula asumsinya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp 11.900 per US \$.
4. Suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan akan turut mengalami tekanan dan sedikit lebih tinggi di atas asumsi APBN tahun 2015 yaitu dari 6,0 persen menjadi 6,2 persen.
5. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berada pada kisaran rata-rata US \$ 60 per barel atau lebih rendah dari asumsi ICP dalam APBN tahun 2015 sebesar US \$ 105 per barel.
6. Lifting minyak diperkirakan akan terealisasi sebesar 825 ribu barel per hari, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 900 ribu barel per hari.
7. Lifting gas bumi diperkirakan mencapai 1.221 ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi lifting gas bumi pada APBN tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per hari.

Kondisi perekonomian Indonesia belum beranjak membaik, sementara berbagai isu dari faktor eksternal terus menekan perekonomian domestik. Pemerintah harus bersikap hati-hati dan waspada terhadap faktor eksternal dan internal yang sewaktu-waktu dapat memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian Indonesia. Target pemerintah untuk penerimaan negara dan hibah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Penerimaan negara

bersumber dari pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. Dalam APBNP 2015 ditargetkan penerimaan negara sebesar Rp 1.761,64 triliun dan belanja negara sebesar Rp 1.984,15 triliun, ternyata pendapatan negara masih mengalami defisit sebesar Rp 2.225,51 triliun, berarti pemerintah masih belum mampu menekan atau mengurangi belanja negara.

Pemasukan yang diterima negara sebagian besar diperoleh dari pajak, kontribusi pajak pada APBNP 2015 sebesar 84,54 persen. Pemerintah menargetkan penerimaan dari pajak dalam APBNP 2015 sebesar Rp 1.489,26 triliun. Namun sampai akhir tahun 2015 penerimaan pajak yang masuk hanya mencapai sekitar Rp 1.235,8 triliun saja atau hanya sekitar 83 persen dari target yang ditetapkan pemerintah.

Dari sisi Pengeluaran Belanja negara sebagian besar digunakan untuk Pengeluaran Pemerintah Pusat, dimana setiap tahun ditargetkan dalam APBN sekitar 66 persen dan sisanya adalah pengeluaran untuk daerah. Pengeluaran untuk Belanja Pemerintah Pusat dalam APBNP 2015 mengalami pertumbuhan sekitar 3,06 persen, dimana sebagian besar digunakan untuk membiayai kementerian/lembaga. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk melakukan pengetatan dan penghematan dari sisi pengeluaran/belanja, salah satunya pemerintah melakukan pengendalian dengan melakukan pemotongan terhadap belanja Kementerian/Lembaga penghematan tersebut dilakukan sengaja dibentuk agar belanja barang lebih efisien dan efektif, namun tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran untuk membiayai

Tabel 1.1. Penerimaan dan Pengeluaran APBN (miliar rupiah), Tahun 2012–2016

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
				APBNP	APBN
A. Penerimaan Negara dan Hibah	1 338 109,6	1 438 891,1	1 635 378,5	1 761 642,8	1 822 545,8
1. Penerimaan Dalam Negeri	1 332 322,9	1 432 058,6	1 633 053,4	1 758 330,9	1 820 514,1
1. Penerimaan Pajak	980 518,1	1 077 306,7	1 246 107,0	1 489 255,5	1 546 664,6
2. Penerimaan bukan pajak	351 804,7	354 751,9	386 946,4	269 075,4	273 849,4
2. Hibah	5 786,7	6 832,5	2 325,1	3 311,9	2 031,8
B. Belanja Negara					
1. Pengeluaran Pemerintah Pusat	1 491 410,2	1 650 563,7	1 876 872,8	1 984 149,7	2 095 724,7
1. Belanja K/L	1 010 558,2	1 137 162,9	1 280 368,6	1 319 549,0	1 325 551,4
2. Belanja Non K/L	621 938,1	690 226,5	602 292,0	795 480,4	784 125,7
a. Pembayaran Bunga Utang	388 620,1	446 936,4	678 076,6	524 068,6	541 425,7
b. Subsidi	480 645,1	513 260,4	596 504,2	664 600,7	770 173,3
2. Pengeluaran untuk daerah	480 645,1	513 260,4	596 504,2	643 834,5	723 191,2
1. Transfer ke daerah	-	-	-	20 766,2	46 982,1
2. Dana Desa	206,9	140,4	-	-	-
3. Suspen					
C. Surplus/defisit Anggaran (A-B)	- 153 300,6	- 211 672,7	- 241 494,3	- 222 506,9	- 273 178,9
% terhadap PDB	-1,9	-2,3	-2,4	-1,9	-2,1

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBNP 2015

Kementerian/Lembaga pada tahun 2015 ditargetkan mencapai Rp 795,48 triliun, terjadi kenaikan sekitar 32,08 persen dibanding tahun 2014.

Pengeluaran pemerintah pusat lainnya adalah pengeluaran non Kementerian/Lembaga, dimana pengeluaran yang cukup besar adalah pengeluaran untuk subsidi. Dalam beberapa tahun terakhir pengeluaran pemerintah untuk subsidi terus meningkat. Pada APBN 2015 pengeluaran untuk subsidi ditargetkan mencapai Rp 414,68 triliun atau meningkat sekitar 2,89 persen dari APBN 2014. Pemerintah berusaha untuk mengurangi anggaran negara untuk subsidi, agar tidak membebani pengeluaran negara yang sudah cukup besar, agar anggaran negara tetap berada dalam batas aman. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani subsidi adalah mengurangi subsidi dibidang energi (BBM dan Listrik) dan mengalihkan sebagian anggaran subsidi untuk kesejahteraan penduduk miskin yang dialihkan melalui program-program pengentasan kemiskinan seperti kartu sehat, kartu pintar.

Salah satu program pemerintahan Jokowi-JK adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Untuk mewujudkan program tersebut maka sejak pemerintahan Jokowi-JK mulai menyediakan anggaran dalam APBNP 2015 yaitu dana desa yang tujuannya adalah dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum di desa yang dapat membuat desa tersebut maju. Dalam APBNP 2015 untuk pos anggaran baru dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,77 triliun.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019 dan menjadi tahun pertama bagi pemerintahan kabinet kerja dalam penyusunan RAPBN mulai dari proses perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi yang akan dilakukan dalam tahun ini. Dengan memerhatikan berbagai tantangan dan kondisi perekonomian yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2016, maka pemerintah mencoba melakukan langkah-langkah terobosan dalam membuat kebijakan fiskal dan penganggaran.

Dalam menyusun APBN 2016 pemerintah penuh kehati-hatian dan disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal, direncanakan dan dibuat seefisien mungkin dalam pengelolaan sumber daya, produktif dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan. Pemerintah memproyeksikan dalam APBN 2016 penerimaan negara sebesar Rp 1.822,54 triliun atau lebih tinggi 3,46 persen dari APBNP 2015. Sedangkan belanja negara diproyeksikan mencapai Rp 2.095,72 triliun lebih tinggi 5,62 persen dari tahun lalu. Postur APBN 2016 masih menunjukkan bahwa masih terjadi defisit anggaran sekitar 2,1 persen dari PDB atau sebesar Rp 273,18 triliun.

Pajak masih menjadi primadona penerimaan negara, dimana pada APBN 2016, direncanakan pemasukan dari pajak sebesar Rp 1.546,66 triliun atau terjadi peningkatan sebesar 3,85 persen dari APBNP 2015. Namun pemerintah mematok target penerimaan pajak sebesar Rp 1.368 triliun, atau 11 persen lebih tinggi dari realisasi penerimaan pajak tahun 2015.

Dari sisi belanja negara langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan optimalisasi pendapatan yang ada, efisiensi dalam belanja, dan melanjutkan efisiensi subsidi. Selain itu meningkatkan belanja produktif yang difokuskan untuk membangun infrastruktur termasuk ketahanan pangan dan energi yang dapat meningkatkan kapasitas perekonomian Indonesia. Pada APBN 2016 besaran belanja negara yang ditargetkan pemerintah sedikit lebih tinggi dari target APBNP 2015. Namun pengeluaran untuk K/L ditargetkan sebesar Rp 784,12 triliun atau turun sekitar 1,43 persen dibanding APBNP 2015, sedangkan target pengeluaran untuk non K/L lebih tinggi meningkat sekitar 3,31 persen atau sebesar Rp 541,43 triliun. Walaupun pengeluaran untuk belanja non K/L naik tetapi tidak dengan anggaran pengeluaran untuk subsidi yang mulai tahun lalu sudah mulai dikurangi oleh pemerintah dan untuk anggaran tahun 2016 ditargetkan lebih rendah lagi dari anggaran tahun lalu yaitu hanya sebesar Rp 182,6 triliun saja atau turun sekitar 55,94 persen.

Anggaran belanja negara yang mendapat perhatian cukup tinggi dari pemerintah adalah pengeluaran untuk daerah, pada anggaran tahun lalu ditargetkan sebesar Rp 664,60 triliun dan untuk tahun anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp 770,17 triliun atau naik sekitar 15,88 persen. Pengeluaran untuk daerah sebagian digunakan untuk meningkatkan alokasi Dana Desa, dimana pada tahun 2016 alokasi untuk dana desa naik hingga 126,24 persen dari tahun lalu atau sebesar Rp 46,98 triliun dari dan diluar transfer ke daerah.

Selain itu yang cukup mendapat perhatian pemerintah dalam menyusun anggaran di tahun 2016 adalah anggaran untuk kesehatan, dimana untuk pertama kali pemerintah mencoba pemenuhan anggaran kesehatan ditetapkan sebesar 5 persen dari belanja negara serta mempertahankan pemenuhan anggaran untuk pendidikan tetap sebesar 20 persen dari belanja negara.

Target pembangunan yang ditetapkan di dalam APBN tahun 2016 yang tertuang dalam APBN telah ditetapkan antara lain :

- Angka pengangguran 5,2 – 5,5
- Angka kemiskinan 9,0 - 10,0
- Gini Rasio (indeks) 0,39
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan penghitungan baru 70,1.

Sehubungan dengan telah disusunnya APBN untuk tahun 2016 pemerintah mulai menjalankan program kerja sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2016 bertema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Pemasukan dari pajak sangat diutamakan sebagai anggaran pembangunan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Program-program Pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja serta dengan dukungan pihak swasta dan lembaga keuangan khususnya perbankan. Berbagai program dan kebijakan Pemerintah dalam mendukung perluasan akses lapangan pekerjaan di antaranya adalah dukungan untuk penciptaan industri kreatif dan pemberdayaan masyarakat, penguatan proyek pembangunan yang bersifat padat karya, serta peningkatan belanja modal dalam APBN khususnya.

Perekonomian Indonesia di Tahun 2016

Perkembangan ekonomi global dan perkembangan perekonomian negara-negara maju tetap akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2016, terutama negara-negara mitra dagang Indonesia akan sangat mempengaruhi neraca perdagangan khususnya ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut. Intinya pemerintah harus mampu menjaga kestabilan perekonomian di dalam negeri dan tetap berusaha untuk mampu menjadi Negara yang mandiri.

Langkah yang dilakukan pemerintahan di tahun 2016 adalah mempercepat pelaksanaan sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Nawacita dan Trisakti. Kebijakan fiskal dalam APBN semakin dipertajam seperti kebijakan di bidang pendapatan negara melalui upaya optimalisasi pendapatan tanpa mengganggu perkembangan investasi dunia usaha, belanja negara dan pembiayaan anggaran. Beberapa kata kunci akan mewarnai pembangunan ekonomi di bawah pemerintahan baru seperti: revolusi mental, pengembangan sektor maritim, pembangunan infrastruktur, industri kreatif/UKM, efisiensi distribusi/logistik nasional, kemandirian pangan dan energi, dan lain-lain. Semuanya tertuang dalam rencana kerja dan masuk dalam penyusunan APBN 2016.

Berbagai target ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah pada tahun 2015 tidak semuanya tercapai seperti pertumbuhan ekonomi, dimana pemerintah menargetkan 5,7 persen namun ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh sebesar 4,73 persen. Target pemerintah yang tidak tercapai di tahun 2015 lainnya adalah pemasukan pendapatan negara dari pajak yang hanya mampu mencapai 83 persen saja dari target yang ditetapkan. Kondisi di atas membuat pemerintah dalam menyusun anggaran dan target capaian di tahun 2016 penuh kehati-hatian, dengan menyiapkan berbagai stimulus dan kebijakan fiskal dan keuangan yaitu kebijakan pada sisi belanja negara diarahkan agar semakin efisien, produktif, dan berkualitas, serta memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal, untuk kebijakan pembiayaan anggaran diarahkan antara lain dengan menyempurnakan kualitas perencanaan investasi oleh Pemerintah. Dibawah ini beberapa indikator asumsi dasar ekonomi makro yang disusun di dalam APBN 2016 terdiri dari:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen;

2. Inflasi sebesar 4,7 persen;
3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.900 per dolar;
4. Suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5 persen;
5. Harga minyak mentah Indonesia (Indonesia's Crude Price/ICP) sebesar US \$ 50 per barel;
6. Lifting minyak Indonesia sebesar 830 ribu barel/hari; dan
7. Lifting gas sebesar 1.155 ribu barel/hari.

Penyusunan asumsi dasar ekonomi makro tersebut mengacu pada sasaran tahunan dalam RKP tahun 2016, yang disesuaikan dengan keadaan/kondisi perkembangan ekonomi domestik maupun global (NKAPBN2016).

Intinya dari rencana anggaran yang dibuat tersebut mengacu pada target pembangunan di tahun 2016 difokuskan pada 3 dimensi yaitu:

1. Dimensi Pembangunan SDM yang meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental
2. Dimensi Pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan tenaga kelistrikan serta kemaritiman, pariwisata dan industri
3. Dimensi Pembangunan Strategi pemerataan dan kewilayahan meliputi mendorong peningkatan kualitas hidup manusia, pemerataan antar kelompok dan pendapatan antar wilayah serta membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar.

Kondisi perkonomian dunia yang belum sepenuhnya pulih diikuti oleh kondisi perekonomian negara-negara maju semoga masih dapat membawa dampak positif pada perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2016. Pemerintah berharap mampu merespon kondisi eksternal dan internal yang akan terjadi disepanjang tahun 2016, diharapkan dapat lebih memanfaatkan momentum dan mengoptimalkan upaya dalam menjamin percepatan pembangunan infrastruktur agar dapat memacu berkembangnya sektor ekonomi produktif, guna mengatasi masalah kesenjangan serta mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi. Pemerintah Indonesia semoga mampu menghadapi segala tantangan di tahun 2016, selain itu juga dapat memanfaatkan peluang dan momentum yang ada. Dengan mengoptimalkan anggaran, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada pemerintah diharapkan mampu menghadapi segala tantangan dan memanfaatkan peluang guna mewujudkan kemandirian ekonomi produktif.



2

Tinjauan Perekonomian Dunia & Indonesia

<http://www.bps.go.id>

Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi Global

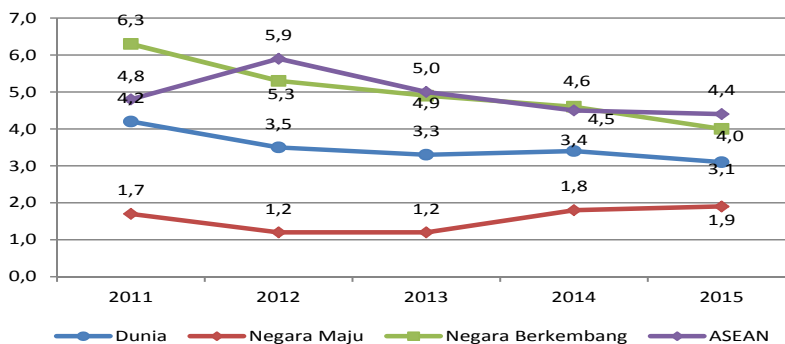
Dari tahun ke tahun IMF selalu memproyeksikan kondisi perekonomian dunia selama beberapa tahun mendatang. Pada April 2015, IMF dalam *World Economic Outlook (WEO)* memperkirakan bahwa perekonomian dunia dapat tumbuh sebesar 3,5 persen atau meningkat dari tahun 2014 yang menunjukkan besaran 3,4 persen. Optimisme pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut didasari karena proyeksi semakin menguatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dari tahun 2014 yang tumbuh sebesar 1,8 persen dan diproyeksikan menjadi 2,4 persen. Namun demikian, IMF juga memproyeksikan bahwa nilai pertumbuhan ekonomi dunia tersebut akan terganggu dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang yang akan mengalami perlambatan dari 4,6 persen pada tahun 2014 menjadi 4,3 persen pada tahun 2015. Hal ini menjadi kekhawatiran apabila proyeksi pertumbuhan ekonomi negara berkembang semakin melambat akan mempengaruhi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Ternyata, kekhawatiran melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara berkembang menjadi kenyataan. Realisasi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2015 hanya mencapai 3,1 persen atau melambat dari pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai pada tahun 2013 (3,3 persen) dan 2014 (3,4 persen). Hal ini menandakan bahwa kinerja perekonomian dunia tidak sesuai dengan proyeksi yang dikeluarkan IMF pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,5 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai proyeksi ini disebabkan karena terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Walaupun, pertumbuhan ekonomi di negara maju mengalami peningkatan, besaran peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mampu mengimbangi besarnya perlambatan pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Alhasil perekonomian dunia pun semakin menunjukkan perlambatan.

Meskipun sesuai dengan proyeksi awal bahwa perekonomian negara maju pada tahun 2015 akan menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan, namun realisasi pertumbuhan ekonomi negara maju pada tahun 2015 yang sebesar 1,9 persen masih dibawah proyeksi awal sebesar 2,4 persen. Pertumbuhan ekonomi negara maju pada tahun 2015 yang sebesar 1,9 persen ini berada di bawah besaran pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi negara maju di tahun 2015 lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 yang sebesar 1,2 persen dan pada tahun 2014 yang sebesar 1,8 persen. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut didukung oleh semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sebagian besar perekonomian negara-negara maju, khususnya Jepang dan Kawasan Eropa. Secara umum, pertumbuhan ekonomi negara maju mampu memberikan kontribusi sebesar 42,0 persen terhadap pertumbuhan ekonomi global. Lebih jauh lagi bila dilihat selama lima tahun terakhir dari tahun 2011-2015

Gambar 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara Maju, dan Negara Berkembang, serta ASEAN (persen), Tahun 2011–2015



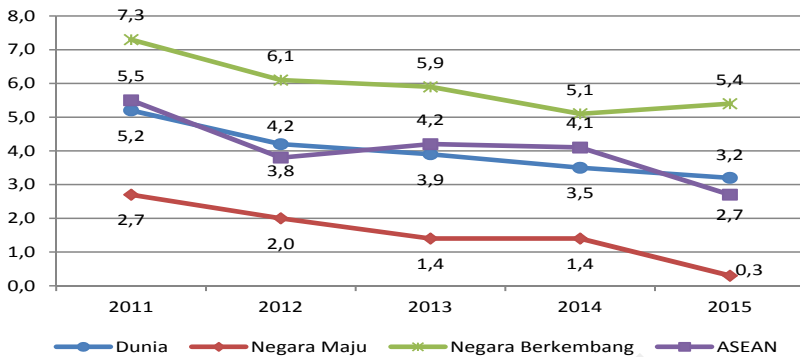
perekonomian dunia mengalami kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang meningkat walaupun tidak begitu tajam.

Berbeda dengan di negara maju, kondisi yang sebaliknya terjadi pada perekonomian di negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang justru mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang diproyeksi akan mengalami perlambatan atau tumbuh sebesar 4,3 persen justru kenyataannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonominya tercatat lebih rendah lagi yaitu hanya sebesar 4,0 persen. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi negara berkembang lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 (4,9 persen) dan pada tahun 2014 (4,6 persen). Perlambatan ekonomi negara berkembang disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi di hampir seluruh negara kawasan negara berkembang kecuali Kawasan Eropa.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya yaitu perlambatan ekonomi Tiongkok. Selama ini kita tahu bahwa kontribusi Tiongkok sangat besar dalam perekonomian negara berkembang terutama Asia. Faktor lainnya yaitu menurunnya aliran modal ke negara berkembang, melemahnya nilai tukar mata uang domestik di beberapa negara, serta berbagai permasalahan struktural dan kebijakan domestik di masing-masing negara.

Dari sisi harga komoditas dunia, selama kurun waktu empat tahun terakhir harga komoditas dunia terus mengalami penurunan. Penurunan harga komoditas ini ditengarai karena melambatnya pertumbuhan ekonomi global, khususnya dari Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi yang melambat berdampak pada penurunan permintaan barang-barang ekspor sehingga tentunya mengakibatkan penurunan kinerja ekspor dari negara-negara yang berbasis pada ekspor komoditas. Hingga tahun 2015, penurunan harga komoditas dunia semakin diperparah dengan menurunnya harga minyak dunia karena tingginya suplai produksi minyak dari negara anggota OPEC maupun non-OPEC

Gambar 2.2
Perkembangan Laju Inflasi Dunia, Negara Maju, dan Negara Berkembang, serta ASEAN (persen), Tahun 2011–2015



tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan minyak dunia, tetapi malah terjadi penurunan permintaan minyak dunia akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selain minyak, komoditas lain yang mengalami penurunan yaitu barang-barang hasil industri, makanan, metal, dan bahan baku pertanian. Lain halnya dengan harga komoditas minuman, komoditas ini masih menunjukkan adanya kenaikan harga walaupun melambat bila dibandingkan dengan tahun 2014.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan menurunnya harga komoditas berpengaruh pada menurunnya laju inflasi dunia. Pada tahun 2015 inflasi dunia tercatat sebesar 3,2 persen, turun dari tahun sebelumnya sebesar 3,5 persen. Inflasi dunia ini juga lebih rendah dari inflasi pada 2011 yang mencapai 5,2 persen, tahun 2012 sebesar 4,2 persen, tahun 2013 sebesar 3,9 persen. Laju inflasi dunia yang menurun didorong oleh laju inflasi di negara-negara maju yang menurun juga dari 1,4 persen pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,3 persen pada tahun 2015. Sebaliknya, kenaikan laju inflasi terjadi di negara-negara berkembang yaitu naik dari 5,1 persen pada tahun 2014 menjadi 5,4 persen pada tahun 2015. Peningkatan inflasi ini terutama disebabkan dari pelemahan nilai tukar mata uang negara-negara berkembang.

Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Maju

Seperti yang telah dibahas di atas, perekonomian negara-negara maju menunjukkan perekonomian yang membaik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan kondisi perekonomian yang tetap bisa tumbuh dan malahan meningkat laju pertumbuhan ekonominya. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di negara maju tidak terlepas dari masih tingginya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat yang masih tetap mempertahankan pertumbuhannya di atas dua persen yaitu sebesar 2,4 persen. Angka ini memang tidak berubah bila dibandingkan dengan tahun 2014 dan masih

dibawah proyeksi IMF (April 2015) sebesar 3,1 persen, namun dapat dikatakan masih bisa tetap tumbuh tinggi di tengah-tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang tetap berada di kisaran 2,0 persen ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi di sektor non-tradable, terutama sektor jasa profesional dan bisnis serta sektor perumahan. Sektor perumahan AS menunjukkan kondisi yang baik ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan penjualan rumah. Perbaikan ekonomi AS juga didorong oleh belanja masyarakat lebih besar dari yang diperkirakan dan membaiknya pasar tenaga kerja. Meningkatnya belanja oleh rumah tangga AS tidak terlepas dari harga minyak yang rendah. Dengan kata lain, penurunan harga BBM berpengaruh pada semakin meningkatnya daya beli masyarakat. Dari sisi tenaga kerja, kondisi tenaga kerja yang terus membaik juga turut mendukung peningkatan konsumsi masyarakat. Meningkatnya serapan tenaga kerja telah membantu perlahan meningkatkan besaran upah. Penurunan harga BBM ternyata juga memberikan pengaruh pada menurunnya laju inflasi di Amerika Serikat. Laju inflasi mengalami penurunan dari 1,6 persen pada tahun 2014 menjadi hanya sebesar 0,1 persen pada tahun 2015.

Sementara itu, pada tahun 2015 negara-negara maju di Eropa (*Euro Area*) mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 1,6 persen. Pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 yang sebesar 0,9 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi ini juga lebih tinggi dari proyeksi IMF (April 2015) yaitu sebesar 1,5 persen. Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju Eropa yang tertinggi (di atas empat persen) dicapai oleh Irlandia, Malta, dan Luxemburg. Sementara itu, negara dengan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Finlandia dan bahkan Yunani justru mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hampir semua negara-negara maju dalam Euro Area ini mengalami peningkatan laju pertumbuhan, kecuali Estonia dan Slovenia yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Membaiknya perekonomian negara maju di kawasan Eropa didukung oleh meningkatnya konsumsi (permintaan domestik) dan membaiknya kondisi tenaga kerja. Peningkatan konsumsi domestik ditunjukkan dengan adanya peningkatan penjualan ritel dan mobil-mobil baru. Konsumsi domestik yang meningkat ini juga berpengaruh pada meningkatnya output sektor industri manufaktur. Sementara itu, membaiknya kondisi tenaga kerja ditandai dengan tingkat pengangguran yang cenderung mengalami penurunan.

Salah satu kekuatan ekonomi negara maju di Eropa yaitu Jerman. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Jerman mengalami perlambatan dari 1,6 persen pada tahun 2014 menjadi 1,5 persen pada tahun 2015. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Jerman terlihat pada kuartal ketiga. Pada periode tersebut melambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh menurunnya investasi pada sektor industri manufaktur dan sektor konstruksi. Selain itu, ekspor yang menurun serta meningkatnya impor turut menjadi penyebabnya.

Namun, kondisi yang baik diperlihatkan dengan meningkatnya pengeluaran rumah tangga dan pemerintah. Dengan kata lain, konsumsi masyarakat dan swasta yang naik masih dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi walaupun tidak dapat mengimbangi penurunan investasi dan ekspor. Hal ini juga menunjukkan bahwa permintaan domestik memiliki peran yang semakin penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Jerman.

Meningkatnya konsumsi masyarakat Jerman dipengaruhi oleh rendahnya inflasi di negara tersebut. Pada tahun 2015 inflasi di Jerman sebesar 0,1 persen atau lebih rendah dari inflasi yang terjadi pada tahun 2014 sebesar 0,8 persen. Selain itu, inflasi yang terjadi pada tahun 2015 merupakan nilai

Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN (persen), Tahun 2011–2015

Kelompok Negara	2011	2012	2013	2014	2015
A. Dunia ¹⁾	4,2	3,5	3,5	3,4	3,1
B. Negara-negara maju¹⁾	1,7	1,2	1,2	1,8	1,9
Amerika Serikat	1,6	2,2	2,2	2,4	2,4
Jepang	-0,5	1,7	1,7	0,0	0,5
Inggris	2,0	1,2	1,2	2,9	2,2
Korea Selatan	3,7	2,3	2,3	3,3	2,6
Kanada	3,1	1,7	1,7	2,5	1,2
Australia	2,7	3,5	3,5	2,6	2,5
Kawasan Eropa	1,6	-0,9	-0,9	0,9	1,6
Jerman	3,7	0,6	0,6	1,6	1,5
Perancis	2,1	0,2	0,2	0,2	1,1
Italia	0,6	-2,8	-2,8	-0,3	0,8
Spanyol	-1,0	-2,6	-2,6	1,4	3,2
Belanda	1,7	-1,1	-1,1	1,0	1,9
C. Negara-negara berkembang¹⁾	6,3	5,3	5,3	4,6	4,0
Sub-Sahara Africa	5,0	4,3	4,3	5,1	3,4
Asia	7,8	6,9	6,9	6,8	6,6
Tiongkok	9,5	7,7	7,7	7,3	6,9
India	6,6	5,6	5,6	7,2	7,3
Amerika Latin dan Karibia	4,9	3,2	3,2	1,3	-0,1
Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan	4,5	5,0	5,0	2,8	2,5
Eropa	5,4	1,2	1,2	2,8	3,5
Negara-negara Persemakmuran	4,8	3,5	3,5	1,1	-2,8
D. Negara-negara ASEAN²⁾	4,8	5,9	5,9	4,5	4,4
Malaysia	5,3	5,5	5,5	6,0	5,0
Philipina	3,7	6,7	6,7	6,1	5,8
Singapura	6,2	3,7	3,7	3,3	2,0
Thailand	0,8	7,2	7,2	0,8	2,8
Indonesia ³⁾	6,5	6,3	6,3	5,1	4,8
Vietnam	6,2	5,2	5,2	6,0	6,7

Catatan : 1). *World Economic Outlook* (WEO) April 2016

2). *Asian Development Outlook* (ADO) 2016

3). Indikator Ekonomi

Sumber : IMF, ADB, dan BPS

inflasi terendah sepanjang lima tahun terakhir. Trend penurunan inflasi dimulai sejak tahun 2011 hingga tahun 2015. Nilai inflasi pada waktu itu mencapai 2,5 persen dan selalu mengalami penurunan setiap tahunnya hingga tahun 2015.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi juga terjadi di Inggris. Sepanjang tahun 2015 Inggris mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,2 persen atau melambat bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 2,9 persen. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi Inggris dipengaruhi oleh menurunnya permintaan produk-produk manufaktur oleh negara-negara lain khususnya Tiongkok dan negara berkembang lainnya. Penurunan permintaan produk manufaktur inilah yang menyebabkan menurunnya performa sektor industri manufaktur. Selain itu, sektor konstruksi yang menunjukkan kondisi yang melambat juga turut berpengaruh dalam menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Jepang sebagai salah satu negara maju di Asia menunjukkan ekonomi membaik dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5 persen pada tahun 2015 atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang tidak mengalami pertumbuhan. Namun, pertumbuhan pada tahun 2015 masih lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2012 yang mencapai 1,7 persen. Salah satu hal yang mendorong membaiknya ekonomi Jepang pada tahun 2015 yaitu adanya perbaikan di sektor industri manufaktur yang mengalami ekspansi sejak pertengahan tahun 2015. Sektor industri manufaktur Jepang yang membaik itu dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat dalam negeri yang meningkat pada akhir tahun serta permintaan dari luar negeri yang menunjukkan perbaikan pula. Permintaan produk-produk manufaktur Jepang diantaranya dari negara-negara maju.

Pertumbuhan ekonomi Jepang yang sebesar 0,5 persen pada tahun 2015 dapat dikatakan masih rendah akibat dari pemulihan ekonomi yang berjalan lambat dan relatif lemah. Salah satu hal yang mempengaruhinya yaitu terbatasnya konsumsi dalam negeri karena adanya kenaikan pajak penjualan yang dikeluarkan pemerintah Jepang. Selain itu, kinerja sektor tenaga kerja yang belum optimal yaitu perbaikan tingkat pengangguran belum stabil, terbatasnya pertumbuhan gaji, dan tidak diteruskannya keuntungan perusahaan yang meningkat kepada karyawan (Bank Indonesia, 2016). Sementara itu, dari sisi inflasi, pada tahun 2015 Jepang mengalami inflasi sebesar 0,8 persen lebih rendah dari inflasi tahun sebelumnya yang sebesar 2,7 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Berkembang

Selama tahun 2015, ekonomi negara-negara berkembang tumbuh melambat dari 4,6 persen pada tahun 2014 menjadi 4,0 persen pada 2015. Meski melambat, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang tersebut masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dunia. Peranan atau kontribusi perekonomian negara-negara berkembang terhadap perekonomian dunia mencapai 58 persen dan tingkat pertumbuhan ekonominya masih dapat dikatakan berada di level yang cukup tinggi. Nilai

pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang juga dapat dikatakan lebih tinggi (4,0 persen) dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara maju (1,9 persen).

Melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang terjadi di hampir seluruh kawasan. Beberapa kawasan tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia melambat dari 6,8 persen menjadi 6,6 persen, di kawasan Sub-Sahara Afrika melambat dari 5,1 persen menjadi 3,4 persen; serta di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan melambat dari 2,8 persen menjadi 2,5 persen. Bahkan di kawasan Amerika Latin dan Karibia serta kawasan Negara-negara Persemakmuran mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Kontraksi pertumbuhan ekonomi di kawasan Amerika Latin dan Karibia cukup rendah sebesar 0,1 persen, sedangkan di kawasan Negara-negara Persemakmuran mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yaitu sebesar 2,8 persen. Dari tabel 2.1 juga dapat dilihat juga bahwa hanya di kawasan Eropa yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 2,8 persen pada tahun 2014 menjadi 3,5 persen pada tahun 2015.

Salah satu negara utama penggerak perekonomian dunia (kekuatan ekonomi kedua terbesar), Tiongkok mencatatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2015 sebesar 6,9 persen. Angka pertumbuhan 2015 itu jauh di bawah pencapaian tahun 2014 dimana ekonomi Tiongkok saat itu tumbuh 7,3 persen. Pertumbuhan ekonomi ini pun sudah diproyeksi oleh IMF (April, 2015) yang memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi 6,3 persen.

Menurut Biro Statistik Nasional Tiongkok (NBS), capaian tersebut menjadi pencapaian terendah sejak krisis keuangan global. Bahkan ada yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut terlamban di Tiongkok dalam 25 tahun terakhir. Meski meleset, pertumbuhan ekonomi tersebut terbilang cukup mendekati target pemerintah sebesar 7 persen. Seperti telah diberitakan bahwa pemerintah Tiongkok sedang menjalankan program transformasi struktural yaitu mengubah model ekonomi negara menjauh dari ekonomi yang didorong oleh investasi dan ekspor di masa lalu menjadi lebih berorientasi pada sektor jasa dan permintaan belanja konsumen.

Program transformasi struktural Tiongkok tersebut selama tahun 2015 menyebabkan perlambatan investasi, sementara akselerasi peningkatan konsumsi belum cukup untuk menopang pertumbuhan secara keseluruhan. Hal tersebut yang mendorong melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Selain itu, pertumbuhan kredit yang berada dalam tren yang menurun dan penurunan kinerja sektor manufaktur (kontraksi) juga berdampak pada perlambatan ekonomi. Menurunnya kinerja sektor manufaktur tidak terlepas dari adanya penurunan permintaan ekspor akibat perlambatan ekonomi dunia di tengah permintaan domestik yang belum kuat. Dari sisi keuangan, ekonomi Tiongkok pun harus menghadapi tekanan eksternal terkait besarnya

arus modal asing keluar. Ketidakpastian kondisi ekonomi Tiongkok yang terjadi telah memengaruhi pasar internasional. Tiongkok mengurangi pembelian komoditas dari luar negeri sehingga permintaan dunia pun berkurang. Selain itu, gangguan nilai tukar mata uang yuan yang melemah terhadap dollar AS turut mengganggu kondisi pasar internasional.

Sementara itu capaian angka inflasi Tiongkok sepanjang 2015 sebesar 1,4 persen atau lebih rendah dari inflasi tahun sebelumnya sebesar 2,0 persen. Angka inflasi ini juga tidak sesuai dengan angka inflasi yang ditargetkan oleh pemerintah Tiongkok sebesar tiga persen. Kondisi ini dinilai sejumlah kalangan

Tabel 2.2. Laju Inflasi Dunia, Negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN (persen), Tahun 2011–2015

Kelompok Negara	2011	2012	2013	2014	2015
A. Dunia ¹⁾	5,2	4,2	3,9	3,5	3,2
B. Negara-negara maju¹⁾	2,7	2,0	1,4	1,4	0,3
Amerika Serikat	3,1	2,1	1,5	1,6	0,1
Jepang	-0,3	0,0	0,4	2,7	0,8
Inggris	4,5	2,8	2,6	1,5	0,1
Korea Selatan	4,0	2,2	1,3	1,3	0,7
Kanada	2,9	1,5	0,9	1,9	1,1
Australia	3,3	1,7	2,5	2,5	1,5
Kawasan Eropa	2,7	2,5	1,3	0,4	0,0
Jerman	2,5	2,1	1,6	0,8	0,1
Perancis	2,3	2,2	1,0	0,6	0,1
Italia	2,9	3,3	1,2	0,2	0,1
Spanyol	3,2	2,4	1,4	-0,1	-0,5
Belanda	2,5	2,8	2,6	0,3	0,2
C. Negara-negara berkembang¹⁾	7,3	6,1	5,9	5,1	5,4
Sub-Saharan Africa	9,5	9,3	6,6	6,4	7,0
Asia	6,5	4,6	4,7	3,5	2,7
Tiongkok	5,4	2,6	2,6	2,0	1,4
India	9,5	9,9	9,4	5,9	4,9
Amerika Latin dan Karibia	5,2	4,6	4,6	4,9	5,5
Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan	9,2	9,8	9,1	6,8	5,7
Eropa	5,4	5,9	4,3	3,8	2,9
Negara-negara Persemakmuran	9,7	6,2	6,4	8,1	15,5
D. Negara-negara ASEAN²⁾	5,5	3,8	4,2	4,1	2,7
Malaysia	3,2	1,7	2,1	3,1	2,1
Philipina	4,6	3,2	3,0	4,1	1,4
Singapura	5,2	4,6	2,4	1,0	-0,5
Thailand	3,8	3,0	2,2	1,9	-0,9
Indonesia ³⁾	3,8	4,3	8,4	8,4	3,3
Vietnam	18,7	9,1	6,6	4,1	0,6

Catatan : 1). *World Economic Outlook* (WEO) April 2016

2). *Asian Development Outlook* (ADO) 2016

3). Indikator Ekonomi

Sumber : IMF, ADB, dan BPS

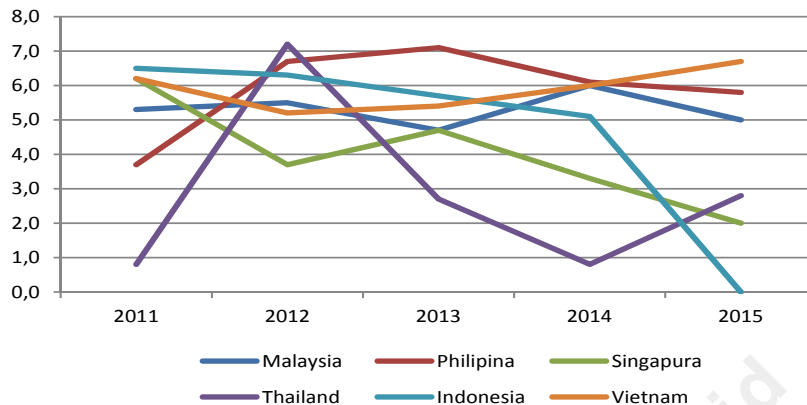
akan memberikan ruang bagi pemerintah Tiongkok untuk menambah stimulus guna memacu pertumbuhan ekonomi. Menurut Tom Orlik, Ekonom Bloomberg Intelijen di Beijing, inflasi tetap jauh di bawah target pemerintah memberikan motif dan kesempatan untuk pelonggaran lebih lanjut. Sementara itu, faktor yang mendorong masih terjadinya kenaikan harga di Tiongkok yaitu kenaikan harga makanan dan harga nonmakanan, baik harga barang-barang konsumsi dan harga jasa pelayanan.

Tidak seperti yang terjadi di Tiongkok, pertumbuhan ekonomi di India justru mengalami peningkatan. Perekonomian India pada tahun 2015 tetap tumbuh kuat. Pertumbuhan ekonomi India tahun 2015 tercatat sebesar 7,3 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2014 yang sebesar 7,2 persen. Angka tersebut juga sesuai dengan proyeksi dari IMF (April, 2015). Angka pertumbuhan ekonomi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dan Indonesia. Oleh karena itu, India pun membidik target pertumbuhan 9 persen ke depannya.

Tingginya angka pertumbuhan ekonomi India pada tahun 2015 disebabkan oleh kuatnya permintaan domestik yang didukung oleh berjalannya proyek infrastruktur pemerintah. Meningkatnya permintaan domestik ini juga berdampak pada meningkatnya permintaan barang-barang produk industri manufaktur sehingga kinerja sektor industri manufaktur pun menjadi meningkat. Beberapa kondisi yang dapat mencerminkan menguatnya permintaan domestik yaitu membaiknya sentimen ekonomi, penjualan mobil, output produksi, dan membaiknya indeks infrastruktur. Sementara itu, dari kenaikan harga-harga barang di dalam negeri, India membuat inflasi terjaga pada level 4,9 persen. Angka inflasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi tahun 2014 yang sebesar 5,9 persen. Inflasi yang dicapai berhasil dipertahankan oleh pemerintah India dengan cara pengendalian inflasi melalui suku bunga yang tetap.

Dari kawasan ASEAN, pertumbuhan ekonomi pada kawasan dengan sebutan Asia Tenggara ini pada tahun 2015 tercatat sebesar 4,4 persen. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dikatakan sedikit mengalami perlambatan bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,5 persen. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN disebabkan oleh melambatnya perekonomian dari sebagian besar negara anggota ASEAN. Hanya Thailand dan Vietnam yang mampu menunjukkan peningkatan laju pertumbuhan ekonominya. Sementara itu dari kenaikan harga, laju inflasi di kawasan ASEAN selama tahun 2015 mencapai 2,7 persen atau mengalami penurunan dari tahun 2014 yang tercatat sebesar 4,1 persen. Laju inflasi tertinggi terjadi di Myanmar dengan inflasi sebesar 11,0 persen, sedangkan laju inflasi terendah terjadi di Vietnam yaitu sebesar 0,6 persen. Sementara negara yang mengalami deflasi antara lain Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam.

Gambar 2.3
Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara ASEAN (persen),
Tahun 2011–2015

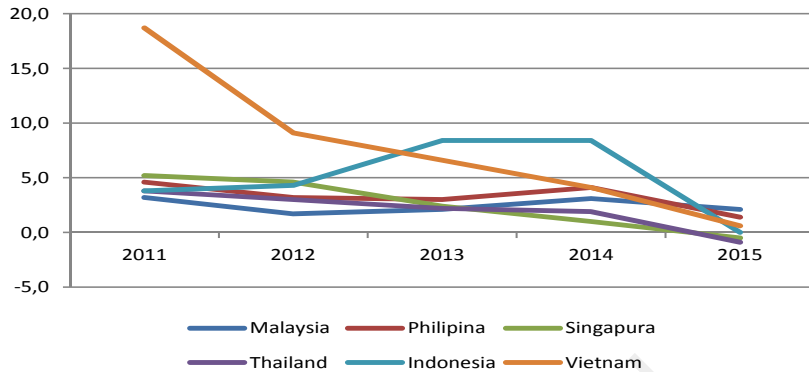


Satu-satunya negara maju di kawasan ASEAN, Singapura selama dua tahun terakhir belum mampu juga meningkatkan pertumbuhannya. Tercatat sejak tahun 2014 pertumbuhannya selalu melambat hingga berlanjut pada tahun 2015. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Singapura melambat dari 4,7 persen pada tahun 2013 menjadi 3,3 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi terus berlanjut hingga tahun 2015 hingga menjadi 2,0 persen. Tentunya ini merupakan akibat dari lesunya kondisi ekonomi global. Menurut Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada tahun 2015 masih di bawah dari proyeksinya sebesar 2,1 persen. Angka ini juga masih jauh lebih rendah dari proyeksi yang dikeluarkan ADB (April, 2015).

Selama ini dalam kegiatan perekonomiannya, Singapura mengutamakan sektor perdagangan dan sangat bergantung pada ekspor dan impor. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 didukung oleh sektor perdagangan grosir, eceran, sektor keuangan, dan asuransi. Harga minyak mentah dunia yang terus menurun memberikan dampak terhadap sektor perdagangan Singapura. Di sisi lain melambatnya sektor konstruksi dari tahun sebelumnya juga turut andil menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dari sisi kenaikan harga, terjadi deflasi atau penurunan harga di Singapura pada tahun 2015. Tercatat deflasi pada tahun ini sebesar 0,5 persen, sedangkan pada tahun sebelumnya tercatat mengalami inflasi sebesar satu persen. Deflasi yang terjadi sepanjang tahun 2015 ini terutama disebabkan adanya penurunan tajam biaya transportasi jalan pribadi seperti biaya bensin, dan juga biaya perumahan serta harga keseluruhan layanan.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Thailand mengalami akselerasi pada 2015. Tercatat pertumbuhan ekonomi di negara dengan sebutan Negeri Gajah Putih itu mencapai 2,8 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun lalu sebesar 0,8 persen. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Thailand tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Thailand yang

Gambar 2.4
Perkembangan Laju Inflasi di Beberapa Negara ASEAN (persen),
Tahun 2011–2015



meningkatkan belanja pemerintah. Peningkatan belanja ini bertujuan untuk mendongkrak perekonomian yang melambat di tengah kekacauan politik selama beberapa tahun. Utang rumah tangga yang tinggi, perlambatan ekspor, anjloknya investasi asing dan kepercayaan konsumen yang rendah telah menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, meningkatnya belanja juga untuk membantu semua lapisan masyarakat, mulai dari petani hingga pelaku usaha kecil agar dapat mendongkrak permintaan lokal. Selanjutnya dari sisi kenaikan harga, Thailand mencatatkan deflasi atau penurunan harga pada tahun 2015, namun nilainya lebih tinggi daripada deflasi di Singapura. Tercatat deflasi di Thailand pada tahun 2015 sebesar 0,9 persen, sedangkan pada tahun sebelumnya tercatat mengalami inflasi sebesar 1,9 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan ditunjukkan oleh Vietnam. Negara yang beribukota di Hanoi ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di ASEAN yaitu sebesar 6,7 persen dan menjadi salah satu negara yang mampu meningkatkan pertumbuhannya bila dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menjadi pertumbuhan ekonomi tercepat dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa resesi perdagangan global dan perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang terjadi sepanjang tahun 2015 yang menjadi momok menakutkan bagi sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara, tidak berlaku bagi Vietnam. Vietnam sukses melepaskan diri dari arus perlambatan ekonomi tersebut. Pencapaian pertumbuhan ekonomi Vietnam ini juga sudah diproyeksikan oleh ADB, dalam risetnya, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Vietnam akan menjadi yang tercepat di antara enam negara Asia Tenggara lainnya.

Menurut Ekonom IHS *Global Insight* Asia Pasifik Rajiv Biswa, pertumbuhan ekonomi Vietnam yang cepat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, melonjaknya ekspor Vietnam karena keberhasilan Vietnam dalam melakukan diversifikasi ekspor pada sisi barang produksi ke sektor manufaktur garmen dan elektronik dan diversifikasi negara tujuan ekspor. Kedua, maraknya

investasi langsung asing (*Foreign Direct Investments/FDI*) yang disebabkan Vietnam memiliki keuntungan dari sisi geografis, upah tenaga kerja dan biaya operasional yang rendah, serta partisipasi Vietnam dalam beberapa pakta perdagangan. Ketiga, mulai tumbuhnya penyaluran kredit karena pemerintah setempat berhasil mengatasi permasalahan kredit macet yang telah menjadi penghambat laju ekonomi selama ini. Keempat, depresiasi terukur mata uang dong juga menjadi langkah jitu otoritas moneter dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Vietnam.

Prospek dan Tantangan Perekonomian Dunia

Sepanjang tahun 2015 sudah dihadapi berbagai persoalan yang menghambat kinerja perekonomian dunia. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan ke depannya agar perekonomian dunia lebih baik. Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan bahwa perekonomian dunia ke depan akan dihadapkan pada tantangan-tantangan besar, khususnya risiko-risiko dari negara-negara besar di pasar berkembang. Namun demikian, pada WEO, April 2015 IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia masih akan bisa mengalami peningkatan. Ekonomi dunia yang pada tahun 2015 tumbuh sebesar 3,1 persen diperkirakan akan sedikit meningkat menjadi sebesar 3,2 persen pada tahun 2016 dan semakin meningkat menjadi sebesar 3,5 persen pada tahun 2017. Bila dilihat dari pertumbuhan ekonomi negara maju dan berkembang, IMF memproyeksikan bahwa pada tahun 2016 perekonomian negara maju dan berkembang tetap optimis akan meningkat di tengah berbagai tantangan yang akan dihadapi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi diproyeksikan juga diikuti dengan meningkatnya inflasi. Pada tahun 2016 inflasi dunia diproyeksikan naik menjadi sebesar 3,3 persen dan kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 3,5 persen.

Menurut IMF, perekonomian di negara-negara maju diproyeksikan akan masih mengalami pertumbuhan pada tahun 2016 meskipun relatif stabil sebesar 1,9 persen dan pada tahun 2017 diproyeksikan meningkat sebesar 2,0 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang membaik pada tahun 2016 menunjukkan bahwa ekonomi negara-negara maju mulai pulih. Hal ini didorong oleh proyeksi bahwa kondisi keuangan di Amerika Serikat (AS) lebih baik untuk memperkuat sektor perumahan dan pasar tenaga kerja. Selain itu, konsumsi swasta di kawasan Eropa menguat berkat rendahnya harga minyak. Hal serupa juga diharapkan terjadi di Jepang. Tren meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan proyeksi meningkatnya laju inflasi di negara-negara maju. Inflasi di negara-negara maju diproyeksikan sebesar 0,7 persen pada tahun 2016 dan meningkat kembali menjadi 1,5 persen pada tahun berikutnya.

Dilihat berdasarkan negara-negara anggota kelompok negara maju, relatif stabilnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 juga terjadi di sebagian besar negara. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak terlalu tinggi dan tidak merata. Terdapat beberapa negara maju yang pertumbuhan ekonominya

bisa di atas dua persen per tahun, yaitu Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, Australia, dan Spanyol. Pertumbuhan di Amerika Serikat diproyeksikan akan stabil pada besaran 2,4 persen pada 2016. IMF melihat ada hambatan dari ekspor AS karena dolar yang lebih kuat, sedangkan harga minyak tetap rendah. Kondisi ini yang menghambat peningkatan pertumbuhan ekonomi AS. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan sebesar 2,7 persen, Australia 2,5 persen, dan Spanyol 2,6 persen.

Tabel 2.3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Dunia, Negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN (persen), Tahun 2016–2017

Kelompok Negara	Pertumbuhan Ekonomi		Inflasi	
	2016	2017	2016	2017
A. Dunia ¹⁾	3,2	3,5	3,3	3,5
B. Negara-negara maju¹⁾	1,9	2,0	0,7	1,5
Amerika Serikat	2,4	2,5	0,8	1,5
Jepang	0,5	-0,1	-0,2	1,2
Inggris	1,9	2,2	0,8	1,9
Korea Selatan	2,7	2,9	1,3	2,2
Kanada	1,5	1,9	1,3	1,9
Australia	2,5	3,0	2,1	2,4
Kawasan Eropa	1,5	1,6	0,4	1,1
Jerman	1,5	1,6	0,5	1,4
Perancis	1,1	1,3	0,4	1,1
Italia	1,0	1,1	0,2	0,7
Spanyol	2,6	2,3	-0,4	1,0
Belanda	1,8	1,9	0,3	0,7
C. Negara-negara berkembang¹⁾	4,1	4,6	4,8	4,6
Sub-Sahara Africa	3,0	4,0	9,0	8,3
Asia	6,4	6,3	2,9	3,2
Tiongkok	6,5	6,2	1,8	2,0
India	7,5	7,5	5,3	5,3
Amerika Latin dan Karibia	-0,5	1,5	5,7	4,3
Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan	3,1	3,5	5,2	4,8
Eropa	3,5	3,3	4,1	4,8
Negara-negara Persemakmuran	-1,1	1,3	9,4	7,4
D. Negara-negara ASEAN²⁾	4,5	4,8	2,6	2,9
Malaysia	4,2	4,4	2,7	2,5
Philipina	6,0	6,1	2,3	2,7
Singapura	2,0	2,2	-0,6	0,4
Thailand	3,0	3,5	0,6	2,0
Indonesia ³⁾	5,2	5,5	4,5	4,2
Vietnam	6,7	6,5	3,0	4,0

Catatan: ¹⁾ *World Economic Outlook* (WEO) April 2016

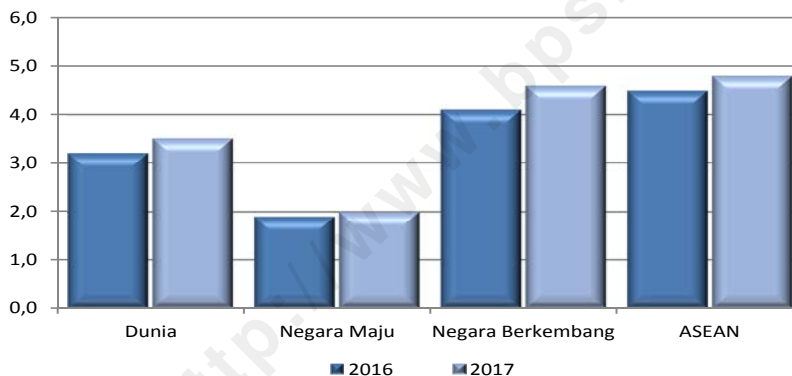
²⁾ *Asian Development Outlook* (ADO) 2016

Sumber: IMF dan ADB

Di kawasan Eropa, secara umum diproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 juga relatif stabil walaupun sedikit melambat menjadi 1,5 persen. Hal ini disebabkan sebagian besar anggota negara maju di kawasan Eropa juga relatif stabil pertumbuhan ekonominya, hanya beberapa negara anggota yang mencatatkan peningkatan pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi, namun ada juga beberapa negara yang mencatatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi inflasi, kenaikan harga terjadi di kawasan Eropa dan mengalami peningkatan di tahun 2016 menjadi 0,4 persen.

Untuk negara maju di kawasan Asia, Jepang optimis akan tetap mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5 persen pada 2016. Namun, pada tahun 2017 ekonomi Jepang diproyeksikan akan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1 persen. IMF memproyeksikan para eksportir akan terpuak dengan penguatan yen dan perlambatan perdagangan Tiongkok. Kondisi demikian juga disebabkan oleh perkiraan kenaikan pajak konsumsi, populasi penduduk yang menua, dan utang yang besar.

Gambar 2.5
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara Maju dan Negara Berkembang
serta ASEAN (persen), Tahun 2016 dan 2017



Beralih ke negara-negara berkembang, ekonomi negara-negara berkembang diperkirakan mengalami sedikit peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 4,1 persen pada tahun 2016 dan 4,6 persen pada tahun 2017. Relatif lambatnnya pertumbuhan ekonomi negara berkembang tidak terlepas dari perlambatan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia khususnya Tiongkok dan beberapa negara berkembang lainnya serta di kawasan Sub-Saharan Afrika. Bahkan pada tahun 2016 di beberapa kawasan masih mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi seperti di kawasan Amerika Latin dan Karibia (0,5 persen), serta Negara-negara Persemakmuran (1,1 persen).

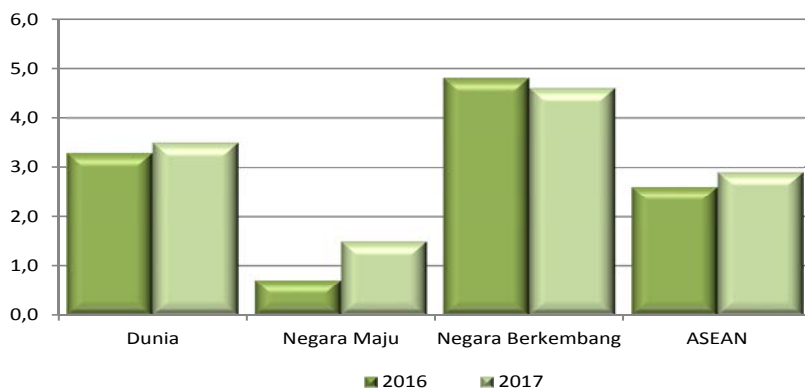
Kawasan Asia masih menjadi bagian yang paling dinamis dari ekonomi global tetapi menghadapi permasalahan parah dari pemulihan global yang masih lemah, perlambatan perdagangan global, dan dampak jangka pendek dari transisi pertumbuhan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi di kawasan

Asia diproyeksikan akan hanya mencapai 6,4 persen pada tahun 2016 dan kembali melambat menjadi 6,3 persen pada tahun 2017. Dari kawasan Asia ini, dua raksasa ekonomi Asia yaitu Tiongkok dan India mengalami perbedaan pertumbuhan ekonomi dimana Tiongkok mengalami perlambatan sedangkan India diproyeksikan akan meningkat. Ekonomi Tiongkok akan diproyeksikan tumbuh sebesar 6,5 persen (melambat dari tahun 2015 sebesar 6,9 persen), sedangkan India diproyeksikan akan tumbuh di atas Tiongkok yaitu dengan pertumbuhan sebesar 7,5 persen (meningkat dari tahun 2015 sebesar 7,3 persen).

Selanjutnya untuk di kawasan ASEAN, ADB memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan ini masih akan tumbuh sebesar 4,5 persen pada tahun 2016 dan kembali meningkat menjadi 4,8 persen pada tahun 2017. ADB juga memproyeksikan 6 negara ASEAN yang akan mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi di atas lima persen pada tahun 2015 yaitu Kamboja (7,0 persen), Indonesia (5,2 persen), Laos (6,8 persen), Myanmar (8,4 persen), Filipina (6,0 persen), dan Vietnam (6,7 persen). Dari keenam negara tersebut hanya empat negara yang diproyeksikan pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi bila dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu Indonesia, Laos, Myanmar dan Filipina. Tidak semua negara anggota ASEAN diproyeksikan akan mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Salah satunya yang mengalami penurunan atau mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yaitu Malaysia yang diproyeksikan akan mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,2 persen (dari 5,0 persen pada tahun 2015).

Terkait dengan harga komoditas dunia, seiring dengan menurunnya harga komoditas, inflasi dunia diperkirakan akan relatif stabil di kisaran 3,2 persen sampai 3,5 persen. Kondisi serupa terjadi pada inflasi di negara maju yang diprediksi mengalami inflasi yang relatif rendah di bawah satu persen yaitu sebesar 0,7 persen pada tahun 2016 (meningkat sedikit dari 0,3 persen pada tahun 2015) dan sedikit meningkat menjadi 1,5 persen pada tahun 2017.

Gambar 2.6
Proyeksi Inflasi Dunia, Negara Maju dan Negara Berkembang serta ASEAN (persen), Tahun 2016 dan 2017



Kondisi sebaliknya terjadi pada inflasi di negara-negara berkembang yang diperkirakan justru akan mengalami penurunan inflasi pada tahun 2016 yaitu menjadi sebesar 4,8 persen tetapi kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 4,6 persen.

Perekonomian dunia tahun 2016 tampaknya akan terus menghadapi tekanan dan gejolak. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde menyatakan seluruh negara tengah berjuang mencegah perlambatan ekonomi. Ekonomi dunia tahun 2016 akan menghadapi empat tantangan besar yang bisa menghambat kinerja perekonomian dunia sehingga sulit tumbuh pesat. Tantangan tersebut adalah:

1. Adanya rebalancing ekonomi Tiongkok, dimana Tiongkok akan menjadikan sektor jasa sebagai motor pertumbuhan ekonomi menggantikan industri, mengubah visi industri dari berorientasi ekspor menjadi pasar domestik, dan fokus menggenjot konsumsi ketimbang investasi. Namun demikian, diperkirakan fundamental ekonomi Tiongkok akan tetap bagus, hanya kurang baik dalam komunikasinya ke pasar finansial. Transisi di Tiongkok ini dapat memicu efek berantai ke negara-negara lain, karena Tiongkok merupakan konsumen produk-produk komoditas dan mitra dagang terbesar bagi sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia.
2. Harga komoditas yang anjlok dalam 18 bulan terakhir.
3. Kebijakan moneter yang tidak sinkron antar negara, yang memicu migrasi dana dari negara berkembang ke Amerika Serikat (AS). Hal ini memicu terjadinya depresiasi mata uang negara-negara berkembang.
4. Tidak semua pasar negara berkembang bisa menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi tahun ini. Diantaranya yaitu Brasil dan Rusia yang diperkirakan perekonomiannya tidak lebih baik dari ekonomi India dan Tiongkok.

Gambaran Umum Perekonomian Indonesia

Di tengah berbagai tantangan perekonomian global dan domestik, perekonomian Indonesia 2015 masih bisa mencatatkan kinerja yang cukup baik. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan terjaga sementara momentum pertumbuhan ekonomi mulai bergulir. Perekonomian Indonesia masih bisa tetap tumbuh sebesar 4,79 persen. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan berbagai permasalahan yang dihadapi ekonomi turut memberikan dampak bagi perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia dapat dikatakan melambat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 ini juga merupakan pertumbuhan ekonomi terendah selama 6 tahun terakhir dan merupakan kali pertama ekonomi Indonesia berada di bawah 5 persen sejak 2009 ketika terjadi krisis keuangan global.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai tahun ini juga dibawah target pemerintah antara 5,4-5,8 persen (Bank Indonesia, 2015). Selain itu juga masih jauh lebih rendah dari proyeksi IMF dan ADB (April, 2015) yang telah menetapkan bahwa ekonomi Indonesia akan bisa tumbuh masing-masing sebesar 5,2 persen dan 5,5 persen. Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang perekonomiannya tetap stabil dan relatif tumbuh tinggi dibandingkan negara lain, bahkan Brasil dan Rusia mengalami resesi.

Pencapaian ekonomi Indonesia pada tahun 2015 juga mendapat pujian dari Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*). IMF melalui Kepala Misi IMF untuk Indonesia Luis E. Breuer, memuji Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berkinerja ekonomi terbaik di sepanjang tahun 2015. Hal ini ditandai dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, inflasi tepat sasaran, dan defisit neraca transaksi berjalan yang menurun. IMF juga menyebutkan, pemerintah mampu mengelola ekonomi secara baik dan memutuskan reformasi birokrasi tepat waktu, terutama saat mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Dari sisi pendapatan perkapita tahun 2015 secara riil mengalami peningkatan. Berdasarkan harga berlaku PDB per kapita mencapai Rp 45,18 juta atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan PDB per kapita tahun 2014 yang sebesar Rp 41,90 juta. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan PDB per kapita sebesar Rp 3,28 juta. Meskipun pendapatan per kapita menunjukkan tren kenaikan, Direktur Eksekutif *Institute for Development of Economic and Finance (Indef)* Enny Sri Hartati menilai, kesejahteraan masih belum dirasakan oleh masyarakat miskin yang ditandai dengan indeks gini rasio yang tidak menunjukkan perbaikan sejak dari tahun 2011. Kenaikan PDB per kapita terjadi karena 20 persen masyarakat teratas tumbuhnya jauh lebih cepat sedangkan masyarakat terbawah tidak tumbuh, atau bahkan menurun. Dengan kata lain, pendapatan per kapita yang meningkat itu hanya dinikmati oleh 20 persen teratas masyarakat. Berdasarkan data BPS, indeks gini rasio sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 ada di level 0,41. Padahal tahun lalu, pemerintah berharap kesenjangan antara kaya-miskin makin sempit menjadi 0,40. Sementara itu, pemerintah dan wakil rakyat pun telah bersepakat untuk menurunkan indeks gini rasio di tahun 2016 ke level 0,39. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat untuk mendorong distribusi pendapatan. Pertama dengan memberlakukan pajak progresif. Kedua, peningkatan akses pembiayaan ke UMKM.

Dari sisi neraca perdagangan luar negeri, pada tahun 2015 Indonesia sudah terlihat keluar dari defisit neraca perdagangan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan adanya surplus sebesar US\$ 7,67 miliar, padahal sebelumnya neraca perdagangan selalu mengalami defisit. Pada tahun 2012 defisit neraca perdagangan mencapai US\$ 8,67 miliar, tahun 2013 defisit sebesar US\$ 4,08 miliar, dan tahun 2014 defisit sebesar US\$ 2,20 miliar. Secara kumulatif nilai

Tabel 2.4. Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Indonesia, Tahun 2011–2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,17	6,03	5,56	5,02	4,79
2. Inflasi (%)	3,79	4,30	8,38	8,36	3,35
3. PDB Harga Konstan 2000 (Triliun Rp)	7 287,64	7 727,08	8 156,50	8 566,27	8 976,93
4. PDB per Kapita Harga Berlaku (Ribu Rp)	32 363,74	35 105,21	38 365,92	41 900,45	45 176,21
5. Neraca Perdagangan Luar Negeri (Juta US \$):					
a. Ekspor (Juta US\$)	203 496,6	190 020,3	182 551,8	175 980,0	150 366,3
b. Impor (Juta US\$)	177 435,6	198 689,5	186 628,6	178 178,8	142 694,4
6. Investasi					
a. PMDN (Miliar Rp)	76 000,69	92 182,01	128 150,56	156 126,16	179 465,87
b. PMA (Juta US\$)	19 474,53	24 564,67	28 617,50	28 529,70	29 275,94
7. Suku Bunga Deposito Berjangka Bank Umum 1 Bulan (%) ¹⁾	6,35	5,58	7,92	8,58	7,60
8. Jumlah Wisatawan Asing (Ribu orang) ²⁾	7 649,73	8 044,46	8 802,13	9 435,41	9 729,35
9. Produksi Padi (GKG): ³⁾					
a. Sawah (Juta Ton)	65,76	69,06	71,28	70,85	74,99
b. Ladang (Juta Ton)	62,53	65,19	67,39	67,10	71,76
c. Ladang (Juta Ton)	3,23	3,87	3,89	3,74	3,63
10. Penduduk Miskin (Juta) ⁴⁾	30,02	29,13	28,07	28,28	28,59
11. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,48	6,13	6,17	5,94	6,18

Catatan: ¹⁾ Kondisi Desember

²⁾ Masuk melalui 19 pintu masuk utama

³⁾ Angka Ramalan II

⁴⁾ Hasil Susenas Triwulan I 2011-2015

Sumber: BPS, Bank Indonesia, BKPM

ekspor Indonesia pada tahun 2015 mencapai US\$ 150,37 miliar atau turun sebesar 14,55 persen dari ekspor tahun 2014 yang sebesar US\$ 175,98 miliar. Penurunan ekspor terjadi baik pada ekspor migas (38,12 persen) maupun non migas (9,71 persen). Sementara itu, nilai impor Indonesia pada tahun 2015 mencapai US\$ 142,69 miliar atau turun 19,92 persen dibanding pada tahun 2014. Penurunan impor disebabkan oleh menurunnya impor migas 46,45 persen dan nonmigas 10,69 persen. Seperti tahun-tahun sebelumnya nilai impor didominasi oleh golongan bahan baku/penolong diikuti oleh barang modal dan barang konsumsi.

Dari sisi kenaikan harga barang, inflasi IHK secara keseluruhan sepanjang tahun 2015 mencapai 3,35 persen dan berada dalam kisaran sasaran inflasi Bank Indonesia, yaitu sebesar 4±1 persen. Kepala BPS Suryamin menyatakan bahwa inflasi tahunan 2015 merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir sejak 2010. Pada 2010, inflasi tahun kalendernya tercatat sebesar 6,96 persen. Sedangkan pada tahun 2011 tercatat sebesar 3,79 persen. Pada tahun

2012, inflasi tahun kalender tercatat sebesar 4,30 persen, dan pada tahun 2013 inflasi tahun kalendernya sebesar 8,38 persen. Sementara itu, tahun lalu inflasi mencapai 8,36 persen.

Dilihat berdasarkan kelompok komponennya, inflasi komponen bergejolak menunjukkan nilai inflasi yang paling besar yaitu sebesar 4,84 persen, sedangkan inflasi komponen harga diatur pemerintah sebesar 0,39 persen. Sementara itu, inflasi inti relatif terjaga pada besaran 3,95 persen. Dari sumbangan/andil inflasi masing-masing komponen yaitu inflasi inti sebesar 0,13 persen, inflasi harga diatur pemerintah sebesar 0,18 persen, dan inflasi komponen bergejolak sebesar 0,65 persen.

Di sektor riil, berdasarkan Angka Sementara (ASEM) produksi padi pada tahun 2015 sebesar 75,36 juta ton atau naik sebesar 6,37 persen dari tahun 2014. Pada tahun 2015 produksi padi jenis padi sawah sebesar 71,76 juta ton dan padi ladang sebesar 3,63 juta ton. Sementara itu, berdasarkan angka tetap pada tahun 2014 produksi padi tercatat sebesar 70,85 juta ton yang terdiri dari produksi padi sawah sebesar 67,10 juta ton dan padi ladang sebesar 3,74 juta ton. Kenaikan produksi padi terjadi karena kenaikan luas panen seluas 0,32 juta hektar (2,31 persen) dan peningkatan produktivitas sebesar 2,04 kuintal/hektar (3,97 persen). Berdasarkan subround, kenaikan produksi padi tahun 2015 sebanyak 4,51 juta ton terjadi pada subround Januari–April sebanyak 1,49 juta ton (4,73 persen), subround Mei–Agustus sebanyak 3,02 juta ton (13,26 persen), dan subround September–Desember sebanyak 1.795 ton (0,01 persen) dibandingkan dengan produksi yang sama pada subround 2014.

Atas pencapaian produksi padi pada tahun 2015 ini, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa ini merupakan prestasi yang menggembirakan karena produksi padi merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Amran juga mengatakan bahwa prestasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah mampu mencapai swasembada pangan dan tak perlu lagi mendatangkan beras impor, mengingat produksi dalam negeri sudah melimpah. Dikatakan pula berbagai perubahan regulasi yang telah dilakukan oleh pemerintah menjadi pemicu naiknya produksi padi. Regulasi yang dilakukan pemerintah antara lain penunjukan langsung untuk pengadaan alat mesin pertanian (alsintan), memperbaiki saluran irigasi, pemberian dan perbaikan mutu benih padi, serta mengawasi penyaluran pupuk agar tepat sasaran.

Selain padi, kenaikan produksi juga terjadi pada kenaikan produksi jagung dan kedelai. Produksi jagung sebanyak 19,61 juta ton pipilan kering pada tahun 2015 atau mengalami kenaikan sebanyak 0,60 juta ton (3,17 persen) dibandingkan tahun 2014. Kenaikan produksi tersebut terjadi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa masing-masing sebanyak 0,46 juta ton dan 0,15 juta ton. Kenaikan produksi jagung terjadi karena kenaikan produktivitas sebesar 2,25 kuintal/hektar (4,54 persen), meskipun luas panen mengalami penurunan sebesar 50.200 hektar (1,31 persen). Selanjutnya, produksi kedelai pada tahun 2015 sebanyak 963.099 ton biji kering. Angka tersebut meningkat sebanyak 8.100 ton (0,85 persen) bila dibandingkan tahun 2014. Meskipun Pulau Jawa

mencatatkan terjadinya penurunan produksi kedelai sebanyak 22.310 ton, peningkatan produksi kedelai masih bisa terjadi karena diimbangi dengan meningkatnya produksi di luar Pulau Jawa sebanyak 30.410 ton. Seperti halnya dengan produksi jagung, peningkatan produksi kedelai juga disebabkan oleh kenaikan produktivitas sebesar 0,18 kuintal/hektar (1,16 persen) meskipun luas panen mengalami penurunan seluas 1.800 hektar (0,29 persen).

Di sektor pariwisata, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kedatangan penduduk mancanegara yang berkunjung ke Indonesia selama tahun 2015 mencapai 10,41 juta kunjungan. Angka ini melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 10 juta orang serta angka proyeksi sebesar 10,017 juta orang. Penduduk mancanegara yang berkunjung ke Indonesia terdiri dari 9,73 juta orang (93,49 persen) merupakan kunjungan wisman yang melalui 19 pintu masuk (19 point of entry), dan 370,9 ribu orang (3,56 persen) kunjungan WNA yang memasuki wilayah Indonesia melalui Pos Lintas Batas (PLB), serta sisanya sebanyak 306,5 ribu orang (2,95 persen) merupakan kunjungan singkat WNA lainnya. Dari total kunjungan wisman tersebut, diperkirakan perolehan devisa pariwisata mencapai US\$ 11,9 miliar atau setara Rp 163 triliun dengan perhitungan bahwa rata-rata lama tinggal wisman selama berlibur di Indonesia adalah 8,50 hari dengan pengeluaran sebanyak US\$ 1.190/wisman per kunjungan.

Pertumbuhan pariwisata Indonesia tahun 2015 sebesar 7,20 persen ini di atas pertumbuhan pariwisata dunia sebesar 4,40 persen dan pertumbuhan pariwisata kawasan ASEAN sebesar enam persen. Pertumbuhan pariwisata Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Singapura yang tumbuh nol persen, namun masih berada di bawah Thailand yang pariwisatanya tumbuh sebesar 23 persen. Pertumbuhan pariwisata 2015 akan menjadi pemicu dalam upaya meraih target kunjungan wisman 2016 sebesar 12 juta wisman. Target pertumbuhan pariwisata tahun 2016 sebesar 20 persen berarti empat kali lipat dari pertumbuhan perekonomian nasional sehingga langkah percepatan harus dilakukan. Langkah percepatan pariwisata yang dilakukan antara lain dengan mengembangkan 10 daerah tujuan wisata prioritas (Borobudur, Mandalika, Labuhan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang). Untuk itu, pemerintah akan membentuk badan otoritas nasional dalam mengelola destinasi prioritas tersebut. Struktur badan otoritas tersebut akan terdiri dari Dewan Pengarah Menko Maritim, Ketua Harian Menpar dengan anggota menteri-menteri terkait termasuk Menpan.

Di bidang ketenagakerjaan, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan adanya penurunan kinerja bila dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran di Indonesia pada Agustus 2015 sebesar 6,18 persen atau mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2014 dengan tingkat pengangguran sebesar 5,94 persen. Dengan kata lain, jumlah penduduk yang menganggur bertambah sebanyak 320 ribu orang dari 7,24 juta orang pada tahun 2014 menjadi sebanyak 7,56 juta orang pada tahun 2015. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS Razali Ritonga menjelaskan,

pertambahan pengangguran tersebut akibat meningkatnya jumlah angkatan tenaga kerja seiring dengan melemahnya daya serap tenaga kerja dari beberapa industri. Pada tahun 2015 sebagian industri melakukan PHK, terutama adalah industri yang memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor. Oleh karena itu, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut menambah beban biaya produksi sektor industri tersebut sehingga dilakukan penghematan ongkos produksi, salah satunya mengurangi tenaga kerja. Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Kecuk Suhariyanto mengatakan bahwa ada pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Lemahnya daya serap tenaga kerja di sektor industri dan perpindahan profesi massal tersebut diduga menjadi penyebab tingginya pengangguran hingga Agustus 2015.

Penduduk bekerja pada Agustus 2015 sebanyak 114,8 juta orang atau bertambah 190 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2014. Penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah, yaitu SD ke bawah 50,8 juta orang (44,27 persen) dan SMP 20,7 juta (18,03 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 12,6 juta orang, mencakup 3,1 juta diploma dan 9,5 juta sarjana. Dilihat dari lapangan kerja, kenaikan penyerapan tenaga kerja terjadi terutama di Sektor Konstruksi sebanyak 930 ribu orang (12,77 persen), Sektor Perdagangan sebanyak 850 ribu orang (3,42 persen), dan Sektor Keuangan sebanyak 240 ribu orang (7,92 persen).

Mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia, tercatat hingga Maret 2015 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 28,59 juta jiwa atau 11,22 persen dari total populasi. Jumlah penduduk miskin bertambah 310 ribu orang dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Maret 2014 yang tercatat 28,28 juta jiwa atau 11,25 persen dari populasi. Meningkatnya jumlah penduduk miskin salah satunya disebabkan karena faktor meningkatnya jumlah penduduk secara nasional yang cepat. Jumlah penduduk Indonesia bertambah 3 juta sampai 4 juta jiwa per tahun. Jika dilihat tren dari tahun 2009 perkembangan angka kemiskinan cenderung stagnan dan selalu berada di atas level 10 persen. Namun, tingkat kemiskinan sebesar 11,22 persen ini dapat dikatakan tinggi sehingga untuk menurunkannya memang tidak mudah dan memerlukan bantuan khusus. Faktor-faktor lain yang turut mendorong angka kemiskinan antara lain pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium pada akhir tahun 2014 yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat di awal tahun 2015 seperti, beras, cabe rawit dan gula pasir. Selain itu, rata-rata upah buru tani per hari yang mengalami penurunan turut menyebabkan kenaikan jumlah penduduk miskin.

Dilihat dari Garis Kemiskinan, pada periode Maret 2014-Maret 2015, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,26 persen yaitu Rp 302.735,- per kapita per bulan pada Maret 2014 menjadi Rp 330.776,- per kapita per bulan pada Maret 2015. Sementara itu bila dilihat dari tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan, pada periode yang sama Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) cenderung mengalami kenaikan. Pada

tahun 2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 1,97 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,54.

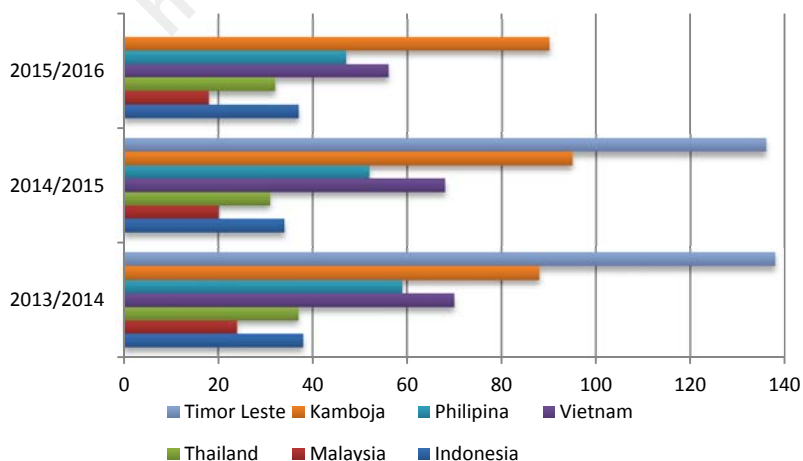
Indeks Daya Saing Indonesia

World Economic Forum telah merilis *Global Competitiveness Report* 2015-2016 pada bulan September 2015. Dalam laporan tersebut, indeks daya saing Indonesia tercatat berada di peringkat ke-37 dari 140 negara yang dinilai. 10 besar negara paling kompetitif di dunia yaitu Swiss, Singapura, AS, Hongkong, Finlandia, Swedia, Inggris, Jerman, Belanda, dan Jepang. Sementara itu, 10 negara Asia Pasifik kompetitif di dunia adalah Taiwan, China, Thailand, Malaysia, Singapura, Selandia Baru, Australia, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang.

Peringkat Indonesia ini berada di atas negara-negara seperti Portugal yang berada di peringkat 38, Italia di peringkat 43, Rusia di peringkat 45, Afrika Selatan di peringkat 49, India di peringkat 55, dan Brazil yang berada di peringkat 75. Sedangkan di level ASEAN sendiri, peringkat Indonesia ini masih berada di bawah tiga negara tetangga, yaitu Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 18 dan Thailand yang berada di peringkat 32. Namun demikian, Indonesia masih mengungguli Filipina yang berada di peringkat 47, Vietnam di peringkat 56, Laos di peringkat 83, Kamboja di peringkat 90, dan Myanmar di peringkat 131.

Dari laporan-laporan *World Economic Forum* terdahulu tercatat, indeks daya saing global Indonesia sempat berada di peringkat 50 pada 2012-2013, lalu naik ke peringkat 38 pada tahun 2013-2014. Peringkat Indonesia naik ke peringkat 34 pada tahun 2014-2015 dan kembali turun ke peringkat 37 pada 2015-2016.

Gambar 2.7
Perbandingan Peringkat Indeks Daya Saing Indonesia Dengan Beberapa Negara Berkembang di Kawasan ASEAN, 2013/2014 - 2015/2016



Tabel 2.5. Perbandingan Peringkat Indeks Daya Saing Indonesia Dengan Beberapa Negara Lainnya ¹, Tahun 2012/2013–2015/2016

Negara	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Swiss	1	1	1	1
Swedia	4	6	10	9
Singapura	2	2	2	2
Amerika Serikat	7	5	3	3
Jerman	6	4	5	4
Jepang	10	9	6	6
Finlandia	3	3	4	8
Belanda	5	8	8	5
Norwegia	15	11	11	11
Denmark	12	15	13	12
Kanada	14	14	15	13
Hongkong SAR	9	7	7	7
Inggris Raya	8	10	9	10
Tiongkok	29	29	28	28
India	59	60	71	55
Afrika Selatan	52	53	56	49
Brazil	48	56	57	75
Turki	43	44	45	51
Meksiko	53	55	61	57
Rusia	67	64	53	45
Indonesia	50	38	34	37
Malaysia	25	24	20	18
Thailand	38	37	31	32
Vietnam	75	70	68	56
Filipina	65	59	52	47
Brunei Darussalam	28	26	-	-
Kamboja	85	88	95	90
Timor-Leste	136	138	136	-

Catatan : ¹ 2012/2013 (144), 2013/2014 (148) dan 2014/2015 (144), 2015/2016 (140).

Sumber : *The Global Competitiveness Report 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 and 2015/2016 (140)*

Dalam aspek persyaratan dasar (*Basic Requirements*) Indonesia berada di ranking 49 dengan skor 4,8. Peringkat tersebut diperoleh melalui skor pilar institusi dengan ranking 55 skor 4,1; pilar infrastruktur ranking 62 skor 4,2; pilar ekonomi makro ranking 33 skor 5,5; pilar kesehatan dan pendidikan dasar dengan ranking 80 skor 5,6. Untuk aspek efisiensi Indonesia berada di ranking 46 dengan skor 4,3. Meliputi efisiensi pendidikan tinggi ranking 65 skor 4,5; efisiensi pasar barang ranking 55 skor 4,4; efisiensi pasar tenaga kerja ranking 115 skor 3,7; pengembangan pasar keuangan ranking 49 skor 4,2; kesiapan teknologi ranking 85 skor 3,5, dan pilar (*Market Size*) ranking 10 skor 5,7. Selanjutnya pada index inovasi dan kecanggihan bisnis Indonesia berada di ranking 33 skor 4,1. Meliputi pilar kecanggihan bisnis ranking 36 skor 4,4; dan pilar inovasi ranking 30 skor 3,9.

Tabel 2.6. Nilai dan Peringkat Indeks Daya Saing Indonesia Menurut Pilar Daya Saing, Tahun 2013/2014–2015/2016

Pilar Daya Saing	2013/2014		2014/2015		2015/2016	
	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat
Persyaratan Dasar	4,9	45	4,9	46	4,8	49
Institusi	4,0	67	4,1	53	4,1	55
Infrastruktur	4,2	61	4,4	56	4,2	62
Makroekonomi	5,8	26	5,5	34	5,5	33
Kesehatan dan Pendidikan Dasar	5,7	72	5,7	74	5,6	80
Penopang Efisiensi	4,3	52	4,4	46	4,3	46
Pendidikan Tinggi	4,3	64	4,5	61	4,5	65
Efisiensi Pasar Barang	4,4	50	4,5	48	4,4	55
Efisiensi Pasar Tenaga Kerja	4,0	103	3,8	110	3,7	115
Pasar Keuangan	4,2	60	4,4	42	4,2	49
Kesiapan Teknologi	3,7	75	3,6	77	3,5	85
Besaran Pasar	5,3	15	5,3	15	5,7	10
Inovasi dan Kecanggihan Bisnis	4,1	33	4,2	30	4,1	33
Kecanggihan Bisnis	4,4	37	4,5	34	4,4	36
Inovasi	3,8	33	3,9	31	3,9	30
Indeks Daya Saing	4,5	38	4,6	34	4,5	37

Sumber: *The Global Competitiveness Report* 2013/2014, 2014/2015, dan 2015/2016

Menanggapi posisi Indeks daya saing Indonesia di peringkat ke-4 dengan rasio indeks 4,5 dan kalah dengan Malaysia, Thailand, apalagi dengan Singapura, Presiden Joko Widodo meminta daerah berperan meningkatkan posisi daya saing Indonesia yang masih jauh di bawah negara-negara lain. Presiden juga menyebutkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia masih di bawah negara lain yaitu 109 pada tahun 2016, dari sebelumnya 120. Tahun depan Indonesia ditargetkan di peringkat 40. Salah satu cara peran daerah untuk meningkatkan daya saing dengan mempercepat dan mempermudah orang untuk melakukan kegiatan usaha terutama UMKM. Peraturan Daerah seyogyanya harus mempermudah investasi dan kegiatan berusaha bukan untuk menghambat.

Sementara itu, menurut WEF untuk meningkatkan daya saing, Indonesia perlu meningkatkan dalam pemberantasan tindak korupsi dalam praktek-praktek penyuaipan dan etika berinstitusi agar mampu memperbaiki tingkat daya saingnya. *World Economic Forum* (WEF) pun memberikan tujuh cara meningkatkan daya saing ekonomi berdasarkan contoh sukses dari tujuh negara di dunia, yakni:

1. Amerika Serikat, membuat program *Automotive Manufacturing Technical Education Collaborative* (AMTEC), dimana mahasiswa diberikan pelatihan tentang kemampuan teknis dalam industri otomotif oleh sejumlah produsen mobil ternama.

2. Negara Uni Eropa, membuat program *European Innovation Partnerships* (EIPs) untuk mendukung riset-riset pendidikan yang mendukung kepada inovasi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
3. India, membuat *Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd* (IL&FS) di tahun 2007 oleh sejumlah perusahaan infrastruktur ternama untuk mengembangkan kemampuan anak muda dari daerah pedesaan terpencil di 16 sektor usaha.
4. Chili, membentuk *Start-Up Chile* di tahun 2010 untuk mendorong pengusaha muda mengembangkan usaha baru di luar industri pertambangan dan perikanan (khususnya ikan salmon).
5. Maroko, membentuk organisasi nirlaba bernama *Education for Employment* (EFE) yang membantu menciptakan kesempatan berbisnis untuk kalangan muda dengan menyediakan pelatihan profesional kelas dunia.
6. Finlandia, membuat program akselerasi bernama *Vigo* di tahun 2009 untuk melatih para pebisnis pemula memasuki pasar global dengan bantuan beberapa pengusaha sukses. Sejak program ini diluncurkan, tim akselerasi berhasil mengumpulkan sumbangan sebesar 200 juta Euro dari 60 perusahaan yang ditargetkan.
7. Korea Selatan, membentuk *Meister Schools* yang didesain khusus untuk menyiapkan anak muda untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan dengan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan.

Prospek dan Tantangan Perekonomian Indonesia di Tahun 2016

Mengawali tahun 2016, Indonesia harus mampu membangun optimisme untuk menghadapi setiap situasi ekonomi, baik global maupun domestik. Namun, kondisi ini harus tetap diwaspadai karena mengingat kondisi ekonomi global yang lebih rentan dengan krisis karena mudah berubah-ubah. Menurut proyeksi Bank Indonesia, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada pada kisaran 5,0-5,4 persen (revisi dari sebelumnya sebesar 5,2-5,6 persen) dengan laju inflasi pada kisaran 4 ± 1 persen. Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi domestik selama tahun 2016 yang lebih rendah dari prediksi sebelumnya karena kondisi ekonomi global yang kembali mengalami pelemahan, sehingga turut berdampak pada Indonesia.

Sementara itu, menurut IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terakselerasi pada tahun 2016 setelah mengalami perlambatan selama beberapa tahun. IMF memproyeksikan bahwa pada tahun 2016 perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 4,9 persen dan meningkat menjadi 5,3 persen pada tahun 2017. Belanja investasi pemerintah yang lebih tinggi dan membaiknya sentimen terhadap Indonesia dalam hal reformasi juga membantu menggenjot pertumbuhan ekonomi. Adapun risiko yang

Tabel 2.7. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Indonesia (persen), Tahun 2016 dan 2017

Indikator	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi ¹⁾	5,0-5,4	5,0-5,4
Pertumbuhan Ekonomi ²⁾	4,9	5,3
Pertumbuhan Ekonomi ³⁾	5,2	5,5
Inflasi ¹⁾	4,0±1,0	4,0±1,0
Inflasi ²⁾	4,3	4,5
Inflasi ³⁾	4,5	4,2

Catatan: ¹⁾ Bank Indonesia (BI) : "Laporan Perekonomian Indonesia 2015"

²⁾ International Monetary Fund (IMF): "World Economic Outlook Database, April 2016"

³⁾ Asian Development Bank (ADB): "Asian Development Outlook (ADO) 2016"

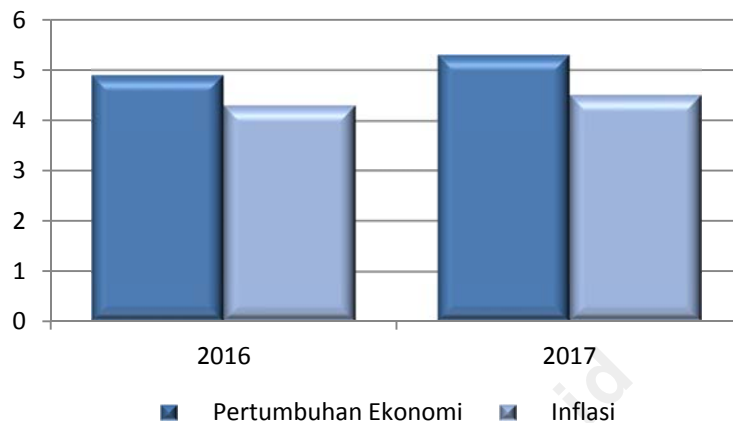
masih membayangi outlook ekonomi Indonesia pada tahun ini lebih banyak disebabkan faktor eksternal seperti kondisi finansial global yang semakin bergejolak, perlambatan yang lebih dalam dialami mitra-mitra dagang sesama negara berkembang, dan pelemahan lebih lanjut dalam harga komoditas.

Sedangkan *Asian Development Bank* (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi daripada IMF. ADB memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan membaik sejalan dengan respons positif konsumen dan investor terhadap upaya pemerintah dalam memperbaiki investasi publik dan melakukan reformasi struktural. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hasil proyeksi ADB pada tahun 2016 akan mencapai 5,2 persen dan meningkat menjadi 5,5 persen pada tahun 2017.

Kepala Perwakilan ADB di Indonesia Steven Tabor mengatakan, di tengah gejolak pasar keuangan global, berbagai reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintah mampu memperkuat kepercayaan pasar dan membawa hasil positif. Untuk mempertahankan momentum reformasi tersebut, Indonesia harus dapat merealisasikan program investasi publik untuk mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan yang baru. Dalam jangka panjang, tantangan bagi Indonesia antara lain adalah untuk mendiversifikasi kegiatan ekonomi guna mengurangi ketergantungan pada sejumlah kecil komoditas. Oleh karena itu, perluasan sektor manufaktur menjadi salah satu hal yang dapat membantu Indonesia meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta juga fokus pada berbagai sektor yang dapat mendorong pertumbuhan tinggi, seperti pariwisata, pertanian bernilai tambah tinggi, perikanan laut, budidaya perairan, dan *e-commerce*.

Di sisi harga, IMF dan ADB juga memproyeksikan laju inflasi Indonesia, namun nilai proyeksinya lebih tinggi dari hasil proyeksi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. IMF memproyeksikan laju inflasi Indonesia sebesar 4,3 persen pada tahun 2016 dan akan naik pada tahun 2017 menjadi 4,5 persen. Sementara itu ADB memperkirakan inflasi Indonesia akan berada pada nilai 4,5 persen pada tahun 2016 dan menurun menjadi 4,3 persen pada tahun 2017.

Gambar 2.8
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Indonesia menurut IMF (persen),
Tahun 2016 dan 2017



Kondisi ekonomi global yang tidak stabil tentunya turut memengaruhi Indonesia. Selain itu, tantangan dari dalam negeri pun tidak lepas turut mempengaruhi perekonomian nasional. Berikut beberapa tantangan yang diproyeksikan akan mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia ke depan menurut beberapa sumber:

1. Presiden Joko Widodo mencatat ada dua tantangan yang dihadapi ekonomi Indonesia saat ini yaitu keterbukaan dan kompetisi. Keterbukaan itu tidak bisa ditolak lagi oleh Indonesia. Dengan keterbukaan maka semua orang akan dapat mengetahui kondisi APBN, kondisi penerimaan negara dan sebagainya. Era keterbukaan akan lebih drastis lagi terjadi pada tahun 2018, saat itu semua bank internasional akan lebih terbuka sehingga data nasabah bank bisa diakses. Hal lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah efek dari era digital yang serba cepat. Perkembangan sosial media dan digital ekonomi juga tidak bisa dihambat lagi. Selain itu, kompetisi global juga tidak bisa dihindarkan dan harus dihadapi dengan penuh kehati-hatian.
2. Bank Indonesia (BI) menyebutkan beberapa faktor global yang dapat menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia, yaitu rencana kenaikan suku bunga acuan *The Federal Reserves*, pelemahan ekonomi Tiongkok, penurunan harga komoditas dan potensi keluarnya aliran modal dari Indonesia ke negara lain. Selain itu, pengumuman Renminbi China sebagai mata uang internasional juga patut diwaspadai. Pasalnya langkah Renminbi menjadi salah satu mata uang dunia, artinya pengelolaan *capital account* China terbuka dan pengelolaan moneter independen. Oleh karena itu, jika Renminbi bisa dilemahkan lagi akan memberikan dampaknya cukup besar.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan ada tiga tantangan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia pada 2016. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliawan D Hadad menyampaikan tantangan pertama, yaitu pemulihan

ekonomi di negara maju dan Tiongkok yang masih melambat, akan membayangi ketidakpastian bagi negara berkembang. Kedua, adanya pelemahan kinerja keuangan korporasi nasional pada semester II tahun ini akibat dampak dari perekonomian global dan domestik. Ketiga, perkembangan tingkat suku bunga acuan beberapa negara di dunia, terutama Amerika Serikat (AS).

4. Indef memberikan 10 persoalan yang perlu perhatian pemerintah guna memperbaiki ekonomi 2016 mendatang. Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengemukakan bahwa persoalan pertama yaitu risiko ketidakpastian ekonomi global. Dengan indikasi perlambatan ekonomi Tiongkok yang akan terus berlanjut, perlu adanya reorientasi pasar ekspor khususnya pada sektor yang berbasis komoditas. Selain itu, spekulasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat yang dapat mengguncang nilai tukar. Begitu pula penurunan harga komoditas sehingga perlu dilakukan hilirisasi industri dan pengembangan pasar nontradisional negara tujuan ekspor. Kedua, stabilitas perekonomian yang semu dan lonjakan harga saham. Ketiga, rendahnya daya beli masyarakat. Keempat, menurunnya produktivitas nasional. Kelima, shortfall pajak dan mandulnya stimulus fiskal. Keenam, meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Ketujuh, ketergantungan pada ekspor komoditas. Kedelapan, efektivitas paket kebijakan fiskal dan moneter. Enny menuturkan, progress, laporan, dan follow up paket tersebut tidak jelas. Kesembilan, tantangan masyarakat ekonomi ASEAN. Kesepuluh, tantangan liberalisasi ekonomi.



3

Pertumbuhan Ekonomi Nasional & Regional

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan di dalamnya terdapat kemungkinan terjadi penurunan atau kenaikan ekonomi. Perekonomian Indonesia diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB), dan pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 2011-2015 cenderung melambat. Perlambatan ini juga merupakan dampak dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang diikuti dengan penurunan harga komoditas.

Pada tahun 2015, Perekonomian nasional secara umum kembali mengalami perlambatan dan hanya mampu tumbuh sebesar 4,79 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar 5,7 persen. Bank Indonesia mematok kisaran antara 5,4-5,8 persen sementara Bappenas mengajukan rentang pertumbuhan 5,3-5,5 persen. Perlambatan ekonomi dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Perlambatan ekonomi tahun 2015 yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu karena pengaruh melambatnya ekonomi Tiongkok dan Jepang, yang tercermin dalam perlambatan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama. Tiongkok merupakan salah satu tujuan utama negara ekspor Indonesia. Melambatnya pertumbuhan ekonomi di dalam negara Tiongkok mempengaruhi perekonomian di dalam negerinya yang berakibat pada penghematan impor. Kondisi tersebut berdampak pada ekspor Indonesia ke Tiongkok yang mengalami penurunan. Indonesia juga terkena imbas kondisi likuiditas global yang mulai ketat menyusul dihentikannya kebijakan pelonggaran kuantitatif (*quantitative easing*) oleh pemerintah Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari melemahnya nilai tukar mata uang negara-negara di dunia, tak terkecuali rupiah, terhadap dolar AS beberapa bulan terakhir di tahun 2015. Sementara itu, dari faktor internal perlambatan ekonomi di dalam negeri disebabkan rendahnya eksekusi belanja infrastruktur pemerintah yaitu di bidang infrastruktur yang belum banyak terealisasi pada kuartal pertama. (Bank Indonesia, 2015).

Nilai PDB Indonesia jika dihitung atas dasar harga berlaku, hanya bertambah sekitar 9-11 persen selama tahun 2012-2015. Peningkatan nilai tambah dari beberapa kategori yang cukup menggembirakan seperti kategori Informasi dan Komunikasi serta Jasa berhasil menopang ekonomi Indonesia hingga 5 persen. Sementara dari sisi penggunaan, konsumsi rumah tangga yang masih solid dan mencapai lebih dari 55 persen dari total PDB ikut berkontribusi terhadap capaian pertumbuhan ini.

Berdasarkan APBN tahun 2016, Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mencapai 5,3 persen, sementara Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen. Dari sisi pemerintah, ada lima langkah yang disiapkan untuk memperbaiki

perekonomian tahun 2016 terutama memastikan penyerapan anggaran lebih cepat, sehingga pembangunan infrastruktur berdampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Lima langkah tersebut antara lain meningkatkan anggaran transfer ke daerah secara signifikan, yang diyakini kebijakan ini bisa mempercepat pemerataan pembangunan di daerah dan mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Langkah kedua, melanjutkan pengalihan belanja yang kurang produktif dan tidak tepat sasaran, seperti subsidi listrik ke belanja yang lebih produktif. Ketiga, pemenuhan anggaran kesehatan 5 persen dari APBN yang pertama kalinya diwujudkan di tahun depan. Keempat, memperkuat dan memperluas program perlindungan sosial ke masyarakat yang kurang mampu. Kemudian memperkuat Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan meningkatkan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Kelima, memperluas program kredit usaha rakyat (KUR) untuk mendukung usaha menengah, kecil, dan mikro melalui peningkatan anggaran subsidi bunga.

Sementara itu, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,2-5,6 persen, perkiraan ini masih sejalan dengan target pemerintah 5,3 persen. Pemulihan ekonomi di 2016 masih akan menghadapi tantangan karena terbatasnya perbaikan ekonomi global serta kinerja fiskal dan optimisme sektor swasta terhadap prospek pemulihan perekonomian yang masih terbatas. Perbaikan ekonomi negara tujuan ekspor utama yang masih belum solid di tengah belum signifikannya perbaikan harga komoditas global, berdampak pada terbatasnya perbaikan kinerja ekonomi daerah. Pada gilirannya kondisi ini berimbas pada daya beli masyarakat di tengah optimisme masyarakat terhadap perekonomian yang belum pulih sepenuhnya, serta berdampak juga pada turunnya pendapatan fiskal daerah. Adapun investasi swasta diharapkan akan meningkat seiring dengan dampak paket kebijakan pemerintah dan pemanfaatan ruang pelonggaran moneter (Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank Indonesia, 2016).

PDB Menurut Lapangan Usaha

Kegiatan ekonomi terangkum di dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009, dimana kegiatan ekonomi diklasifikasikan menjadi 21 kategori yang dapat disederhanakan menjadi 17 kategori. KBLI 2009 disusun untuk menyeragamkan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data statistik menurut kegiatan ekonomi. Dengan penyeragaman tersebut, data statistik kegiatan ekonomi dapat dibandingkan dengan format standar pada level internasional, nasional, maupun regional (Perka BPS No 57 Tahun 2009).

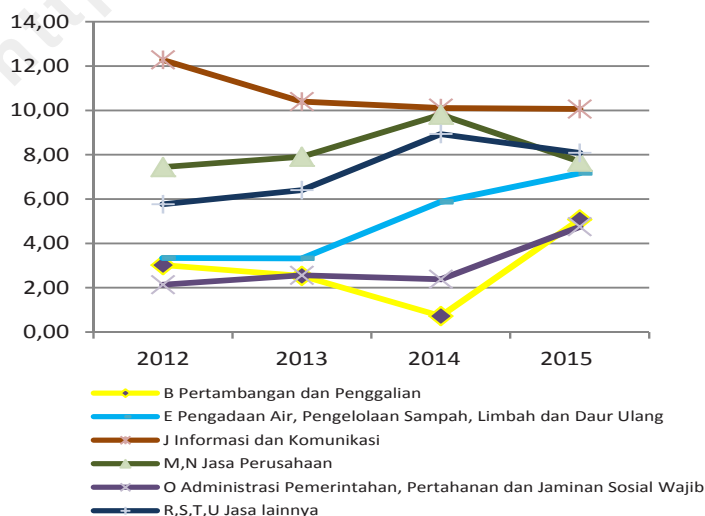
Kendati pertumbuhan ekonomi 2015 melambat, namun pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi tetap mengalami peningkatan. Dari 17 kategori lapangan usaha yang ada di Indonesia, pertumbuhan PDB tertinggi ditunjukkan oleh kategori Informasi dan Komunikasi dengan laju pertumbuhan di atas 10 persen dalam empat tahun terakhir, bahkan pada tahun 2012 nilai pertumbuhan mencapai 12,28 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan lapangan usaha lainnya. Meningkatnya pertumbuhan pada sektor informasi

dan komunikasi sebagai ciri ekonomi negara yang sedang berkembang, dimana informasi dan komunikasi memang menjadi tumpuannya. Populasi Indonesia yang besar, penetrasi informasi dan komunikasi kecil menjadi keuntungan untuk sektor informasi dan komunikasi ini. Meningkatnya sektor informasi dan komunikasi akibat dari peningkatan penggunaan telpon selular dan pelayanan data, juga penggunaan internet.

Sektor Informasi dan Komunikasi dipercaya mampu mendorong percepatan, pertumbuhan, serta pemerataan ekonomi dan dapat berkontribusi pada produktivitas, daya saing, serta pertumbuhan bidang usaha, dan industri strategis nasional. Sehingga pemerintah diharapkan mampu untuk mengoptimalkan sektor Informasi dan Komunikasi ini guna meningkatkan potensi sosial ekonomi. Sektor Informasi dan Komunikasi juga dapat mendukung pengembangan kelompok teknologi nasional serta mendorong usaha lokal, baik dari hulu ke hilir untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman satu sama lain. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan juga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). <http://jakartakita.com/2015/03/10/sektor-teknologi-informasi-dan-komunikasi>.

Jasa Keuangan & Asuransi dan Jasa Lainnya merupakan dua sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi berikutnya setelah sektor Informasi dan Komunikasi pada tahun 2015. Masing-masing mengalami pertumbuhan 8,53 persen untuk sektor Jasa Keuangan & Asuransi, diikuti sektor Jasa Lainnya sebesar 8,08 persen. Kategori lain umumnya mengalami pasang surut pertumbuhan sejalan ketidakpastiaan perekonomian global yang melanda beberapa tahun terakhir.

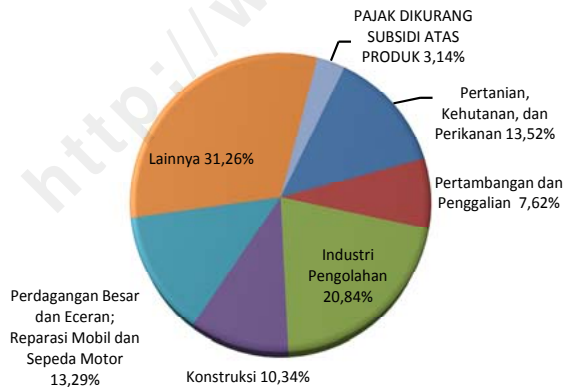
Gambar 3.1
Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2012–2015



Sementara itu, tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan PDB terendah yaitu Pertambangan dan Penggalian (B), Pengadaan Listrik dan Gas (D), dan Perdagangan Besar dan Eceran (G). Pada tahun 2015 ini sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan negatif (-5,08 persen). Menariknya Sektor Pertambangan dan Penggalian tersebut meski mengalami pertumbuhan negatif tetapi termasuk lima besar penyumbang perekonomian Indonesia dengan share terhadap PDB sebesar 7,62 persen. Pertumbuhan negatif sektor Pertambangan dan Penggalian tersebut dipengaruhi oleh subsektor Pertambangan Batubara dan Lignit (-20,89 persen) dan Pertambangan Biji Logam (-3,28 persen). Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan kategori yang paling terkena imbas kebijakan pemerintahan baru mengenai larangan ekspor bahan mineral mentah. Di samping itu, penurunan permintaan global dan harga komoditas di pasar internasional juga menyebabkan pertumbuhan lapangan usaha ini merosot tajam.

Tiga lapangan usaha utama masih mendominasi struktur perekonomian Indonesia di tahun 2015, yaitu Industri Pengolahan (20,84 persen); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (13,52 persen); serta Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,12 persen). Secara bertahap, perekonomian Indonesia telah beralih dari negara agraris yang didominasi pertanian menjadi negara berbasis industri. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi Industri Pengolahan selama 2012-2015 yang selalu berada di posisi puncak dengan persentase di atas 20 persen, mengalahkan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Gambar 3.2
Kontribusi PDB Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2015



Pertumbuhan sektor industri pengolahan memegang peranan penting sebagai motor dan pilar pertumbuhan ekonomi nasional karena memberikan devisa dari aktivitas ekspor dan kemampuannya menyerap angkatan kerja. Ada tiga karakteristik penting dari sektor industri pengolahan yang memiliki dampak positif bagi perekonomian nasional. Pertama, menyerap tenaga kerja dari jenis industri padat karya, padat modal hingga industri yang

Tabel 3.1. Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2012–2015

Lapangan Usaha	2012	2013	2014 *	2015 **
PDB Harga Berlaku (miliar rupiah) dan Distribusi PDB (%)				
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 152 262,1	1 275 048,4	1 409 655,7	1 560 399,3
	13,37	13,36	13,34	13,52
B. Pertambangan dan Penggalan	1 000 307,6	1 050 745,8	1 042 900,9	879 399,6
	11,61	11,01	9,87	7,62
C. Industri Pengolahan	1 848 150,9	2 007 426,8	2 219 441,4	2 405 408,9
	21,45	21,03	21,01	20,84
D. Pengadaan Listrik dan Gas	95 637,8	98 686,8	114 617,9	131 264,2
	1,11	1,03	1,08	1,14
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6 603,8	7 209,0	7 887,1	8 606,0
	0,08	0,08	0,07	0,07
F. Konstruksi	805 208,1	905 990,5	1 041 949,5	1 193 346,1
	9,35	9,49	9,86	10,34
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 138 484,4	1 261 145,6	1 420 054,3	1 534 067,3
	13,21	13,21	13,44	13,29
H. Transportasi dan Pergudangan	313 156,2	375 305,9	466 968,9	578 963,9
	3,63	3,93	4,42	5,02
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	252 612,3	289 498,3	321 062,1	341 790,2
	2,93	3,03	3,04	2,96
J. Informasi dan Komunikasi	311 362,4	341 009,4	369 415,0	406 887,6
	3,61	3,57	3,50	3,53
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	320 534,3	370 131,9	408 438,8	464 734,6
	3,72	3,88	3,87	4,03
L. Real Estate	237 913,9	264 275,0	294 573,4	329 796,9
	2,76	2,77	2,79	2,86
M,N. Jasa Perusahaan	127 724,2	144 604,1	165 990,6	190 267,9
	1,48	1,51	1,57	1,65
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	340 567,6	372 195,0	404 629,6	450 733,1
	3,95	3,90	3,83	3,91
P. Jasa Pendidikan	270 372,3	307 862,3	342 063,2	388 682,6
	3,14	3,22	3,24	3,37
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86 235,4	96 881,3	109 147,2	123 410,3
	1,00	1,01	1,03	1,07
R,S,T,U Jasa lainnya	122 566,2	140 315,5	163 548,8	190 579,5
	1,42	1,47	1,55	1,65
NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	8 429 699,5	9 308 331,6	10 302 344,4	11 178 338,0
	97,84	97,51	97,51	96,86
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	186 005,0	237 802,4	263 472,9	362 451,8
	2,16	2,49	2,49	3,14
PRODUK DOMESTIK BRUTO	8 615 704,5	9 546 134,0	10 565 817,3	11 540 789,8
	100,00	100,00	100,00	100,00
PDB Harga Konstan Tahun 2010 (miliar rupiah) dan Pertumbuhan PDB (%)				
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 039 440,7	1 083 141,8	1 129 052,7	1 174 456,8
	4,59	4,20	4,24	4,02
B. Pertambangan dan Penggalan	771 561,6	791 054,4	796 711,6	756 239,2
	3,02	2,53	0,72	-5,08
C. Industri Pengolahan	1 697 787,2	1 771 961,9	1 853 688,2	1 932 457,4
	5,62	4,37	4,61	4,25
D. Pengadaan Listrik dan Gas	84 393,0	88 805,1	93 755,9	94 894,8
	10,06	5,23	5,57	1,21

Lapangan Usaha	2012	2013	2014 *	2015 **
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6 329,8	6 539,9	6 923,5	7 420,2
	3,34	3,32	5,87	7,17
F. Konstruksi	728 226,4	772 719,6	826 615,6	881 583,9
	6,56	6,11	6,97	6,65
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 067 911,5	1 119 272,1	1 177 048,6	1 206 074,7
	5,40	4,81	5,16	2,47
H. Transportasi dan Pergudangan	284 662,6	304 506,2	326 933,0	348 775,6
	7,11	6,97	7,36	6,68
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	228 232,6	243 748,3	257 815,5	269 054,5
	6,64	6,80	5,77	4,36
J. Informasi dan Komunikasi	316 278,7	349 150,1	384 407,4	423 063,5
	12,28	10,39	10,10	10,06
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	280 896,1	305 515,1	319 825,5	347 095,7
	9,54	8,76	4,68	8,53
L. Real Estate	229 254,2	244 237,5	256 440,2	268 811,4
	7,41	6,54	5,00	4,82
M,N Jasa Perusahaan	116 293,3	125 490,7	137 795,3	148 395,5
	7,44	7,91	9,81	7,69
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	282 235,3	289 448,9	296 329,7	310 393,9
	2,13	2,56	2,38	4,75
P. Jasa Pendidikan	232 704,3	250 016,2	263 889,6	283 540,0
	8,22	7,44	5,55	7,45
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	78 380,1	84 621,4	91 357,1	97 840,8
	7,97	7,96	7,96	7,10
R,S,T,U Jasa lainnya	115 675,4	123 083,1	134 070,1	144 902,4
	5,76	6,40	8,93	8,08
NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	7 560 262,8	7 953 312,3	8 352 659,5	8 695 000,3
	5,85	5,20	5,02	4,10
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	166 820,6	203 185,5	213 611,7	281 931,2
	15,05	21,80	5,13	31,98
PRODUK DOMESTIK BRUTO	7 727 083,4	8 156 497,8	8 566 271,2	8 976 931,5
	6,03	5,56	5,02	4,79

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

membutuhkan pengetahuan dan berbasis teknologi tinggi. Kedua, industri memiliki produktivitas relatif tinggi dan ketiga, mampu melahirkan keterkaitan dan memasok kebutuhan bagi sektor lainnya.

Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 4,25 persen selama tahun 2015 atau sedikit lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79 persen, dimana industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik mengalami pertumbuhan paling tinggi (7,83 persen) dibandingkan dengan industri makanan dan minuman (7,54 persen). Kementerian Perindustrian menyebutkan target pertumbuhan Industri Pengolahan tahun 2016 sebesar 5,7 persen. Hal yang penting untuk mendukung pertumbuhan industri di Indonesia yaitu penyediaan energi dengan harga murah dan infrastruktur pendukung. Dalam RPJM 2015-2019, pemerintah berencana menambah jumlah industri besar dan sedang sebanyak 9 ribu unit dalam lima tahun mendatang dengan tenaga kerja yang diserap

berkisar 3 juta orang. Dari jumlah tersebut, 50 persen diarahkan bisa tumbuh di luar Jawa. Industri kecil juga direncanakan bertambah 20 ribu unit selama 2015-2019.

Transformasi industri diarahkan kepada pembangunan kawasan industri, penambahan populasi industri dan pemerataan persebaran, serta peningkatan daya saing dan produktivitas industri. Pengembangan kawasan industri dititikberatkan di luar Pulau Jawa dan pengembangan industri kecil dan menengah di kawasan Indonesia timur. Kemenperin telah menetapkan 10 industri prioritas meliputi industri pangan; farmasi, kosmetik, alat kesehatan; tekstil, kulit, alas kaki dan aneka; alat transportasi; elektronika dan telematika; pembangkit energi; barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri; industri hulu agro logam dasar dan bahan galian bukan logam; serta kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Lapangan usaha dengan kontribusi tertinggi kedua terhadap total PDB tahun 2015 sebesar 13,52 persen yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada tahun 2016 kategori ini diprediksi dapat tumbuh 4,2 persen. Kementan optimis dengan target ini karena tidak ada data yang menunjukkan akan ada kemarau panjang seperti yang terjadi pada tahun 2015 dengan adanya fenomena El Nino, sehingga petani bisa mengoptimalkan lahan-lahan yang dimiliki. Optimisme pertanian ke depan juga didukung potensi sumber daya lahan karena lahan di Indonesia termasuk paling subur di dunia. Kendati demikian harus ada langkah antisipasi yang harus di ambil untuk menjaga kemungkinan terburuk yang terjadi yaitu perlu ada kebijakan yang terintegrasi antar kementerian.

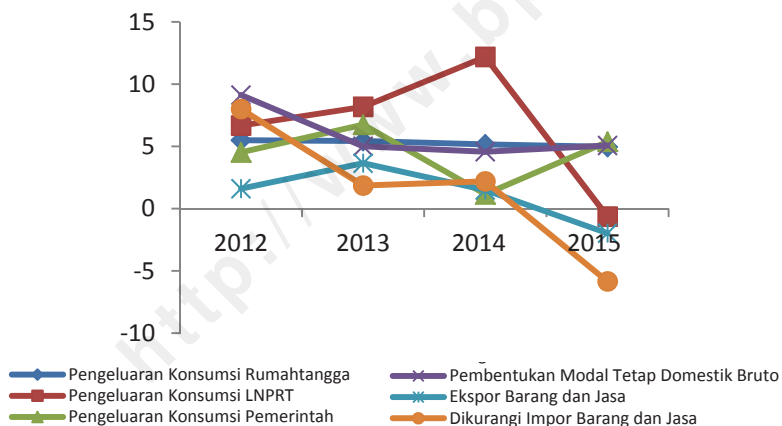
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi lapangan usaha ketiga dengan kontribusi tertinggi terhadap PDB. Lapangan usaha ini diperkirakan tumbuh 4,8 persen pada tahun 2016. Pemerintah berupaya meningkatkan perdagangan dengan pengembangan pasar di dalam dan luar negeri. Untuk peningkatan perdagangan dalam negeri, distribusi barang dagang utamanya bahan makanan diatur agar lebih efisien. Regulasi di bidang perdagangan disusun untuk memberi perlindungan baik terhadap konsumen melalui standarisasi produk maupun kepada produsen dengan peraturan perdagangan *e-commerce*. Sementara untuk perdagangan luar negeri, kebijakan yang ditempuh yaitu melalui pengembangan ekspor produk olahan nonmigas agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi tahun 2016 diprediksi mengalami pertumbuhan tertinggi dibanding kategori lainnya, yaitu sebesar 10,1 persen. Kebutuhan telekomunikasi yang meningkat serta kebijakan tahun 2016 tentang konektivitas nasional mendukung kategori ini berkembang pesat. Semakin cepatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan di segala jenis kehidupannya yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang dapat dicapai. Banyaknya sektor kehidupan yang ada diharapkan membuka inovasi baru bagi kita untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan peradaban manusia. Persaingan yang keras dalam dunia bisnis

tentunya sangat membutuhkan suatu perusahaan yang dapat menangani akan hal itu diberbagai situasi yang menantang. Semua bisnis tentunya juga membutuhkan semua informasi yang sangat aktual, cepat dan dapat dipercaya, yang mana semua permasalahan tersebut hanya bisa diselesaikan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi. Walaupun praktek komunikasi bisnis menggunakan peran teknologi informasi dan komunikasi akan tetapi keberhasilan komunikasi itu disebabkan oleh kemampuan dari individu itu sendiri.

Jika dilihat menurut sisi penggunaan, komponen yang mempunyai peranan besar pembentuk PDB tahun 2015 yaitu pengeluaran konsumsi pemerintah dengan pertumbuhan sebesar 5,38 persen. Komponen lain yang memiliki peranan besar dalam pembentukan PDB adalah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) dan konsumsi rumah tangga, dimana masing-masing tumbuh sebesar 5,07 persen dan 4,96 persen. Sementara tiga komponen lainnya mengalami kontraksi, yaitu Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRRT) (-0,63 persen), Ekspor barang dan jasa (-1,97 persen) dan Impor barang dan jasa (-5,84 persen).

Gambar 3.3
Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan, Tahun 2012–2015

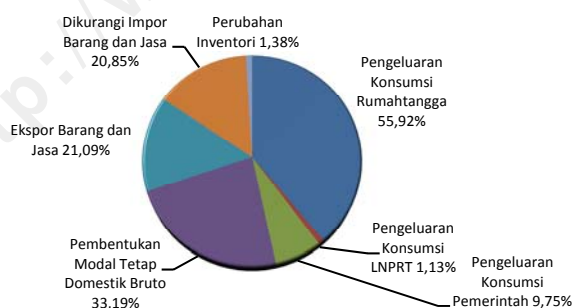


Dalam empat tahun terakhir pertumbuhan Indonesia mengalami perlambatan diikuti dengan perlambatan pertumbuhan dari komponen-komponen pembentuk PDB seperti ekspor, impor, dan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung stabil karena dipengaruhi struktur demografi Indonesia yang didominasi penduduk usia produktif. Sedangkan Konsumsi pemerintah mencapai pertumbuhan terendah di tahun 2014 yang hanya sebesar 1,16 persen. Penurunan konsumsi pemerintah di tahun 2014 disebabkan kebijakan pemerintahan baru yang melarang pemborosan belanja negara untuk aparatur pemerintah. Namun tahun 2015 pengeluaran konsumsi pemerintah justru mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 5,38 persen.

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) mengalami pasang surut pertumbuhan selama tahun 2012-2015, tahun 2012 sebesar 9,13 persen, dua tahun berturut-turut mengalami penurunan (2013-2014) masing-masing sebesar 5,01 persen dan 4,57 persen, kemudian tahun 2015 naik kembali menjadi 5,07 persen. Investasi kapital yang diindikasikan dengan PMTB merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia menjadi cermin iklim usaha yang kondusif. Keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan usaha dinilai menjadi salah satu poin yang akan meningkatkan jumlah investor di Indonesia. Pemerintah juga memberikan keringanan pajak untuk investasi industri yang berorientasi ekspor, industri kereta api dan pengiriman, dan untuk penelitian dan pembangunan.

Sementara itu pada tahun 2015 ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,97 persen. Perlambatan yang terjadi ini lebih disebabkan karena anjloknya dua harga komoditi yang menjadi andalan ekspor Indonesia yaitu minyak kelapa sawit dan batubara. Melambatnya nilai ekspor ini juga turut ditengarai oleh melemahnya ekonomi global khususnya untuk negara-negara tujuan ekspor kedua komoditas tersebut. Negara tujuan ekspor Indonesia terbesar untuk komoditas batubara ialah Tiongkok sementara untuk tujuan utama komoditas minyak kelapa sawit ialah India. Kedua negara tersebut tidak hanya menjadi negara tujuan ekspor terbesar Indonesia melainkan juga sebagai negara yang mengkonsumsi komoditas tersebut terbesar di dunia.

Gambar 3.4
Kontribusi PDB Menurut Penggunaan (persen), Tahun 2015



Jika ditinjau berdasarkan kontribusi terhadap pembentukan PDB dari sisi penggunaan, konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama pembentuk PDB dengan kontribusi lebih dari 55 persen selama tahun 2012-2015. PDB tahun 2015 ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 55,91 persen, pembentukan modal tetap domestik bruto 33,19 persen, ekspor 21,09 persen, impor 20,85 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah 9,75 persen, perubahan inventori 1,38 persen, dan pengeluaran konsumsi LNPR 1,13 persen.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan penguatan kebijakan struktural terutama yang terkait dengan pengembangan sentra produksi dan tata niaga bahan pangan pokok guna mencegah gejolak kenaikan harga. Pemerintah juga berupaya mendorong penguatan daya beli masyarakat yang diharapkan dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat melalui kebijakan penyesuaian Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Selain itu peningkatan daya beli masyarakat juga didukung oleh perluasan cakupan dan paket manfaat dari Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Ketenagakerjaan, khususnya untuk penduduk rentan dan pekerja informal. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun 2016 diperkirakan mencapai 5,2 persen.

Tahun 2016, pertumbuhan PMTB diperkirakan tumbuh sebesar 7,3 persen. Penguatan kinerja pertumbuhan PMTB terutama didukung lingkungan eksternal yang lebih kondusif, kebijakan perbaikan iklim investasi dan usaha, peningkatan belanja infrastruktur pemerintah, dan kebijakan insentif perpajakan. Terkait kebijakan perbaikan iklim investasi dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah antara lain penguatan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur investasi dan usaha baik di pusat maupun di daerah, peningkatan kualitas layanan, pengembangan sistem investasi baik fiskal maupun nonfiskal, koordinasi dalam pendirian forum investasi, peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan peningkatan persaingan usaha yang sehat dan mendukung iklim investasi. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintah di tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional melalui peningkatan konektivitas nasional, ketahanan energi, perumahan pemukiman.

Peningkatan kualitas anggaran pemerintah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi pemerintah yang ditargetkan tumbuh 5,7 persen di tahun 2015. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintah di tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional melalui peningkatan konektivitas nasional, ketahanan energi dan perumahan pemukiman. Peningkatan konektivitas nasional diarahkan melalui pengembangan jalan nasional dan provinsi, pembangunan jalan baru dan jalan bebas hambatan, bandara, jalur kereta api, dan peningkatan kapasitas pelabuhan utama untuk mendukung tol laut. Peningkatan ketahanan energi dilaksanakan melalui pembangunan waduk baru dan jaringan irigasi, penambahan kapasitas pembangkit listrik dan pembangunan energi baru. Sementara itu, pembangunan perumahan pemukiman diarahkan untuk penyediaan tempat tinggal yang layak melalui penyediaan bangunan baru dan peningkatan kualitas hunian. Guna mendukung penguatan kinerja investasi dalam negeri, Pemerintah juga memberikan berbagai insentif perpajakan diantaranya melalui *tax allowance*, *tax holiday*, dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).

Kinerja ekspor dan impor pada tahun 2016 diperkirakan akan meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi global dan kenaikan harga beberapa komoditas. Perbaikan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, diprediksi akan mendorong permintaan dan kinerja ekspor

Indonesia. Dalam rangka memanfaatkan peluang peningkatan aktivitas perdagangan internasional, pemerintah akan membuka pasar ekspor baru, mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor, serta meningkatkan fasilitas ekspor untuk mendorong permintaan untuk produk Indonesia. Selain itu, Pemerintah berupaya untuk mendorong partisipasi sektor industri yang berorientasi ekspor sebagai upaya untuk memperluas tujuan ekspor dan meningkatkan daya saing produk. Dari sisi impor, kebijakan diarahkan pada upaya untuk menarik investor guna menumbuhkan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku sehingga akan mendorong perbaikan neraca perdagangan. Fasilitas perdagangan dengan sistem *on-line* juga akan dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan dan

Tabel 3.2. Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan, Tahun 2012–2015

Lapangan Usaha	2012	2013	2014 *	2015 **
PDB Harga Berlaku (miliar rupiah) dan Distribusi PDB (%)				
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	4 768 745,1	5 321 087,6	5 915 741,7	6 453 205,5
	55,35	55,75	55,97	55,92
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	89 585,8	103 929,0	124 242,0	130 936,0
	1,04	1,09	1,18	1,13
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	796 848,3	908 574,3	996 197,4	1 125 542,4
	9,25	9,52	9,43	9,75
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2 819 026,5	3 051 496,2	3 442 026,9	3 829 978,4
	32,72	31,96	32,58	33,19
5. Perubahan Inventori	202 638,4	178 090,5	210 407,1	158 753,9
	2,35	1,87	1,99	1,38
6. Ekspor Barang dan Jasa	2 118 979,0	2 283 776,7	2 497 116,4	2 434 180,6
	24,59	23,82	23,63	21,09
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2 152 937,0	2 359 212,1	2 580 527,1	2 405 762,4
	24,99	24,71	24,42	20,85
Diskrepansi Statistik ¹⁾	- 27 181,5	58 391,9	- 39 387,1	- 186 044,6
	-0,32	0,61	-0,37	-1,61
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	8 615 704,5	9 546 134,0	10 565 817,3	11 540 789,8
	100,00	100,00	100,00	100,00
PDB Harga Konstan (miliar rupiah) dan Pertumbuhan PDB (%)				
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	4 195 787,6	4 423 416,9	4 651 480,2	4 882 258,7
	5,49	5,43	5,16	4,96
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	81 918,6	88 618,0	99 420,0	98 789,0
	6,68	8,18	12,19	-0,63
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	681 819,0	727 812,1	736 283,1	775 925,1
	4,53	6,75	1,16	5,38
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2 527 728,8	2 654 375,0	2 775 733,6	2 916 601,6
	9,13	5,01	4,57	5,07
5. Perubahan Inventori	174 183,1	124 453,6	156 720,3	112 847,9
	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	1 945 063,7	2 026 113,7	2 046 296,2	2 005 945,0
	1,61	4,17	1,00	-1,97
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1 910 299,5	1 945 866,3	1 988 537,2	1 872 353,5
	8,00	1,86	2,19	-5,84
Diskrepansi Statistik ¹⁾	30 882,1	57 575,9	88 875,0	56 917,6
	-	-	-	-
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	7 727 083,4	8 156 497,8	8 566 271,2	8 976 931,5
	6,03	5,56	5,02	4,79

Catatan: * Angka sementara

**Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

mempercepat proses penerbitan perizinan. Dengan memerhatikan faktor-faktor dan strategi Pemerintah tersebut, kinerja ekspor pada tahun 2016 diprediksi akan tumbuh sebesar 2,5 persen, sementara impor akan tumbuh 2,2 persen. (Nota Keuangan, 2016).

Pertumbuhan Ekonomi Spasial

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga berdampak di sebagian wilayah Indonesia, seperti Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Perlambatan yang paling signifikan terjadi di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 3,29 persen pada tahun 2014 menjadi 1,31 persen pada tahun 2015. Sementara untuk wilayah yang paling tinggi mengalami pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 adalah Pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu mencapai 10,29 persen, dimana pertumbuhan ini lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai 5,87 persen. Sedangkan ekonomi di wilayah timur Indonesia (Maluku dan Papua) mengalami pertumbuhan dari 4,64 persen pada tahun 2014 menjadi 6,62 persen pada tahun 2015.

**Tabel 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (persen),
Tahun 2013–2015**

Wilayah Pulau	2013	2014 *	2015 **
Sumatera	4,95	4,58	3,54
Jawa	6,01	5,57	5,45
Bali dan Nusa Tenggara	5,95	5,87	10,29
Kalimantan	3,95	3,29	1,31
Sulawesi	7,69	6,87	8,18
Maluku dan Papua	7,71	4,64	6,62
Indonesia	5,58	5,02	4,79

Catatan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Secara keseluruhan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera disebabkan penurunan kinerja lapangan usaha pertanian dan pertambangan serta terbatasnya konsumsi rumah tangga. Penurunan kinerja lapangan usaha Pertambangan sebagai dampak dari penurunan harga minyak dunia, terhentinya operasional kilang gas Arun di Provinsi Aceh yang telah beroperasi selama 36 tahun. Selain itu, penurunan *lifting* minyak di Riau akibat usia sumur produksi yang sudah tua juga turut memengaruhi kinerja pertambangan di Sumatera. Lapangan usaha Industri Pengolahan juga melambat sebagai akibat pelemahan investasi pada Industri Pengolahan hasil perkebunan. Permintaan dunia terhadap kelapa sawit dan karet yang terbatas juga memengaruhi perlambatan kinerja Industri Pengolahan.

Perekonomian di Pulau Kalimantan sedikit mengalami perlambatan disebabkan penurunan kinerja pertambangan dan pertanian. Sektor pertambangan berkontraksi sejalan dengan lesunya permintaan ekspor batubara dari negara Tiongkok dan ditambah lagi dengan ketatnya persaingan pasar batubara dengan masuknya Afrika Selatan sebagai salah satu produsen batubara. Sementara perlambatan sektor pertanian terjadi karena adanya perlambatan luas tanaman sawit produktif karena monotorium 2011 dan koreksi harga sawit. Perlambatan perekonomian di Pulau Kalimantan juga tidak terlepas dari melambatnya semua indikator sisi permintaan PDRB kecuali konsumsi LNPRT. Perlambatan hampir terjadi di semua provinsi di Kalimantan kecuali Kalimantan Tengah, yang disebabkan karena telah beroperasinya beberapa smelter mineral di wilayah Kalimantan Tengah.

Perlambatan ekonomi di Pulau Jawa sangat mempengaruhi perekonomian nasional karena pangsa ekonomi Pulau Jawa mencapai lebih dari 50 persen. Perlambatan ini disebabkan menurunnya kinerja ekspor yang terbatas seiring dengan masih melemahnya permintaan global maupun domestik. Selain itu juga disebabkan karena melemahnya investasi sejak tahun 2014. Kondisi ini menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat, sebagaimana tercermin dari penurunan daya beli masyarakat. Upaya pemerintah mempercepat investasi infrastruktur pada semester II 2015 menjadi faktor penahan perlambatan lebih dalam dari kinerja investasi di Pulau Jawa, di tengah belum pulihnya belanja investasi swasta. Lemahnya kinerja belanja rumah tangga dan perdagangan luar negeri tahun 2015 berdampak pada penurunan kinerja lapangan usaha perdagangan dan industri pengolahan. Sementara itu lapangan usaha pertanian menjadi penahan perlambatan ekonomi lebih dalam di Pulau Jawa, akibat adanya anomali iklim El Nino.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia tahun 2015 terutama sebagai dampak dari dikeluarkannya kembali izin ekspor oleh pemerintah kepada produsen mineral tembaga di Papua dan NTB sebagai

Tabel 3.4. Peranan Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional (persen), Tahun 2013–2015

Wilayah Pulau	2013	2014 [*]	2015 ^{**}
Sumatera	23,05	23,01	22,21
Jawa	57,06	57,39	58,29
Bali dan Nusa Tenggara	2,80	2,87	3,06
Kalimantan	9,25	8,76	8,15
Sulawesi	5,50	5,65	5,92
Maluku dan Papua	2,34	2,32	2,37
33 Provinsi	100,0	100,0	100,0

Catatan : * Angka sementara

^{**} Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

bagian dari komitmen untuk membangun fasilitas hilirisasi di Indonesia. Disamping itu, beroperasinya dua smelter nikel baru yaitu di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, serta satu pabrik pengolahan gas alam (LNG) di Sulawesi Tengah turut mendorong akselerasi perekonomian di wilayah timur Indonesia.

Struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Pulau Jawa dengan kontribusi lebih dari 50 persen dalam membentuk PDB nasional. Bahkan dalam tiga tahun terakhir, Pulau Jawa terus mengalami peningkatan kontribusi, dari 57,06 persen pada tahun 2013 menjadi 58,29 persen pada tahun 2015. Diikuti oleh Pulau Sumatera, tahun 2013, kontribusi Pulau Sumatera terhadap PDB nasional sebesar 23,05 persen dan tahun 2014 sebesar 23,01 persen, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan kontribusi menjadi 22,21 persen. Pulau di Indonesia yang mengalami peningkatan kontribusi meskipun nilainya kecil adalah Pulau Sulawesi dari 5,50 persen pada tahun 2013 menjadi 5,92 persen pada tahun 2015. Pulau Bali dan Nusa Tenggara berkontribusi sebesar 2,80 persen pada tahun 2013 menjadi 3,06 persen pada tahun 2015. Pulau Kalimantan mengalami penurunan kontribusi terhadap PDB nasional selama tahun 2013-2015. Tahun 2013, Kalimantan memberikan sumbangan PDRB sebesar 9,25 persen, tahun 2014 turun menjadi 8,76 persen dan tahun 2015 turun lagi menjadi 8,15 persen. Sementara itu, Pulau Maluku dan Papua merupakan wilayah/Pulau di Indonesia dengan kontribusi yang paling kecil terhadap PDB nasional. Tahun 2013, peran Pulau Maluku dan Papua dalam membentuk PDB sebesar 2,34 persen dan menurun menjadi 2,32 persen pada tahun 2014, tetapi pada tahun 2015 sedikit mengalami peningkatan kontribusi yaitu sebesar 2,37 persen.

PDB Per Kapita

Indikator kesejahteraan suatu negara yang selalu menjadi perhatian bagi pemerintah maupun lembaga keuangan salah satunya adalah pendapatan perkapita. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak serta merta menurunkan PDB per kapita. Berdasarkan PDB harga berlaku, PDB per kapita di Indonesia merangkak naik dari Rp 32,36 juta pada 2011 menjadi Rp 45,18 juta pada tahun 2015 jika dihitung atas dasar harga berlaku atau Rp 35,14 juta jika dihitung atas dasar harga konstan. Nilai PDB per kapita diperoleh dari nilai PDB tahun dasar 2010 dibagi dengan jumlah penduduk hasil proyeksi penduduk 2010-2035.

Pendapatan perkapita umumnya selalu meningkat. Namun pendapatan perkapita dapat bias pada suatu kelompok tertentu yang dapat mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah jika terdapat kesenjangan yang semakin melebar saat terjadi peningkatan pendapatan, baik kesenjangan antar wilayah, antar sektor ekonomi, dan kesenjangan pendapatan. Kesenjangan antar wilayah di Indonesia sangat terlihat ketika melihat kontribusi ekonomi di Pulau Jawa dalam pembentukan PDB dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Pada triwulan I-2016, Pulau Jawa memberi kontribusi terhadap PDB sebesar 58,91 persen, diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,15 persen, Pulau Kalimantan 7,67 persen, Pulau Sulawesi 5,89 persen, dan pulau-pulau lain sebesar 5,38 persen.

Tabel 3.5. Produk Domestik Bruto per Kapita (ribu rupiah), Tahun 2011–2015

PDB per Kapita	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010
2011	32 363,7	30 115,4
2012	35 105,2	31 484,5
2013	38 365,9	32 781,0
2014 ^x	41 900,4	33 970,9
2015 ^{xx}	45 176,2	35 140,0

Catatan : ^x Angka sementara

^{xx} Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Distribusi pendapatan yang tidak merata/kesenjangan pendapatan terlihat dimana hampir 25 persen PDB dimiliki oleh orang-orang kaya yang jumlahnya hanya 0,02 persen dari total penduduk. Hal ini mencerminkan masih timpangnya kesejahteraan ekonomi antar penduduk di Indonesia. Percepatan pembangunan di beberapa sektor (ritel, otomotif, dan properti), persediaan sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang berkembang pesat, upah buruh dan biaya produksi yang rendah menjadi potensi yang mendukung perekonomian Indonesia terus tumbuh dari tahun ke tahun jika dikelola dengan bijaksana.

Capaian Kinerja Perekonomian Indonesia Triwulan I 2016

Pada triwulan I-2016, PDB Indonesia sebesar Rp 2.947,6 triliun jika dihitung atas dasar harga berlaku atau sebesar Rp 2.262,6 triliun jika dihitung atas dasar harga konstan. Perlambatan ekonomi masih dialami Indonesia di awal tahun ini, dimana laju pertumbuhan PDB triwulan I 2016 dibanding triwulan IV 2015 (*q-to-q*) mengalami penurunan 0,34 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi berasal dari faktor musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih dapat tumbuh sebesar 14,43 persen. Pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada lapangan usaha Jasa Perusahaan (2,25 persen), Real Estat (1,77 persen), Informasi dan Komunikasi (1,00 persen) dan Penyedia Akomodasi dan Makan Minum (0,10 persen). Namun pertumbuhan ini belum cukup menahan kontraksi ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap PDB seperti Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami kontraksi.

PDB Indonesia pada triwulan I-2016 jika dibandingkan dengan triwulan I-2015 (*y-on-y*) tumbuh 4,92 persen. Pertumbuhan ini didukung hampir seluruh lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi 0,66 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (9,10 persen), diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,52 persen), Informasi dan Komunikasi (8,28 persen) dan Jasa Perusahaan (8,14 persen). Jika dilihat struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha masih

belum menunjukkan perubahan berarti. Hal ini ditandai dengan lapangan usaha Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta Perdagangan Besar dan Eceran yang masih dominan.

Sumber pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa Industri Pengolahan menjadi sumber penciptaan PDB tertinggi yaitu sebesar 1,00 persen, diikuti Konstruksi sebesar 0,75 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,55 persen, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan sebesar 0,24 persen.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan triwulan I-2016 dibandingkan triwulan sebelumnya (*q-to-q*) hanya terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 0,17 persen, sementara komponen pengeluaran lainnya bernilai negatif. Pengeluaran konsumsi pemerintah tercatat mengalami penurunan 49,45 persen. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintahan baru yang membatasi anggaran belanja pemerintah. Kontraksi kinerja investasi dan ekspor yang bernilai negatif juga turut menyumbang penurunan ekonomi di awal tahun 2016.

Tabel 3.6. Nilai, Struktur, Laju dan Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha, Triwulan I-2016

Lapangan Usaha	Nilai PDB (triliun rupiah)		Struktur PDB (Persen)	Laju Pertumbuhan (persen)		Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2016 (y-on-y) (persen)
	Harga Berlaku	Harga Konstan		Tw I 2016 to TW IV 2015	Tw I 2016 to TW I 2015	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	399,6	287,9	13,56	14,43	1,85	0,24
Pertambangan dan Penggalian	200,7	189,0	6,81	-0,27	-0,66	-0,06
Industri Pengolahan	613,0	489,5	20,80	-0,29	4,59	1,00
Pengadaan Listrik dan Gas	33,8	24,4	1,15	-1,98	7,50	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,2	1,9	0,07	-0,96	4,84	0,00
Konstruksi	321,8	223,0	10,92	-6,27	7,87	0,75
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	394,2	303,4	13,37	-0,08	4,04	0,55
Transportasi dan Pergudangan	149,9	89,3	5,08	-1,50	7,73	0,30
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	88,5	69,2	3,00	0,10	5,62	0,17
Informasi dan Komunikasi	107,3	110,5	3,64	1,00	8,28	0,39
Jasa Keuangan dan Asuransi	125,1	91,9	4,25	0,20	9,10	0,36
Real Estate	86,3	69,4	2,93	1,77	4,87	0,15
Jasa Perusahaan	51,4	39,0	1,74	2,25	8,14	0,14
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	112,4	78,0	3,81	-7,96	4,94	0,17
Jasa Pendidikan	94,6	68,9	3,21	-11,26	5,26	0,15
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	31,7	25,0	1,08	-5,52	8,52	0,09
Jasa lainnya	51,1	37,9	1,73	1,60	7,92	0,13
NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	2 863,6	2 198,2	97,15	0,20	4,74	4,61
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	84,0	64,4	2,85	-15,81	11,53	0,31
PRODUK DOMESTIK BRUTO	2 947,6	2 262,6	100,00	-0,34	4,92	4,92

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik

Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2016 terhadap triwulan I-2015 (*y-on-y*) terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (6,38 persen), Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (5,57 persen), Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (4,94 persen), dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (2,93 persen). Sementara itu, komponen pengeluaran Ekspor dan Impor Barang dan Jasa masing-masing mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3,88 persen dan 4,24 persen.

Struktur PDB menurut pengeluaran masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi lebih dari 50 persen. Komponen pengeluaran lain yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB yaitu Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (33,16 persen), Ekspor Barang dan Jasa (18,78 persen), Impor (18,77 persen), dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (6,80 persen), sedangkan Pengeluaran Konsumsi LNPRT dan Perubahan Inventori relatif kecil.

Tabel 3.7. Nilai, Struktur, Laju dan Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran, Triwulan I-2016

Lapangan Usaha	Nilai PDB (triliun rupiah)		Struktur PDB (Persen)	Laju Pertumbuhan (persen)		Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2016 (<i>y-on-y</i>) (persen)
	Harga Berlaku	Harga Konstan		Tw I 2016 to TW IV 2015	Tw I 2016 to TW I 2015	
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1 676,0	1 247,5	56,86	0,17	4,94	2,73
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	34,1	25,1	1,16	-2,91	6,38	0,07
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	200,3	137,8	6,80	-49,45	2,93	0,18
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	977,3	730,1	33,16	-5,75	5,57	1,79
5 Perubahan Inventori	80,6	53,1	2,73	-	-	-
6 Ekspor Barang dan Jasa	553,6	479,1	18,78	-3,44	-3,88	-0,90
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	553,2	448,7	18,77	-6,24	-4,24	-0,92
Diskrepani Statistik	-21,1	38,6	-0,72			
Produk Domestik Bruto (PDB)	2 947,6	2 262,6	100,00	-0,34	4,92	4,92

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik

Jika dilihat dari sumber penciptaannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2016 sebesar 4,92 persen berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,73 persen, PMTB sebesar 1,79 persen, dan sisanya berasal dari komponen pengeluaran lainnya.

Lampiran

Kategori	Lapangan Usaha	2012	2013	2014 ^x	2015 ^{xx}
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,59	4,20	4,24	4,02
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	4,58	3,85	3,85	3,31
	a. Tanaman Pangan	4,9	1,97	0,06	3,48
	b. Tanaman Hortikultura	-2,21	0,67	5,15	2,49
	c. Tanaman Perkebunan	6,95	6,15	5,94	3,54
	d. Peternakan	4,97	5,08	5,52	3,09
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	6,07	5,91	2,95	3,87
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,24	0,61	0,58	0,66
3	Perikanan	6,29	7,24	7,35	8,37
B	Pertambangan dan Penggalian	3,02	2,53	0,72	-5,08
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-3,61	-3,18	-2,07	0,13
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	15,73	7,37	0,36	-20,89
3	Pertambangan Bijih Logam	-3,98	7,63	-0,29	-3,28
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	6,04	4,61	8,77	9,97
C	Industri Pengolahan	5,62	4,37	4,61	4,25
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-2,40	-2,64	-2,38	-1,76
2	Industri Makanan dan Minuman	10,33	4,07	9,49	7,54
3	Industri Pengolahan Tembakau	8,82	-0,27	8,33	6,43
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	6,04	6,58	1,56	-4,79
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-5,43	5,23	5,62	3,98
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-0,80	6,19	6,12	-1,84
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-2,89	-0,53	3,58	-0,11
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	12,78	5,10	4,04	7,36
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	7,56	-1,86	1,16	5,05
10	Industri Barang Galian bukan Logam	7,91	3,34	2,41	6,18
11	Industri Logam Dasar	-1,57	11,63	6,01	6,48
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	11,64	9,22	2,94	7,83
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	-1,39	-5,00	8,67	7,49
14	Industri Alat Angkutan	4,26	14,95	4,01	2,33
15	Industri Furnitur	-2,15	3,64	3,60	5,00
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-0,38	-0,70	7,65	4,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,06	5,23	5,57	1,21
1	Ketenagalistrikan	11,74	5,96	5,64	2,68
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	2,05	1,39	5,24	-6,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,34	3,32	5,87	7,17
F	Konstruksi	6,56	6,11	6,97	6,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,40	4,81	5,16	2,47
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	6,58	7,30	5,01	0,47
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	5,13	4,22	5,20	2,95

Lanjutan

Kategori	Lapangan Usaha	2012	2013	2014*	2015**
H	Transportasi dan Pergudangan	7,11	6,97	7,36	6,68
	1 Angkutan Rel	-4,19	6,14	20,81	4,51
	2 Angkutan Darat	7,47	7,51	7,64	7,15
	3 Angkutan Laut	8,75	6,92	7,68	2,37
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	2,77	4,55	6,85	1,03
	5 Angkutan Udara	7,09	4,75	6,07	9,44
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	6,48	7,98	6,99	5,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,64	6,80	5,77	4,36
	1 Penyediaan Akomodasi	9,51	9,48	7,81	6,25
	2 Penyediaan Makan Minum	5,99	6,16	5,27	3,89
J	Informasi dan Komunikasi	12,28	10,39	10,10	10,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,54	8,76	4,68	8,53
	1 Jasa Perantara Keuangan	10,51	9,66	2,92	9,57
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	7,60	7,69	7,94	6,60
	3 Jasa Keuangan Lainnya	8,39	6,44	7,48	7,50
	4 Jasa Penunjang Keuangan	8,57	8,35	6,36	5,24
L	Real Estate	7,41	6,54	5,00	4,82
M,N	Jasa Perusahaan	7,44	7,91	9,81	7,69
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,13	2,56	2,38	4,75
P	Jasa Pendidikan	8,22	7,44	5,55	7,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,97	7,96	7,96	7,10
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,76	6,40	8,93	8,08
A	NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	5,85	5,20	5,02	4,10
B	PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	15,05	21,80	5,13	31,98
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	6,03	5,56	5,02	4,79

Catatan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara



4

Perkembangan Poros Ekonomi Maritim Indonesia

Profil Kemaritiman Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya berupa perairan. Luas wilayah perairan Indonesia yaitu 6,32 juta km² dengan panjang garis pantai 99.093 km (KKP, 2015). Garis pantai Indonesia berada di urutan kedua terpanjang di dunia setelah Kanada. Jumlah pulau di Indonesia sebanyak 13.466 pulau yang sudah memiliki nama dan koordinat. Selat Malaka dan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) secara umum merupakan jalur perdagangan strategis yang dilalui kapal-kapal perdagangan dunia dengan volume perdagangan mencapai 45 persen dari total nilai perdagangan seluruh dunia. Potensi laut Indonesia diprediksi meningkat di masa datang, mengingat prospek perkembangan perekonomian di wilayah Asia masih menjanjikan. Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang terbentang seluas 2,4 juta kilometer persegi dengan berbagai potensi kekayaan alam yang siap dieksploitasi di dalamnya (Suroso, 2015).

Indonesia memiliki aset potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari sisi masyarakat, sekitar 161 juta jiwa atau 60 persen penduduk tinggal di daerah pesisir. Sementara dari segi ekonomi kelautan, sektor ekonomi kelautan berkontribusi 20 persen terhadap pembentukan PDB. Pelayanan dan logistik yang dikirim melalui ALKI sebesar US\$ 1.500 triliun (UNCTAD, 2010). Rencana pembangunan diprioritaskan dengan pemanfaatan ekonomi kelautan dan kemaritiman sebagai modal untuk menjadi pusat geoekonomi dan geopolitik dunia. Ekonomi laut dan maritim sebagai aset andalan yaitu perikanan, mineral dan gas (*seabed*), transportasi (tol laut) dan industri maritim, potensi ekonomi baru (jasa lingkungan dan wisata laut, energi baru), pesisir dan pulau-pulau kecil. Tata kelola dan aspek pendukung meliputi pengaturan ruang laut, alur laut dan pengawasan keamanan (*sipil/coast guard*), iptek, budaya dan SDM, kualitas dan daya dukung laut. Pelindung kedaulatan NKRI meliputi pertahanan, keamanan, dan politik (Murniningtyas, 2015).

Berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* tahun 1982, Indonesia diakui dunia sebagai negara maritim. Indonesia mempunyai hak pengelolaan sumberdaya alam pada laut bebas serta dasar samudra. Keseluruhannya itu membuat Indonesia menjadi bangsa yang kaya dengan potensi laut, baik hayati maupun non-hayati. Sumberdaya pesisir dan lautan seperti mangrove, ikan, terumbu karang, sumber energi terbarukan ataupun minyak serta gas bumi, mineral langka, ditambah dengan daerah wisata bahari, sekaligus sarana transportasi dunia dan lintas pulau menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan kaya sumber daya. Dinilai dari share PDB Atas Dasar Harga Berlaku terhadap total PDB Nasional, lapangan usaha bidang kelautan masih sangat potensial untuk dikembangkan. Kontribusi pertambangan minyak dan gas bumi, dan subsektor perikanan terus mengalami peningkatan.

Visi Indonesia sebagai poros maritim dunia telah dikumandangkan. Presiden menjelaskan lima pilar utama mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Pertama, pembangunan kembali budaya maritim

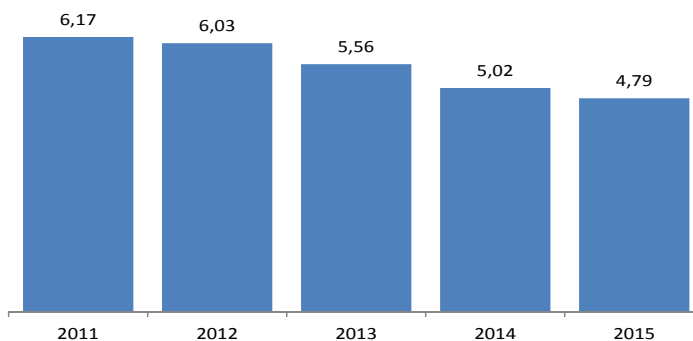
Indonesia. Kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Konektivitas laut penting untuk menghubungkan *remote area* dan perlu didukung dengan pembangunan wilayah. Konektivitas yang terbentuk dari pembangunan infrastruktur maritim akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat maritim. Dengan demikian, sektor perdagangan meningkat dan lapangan pekerjaan akan terus tumbuh (Murniningtyas, 2015). Keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Kelima, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, Kelompok Aspek Ekonomi Kelautan dan Kemaritiman yang menjadi aset andalan pengembangan dan pembangunan poros maritim. Kedua, Kelompok Aspek Tata Kelola yang akan menentukan bagaimana komponen pertama dapat dikelola dan dikembangkan arahnya untuk mewujudkan poros maritim dunia. Langkah nyata untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia dimulai dengan penegakan kedaulatan, pengembangan konektivitas laut, pengembangan regional, penguatan aspek-aspek yang menjadi *core* ekonomi, penguasaan teknologi dan penataan kelembagaan (Bappenas, 2016).

Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) Subsektor Perikanan

Perekonomian Indonesia melambat dalam empat tahun terakhir. Kondisi ini dipicu perlambatan ekonomi global, termasuk negara mitra dagang Indonesia; rendahnya harga komoditas di pasar internasional; dan ketidakpastian kondisi pasar keuangan global terkait ketidakpastian

Gambar 4.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Persen), Tahun 2011-2015^x



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

kenaikan suku bunga acuan *The Federal Reserve (Fed Fund Rate)*. Tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 4,79 persen. Angka ini merupakan pertumbuhan yang terendah dalam lima tahun terakhir. Penyebab utama perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yaitu menurunnya konsumsi rumah tangga akibat kenaikan harga pangan.

Jika ditinjau menurut lapangan usaha, PDB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 13,52 persen terhadap total PDB nasional tahun 2015. Angka ini meningkat 0,18 persen dibandingkan tahun 2014 sebesar 13,34 persen. Peningkatan peran sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap struktur ekonomi Indonesia terus diupayakan pemerintah sebagai langkah menuju kedaulatan pangan Indonesia. Jika dilihat menurut peranan subsektor, kontribusi subsektor perikanan mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir terhadap PDB nasional. Hal ini menggambarkan terdapat peningkatan nilai tambah atau pendapatan sektor kelautan dan perikanan secara rata-rata.

Tabel 4.1. Nilai PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDB Atas Dasar Harga Konstan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Tahun 2012 - 2015

Lapangan Usaha	2012 (miliar rupiah)	2013 (miliar rupiah)	2014 * (miliar rupiah)	2015 ** (miliar rupiah)
PDB Atas Dasar Harga Berlaku	8 615 704,5	9 546 134,0	10 565 817,3	11 540 789,8
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 152 262,1	1 275 048,4	1 409 655,7	1 560 399,3
Perikanan	184 254,0 (2,14)	210 670,8 (2,21)	245 488,0 (2,32)	292 135,6 (2,53)
PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010	7 727 083,4	8 156 497,8	8 566 271,2	8 976 931,5
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 039 440,7	1 083 141,8	1 129 052,7	1 174 456,8
Perikanan	164 264,3	176 149,3	189 089,7	204 919,8

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan kontribusi subsektor perikanan terhadap PDB Nasional

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

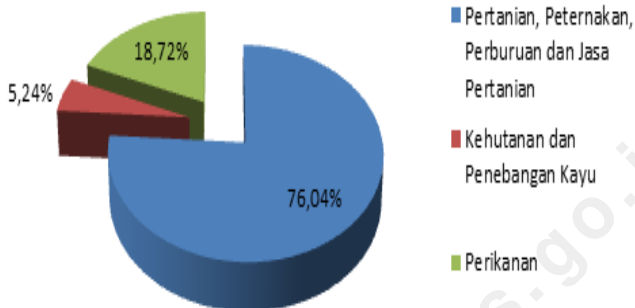
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Di tengah perlambatan ekonomi, pertumbuhan subsektor perikanan bagaikan angin segar. Jika diukur dari PDB atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan PDB subsektor perikanan meningkat selama periode 2012-2015. Pertumbuhan tahunan subsektor perikanan tercatat lebih tinggi dibandingkan subsektor lainnya seperti pertanian, peternakan, perburuan, jasa pertanian, kehutanan, dan penebangan kayu. Peningkatan pertumbuhan ini disebabkan peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Hal ini menunjukkan peningkatan daya beli (*purchasing power*) dari para pelaku subsektor kelautan dan perikanan dibandingkan sektor pertanian dan nasional.

Dalam empat tahun terakhir, PDB subsektor perikanan tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan PDB sektor pertanian dan PDB nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perikanan memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan PDB sektor pertanian dan PDB nasional (KKP, 2015). Tahun 2015, subsektor perikanan

berkontribusi sebesar 18,72 persen terhadap pembentukan PDB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini menunjukkan potensi subsektor perikanan dalam perekonomian nasional. Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat hendaknya bersinergi menjaga dan mengelola sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, sebagai andalan dalam perekonomian nasional.

Gambar 4.2
Distribusi PDB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Tahun 2015^x

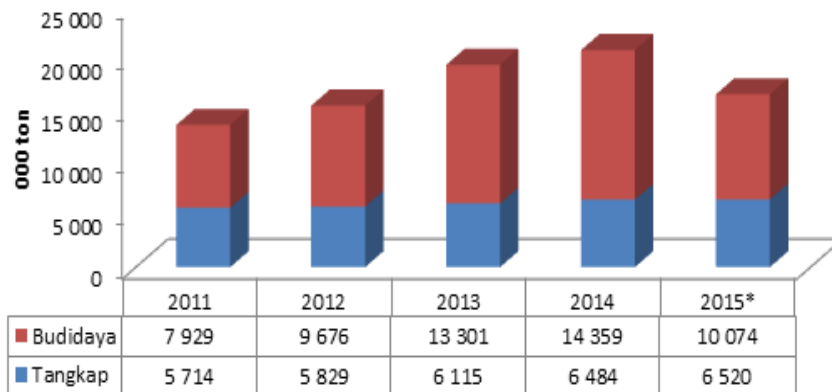


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Produksi Perikanan di Indonesia

Volume total produksi perikanan menunjukkan tren yang meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode 2011-2014 sebesar 15,41 persen. Subsektor perikanan di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Masing-masing menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan rata-rata 4,32 persen untuk perikanan tangkap dan 22,48 persen untuk perikanan budidaya selama periode 2011-2014.

Gambar 4.3. Volume Produksi Perikanan di Indonesia, Tahun 2011-2015^x



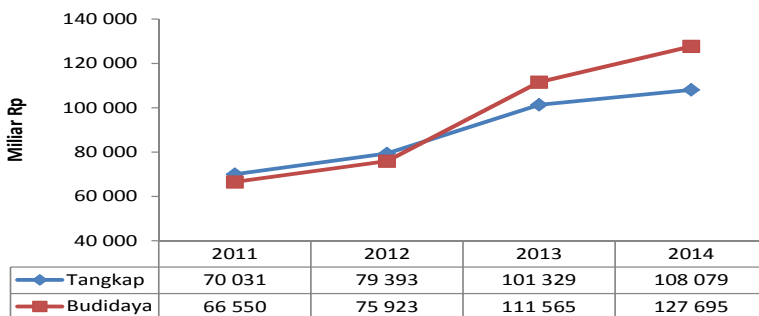
Sumber: Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015, KKP

Ditinjau dari kontribusi terhadap total produksi, persentase perikanan budidaya menyumbang lebih tinggi dibandingkan perikanan tangkap. Kontribusi produksi perikanan tangkap terhadap produksi perikanan nasional menurun selama periode 2011-2014, dimana tahun 2011 sebesar 41,88 persen dan tahun 2014 menjadi 31,11 persen. Di sisi lain, kontribusi perikanan budidaya terhadap produksi perikanan nasional meningkat selama periode 2011-2014. Tahun 2011, kontribusi produksi perikanan budidaya terhadap produksi nasional sebesar 58,12 persen dan terus meningkat hingga 68,89 persen tahun 2014. Hal ini membuktikan bahwa perikanan budidaya memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai penopang produksi perikanan di Indonesia. Peningkatan produksi perikanan budidaya didukung dengan berbagai kegiatan seperti industrialisasi perikanan budidaya, pengembangan sistem perbenihan, pengembangan sistem produksi, dan peningkatan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan (KKP, 2015).

Capaian produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2014 berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 19,50 juta ton, dengan rincian 6,05 juta ton untuk perikanan tangkap dan 13,45 juta ton untuk perikanan budidaya. Kondisi geografis Indonesia yang strategis di persilangan jalur perdagangan dunia dengan potensi laut yang besar sudah selayaknya menjadikan Indonesia sebagai pemasok hasil perikanan terbesar. Di samping itu, kenaikan produksi perikanan merupakan bentuk capaian pemerintah dalam memberantas *illegal fishing* sehingga pencurian ikan berkurang.

Tahun 2015, pemerintah menetapkan target produksi perikanan budidaya sebesar 17,90 juta ton. Berdasarkan angka sementara tahun 2015, volume produksi perikanan di Indonesia tercatat sebesar 16,59 juta ton, terdiri dari perikanan tangkap sebesar 10,07 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 6,52 juta ton (KKP, 2016). Untuk perikanan tangkap, angka ini merupakan capaian sementara, sedangkan data perikanan budidaya adalah angka sementara hingga triwulan III tahun 2015. Oleh sebab itu, target tahun 2015 diharapkan dapat tercapai hingga akhir tahun 2015 melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam mendukung pembangunan sektor maritim nasional.

Gambar 4.4
Nilai Produksi Perikanan di Indonesia, Tahun 2011-2014



Sumber: Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015, KKP

Tren nilai produksi perikanan nasional juga meningkat selama tahun 2011-2014, dengan rata-rata kenaikan 20,51 persen. Nilai produksi perikanan tahun 2014 meningkat 10,75 persen dibandingkan tahun 2013, jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 sebesar 37,07 persen. Jika ditinjau menurut jenisnya, rata-rata pertumbuhan nilai produksi perikanan budidaya selama periode 2011-2014 sebesar 25,16 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan nilai produksi perikanan tangkap sebesar 15,89 persen.

Hingga tahun 2012, kontribusi nilai produksi perikanan tangkap lebih tinggi dibandingkan kontribusi nilai produksi perikanan budidaya terhadap nilai produksi nasional. Namun sejak tahun 2013, kontribusi nilai produksi perikanan budidaya berhasil mengungguli nilai produksi perikanan tangkap. Pergeseran ini menunjukkan arah positif dimana perikanan budidaya nilai jualnya meningkat, selain itu banyak diminati oleh masyarakat, dan bagi pengusaha merupakan lapangan usaha yang menjanjikan.

Data *Food and Agriculture Organization* tahun 2012 menyebutkan, Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar produksi perikanan di bawah China dan India. Perairan Indonesia menyimpan 70 persen potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan wilayah Indonesia. Hingga saat ini, baru 10 persen yang telah dieksplor dan dimanfaatkan. Beragamnya potensi maritim Indonesia, antara lain industri bioteknologi kelautan, perairan dalam (*deep ocean water*), wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industri maritim, sebenarnya dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia (Perum Perikanan Indonesia, 2015). Namun yang perlu menjadi perhatian bersama, besarnya potensi perikanan di Indonesia harus dikembangkan secara seimbang untuk mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan.

Ikan merupakan komoditi perdagangan internasional yang terus meningkat seiring penambahan jumlah penduduk dunia. Laju pertumbuhan penduduk yang meningkat menyebabkan jumlah konsumsi ikan bertambah. Hal ini disebabkan ikan merupakan sumber makanan yang kaya protein. Semakin tingginya kesadaran masyarakat dunia terhadap pola hidup sehat berdampak pada pemilihan bahan pangan yang sehat pula, seperti konsumsi ikan segar dan produk olahan ikan. Disamping sebagai bahan pangan, ikan juga digunakan sebagai bahan baku pakan ternak dan bahan baku industri pengolahan untuk diekspor. Dengan potensi pasar yang besar di tingkat internasional, subsektor perikanan diharapkan mampu menyokong perekonomian Indonesia.

Dari waktu ke waktu, kinerja ekspor perikanan Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan impor perikanan. Volume ekspor produk perikanan Indonesia meningkat dalam empat tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 3,24 persen selama periode 2011-2014. Sejalan dengan volume ekspor, nilai ekspor produk perikanan menunjukkan performa yang menggembirakan. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor produk perikanan selama tahun 2011-2014 mencapai 9,65 persen. Hingga akhir 2014, komoditas unggulan

Tabel 4.2. Volume dan Nilai Produk Perikanan Indonesia, Tahun 2011-2015*

Uraian	Tahun					Pertumbuhan (%)	
	2011	2012	2013	2014	2015*	2011 - 2014	2013 - 2014
Volume Ekspor (Ton)	1 159 349	1 229 114	1 258 179	1 274 982	872 379	3,24	1,34
Volume Impor (Ton)	431 871	337 360	353 404	307 243	256 716	-10,06	-13,06
Nilai Ekspor (US\$ 1 000)	3 521 091	3 853 658	4 181 857	4 641 913	3 273 085	9,65	11,00
Nilai Impor (US\$ 1 000)	488 351	412 362	457 247	418 438	331 214	-4,39	-8,49
Neraca Perdagangan (US\$ 1 000)	3 032 740	3 441 296	3 724 610	4 223 475	2 941 871	11,70	13,39

Catatan : * Angka sementara hingga Oktober 2015

Sumber : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015, KKP

yang memberikan kontribusi nilai tertinggi yaitu udang, sebesar 46,12 persen terhadap total nilai ekspor. Sampai saat ini, pasar utama ekspor hasil perikanan dari Indonesia yaitu Amerika Serikat (KKP, 2015). Hingga Oktober 2015, volume ekspor produk perikanan Indonesia tercatat sebesar 872,38 ribu ton dengan nilai US\$ 3,27 miliar. Kepala BPS, Suryamin (2015) menyebutkan bahwa peningkatan ekspor merupakan hasil upaya pemberantasan aksi pencurian ikan/*illegal fishing* sehingga mampu mendongkrak produksi perikanan dalam negeri.

Dalam periode yang sama, rata-rata pertumbuhan volume impor produk perikanan Indonesia bernilai negatif. Penurunan volume impor produk perikanan tahun 2012 sebesar 21,88 persen dibandingkan tahun 2011 berkontribusi besar terhadap penghitungan rata-rata pertumbuhan volume impor perikanan sehingga bernilai negatif selama periode 2010-2014. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan nilai impor produk perikanan bernilai negatif sebesar -4,39 persen selama periode 2011-2014, seiring pertumbuhan negatif dari volume impor. Penurunan volume dan nilai impor produk perikanan yang terjadi pada tahun 2012 dan 2014 menyebabkan rata-rata pertumbuhan impor perikanan tahun 2011-2014 bernilai negatif. Hingga Oktober 2015, volume impor produk perikanan tercatat 256,72 ribu ton dengan nilai US\$ 0,33 miliar. Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan impor menurun disebabkan kebutuhan dalam negeri sudah dapat terpenuhi.

Neraca perdagangan produk perikanan Indonesia tercatat mengalami surplus dalam beberapa tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan surplus neraca perdagangan produk perikanan selama periode 2011-2014 mencapai 11,70 persen. Neraca perdagangan hingga Oktober 2015 tercatat surplus sebesar US\$ 2,94 miliar. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan upaya guna mendorong peningkatan hasil ekspor perikanan, antara lain: percepatan penyelesaian hambatan ekspor, peningkatan sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dan meningkatkan promosi dan memperluas akses pasar ke pasar-pasar non-tradisional (di luar AS, UE, dan Jepang). Tahun 2014, KKP berpartisipasi aktif melalui kerjasama dengan organisasi perdagangan internasional dan pemerintah negara tujuan ekspor.

Potensi Perikanan di Indonesia

Tabel 4.3. Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dalam Ribu Ton/Tahun

Wilayah	WPP	Potensi Sumberdaya Ikan
Selat Malaka	WPP 571	276,0
Samudra Hindia	WPP 572	565,2
	WPP 573	491,7
	WPP 711	1 059,0
Laut Cina Selatan	WPP 711	1 059,0
Laut Jawa	WPP712	836,6
Selat Makasar	WPP 713	929,7
Laut Banda	WPP 714	278,0
Teluk Tomini	WPP 715	595,6
Laut Sulawesi	WPP 716	333,6
Samudra Pasifik	WPP 717	299,1
Laut Arafura-Laut Timor	WPP 718	855,5
Jumlah		6 520,1

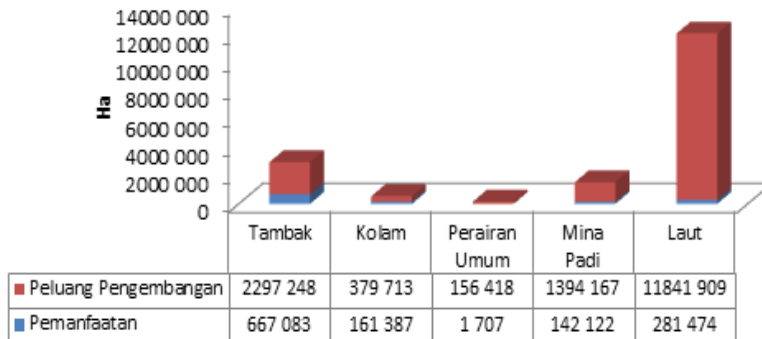
Sumber : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015, KKP

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan meliputi perikanan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Indonesia memiliki 11 WPP dengan penomoran dan pembagian wilayah pengelolaan berdasarkan standar internasional FAO (Nugraha, 2012). Tabel 4.3 menggambarkan estimasi potensi sumberdaya ikan di 11 WPP RI sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tahun 2011 dengan total potensi 6.520,1 ribu ton, dan potensi terbesar berada di WPP Laut Cina Selatan sebesar 1.059,0 ribu ton.

Untuk meningkatkan hasil perikanan tangkap, pemerintah terus berupaya melakukan terobosan seperti memberdayakan para nelayan dengan berbagai kemudahan dan bantuan. Diharapkan, kemudahan ini dapat memacu peningkatan produksi sektor perikanan, bukan hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas. Potensi perikanan tangkap di Indonesia masih sangat besar mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang dikelilingi perairan domestik dan internasional. Namun hal penting yang harus disadari yaitu jumlah tangkapan yang diperbolehkan tidak boleh melebihi 80 persen dari produksi tangkapan lestari/*Maximum Sustainable Years* (MSY) sebesar 6,5 juta ton per tahun. Oleh sebab itu, potensi perikanan di Indonesia perlu dikelola secara bijak dengan memperhatikan faktor lingkungan dan dampak yang ditimbulkan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Data Potensi Lahan Budidaya diperoleh dari buku saku Statistik Perikanan Budidaya Tahun 2009, sementara data Peluang Pengembangan berdasarkan buku Statistik Perikanan Budidaya Indonesia Tahun 2014. Potensi lahan budidaya

Gambar 4.5
Potensi Lahan Budidaya di Indonesia



Sumber : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015, KKP

merupakan penjumlahan dari pemanfaatan dan peluang pengembangan budidaya. Budidaya ikan mencakup budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya karamba, budidaya jaring apung, dan budidaya mina padi. Pemanfaatan lahan budidaya masih sangat minim dan perlu diusahakan lebih keras mengingat peluang pengembangan lahan budidaya masih sangat tinggi. Di samping itu, perikanan budidaya juga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain diversifikasi komoditas, pengembangan teknologi tepat guna untuk mendukung efisiensi dan pembangunan berkelanjutan, pengembangan sumberdaya manusia dengan peningkatan jiwa kemandirian dalam usaha perikanan budidaya.

Perikanan budidaya berkembang seiring peningkatan pelaku usaha yang terjun di bidang ini. Selain itu, menurut Kepala BPS RI, perbaikan sarana dan prasarana seperti revitalisasi tambak udang di sepanjang pantai Jawa Barat dan Banten, serta pemanfaatan lahan budidaya dengan metode super intensif di sejumlah daerah di Sulawesi juga berperan dalam peningkatan produksi perikanan budidaya. Pengembangan lahan budidaya di Indonesia sebaiknya diarahkan untuk lahan yang masih sangat luas untuk dikembangkan, seperti tambak dan mina padi.

Sumberdaya Kelautan

Jumlah nelayan yang menangkap ikan di laut jauh lebih besar dibandingkan nelayan yang menangkap ikan di perairan umum. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak nelayan penuh atau nelayan yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan penangkapan ikan di laut. Selama periode 2011-2013, jumlah nelayan perikanan tangkap menunjukkan tren yang menurun. Bahkan tahun 2013, jumlah nelayan berkurang 3,96 persen dibandingkan tahun 2012. Nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut tercatat sebanyak 2,21 juta nelayan pada tahun 2014, sedangkan yang menggantungkan hidupnya di perairan umum hanya sebanyak 0,53

Tabel 4.4. Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap, Tahun 2011–2014

Sektor Perikanan Tangkap	2011	2012	2013	2014
Laut	2 265 213	2 278 388	2 164 969	2 210 195
Perairan Umum	489 965	470 520	475 126	529 688
Total	2 755 178	2 748 908	2 640 095	2 739 883

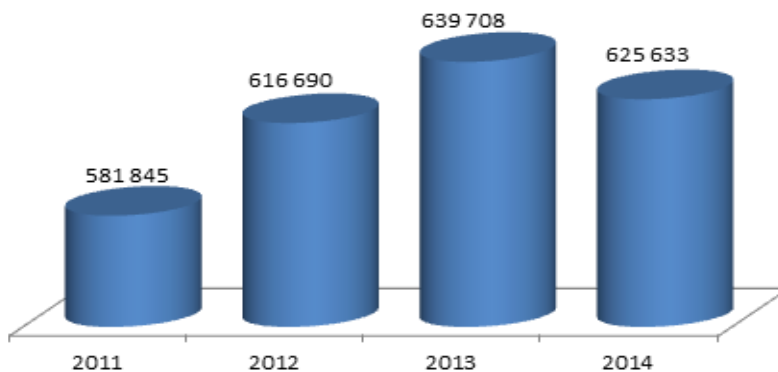
Sumber: Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015, KKP

juta nelayan. Hal ini membuktikan bahwa laut Indonesia yang begitu luas sangat menjanjikan dan kekayaan laut di dalamnya mampu menghidupi keberlangsungan hidup para nelayan dari tahun ke tahun.

Jumlah perahu/kapal perikanan laut meningkat selama periode 2011-2013 meskipun pertumbuhannya perlahan menurun. Pertumbuhan jumlah perahu/kapal pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing sebesar 5,99 persen dan 3,73 persen. Sementara itu, pada tahun 2014, jumlah perahu/kapal perikanan laut berkurang 14.705 atau menurun 2,20 persen dibandingkan tahun 2013. Ditinjau dari jenisnya, perahu/kapal perikanan laut dibedakan menjadi tiga, yaitu perahu tanpa motor, perahu motor tempel, dan kapal motor.

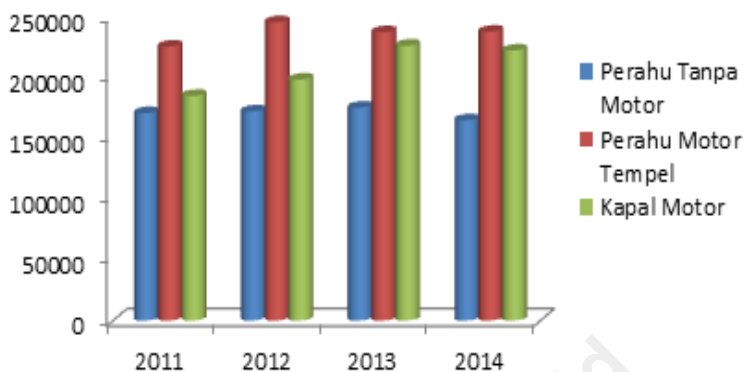
Gambar 4.7 menunjukkan jumlah perahu motor tempel dan kapal motor melebihi jumlah perahu tanpa motor selama periode 2011-2014. Kondisi ini membuktikan telah terjadi modernisasi kapal penangkap ikan di perairan Indonesia. Perahu motor tempel dan kapal motor menggunakan tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan perahu tanpa motor karena dalam pengoperasiannya sudah menggunakan alat bantu berupa motor. Hal ini tentunya mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengoperasikan perahu atau kapal motor. Jika dikaitkan dengan jumlah nelayan yang semakin menurun,

Gambar 4.6
Jumlah Perahu/Kapal Perikanan Laut, Tahun 2011-2014



Sumber: Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015, KKP

Gambar 4.7
Jumlah Perahu/Kapal Perikanan Laut Menurut Jenis Perahu/Kapal,
Tahun 2011-2014



Sumber: Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015, KKP

dapat dipahami bahwa modernisasi teknologi penangkap ikan di Indonesia telah menggeser kebutuhan terhadap jumlah nelayan dengan teknologi padat modal. Pada dasarnya, karakteristik usaha perikanan tangkap yang efisien dan menguntungkan adalah yang bersifat padat modal (Bappenas, 2014).

Penguatan Poros Maritim

Pilar kelima untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu membangun kekuatan pertahanan maritim. Dua strategi pendukung pilar kelima yaitu membuat peraturan di bidang kelautan dan perikanan; dan

Tabel 4.5. Jumlah Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan, Tahun 2011–2015

Jenis Peraturan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Undang-Undang	-	-	-	2	-
Peraturan Pemerintah	-	-	-	1	1
Peraturan Presiden	-	2	-	3	1
Keputusan Presiden	-	-	-	5	-
Instruksi Presiden	-	-	-	1	-
Peraturan Menteri	52	33	25	59	32
Keputusan Menteri	202	225	279	228	130
Instruksi Menteri	-	-	-	-	-
Peraturan Bersama	-	-	-	-	-
Keputusan Bersama	-	-	-	-	-
Keputusan a.n. Menteri lautan dan Perikanan	132	177	263	145	147
Peraturan Sekjen (PER-SJ/)	-	-	-	-	1
Keputusan Sekjen (KEP-SJ/)	-	-	21	14	23

Sumber : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015, KKP

menambah armada kapal pengawas. Pasca diresmikannya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Illegal (*Illegal Fishing*), penegakan di wilayah kedaulatan kemaritiman NKRI semakin kokoh. Melalui Perpres ini, Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing* memiliki kekuatan hukum untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Sebelumnya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/Permen-KP/2014 melarang praktik *transshipment* atau bongkar muat barang di tengah laut. Aturan ini dibentuk untuk tetap menjaga aktivitas di pelabuhan-pelabuhan wilayah pesisir, di samping menghindari aktivitas pelanggaran seperti penyelundupan BBM dan narkoba. Selama ini *transshipment* telah membuat pelabuhan menjadi sepi karena kapal-kapal melakukan bongkar muat di tengah laut dan langsung diekspor (Jefriando, 2016). Berbagai peraturan di bidang kelautan dan perikanan dibuat untuk menjaga kedaulatan maritim wilayah NKRI.

Kebutuhan kapal pengawas sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Perairan di Indonesia dan sekitarnya merupakan salah satu wilayah produksi perikanan terbesar di dunia. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengamanan wilayah laut dan pertahanan ekosistem laut dari berbagai hambatan, seperti kapal-kapal asing pencuri ikan. Tahun 2014 Indonesia memiliki kapal pengawas 27 kapal, setahun kemudian pemerintah menambah 4 kapal baru menjadi 31 kapal. Jika dilihat dari luas laut yang dimiliki Indonesia masih kurang dengan jumlah kapal pengawas yang ada sekarang. Namun dari kapal yang dimiliki sekarang paling tidak dapat mengurangi perahu/kapal ilegal yang masuk ke perairan Indonesia yang akan mencuri ikan.

Tabel 4.6. Jumlah Kapal Pengawas yang Dimiliki Indonesia, Tahun 2012–2015*

Nama Kapal	2012	2013	2014	2015*
KP Baracuda	2	2	2	2
KP Hiu	10	10	11	15
KP Hiu Macan	6	7	6	6
KP Todak	2	2	2	2
KP Takalamongan	1	1	1	1
KP Padaido	1	1	1	1
KP Hiu Macan Tutul	1	1	2	2
KP Akar Bahar	1	1	1	1
KP Paus	1	1	1	1
Jumlah	25	26	27	31

Sumber : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015, KKP

Gambaran dan Strategi Pengelolaan Perikanan

Kegiatan perikanan tangkap terkendala dengan semakin terbatasnya sumber daya ikan di laut dan perairan umum akibat penangkapan ikan setelah sekian lama. Bahkan di beberapa wilayah di Indonesia, kegiatan penangkapan ikan sudah masuk gejala tangkap lebih (*overfishing*). Disamping itu, pencurian

ikan oleh kapal-kapal asing turut berdampak terhadap subsektor perikanan di Indonesia. Keterbatasan teknologi dan armada perikanan menyebabkan Indonesia belum mampu mengoptimalkan kegiatan penangkapan ikan di laut bebas.

Gambaran perikanan tangkap di Indonesia: 1) masih maraknya penangkapan ikan secara *illegal*; 2) *overfishing* di beberapa perairan pantai Indonesia; 3) penggunaan alat penangkapan ikan yang bersifat destruktif; 4) sistem pengawasan yang masih lemah dan belum efektif. Sementara itu, gambaran perikanan budidaya di Indonesia: 1) kebutuhan pakan ikan masih bergantung pada impor; 2) sebagian besar usaha budidaya perikanan belum menerapkan *good aquaculture practices*; 3) konversi lahan yang tidak sesuai peruntukannya; 4) ketersediaan induk ikan dan udang unggulan masih sangat terbatas (Bappenas, 2014).

Indonesia sebagai poros maritim dunia tentunya berupaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, termasuk di bidang perikanan. Pembangunan berkelanjutan oleh PBB didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Permasalahan umum yang menjadi kendala pembangunan perikanan berkelanjutan di Indonesia yaitu pengelolaan perikanan, penegakan hukum, dan pelaku usaha perikanan. Pemanfaatan sumberdaya ikan belum merata, *overfishing* di perairan laut kawasan barat dan tengah, sementara kawasan timur *underfishing*. Perikanan budidaya masih menggantungkan kebutuhan benih dan pakan dari suplai impor. Hal ini menunjukkan pengelolaan perikanan masih belum efisien. Penegakan hukum di bidang perikanan yang masih lemah menyebabkan negara mengalami kerugian, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan.

Selain itu, *illegal fishing* telah menguras stok sumberdaya ikan nasional, sekaligus mencemari lingkungan perairan akibat penggunaan alat penangkap ikan yang destruktif. Pelaku usaha perikanan belum memiliki cukup pengetahuan dan informasi terkait pembangunan perikanan berkelanjutan, misalnya masih menggunakan alat penangkap ikan atau bahan-bahan yang berbahaya bagi kelestarian sumberdaya ikan, lingkungan, dan manusia. Bappenas (2014) menyebutkan strategi untuk mewujudkan pengelolaan perikanan berkelanjutan meliputi: 1) meningkatkan daya saing produk industri hasil perikanan; 2) menyediakan kebutuhan benih dan pakan yang cukup, 3) menciptakan sistem pemasaran dan distribusi produk perikanan yang efisien; 4) meningkatkan kualitas dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya; 5) pemberantasan *illegal fishing*; 6) menerapkan sistem budidaya sesuai daya dukung perairan yang ada; 7) membangun sistem pengelolaan pemanfaatan sumberdaya ikan yang efektif, efisien, dan transparan; 8) meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas sumberdaya ikan dan penegakan hukum; 9) penjaminan tata ruang untuk usaha budidaya perikanan.



5

Inflasi dan Daya Beli Masyarakat

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang dapat menggambarkan stabilitas perekonomian suatu negara. Umumnya, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus-menerus. Inflasi sangat berkaitan dengan daya beli masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, daya beli masyarakatpun menjadi rendah karena secara riil tingkat pendapatan juga menurun. Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa inflasi dapat memberikan dampak bagi dinamika pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, inflasi ini menjadi suatu perhatian penting bagi pemangku kebijakan.

Dalam teori Keynes, inflasi terjadi karena pola konsumsi masyarakat yang berlebihan terhadap banyak barang dan jasa. Permintaan yang meningkat akan menaikkan harga barang dan jasa sehingga terjadilah inflasi. Sebaliknya, dalam *cost-push theory*, inflasi terjadi karena kenaikan biaya produksi sehingga terjadi penurunan dalam penawaran total. Hal tersebut menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga barang/jasa. Tingginya harga barang akan menurunkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi barang-jasa tersebut.

Pengukuran tingkat inflasi ini berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK menggambarkan rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK merefleksikan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Penyusunan IHK menggunakan data harga konsumen yang mencakup barang dan jasa yang dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose - COICOP*), yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; serta transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Sebelum Januari 2014, IHK menggunakan tahun 2007 sebagai tahun dasar dan hanya mencakup 66 kota. Mulai Januari 2014, IHK disajikan dengan tahun dasar 2012 dan mencakup 82 kota.

Inflasi Inti dan Inflasi Non Inti

Analisis inflasi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pengelompokan. Selain pengelompokan berdasarkan COICOP, inflasi dapat dikelompokkan berdasarkan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi dapat memberikan informasi pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental terhadap inflasi. Pengelompokan disagregasi inflasi terbagi menjadi dua, yaitu inflasi inti dan inflasi non inti.

Inflasi inti adalah komponen inflasi yang pergerakannya cenderung tetap (persisten) dan hanya dipengaruhi oleh faktor yang bersifat dasar (fundamental). Faktor fundamental tersebut adalah interaksi permintaan dan penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional,

inflasi mitra dagang), dan ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen. Di sisi lain, inflasi non inti adalah indikator inflasi yang pergerakan atau volatilitasnya cenderung tinggi karena tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari inflasi komponen bergejolak (*volatile food*) dan inflasi komponen harga yang diatur pemerintah (*administered prices*). Inflasi komponen bergejolak didominasi oleh kelompok bahan makanan, sedangkan *administered prices* dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti harga BBM bersubsidi.

Tabel 5.1. Inflasi dan Sumbangan Inflasi Inti dan Non Inti, Tahun 2013–2015

Tahun	Inflasi Inti		Bergejolak		Harga Diatur Pemerintah	
	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan
2013	4,98	3,17	11,83	2,33	16,65	2,88
2014	4,93	3,09	10,88	1,88	17,57	3,39
2015	3,95	2,41	4,84	0,86	0,39	0,08

Sumber : Badan Pusat Statistik

Angka inflasi inti dalam tiga tahun terakhir (2013-2015) menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2013, inflasi inti di Indonesia adalah 4,98 persen, lalu menurun menjadi 4,93 persen pada tahun 2014, dan terus menurun hingga 3,95 persen pada tahun 2015. Angka yang menurun dan cenderung stabil menunjukkan bahwa inflasi inti cukup terkendali. Turunnya inflasi inti ini merupakan salah satu indikator bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan. Dengan turunnya suku bunga, para investor akan tertarik berinvestasi di Indonesia karena tingkat bunga pinjaman yang juga menurun. Selain investasi, penurunan suku bunga juga dapat berdampak positif bagi pengusaha dalam mengembangkan bisnisnya. Hal tersebut didukung dari mudah dan murahannya mendapatkan dana untuk melakukan ekspansi bisnis karena penyesuaian suku bunga pinjaman yang dilakukan pihak perbankan. Meningkatnya kegiatan investasi dan perkembangan dunia bisnis tentunya akan sangat berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Inflasi komponen bergejolak juga terus mengalami penurunan. Bahkan, dari tahun 2014 ke tahun 2015, inflasi komponen bergejolak menurun cukup signifikan, yaitu dari 10,88 persen menjadi 4,84 persen. Angka inflasi yang rendah di tahun 2015 menandakan bahwa peningkatan harga komponen bergejolak seperti kelompok bahan makanan lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rendahnya inflasi komponen bergejolak ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan program pengendalian inflasi yang dilakukan dengan koordinasi yang baik antara Bank Indonesia, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Pemerintah telah mengupayakan menjaga kecukupan pasokan pangan dengan mendorong peningkatan produksi dan memperbaiki distribusi, serta meminimalkan distorsi harga bahan pangan (Departemen Komunikasi, 2015). Pemerintah sangat fokus dalam mengendalikan kenaikan

harga pangan, karena konsumsi masyarakat adalah kontributor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini merupakan salah satu upaya meningkatkan daya beli masyarakat.

Selanjutnya, inflasi komponen harga diatur pemerintah di tahun 2015 juga menurun sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, inflasi komponen harga diatur pemerintah mencapai 16,65 persen dan meningkat menjadi 17,57 persen di tahun 2014, kemudian menurun sangat tajam menjadi 0,39 persen di tahun 2015. Capaian inflasi yang sangat rendah ini dikarenakan harga minyak dunia yang anjlok sehingga pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Penekanan harga bahan bakar ini juga dilakukan pemerintah untuk kebutuhan rumah tangga dan intervensi tarif sektor transportasi dan tenaga listrik. Penurunan biaya distribusi ini juga merupakan salah satu faktor penurunan harga pangan.

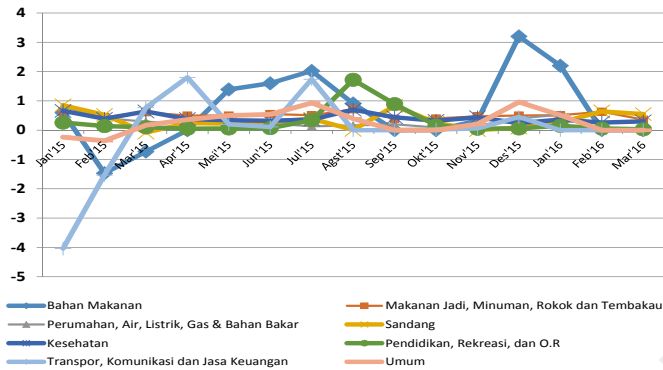
Selain itu, di tahun 2015, sumbangan inflasi komponen harga diatur pemerintah paling rendah dibandingkan kelompok disagregasi inflasi lainnya. Dari inflasi umum yang sebesar 3,35 persen, inflasi komponen harga diatur pemerintah menyumbang 0,08 persen. Padahal sumbangan inflasi komponen harga diatur pemerintah di tahun 2014 menyumbang inflasi terbesar yaitu 3,39 persen. Selain itu, rendahnya inflasi ini juga didukung langkah pemerintah dalam menurunkan harga solar dan memberikan keringanan tarif listrik industri golongan tertentu melalui paket kebijakan ekonomi III.

Pada tahun 2015 inflasi inti menjadi penyumbang terbesar bagi inflasi umum, yaitu sebesar 2,41 persen. Di tahun 2013, inflasi inti juga menjadi penyumbang terbesar, yaitu 3,17 persen. Hal tersebut dikarenakan perkembangan inflasi inti yang menurun tidak begitu signifikan. Meskipun demikian, para pemangku kebijakan telah melakukan berbagai upaya dalam mengendalikan inflasi inti ini dengan mengelola permintaan domestik, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mengarahkan ekspektasi inflasi.

Perkembangan Inflasi Nasional Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Perkembangan laju inflasi adalah indikator penting untuk melihat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Perkembangan ini dapat terlihat dari kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Pengendalian inflasi ini telah dilakukan dalam kebijakan fiskal, moneter dan sektoral oleh para pemangku kebijakan. Para pemangku kebijakan tersebut juga telah bekerja sama dan berkoordinasi melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi demi terwujudnya pencapaian sasaran inflasi. Koordinasi tersebut telah diwujudkan dalam pembentukan Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat dan diperluas hingga ke tingkat daerah.

Gambar 5.1
Laju Inflasi Indonesia, Tahun 2015–2016



Sumber: Indikator Ekonomi

Secara garis besar, selama di bulan Januari 2015 hingga di bulan Maret 2015, terdapat beberapa kelompok barang kebutuhan yang mengalami deflasi, diantaranya bahan makanan, sandang, serta transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan harga selama bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2015 diantara ketiga kelompok barang tersebut. Penurunan harga bahan makanan ini dipengaruhi melimpahnya pasokan beberapa komoditas. Selain pasokan yang melimpah, turunnya harga pangan juga disebabkan menurunnya nilai distribusi yang didukung dari turunnya harga minyak dunia dan kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga BBM (Satyagraha, 2015). Alasan serupa juga berdampak pada turunnya harga sandang serta tarif transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Selanjutnya, selama di bulan April 2015 hingga Maret 2016 semua kelompok barang kebutuhan umumnya mengalami inflasi.

Kelompok bahan makanan adalah kelompok barang kebutuhan dengan laju inflasi yang sangat bergejolak selama Januari 2015 hingga Maret 2016. Di bulan Februari 2015, kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar 1,47 persen dan terus berkejolak hingga di bulan Desember 2015, kelompok barang kebutuhan ini mengalami inflasi hingga 3,20 persen. Gejolak harga yang terjadi pada bahan makanan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya keadaan alam. Keadaan alam, seperti cuaca atau musim dapat menghambat pasokan dan distribusi sejumlah bahan makanan, contohnya El Nino dapat memberi dampak pada produksi di sektor pertanian, seperti beras. Berbeda dengan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan, walaupun di bulan Januari 2015 mengalami deflasi hingga 4,04 persen, di bulan-bulan berikutnya tingkat inflasi kelompok ini sudah terkendali.

Tabel 5.2. Laju Inflasi Indonesia Gabungan 82 Kota Menurut Kelompok Barang Kebutuhan (2012=100) (persen), Tahun 2013–2016

Tahun/Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan O.R	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	Umum
2013	11,35	7,45	6,22	0,52	3,70	3,91	15,36	8,38
2014	10,57	8,11	7,36	3,08	5,71	4,44	12,14	8,36
2015	4,93	6,42	3,34	3,43	5,32	3,97	-1,53	3,35
Januari	0,60	0,65	0,80	0,85	0,66	0,26	-4,04	-0,24
Februari	-1,47	0,45	0,41	0,52	0,39	0,14	-1,53	-0,36
Maret	-0,73	0,61	0,29	-0,08	0,64	0,1	0,77	0,17
April	-0,79	0,50	0,22	0,24	0,38	0,05	1,80	0,36
Mei	1,39	0,50	0,20	0,23	0,34	0,06	0,20	0,50
Juni	1,60	0,55	0,23	0,28	0,32	0,07	0,11	0,54
Juli	2,02	0,51	0,13	0,39	0,36	0,34	1,74	0,93
Agustus	0,91	0,71	0,16	0,01	0,70	1,72	-0,58	0,39
September	-1,07	0,39	0,20	0,83	0,44	0,89	-0,40	-0,05
Oktober	-1,06	0,40	0,09	0,25	0,32	0,16	0,02	-0,08
November	0,33	0,47	0,15	-0,23	0,44	0,05	0,06	0,21
Desember	3,20	0,50	0,40	0,09	0,24	0,06	0,45	0,96
2016	4,93	6,42	3,34	3,43	5,32	3,97	-1,53	3,35
Januari	2,20	0,51	0,53	0,26	0,36	0,15	-1,11	0,51
Februari	-0,58	0,63	-0,45	0,64	0,26	0,06	-0,15	-0,09
Maret	0,69	0,36	-0,07	0,55	0,30	0,03	-0,22	0,19

Sumber : Indikator Ekonomi

Inflasi sepanjang tahun 2015 adalah 3,35 persen dan lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 8,36 persen. Inflasi tahunan 2015 ini merupakan inflasi terendah dalam lima tahun terakhir sejak 2010. Angka inflasi 2015 ini juga telah menunjukkan tercapainya target pemerintah. Tercapainya target pemerintah ini berkat adanya komitmen dan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam pengendalian inflasi. Salah satu upaya mengendalikan inflasi yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat pada sasaran inflasi yang ditetapkan. Berdasarkan PMK No.66/PMK.011/2012, pemerintah telah menetapkan target inflasi di tahun 2015 sebesar 4 persen dengan deviasi ± 1 persen. Dengan kata lain, inflasi aktual yang sebesar 3,35 persen ini masuk ke dalam rentang batas bawah target pemerintah.

Sasaran inflasi di Indonesia untuk tahun 2016 masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 4 persen dengan deviasi sebesar 1 persen, sesuai dengan penetapan pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93.PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018. Untuk mencapai sasaran inflasi 2016 tersebut, pemerintah dan BI telah menyepakati enam langkah strategis. Keenam langkah strategis tersebut antara lain:

1. Mengimplementasikan arah (*roadmap*) pengendalian inflasi sebagai acuan program Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID),

2. Mengaktifkan sekretariat pengendalian inflasi yang berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk mempermudah koordinasi pusat dan daerah yang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat,
3. Melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan penegak hukum untuk mengatasi permasalahan struktur pasar komoditas pangan,
4. Menyelenggarakan rapat koordinasi nasional VII TPID tahun 2016 pada Bulan Agustus 2016, setelah penetapan kepala daerah baru, untuk memperoleh komitmen dari kepala daerah dalam upaya stabilisasi harga,
5. Melakukan upaya yang lebih dalam pengendalian inflasi komoditas pangan, sebagai antisipasi tantangan inflasi harga yang diatur pemerintah (*administered prices*) tahun 2016, dan
6. Memperkuat bauran kebijakan BI untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi, khususnya pencapaian target inflasi 2016 (Kementerian Keuangan, 2015).

Selain inflasi tahun ke tahun (*year on year*), inflasi juga dapat dilihat setiap bulan. Inflasi yang terjadi setiap bulan mulai dari bulan Januari 2015 hingga Maret 2016, selalu bernilai dibawah satu persen. Bahkan di bulan Januari, Februari, September, Oktober tahun 2015 dan Februari 2016, perekonomian di Indonesia mengalami deflasi. Dari bulan-bulan tersebut, deflasi terbesar terjadi di bulan Februari 2015, yaitu 0,36 persen. Deflasi secara umum yang terjadi di bulan Februari ini didukung deflasi oleh dua kelompok barang kebutuhan, yaitu bahan makan dan transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Deflasi di bulan tersebut tidak lepas dari turunnya harga barang kebutuhan dampak dari menurunnya harga BBM.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, penyumbang inflasi terbesar di tahun 2014 adalah transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (2,35 persen) kemudian terbesar kedua adalah kelompok bahan makanan dengan sumbangan sebesar 2,06 persen. Namun di tahun 2015, penyumbang inflasi terbesar bergeser ke kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau

Tabel 5.3. Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Nasional (persen), Tahun 2014 dan 2015

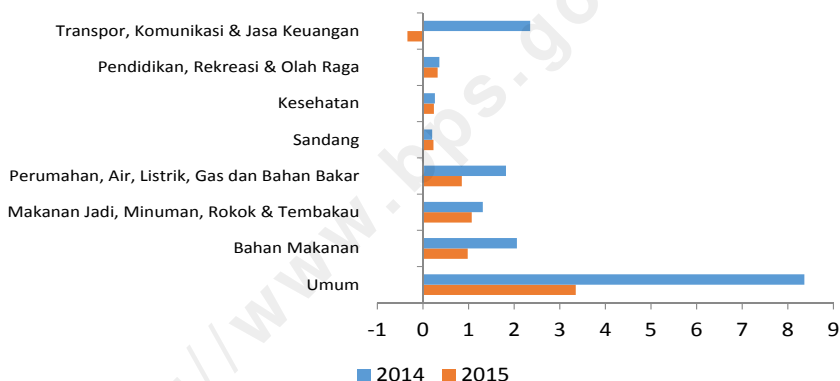
Kelompok	Sumbangan terhadap Inflasi	
	2014	2015
Umum	8,36	3,35
Bahan Makanan	2,06	0,98
Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	1,31	1,07
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	1,82	0,85
Sandang	0,2	0,23
Kesehatan	0,26	0,24
Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	0,36	0,32
Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	2,35	-0,34

Sumber : Berita Resmi Statistik (BRS)

(1,07 persen) dan disusul dengan kelompok bahan makanan (0,98 persen). Andil yang paling besar sumbangan inflasi di kelompok barang makanan-minuman jadi dan rokok adalah kenaikan harga rokok terutama kretek filter.

Sumbangan inflasi rokok kretek filter itu sendiri terhadap inflasi selama tahun 2015 adalah 0,16 persen dan merupakan komoditas dengan sumbangan inflasi terbesar kedua setelah beras. Naiknya harga jual eceran rokok ini dikarenakan penertiban baru yang ditetapkan pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20 Tahun 2015, Industri Hasil Tembakau (IHT) wajib membayar cukai di muka atau pada bulan Desember di tahun sebelumnya. Padahal pembayaran pita cukai tersebut sebelumnya bisa diberlakukan pada Januari atau Februari. Dengan demikian, banyak perusahaan rokok yang menaikkan harga jualnya untuk menutupi kekurangan pembayaran cukai tersebut (Sari, 2015).

Gambar 5.2
Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Indonesia (persen),
Tahun 2014 dan 2015



Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS)

Inflasi Kota-Kota di Indonesia

Peran dan komitmen pemerintah daerah sangat penting dalam upaya pencapaian target inflasi nasional. Pemerintah daerah ikut serta mengendalikan inflasi daerah pada tingkat yang rendah dan stabil, karena inflasi nasional merupakan agregasi dinamika pembentukan harga di daerah. Oleh karena pentingnya peran daerah terhadap implikasi bagi kegiatan pembangunan, pemerintah telah membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sejak tahun 2008. TPID ini telah membantu para pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan dengan merekomendasikan pengendalian harga.

Sepanjang tahun 2012, ketika penghitungan laju inflasi menggunakan tahun 2007 sebagai tahun dasar dan hanya dilakukan di 66 kota, inflasi berada pada kisaran 0,06 persen hingga 6,73 persen. Kemudian, di tahun selanjutnya,

yaitu 2013, pemerintah dan pihak terkait seperti TPID belum mampu membuahkan hasil dalam pengendalian inflasi. Di tahun 2013, inflasi daerah di 66 kota berada pada kisaran 4 persen hingga 12,02 persen.

Tabel 5.4. Laju Inflasi 82 Kota Di Indonesia¹ (2012=100), Tahun 2012–2015

Kota	2012	2013	2014	2015
1. Meulaboh	-	-	8,20	0,58
2. Banda Aceh	0,06	6,39	7,83	1,27
3. Lhokseumawe	0,39	8,27	8,53	2,44
4. Sibolga	3,30	10,08	8,36	3,34
5. Pematang Siantar	4,73	12,02	7,94	3,36
6. Medan	3,79	10,09	8,24	3,32
7. Padang Sidempuan	3,54	7,82	7,38	1,66
8. Padang	4,16	10,87	11,90	0,85
9. Bukittinggi	-	-	9,24	2,79
10. Tembilahan	-	-	10,06	2,06
11. Pekanbaru	3,35	8,83	8,53	2,71
12. Dumai	3,21	8,60	8,53	2,63
13. Bungo	-	-	8,99	1,29
14. Jambi	4,22	8,74	8,72	1,37
15. Palembang	2,72	7,04	8,38	3,05
16. Lubuklinggau			9,34	3,47
17. Bengkulu	4,61	9,94	10,85	3,25
18. Bandar Lampung	4,30	7,56	8,36	4,65
19. Metro	-	-	6,50	2,67
20. Tanjung Pandan	-	-	13,14	0,88
21. Pangkal Pinang	6,57	8,71	6,81	4,66
22. Batam	2,02	7,81	7,61	4,73
23. Tanjung Pinang	3,92	10,09	7,49	2,46
24. Jakarta	4,52	8,00	8,95	3,30
25. Bogor	4,06	8,55	6,83	2,70
26. Sukabumi	3,98	8,03	8,38	2,20
27. Bandung	4,02	7,97	7,76	3,93
28. Cirebon	3,36	7,86	7,08	1,56
29. Bekasi	3,46	9,46	7,68	2,22
30. Depok	4,11	10,97	7,49	1,87
31. Tasikmalaya	3,87	6,89	8,09	3,53
32. Cilacap	-	-	8,19	2,63
33. Purwokerto	4,73	8,50	7,09	2,52
34. Kudus	-	-	8,59	3,28
35. Surakarta	2,87	8,32	8,01	2,56
36. Semarang	4,85	8,19	8,53	2,56
37. Tegal	3,09	5,80	7,40	3,95
38. Yogyakarta	4,31	7,32	6,59	3,09
39. Jember	4,49	7,21	7,52	2,31
40. Banyuwangi	-	-	6,59	2,15
41. Sumenep	5,05	6,62	8,04	2,62
42. Kediri	4,63	8,05	7,49	1,71
43. Malang	4,60	7,92	8,14	3,32

Lanjutan Tabel 5.4.

Kota	2012	2013	2014	2015
44. Probolinggo	5,88	7,98	6,79	2,11
45. Madiun	3,51	7,52	7,40	2,75
46. Surabaya	4,39	7,52	7,90	3,43
47. Tangerang	4,44	10,02	10,03	4,28
48. Cilegon	3,91	7,98	9,93	3,94
49. Serang	4,41	9,16	11,27	4,67
50. Singaraja	-	-	10,32	2,97
51. Denpasar	4,71	7,35	8,03	2,70
52. Mataram	4,10	9,27	7,18	3,25
53. Bima	3,61	10,42	7,37	4,11
54. Maumere	6,49	6,24	4,00	3,89
55. Kupang	5,10	8,84	8,32	5,07
56. Pontianak	6,62	9,48	9,38	6,17
57. Singkawang	4,21	6,15	9,66	4,00
58. Sampit	4,69	7,25	7,90	5,72
59. Palangka Raya	6,73	6,45	6,63	4,20
60. Tanjung	-	-	8,80	6,69
61. Banjarmasin	5,96	6,98	7,16	5,03
62. Balikpapan	6,41	8,56	7,43	6,26
63. Samarinda	4,81	10,37	6,74	4,24
64. Tarakan	5,99	10,35	11,91	3,42
65. Manado	6,04	8,12	9,67	5,56
66. Palu	5,87	7,57	8,85	4,17
67. Bulukumba	-	-	9,45	2,17
68. Watampone	3,65	6,86	8,22	0,97
69. Makassar	4,57	6,24	8,51	5,18
70. Parepare	3,49	6,31	9,38	1,58
71. Palopo	4,11	5,25	8,95	3,38
72. Kendari	5,25	5,92	7,40	1,64
73. Bau-Bau	-	-	11,37	3,95
74. Gorontalo	5,31	5,84	6,14	4,30
75. Mamuju	3,28	5,91	7,88	5,07
76. Ambon	6,73	8,81	6,81	5,92
77. Tual	-	-	11,48	8,58
78. Ternate	3,29	9,78	9,34	4,52
79. Manokwari	4,88	4,63	5,70	2,77
80. Sorong	5,12	7,93	6,83	6,17
81. Merauke	-	-	12,31	5,76
82. Jayapura	4,52	8,27	7,98	2,79
Indonesia	4,30	8,38	8,36	3,35

Catatan : ¹ Sebelum tahun 2014 merupakan laju inflasi 66 kota (2007=100)

Sumber : Indikator Ekonomi

Inflasi daerah yang dipantau di 82 kota pada tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat 46 kota dengan inflasi di bawah angka inflasi nasional dan sisanya sebanyak 36 kota dengan angka inflasi sama atau di atas inflasi nasional. Jumlah kota dengan inflasi di bawah inflasi nasional ini sama dengan keadaan di tahun 2014 yang juga terdapat 46 kota dengan angka inflasi di bawah inflasi

nasional. Namun demikian, inflasi daerah di tahun 2015 ini terlihat jelas mulai bisa ditekan dan dikendalikan. Semua angka inflasi di 82 kota pada tahun 2015 hanya sebesar satu digit, sedangkan di tahun 2014 masih terdapat 11 kota yang memiliki angka inflasi dua digit.

Inflasi sepanjang tahun 2015 di kota-kota Sumatera berada di kisaran angka 0,85-4,73 persen, dimana Kota Padang merupakan kota dengan inflasi terendah (0,85 persen). Laju inflasi sepanjang tahun 2015 di Kota Padang turun sangat ekstrim dibandingkan dengan periode sebelumnya. Membaiknya angka inflasi ini juga terjadi secara agregat untuk Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 1,08 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Puji Atmoko, mengatakan terdapat beberapa faktor utama yang menunjang perbaikan laju inflasi di Sumatera Barat pada tahun 2015, yaitu relatif lebih terjaganya pasokan pangan dan tidak adanya kebijakan kenaikan harga energi strategis oleh pemerintah. Selain itu, rendahnya tingkat inflasi tersebut juga disebabkan pelemahan daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan ekonomi selama 2015. Rendahnya inflasi tersebut juga hasil kinerja dan program TPID seluruh tingkatan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 yang telah terealisasi dengan baik. Program-program tersebut antara lain program inspeksi pasar dan operasi pasar murah, program penanaman cabai dalam *polybag* di Kota Padang, perbaikan infrastruktur dalam meminimalisir risiko akibat kemarau, komunikasi antar pemerintah daerah dengan pedagang besar cabai merah, program sosialisasi dan komunikasi ekspektasi positif ke masyarakat serta program-program yang menindaklanjuti kebijakan penyesuaian tarif angkutan kota (Riani, 2016).

Kemudian, pada tahun yang sama, kota di Pulau Jawa dengan inflasi tertinggi adalah Kota Serang (4,67 persen) dan kota dengan inflasi terendah adalah Kota Cirebon (1,56 persen). Sementara itu, sebagian besar kota-kota di wilayah Timur Indonesia memiliki inflasi di atas inflasi nasional. Bahkan, kota dengan tingkat inflasi tertinggi sepanjang tahun 2015 adalah Kota Tual yang mencapai 8,58 persen. Komoditas yang dominan dalam penyumbang inflasi di Kota Tual adalah angkutan udara, ikan cakalang, ikan kakap putih, ikan ekor kuning, dan nasi dengan lauk. Walaupun secara umum inflasi 2015 di Indonesia sudah berhasil dikendalikan, inflasi di daerah-daerah tertentu seperti wilayah timur Indonesia perlu diperhatikan kembali. Penyebab masih tingginya inflasi di daerah timur Indonesia adalah infrastruktur yang belum memadai untuk menghubungkan satu daerah ke daerah yang lain, khususnya dalam memperlancar arus barang pangan (Jefriando, 2016). Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem logistik daerah timur yang bertujuan agar tercapainya ketahanan pangan dan arus bahan pangan dari sentra produksi hingga pembeli akhir dapat berjalan lancar dengan waktu yang singkat.

Hubungan antara Inflasi, Konsumsi, dan Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat inflasi adalah keadaan moneter suatu negara dan cenderung mengakibatkan adanya pergejolakan ekonomi di negara tersebut. Indonesia pernah berada dalam pergejolakan ekonomi yang cukup mengkhawatirkan. Pada dasawarsa 1960-an, kebijakan ekonomi yang lebih mengutamakan kepentingan politik hampir menghabiskan seluruh potensi ekonomi Indonesia. Faktor tersebut menyebabkan pertumbuhan PDB Indonesia sangat rendah sehingga membuat laju inflasi mencapai 635 persen di tahun 1966. Tingginya inflasi di tahun tersebut membuat pemerintah dan pemangku kebijakan mengeluarkan kebijakan-kebijakan pengetatan moneter (Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2007).

Sejak saat itu, pemerintah terus berupaya mengendalikan laju inflasi dengan strategi pembangunan yang dicantumkan dalam berbagai kebijakan. Di tahun-tahun berikutnya, laju inflasi Indonesia mulai terkendali. Namun, krisis moneter di tahun 1997 berdampak kembali ke meroketnya inflasi Indonesia yang mencapai 77,63 persen sepanjang tahun 1998. Keberlangsungan kegiatan ekonomi nasional di saat itu sangat terancam, dimana pemerintah harus menghadapi kesulitan likuiditas dan nilai tukar rupiah yang terus merosot. Tidak hanya itu, krisis tersebut menghambat pasokan barang karena menurunnya kegiatan produksi dan distribusi akibat kerusuhan yang terjadi di dalam negeri pada tahun tersebut. Akan tetapi, berkat instrumen kebijakan yang diberlakukan pemerintah, perekonomian Indonesia mulai kembali membaik dan laju inflasi berhasil diturunkan.

Dari potongan sejarah perekonomian Indonesia tersebut tergambar jelas bahwa tingkat inflasi suatu negara erat hubungannya dengan bergejolaknya ekonomi negara tersebut. Keadaan hiperinflasi di Indonesia pada tahun 1966 dan 1998 membuat Indonesia berada pada kondisi perekonomian yang cukup berat. Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada besaran inflasi tersebut. Inflasi ringan dan stabil akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan para pengusaha akan cenderung memperluas dan meningkatkan produksinya dengan adanya kenaikan harga. Namun kenaikan harga yang wajar tersebut tidak akan terlalu berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Selain itu, perluasan produksi juga akan membentuk lapangan kerja baru.

Selain itu, hubungan kasualitas juga dapat ditemukan diantara ketiga indikator perekonomian, yaitu inflasi, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana konsumsi yang meningkat akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tersebut terjadi karena adanya peningkatan barang dan jasa untuk memenuhi peningkatan konsumen terhadap barang dan jasa. Demikian sebaliknya apabila tingkat konsumsi masyarakat menurun (Silvia, Wardi, & Aimon, 2013).

Konsumsi atau daya beli masyarakat jelas berhubungan dengan inflasi. Daya beli masyarakat yang konsumtif akan meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa. Peningkatan permintaan tersebut akan menyebabkan terjadinya pergerakan harga yang berujung pada naiknya laju inflasi. Tingkat daya beli masyarakat yang konsumtif ini biasa terjadi pada hari raya keagamaan, tahun ajaran baru, dan sebagainya. Laju inflasi yang tinggi dimana harga barang meningkat cukup tinggi akan berujung pada menurunnya daya beli masyarakat.

Dengan demikian, indikator penting dalam perekonomian negara dapat terlihat dari inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga indikator tersebut saling berhubungan dan memiliki dampak satu sama lain. Pengendalian inflasi dan menjaga pemenuhan konsumsi masyarakat akan menunjang pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Tingkat Inflasi Negara ASEAN

Dampak potensial dari globalisasi pada inflasi telah menjadi perhatian bagi pemerintah dan para pemangku kebijakan. Dalam analisis makroekonomi, inflasi jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kondisi perekonomian suatu negara dapat dibandingkan dari tingkat inflasinya. Tingkatan inflasi antar negara berbeda dari waktu ke waktu, seperti tingkatan inflasi di beberapa negara ASEAN.

Selama tahun 2013-2015, inflasi di negara-negara ASEAN berada pada tingkatan yang berbeda. Sebagian besar negara ASEAN terus mengalami penurunan tingkat inflasi. Bahkan terdapat beberapa negara yang berujung pada deflasi. Sepanjang tahun 2013, inflasi di negara Brunei Darussalam

Tabel 5.5. Laju Inflasi Negara ASEAN (persen), Tahun 2013–2015

Kota	2013	2014 ¹	2015
Brunei Darussalam	0,4	-0,2	-0,4
Kamboja	3,0	3,9	1,2
Indonesia	8,4	8,4	4,4
Lao People's Dem. Rep.	6,4	5,5	5,3
Malaysia	2,1	3,1	2,1
Myanmar	5,7	5,9	11,5
Filipina	2,9	4,2	1,4
Singapura	2,4	1,0	-0,5
Thailand	2,2	1,9	-0,9
Vietnam	6,6	4,1	0,6

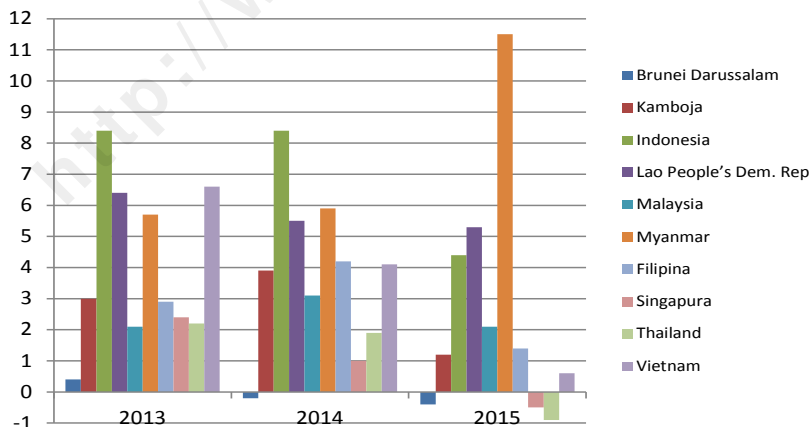
Catatan : ¹ Angka revisi

Sumber : World Economic Outlook (IMF) dan Indikator Ekonomi

sebesar 0,4 persen lalu di tahun 2014 terjadi deflasi sebesar 0,2 persen dan kembali mengalami deflasi menjadi 0,4 persen di tahun 2015. Kemudian negara yang berada dalam tingkat deflasi adalah Negara Singapura yaitu sebesar 0,5 persen di tahun 2015. Negara Thailand merupakan negara dengan tingkat deflasi tertinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya, yaitu mencapai 0,9 persen, sedangkan sepanjang tahun 2014, inflasi di Negara Thailand mencapai sebesar 1,9 persen. Deflasi ini biasanya merupakan problematika yang dihadapi negara maju, dimana permintaan tidak meningkat sehingga harga produk cenderung menurun.

Di sisi lain, masih terdapat negara ASEAN dengan tingkat inflasi yang perlu ditekan, salah satunya adalah Indonesia merupakan negara ASEAN dengan angka inflasi tertinggi sepanjang tahun 2013 dan 2014, Indonesia sudah dapat mengendalikan tingkat inflasi tersebut di tahun 2015 dengan inflasi sebesar 4,4 persen. Hal tersebut membuat Indonesia berada pada posisi ketiga untuk inflasi tertinggi di antara sepuluh negara ASEAN, setelah Myanmar dan Lao People’s Dem. Rep. Namun demikian Indonesia masih perlu menekankan angka inflasinya, agar dapat bersaing dengan negara lain khususnya anggota ASEAN 5, seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Myanmar merupakan negara dengan tingkat inflasi tertinggi di tahun 2015, yaitu mencapai 11,5 persen. Tingkat inflasi Myanmar tersebut meningkat hampir 50 persen dibandingkan tahun 2014, yang sebesar 5,9 persen.

Gambar 5.3
Laju Inflasi Negara ASEAN (persen), Tahun 2013–2015



Sumber : *World Economic Outlook* (IMF) dan Indikator Ekonomi



6

Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Indonesia

Perdagangan memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor perdagangan menempati posisi ketiga di bawah sektor industri dan pertanian dengan kontribusi lebih dari 13 persen terhadap total perekonomian nasional dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, laju pertumbuhan sektor perdagangan mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 2,47 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang tercatat sebesar 5,16 persen. Pembangunan sektor-sektor unggulan penopang perekonomian seperti sektor perdagangan, merupakan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan, menciptakan lapangan pekerjaan dan memperluas kesempatan kerja.

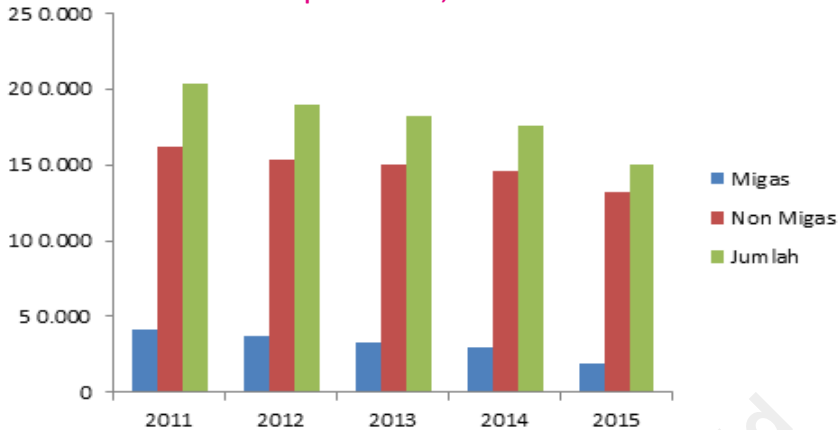
Perdagangan luar negeri yang meliputi kegiatan ekspor impor, merupakan aktivitas yang tidak pernah lepas dari suatu negara. Pergerakan arus barang dan jasa bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus sebagai sumber penghasilan. Selain itu, perdagangan luar negeri juga berperan meningkatkan kerjasama dan konektivitas antar negara yang akan berdampak pada berbagai sektor di tanah air. Tidak sedikit negara yang menggantungkan kebutuhan barang atau jasa tertentu dari perdagangan luar negeri. Ketergantungan antar negara dalam perekonomian dunia disebabkan kebutuhan yang semakin bertambah, adanya spesialisasi yang bersifat internasional, dan semakin berkembangnya kegiatan perusahaan multinasional. Namun, perdagangan luar negeri tidak lepas dari hambatan-hambatan seperti faktor keamanan suatu negara, kebijakan ekonomi internasional, dan ketidakstabilan kurs mata uang asing (Widiastuti).

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah berlaku sejak awal tahun 2015 membuka kesempatan bagi perluasan pangsa ekspor Indonesia. Pasar ekspor ASEAN yang semakin terbuka akan mendorong pertumbuhan produksi nasional berorientasi ekspor. Di samping itu, momentum MEA diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan dampak positif lain bagi Indonesia seperti hambatan perdagangan cenderung berkurang sehingga meningkatkan ekspor, memperoleh impor dengan biaya lebih murah, dan meningkatkan konektivitas antar negara.

Perkembangan Ekspor

Ekspor merupakan salah satu komponen pembentuk perekonomian nasional. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, tentunya tidak lepas dari aktivitas perdagangan internasional yaitu ekspor impor. Melalui aktivitas ekspor, negara dapat melakukan pertukaran barang dan jasa untuk saling melengkapi kebutuhan rakyatnya. Kinerja ekspor Indonesia menunjukkan tren yang menurun dalam lima tahun terakhir. Nilai ekspor Indonesia tahun 2011 sebesar US\$ 203,50 miliar turun menjadi US\$ 150,37 miliar pada tahun 2015. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2015, dimana nilai ekspor turun 14,55 persen atau sebesar US\$ 25,61 miliar dibandingkan tahun 2014.

Gambar 6.1
Nilai Ekspor Indonesia, Tahun 2011–2015



Ekspor yang menurun merupakan dampak dari krisis ekonomi global dan penurunan harga komoditi utama ekspor Indonesia. Negara tujuan utama ekspor Indonesia seperti Amerika, Jepang, dan Tiongkok masih mengalami perlambatan ekonomi, sehingga permintaan ekspor dari Indonesia menurun. Capaian ekspor Indonesia tahun 2015 sebesar US\$ 150,37 miliar masih lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan pemerintah sebesar US\$ 192,5 miliar. Pemerintah menargetkan ekspor naik 300 persen dalam lima tahun ke depan hingga tahun 2019 menjadi US\$ 485 miliar. Di akhir 2015, pemerintah merevisi target tersebut menjadi 6-7 persen per tahun untuk pertumbuhan ekspor. Menteri Perdagangan, Thomas Lembong (2015) menyatakan bahwa kinerja ekspor dan impor Indonesia menurun secara signifikan karena perekonomian global masih lemah dan hampir semua negara mengalami kontraksi, baik untuk ekspor maupun impor (Febrianto, 2015).

Tabel 6.1. Nilai Ekspor Indonesia Menurut Migas dan Non-Migas (juta US\$),
Tahun 2011–2016

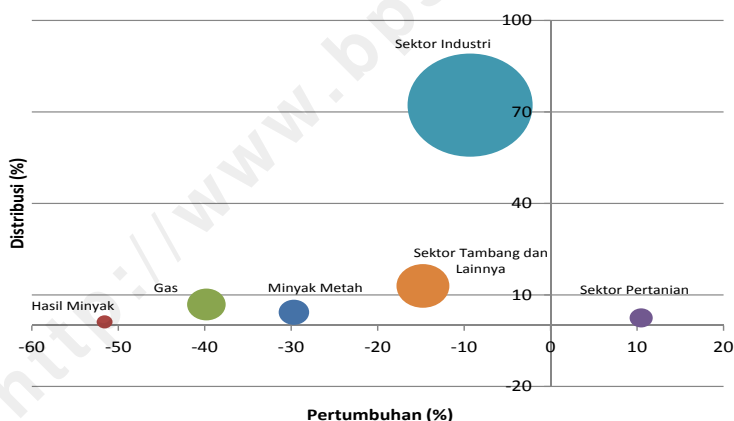
Ekspor	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (Jan - Maret)
Migas	41 477,0^r	36 977,3	32 633,0	30 018,8	18 574,4	3 460,6
Minyak Mentah	13 828,7	12 293,4 ^r	10 204,7	9 215,0	6 479,4	1 402,8
Hasil Minyak	4 776,9	4 163,4 ^r	4 299,1	3 623,5	1 754,2	203,6
Gas	22 871,4	20 520,5 ^r	18 129,2	17 180,3	10 340,8	1 854,2
Non Migas	162 019,6^r	153 043,0^r	149 918,8	145 961,2	131 791,9	30 142,0
Sektor Pertanian	3 388,8 ^r	3 597,7 ^r	3 598,5 ^r	3 373,2 ^r	3 726,5	696,1
Sektor Industri	123 986,1 ^r	118 115,2 ^r	115 158,6 ^r	119 753,8 ^r	108 603,5	25 491,5
Sektor Tambang dan Lainnya	34 644,7 ^r	31 330,1 ^r	31 161,7 ^r	22 834,2 ^r	19 461,9	3 954,4
Jumlah	203 496,6	190 020,3^r	182 551,8	175 980,0	150 366,3	33 602,6

Sumber : Indikator Ekonomi Maret 2016, BPS

Penurunan total nilai ekspor seiring dengan penurunan nilai ekspor migas dan non migas. Nilai ekspor migas tahun 2015 menurun 38,12 persen dibandingkan tahun 2014, sementara nilai ekspor non migas menurun 9,70 persen. Ketidakstabilan ekonomi global dan harga minyak dunia yang turun sebagai akibat peningkatan penawaran minyak negara non OPEC, khususnya Amerika Serikat ditengarai menjadi faktor perlambatan ekonomi global sejak tahun 2014 yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Hal ini berdampak pada penurunan ekspor non migas Indonesia tahun 2015.

Ditinjau menurut jenisnya, kontribusi nilai ekspor non migas jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor migas. Tabel 6.1 menunjukkan struktur produk ekspor non migas yang didominasi oleh komoditi bernilai tambah relatif tinggi yang berasal dari sektor industri, sementara untuk ekspor migas berasal dari gas, baik pengadaan gas/gas alam maupun pertambangan gas alam. Tahun 2015, struktur nilai ekspor non migas Indonesia terdiri dari 2,83 persen ekspor hasil pertanian, 82,40 persen ekspor hasil industri, dan 14,77 persen ekspor hasil pertambangan dan lainnya.

Gambar 6.2
Pertumbuhan, Distribusi, dan Nilai Ekspor Indonesia Menurut Sektor Komoditas, Tahun 2015



Penurunan nilai ekspor ternyata juga diikuti oleh pertumbuhan nilai ekspor migas dan non migas yang bernilai negatif, kecuali sektor pertanian (lihat Gambar 6.2). Ditinjau dari kontribusi dan nilainya, ekspor sektor industri masih menjadi primadona aktivitas ekspor di Indonesia. Pada kenyataannya, nilai ekspor yang menurun di tahun 2015 tidak sesuai dengan target dan prediksi pemerintah. Target pada transformasi sektor industri tahun 2015 yaitu pertumbuhan ekspor non migas sebesar 6,5 persen (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015). Berdasarkan RPJMN 2015-2019, nilai total ekspor Indonesia tahun 2015 diproyeksikan sebesar US\$ 189 miliar (Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2015).

Penerimaan ekspor Indonesia tahun 2016 diperkirakan juga meningkat 8,3-9,4 persen dengan kenaikan ekspor non migas sebesar 7,2-8,5 persen. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan ekspor non migas yaitu dengan meningkatkan daya saing produk olahan ekspor non migas. Ditinjau dari sisi permintaan, permintaan eksternal diperkirakan mendorong pertumbuhan ekspor hingga mencapai 4,8-5,2 persen. Kondisi ini didukung membaiknya perekonomian global, terutama di pasar ekspor utama Indonesia, seperti Amerika Serikat; membuka pasar ekspor baru; mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor; serta meningkatkan fasilitas ekspor. Sementara dari sisi penawaran, pertumbuhan sektor perdagangan diperkirakan tumbuh 5,4-6,3 persen didorong aktivitas perdagangan yang semakin meningkat, baik ekspor, impor, maupun aktivitas perdagangan antar wilayah (Bappenas, 2015).

Sementara itu, Menteri Perdagangan Indonesia memperkirakan aktivitas ekspor di negara berkembang meningkat menjadi 6,6 persen tahun 2016 (Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2015). Hingga triwulan I tahun 2016, tercatat nilai ekspor Indonesia sebesar US\$ 33,60 miliar dengan kontribusi US\$ 3,46 miliar dari ekspor migas dan US\$ 30,14 miliar dari sektor non migas. Angka ini masih 17,76-17,96 persen dari perkiraan total ekspor tahun 2016 sebesar US\$ 187,10-189,20 miliar (Bappenas, 2015). Sehingga jika ingin target 2016 tercapai, pemerintah, swasta, dan para pelaku usaha diharapkan saling bersinergi mendorong pertumbuhan ekspor.

1. Ekspor Komoditi Penting

Setiap negara perlu mengetahui dan mengembangkan nilai ekspor dari komoditas ekspor unggulannya. Perkembangan ekspor penting untuk

Tabel 6.2. Nilai Ekspor Komoditi Penting Indonesia (juta US\$), Tahun 2014–2016

Komoditas Ekspor	2014	2015	2016 (Jan-Maret)
Ekspor Hasil Pertanian	3 373,2	3 726,5	696,1
Kopi	1 030,6	1 189,7	194,6
Ikan	492,3	516,5	117,1
Udang	184,7	248,9	66,7
Rempah-rempah	196,5	114,8	12,5
Biji Coklat	149,5	171,8	33,9
Hasil Pertanian Lainnya	1 319,6	1 484,8	271,3
Ekspor Hasil Industri	119 753,8	108 603,5	25 491,5
Minyak Kelapa Sawit	18 615,0	16 427,0	3 374,1
Karet Olahan	6 256,0	6 410,9	1 583,0
Pakaian Jadi	5 013,1	4 510,4	1 100,0
Alat-alat Listrik	4 595,1	3 564,1	645,4
Tekstil Lain	6 500,9	6 075,5	1 384,9
Hasil Industri Lainnya	78 773,7	71 615,6	17 404,1
Ekspor Hasil Tambang (Tidak Termasuk Migas)	22 827,7	19 456,0	3 953,4
Batu Bara	18 697,7	14 717,3	3 057,4
Bijih Tembaga	1 683,6	3 277,2	644,8
Hasil Tambang Lainnya	2 446,4	1 461,5	251,2

Sumber : Indikator Ekonomi Maret 2016, BPS

meningkatkan pendapatan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Industrialisasi dan substitusi impor ke promosi ekspor merupakan bentuk upaya yang berfokus pada kegiatan ekspor. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa komoditi ekspor unggulan Indonesia berada di sektor non migas, yang dibagi menjadi ekspor hasil pertanian, ekspor hasil industri, dan ekspor hasil tambang.

Tabel 6.2 menunjukkan pertumbuhan yang positif untuk nilai ekspor hasil pertanian di tahun 2015, sementara nilai ekspor hasil industri dan pertambangan pertumbuhannya bernilai negatif. Secara rata-rata, nilai komoditi ekspor hasil pertanian juga mengalami pertumbuhan positif, dengan komoditi unggulan yaitu kopi. Ekspor hasil industri didominasi oleh minyak kelapa sawit, sementara ekspor hasil tambang didominasi batu bara. Indonesia merupakan produsen dan eksportir terbesar minyak kelapa sawit di dunia dan produsen ketiga terbesar di dunia untuk batubara. Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor utama batubara Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang menurun ditambah penerapan kebijakan energi bersih untuk mengurangi polusi di Tiongkok menyebabkan kebutuhan konsumsi batubara menurun dan berdampak pada penurunan permintaan ekspor batubara dari Indonesia. Sementara itu, penurunan permintaan ekspor minyak kelapa sawit disebabkan harga minyak kedelai yang turun dan melimpahnya stok di Amerika Serikat, Brazil, dan Argentina sehingga harga minyak kelapa sawit juga menurun (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN SETJEN DPR RI).

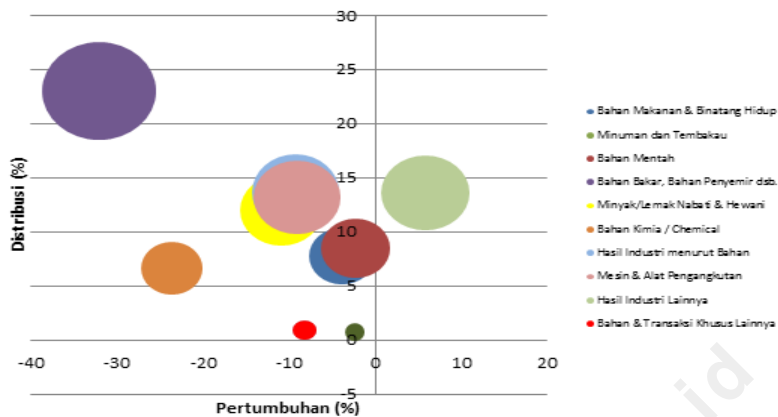
Ditinjau dari golongan barang SITC (*Standard International Trade Classification*), nilai ekspor Indonesia didominasi kelompok bahan bakar, bahan penyemir, dan sebagainya (SITC 3) dengan kontribusi 23-34 persen selama periode 2011-2015 dan tren yang menurun. Di peringkat kedua dan ketiga yaitu kelompok hasil industri menurut bahan (SITC 6) dengan kontribusi 11-14 persen dan kelompok hasil industri lainnya (SITC 8) dengan kontribusi 8-14 persen selama periode 2011-2015.

Tabel 6.3. Nilai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (juta US\$), Tahun 2011–2016

SITC	Golongan Barang	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (Jan-Maret)
0	Bahan Makanan & Binatang Hidup	10 116	10 742	10 960	12 070	11 601	2 600
1	Minuman dan Tembakau	808	880	1 018	1 101 ^r	1 075	285
2	Bahan Mentah	24 272	18 832	19 276	13 073 ^r	12 766	2 635
3	Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb.	68 914	63 373	57 396	51 070	34 649	6 759
4	Minyak/Lemak Nabati & Hewani	20 705	22 020	19 926	20 205 ^r	18 006	3 697
5	Bahan Kimia / Chemical	12 758	10 598	10 975	13 164 ^r	10 047	2 392
6	Hasil Industri menurut Bahan	25 485	22 289	21 923	22 684 ^r	20 586	4 630
7	Mesin & Alat Pengangkutan	21 769	22 767	22 134	21 779 ^r	19 801	4 565
8	Hasil Industri Lainnya	16 447	16 513	17 125	19 302 ^r	20 429	5 686
9	Bahan & Transaksi Khusus Lainnya	2 223	2 008	1 820	1 532	1 406	354
	Jumlah	203 497	190 022	182 553	175 980	150 366	33 603

Sumber : Indikator Ekonomi Maret 2016, BPS

Gambar 6.3
Pertumbuhan, Distribusi dan Nilai Ekspor Indonesia Menurut
Golongan Barang, Tahun 2015



Gambar 6.3 menunjukkan bahwa hampir seluruh golongan barang SITC memiliki pertumbuhan nilai ekspor negatif di tahun 2015, kecuali kelompok hasil industri lainnya (SITC 8). Ditinjau dari kontribusi dan nilai, kelompok bahan bakar, bahan penyemir, dan sebagainya (SITC 3) mendominasi total nilai ekspor Indonesia, sementara kelompok minuman dan tembakau (SITC 1) dan kelompok bahan dan transaksi khusus lainnya (SITC 9) memiliki nilai dan kontribusi terendah terhadap total nilai ekspor tahun 2015.

2. Ekspor Menurut Negara Tujuan

Konektivitas antar negara yang semakin terbentuk telah mempengaruhi dinamika perdagangan Indonesia. Pertumbuhan nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan selama periode 2011-2015 di seluruh negara tujuan ekspor, termasuk ke mitra dagang terbesar Indonesia seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Ditinjau dari masing-masing negara, tujuan ekspor Indonesia yang utama yaitu Jepang, dengan kontribusi 11,98 persen, disusul oleh Amerika Serikat dan Tiongkok di peringkat kedua dan ketiga dengan kontribusi masing-masing 10,80 persen dan 10,01 persen pada tahun 2015.

Gambar 6.4 memperlihatkan pertumbuhan nilai ekspor ke negara tujuan ekspor seperti ASEAN, negara-negara Asia, Amerika, Australia, Afrika dan Uni Eropa yang bernilai negatif di tahun 2015, kecuali Eropa lainnya. Ditinjau dari kontribusi dan nilainya, Asia merupakan pangsa pasar utama ekspor Indonesia. Kelompok Asia lainnya (di luar ASEAN, Tiongkok, dan Jepang) jika dijumlahkan dengan kelompok ASEAN, Tiongkok, dan Jepang, berkontribusi sekitar 68,86 persen dengan nilai US\$ 103,55 miliar terhadap total nilai ekspor Indonesia (US\$ 150,37 miliar) di tahun 2015.

Tantangan yang dihadapi dalam mencapai peningkatan ekspor tahun 2016 yaitu perlambatan ekonomi di Tiongkok sebagai salah satu negara tujuan ekspor Indonesia. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

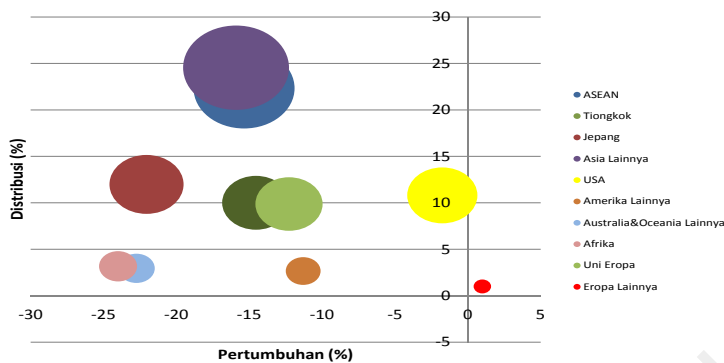
Tabel 6.4. Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan (juta US\$),
Tahun 2011–2016

Negara Tujuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (Jan-Maret)
1. ASEAN	42 098,9	41 829,1	40 630,0	39 668,1	33 577,0	7 461,3
	(20,69)	(22,01)	(22,26)	(22,54)	(22,33)	(22,20)
(Malaysia)	10 995,8	11 278,3	10 666,6	9 730,0	7 630,9	1 644,4
	(5,40)	(5,94)	(5,84)	(5,53)	(5,07)	(4,89)
(Thailand)	5 896,7	6 635,1	6 061,9	5 783,1	5 507,3	1 186,4
	(2,90)	(3,49)	(3,32)	(3,29)	(3,66)	(3,53)
(Singapura)	18 443,9	17 135,0	16 686,3	16 728,3	12 632,6	2 781,0
	(9,06)	(9,02)	(9,14)	(9,51)	(8,40)	(8,28)
2. Tiongkok	22 941,0	21 659,5	22 601,5	17 605,9	15 046,4	3 347,4
	(11,27)	(11,40)	(12,38)	(10,00)	(10,01)	(9,96)
3. Jepang	33 714,7	30 135,1	27 086,3	23 117,5	18 020,9	4 068,8
	(16,57)	(15,86)	(14,84)	(13,14)	(11,98)	(12,11)
4. Asia Lainnya	49 092,0	45 984,0	42 608,9	43 880,6	36 903,2	7 679,7
	(24,12)	(24,20)	(23,34)	(24,93)	(24,54)	(22,85)
5. Amerika Serikat	16 459,1	14 874,4	15 691,7	16 530,1	16 240,8	3 766,4
	(8,09)	(7,83)	(8,60)	(9,39)	(10,80)	(11,21)
6. Amerika Lainnya	4 913,9	4 417,5	4 488,1	4 505,5	3 996,6	869,9
	(2,41)	(2,32)	(2,46)	(2,56)	(2,66)	(2,59)
7. Australia & Oceania Lainnya	6 303,1	5 682,8	5 207,5	5 738,4	4 433,5	943,5
	(3,10)	(2,99)	(2,85)	(3,26)	(2,95)	(2,81)
8. Afrika	5 675,3	5 713,7	5 615,5	6 262,3	4 759,4	955,8
	(2,79)	(3,01)	(3,08)	(3,56)	(3,17)	(2,84)
9. Uni Eropa	20 508,9	18 027,3	16 763,7	16 918,9	14 842,5	3 437,7
	(10,08)	(9,49)	(9,18)	(9,61)	(9,87)	(10,23)
(Inggris)	1 719,7	1 696,8	1 634,8	1 658,6	1 527,1	364,6
	(0,85)	(0,89)	(0,90)	(0,94)	(1,02)	(1,09)
(Belanda)	5 132,5	4 664,3	4 106,0	3 984,6	3 442,2	689,4
	(2,52)	(2,45)	(2,25)	(2,26)	(2,29)	(2,05)
(Jerman)	3 304,7	3 075,0	2 883,4	2 821,6	2 664,2	627,7
	(1,62)	(1,62)	(1,58)	(1,60)	(1,77)	(1,87)
10. Eropa Lainnya	1 789,7	1 696,6	1 858,6	1 752,7	2 546,0	1 072,1
	(0,88)	(0,44)	(1,02)	(1,00)	(1,69)	(3,19)
Jumlah	203 496,6	190 020,3	182 551,8	175 980,0	150 366,3	33 602,7
	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap total
Sumber : Indikator Ekonomi Maret 2016, BPS

Perdagangan 2015-2019, arah kebijakan pembangunan sektor perdagangan, khususnya pengembangan ekspor meliputi: 1) mengamankan pangsa ekspor di pasar utama; 2) memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hubungan perdagangan internasional; dan 3) meningkatkan diversifikasi produk ekspor. Penguatan kelembagaan ekspor melalui kerja sama dalam negeri dan luar negeri juga diperlukan untuk memperkuat kinerja ekspor (Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 2016).

Gambar 6.4
Pertumbuhan, Distribusi dan Nilai Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan, Tahun 2015



Perkembangan Impor

Untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri yang tidak mampu mencukupi, dan mengisi stok kekosongan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri dapat dilakukan pemerintah melalui impor. Namun demikian pemerintah tetap harus menekan impor barang-barang yang akan masuk ke dalam negeri dan menghindari barang-barang impor yang bersifat konsumtif. Kebijakan impor tahun 2015 diarahkan untuk mendorong industri pengganti bahan baku impor dalam negeri. Impor Indonesia akan difokuskan pada barang modal sehingga dapat memicu perkembangan industri pengolahan dalam negeri (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015).

Nilai impor Indonesia menunjukkan tren yang menurun selama periode 2011-2015, meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2012. Tahun 2015, nilai impor menurun 19,92 persen dibandingkan tahun 2014. Kinerja impor menurun sejak tahun 2013. Nilai tukar rupiah terhadap US\$ yang melemah diduga berdampak pada penurunan impor. Nilai impor bahan baku juga cenderung menurun yang menandakan perlambatan ekonomi. Oleh sebab itu, percepatan pembangunan infrastruktur diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian, termasuk aktivitas ekspor impor (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN SETJEN DPR RI).

Tabel 6.5. Nilai Impor Indonesia Menurut Migas dan Non-Migas (juta US\$), Tahun 2011–2016

Ekspor	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (Jan - Maret)
Migas	40 701,5	42 562,8	45 266,4	45 961,9	24 613,2	3 896,8
Non Migas	136 734,1	149 126,7	141 362,3	132 216,9	118 081,2	28 047,6
Jumlah	177 435,6	191 689,5	186 628,7	178 178,8	142 694,4	31 944,4

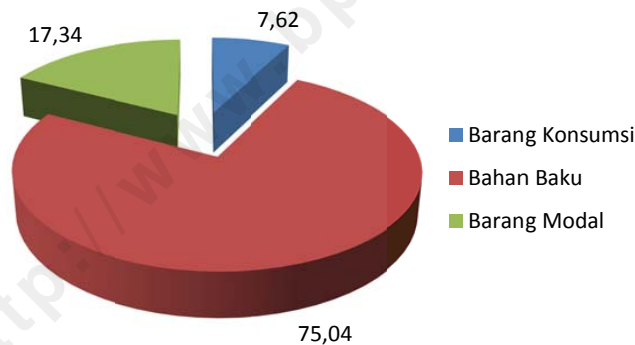
Sumber : Indikator Ekonomi Maret 2016, BPS

Perkembangan kontribusi impor migas semakin menurun selama periode 2011-2015, dari 22,94 persen di tahun 2011 menjadi 17,25 persen di tahun 2015. Di sisi lain, impor non migas semakin meningkat kontribusinya, dari 77,06 persen di tahun 2011 menjadi 82,75 persen di tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa komoditi utama impor berasal dari sektor non migas, sama halnya aktivitas ekspor.

Dari sisi pertumbuhan, penurunan paling signifikan terjadi pada nilai impor migas pada tahun 2015, dimana nilai impor migas menurun hingga 46,45 persen atau turun sebesar US\$ 21,35 miliar dibandingkan tahun 2014. Tingginya penurunan nilai impor migas disebabkan jatuhnya harga minyak dunia di tahun 2015 yang hanya mencapai US\$ 40 per barel. Sementara itu, nilai impor non migas tahun 2015 menurun 10,69 persen atau sebesar US\$ 14,14 miliar dibandingkan tahun 2014. Hingga triwulan I 2016, nilai impor tercatat sebesar US\$ 31,94 miliar. Angka ini baru 18,16-18,19 persen dari perkiraan total impor tahun 2016 sebesar US\$ 175,60-175,90 miliar (Bappenas, 2015). Berdasarkan perkiraan tersebut, diperlukan strategi dan upaya keras dari pemerintah, swasta, dan pelaku usaha untuk mencapai impor sesuai target yang ditetapkan.

1. Impor Menurut Golongan Barang Ekonomi

Gambar 6.5
 Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang Ekonomi, Tahun 2015



Menurut golongan barang ekonomi, impor Indonesia didominasi oleh impor bahan baku. Tahun 2015, struktur impor Indonesia terdiri dari 7,62 persen impor barang konsumsi, 75,04 persen impor bahan baku, dan 17,34 persen impor barang modal. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri di dalam negeri belum mampu secara utuh memenuhi kebutuhan bahan baku, untuk itu masih

Tabel 6.6. Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang Ekonomi (Juta US\$), Tahun 2011-2016

Impor	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (Jan-Maret)
Barang Konsumsi	13 392,9	13 408,6	13 138,8	12 667,2	10 876,5	3 152,8
Bahan Baku	130 934,3	140 126,0	141 957,9	136 208,6	107 080,7	23 488,1
Barang Modal	33 108,4	38 154,9	31 532,0	29 303,0	24 737,3	5 303,4
Jumlah	177 435,6	191 689,5	186 628,7	178 178,8	142 694,4	31 944,3

Sumber : Indikator Ekonomi

mengandalkan impor bahan baku dan barang modal. Impor bahan baku dan barang modal yang tinggi diharapkan dapat memacu pertumbuhan sektor industri untuk menghasilkan produk-produk bernilai tambah tinggi dan mendorong peningkatan ekspor.

Tabel 6.7. Nilai Impor Indonesia (CIF) Menurut Golongan Barang SITC (juta US\$), Tahun 2011–2016

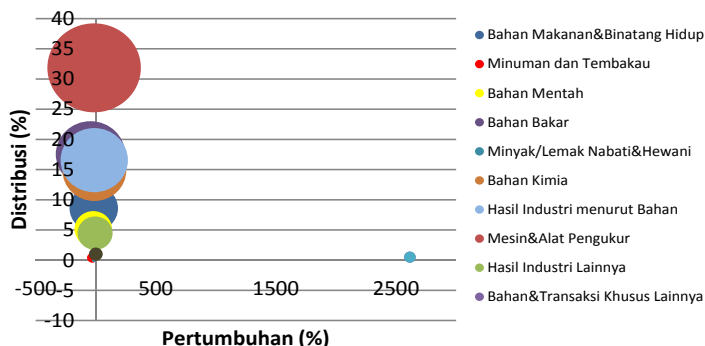
SITC	Golongan Barang	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (Jan-Maret)
0	Bahan Makanan & Binatang Hidup	14 335	13 342	13 872	14 588	12 245	3 394
1	Minuman dan Tembakau	656	848	822	789	562	179
2	Bahan Mentah	9 944	9 030	9 231	9 191	7 357	1 741
3	Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb.	40 821	42 733	45 509	43 928	25 027	3 985
4	Minyak/Lemak Nabati & Hewani	187	157	206	170	152	40
5	Bahan Kimia	22 238	23 666	23 594	23 728	21 170	4 991
6	Hasil Industri menurut Bahan	25 864	29 773	28 462	26 867	23 646	5 425
7	Mesin & Alat Pengangkutan	57 788	65 637	57 823	52 157	45 439	10 395
8	Hasil Industri Lainnya	5 483	6 460	7 076	6 736	6 388	1 750
9	Bahan & Transaksi Khusus Lainnya	70	43	33	26	705	45
	Jumlah	177 436	191 689	186 629	178 179	142 693	31 944

Sumber : Indikator Ekonomi April 2016, BPS

Namun sejak tahun 2013, Indonesia telah mampu mengurangi impor barang-barang konsumsi dan barang modal, ditandai dengan menurunnya nilai impor barang tersebut masing-masing sebesar 2,01 persen dan 17,36 persen dibandingkan tahun 2012, walaupun nilai impor bahan baku menunjukkan peningkatan sebesar 1,31 persen. Tahun 2015, nilai impor barang konsumsi menurun 14,14 persen atau turun sebesar US\$ 1,79 miliar dibandingkan tahun 2014. Nilai impor bahan baku menurun 21,38 persen atau turun sebesar US\$ 29,13 miliar, sementara nilai impor barang modal menurun 15,58 persen.

Impor Indonesia jika ditinjau menurut golongan barang ekonomi masih didominasi mesin dan alat pengangkutan (SITC 7), bahan bakar, bahan penyemir, dan sebagainya (SITC 3), dan hasil industri menurut bahan (SITC 6). Nilai ketiga golongan barang SITC tersebut berkontribusi antara 65-72 persen terhadap total

Gambar 6.6
Pertumbuhan, Distribusi, dan Nilai Impor Indonesia
Menurut Golongan Barang, Tahun 2015



import selama periode 2011-2015. Impor mesin dan peralatan masih tinggi karena belum mampu diproduksi sendiri dalam negeri. Keterbatasan teknologi, khususnya yang membutuhkan presisi tinggi, hanya dapat diandalkan dari impor, disamping keterbatasan bahan baku. Sementara permintaan penduduk Indonesia yang tinggi terhadap bahan bakar mendorong pemerintah untuk mengimpor bahan bakar guna mencukupi kebutuhan dalam negeri yang terus melonjak.

Gambar 6.6 menjelaskan pertumbuhan dari semua golongan barang yang diimpor bernilai negatif, kecuali bahan dan transaksi khusus lainnya (SITC 9). Mesin dan alat angkutan (SITC 7) tumbuh -12,88 persen dengan kontribusi 31,84 persen terhadap total impor. Penurunan impor tertinggi tahun 2015 terletak pada bahan bakar, bahan penyemir, dsb (SITC 3) turun sebesar 43,03 persen dengan kontribusi 17,54 persen. Hasil industri menurut bahan (SITC 7) menurun 11,99 persen dengan kontribusi 16,57 persen. Sementara kontribusi terendah disumbang dari minuman dan tembakau (SITC 1) dengan kontribusi 0,39 persen.

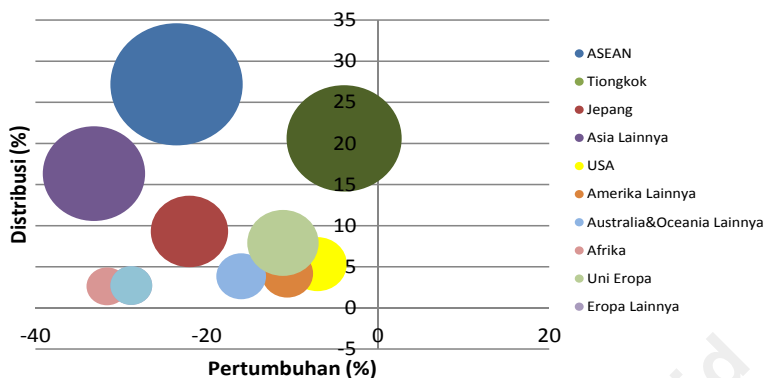
2. Impor Menurut Negara Asal

**Tabel 6.8. Impor Indonesia Menurut Negara Asal (juta US\$),
Tahun 2011–2016**

Negara Asal	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (Jan-Maret)
1. ASEAN	51 109,0 (28,80)	53 662,2 (27,99)	53 851,1 (28,85)	50 726,0 (28,47)	35 208,5 (24,67)	8 408,4 (26,32)
(Thailand)	10 405,1 (5,86)	11 438,5 (5,97)	10 703,1 (5,73)	9 781,0 (5,49)	11 181,3 (7,84)	2 395,7 (7,50)
(Malaysia)	10 404,9 (5,86)	12 243,5 (6,39)	13 322,5 (7,14)	10 855,4 (6,09)	8 105,7 (5,68)	1 681,2 (5,26)
(Singapura)	25 964,7 (14,63)	26 087,3 (13,61)	25 581,5 (13,71)	25 185,7 (14,14)	16 602,2 (11,63)	3 229,0 (10,11)
2. Tiongkok	26 212,2 (14,77)	29 385,8 (15,33)	29 849,5 (15,99)	30 624,3 (17,19)	29 410,9 (20,61)	7 157,8 (22,41)
3. Jepang	19 436,6 (10,95)	22 767,8 (11,88)	19 284,6 (10,33)	17 007,6 (9,55)	13 263,5 (9,30)	3 015,6 (9,44)
4. Asia Lainnya	35 494,5 (20,00)	36 054,2 (18,81)	36 064,6 (19,32)	34 863,1 (19,57)	27 045,8 (18,95)	4 841,3 (15,16)
5. Amerika Serikat	10 813,2 (6,09)	11 602,6 (6,05)	9 065,7 (4,86)	8 170,1 (4,59)	7 593,2 (5,32)	1 621,5 (5,08)
6. Amerika Lainnya	6 659,6 (3,75)	6 836,2 (3,57)	7 351,6 (3,94)	6 647,6 (3,73)	5 942,4 (4,16)	1 444,2 (4,52)
7. Australia & Oceania	5 943,9 (3,35)	6 055,6 (3,16)	5 867,6 (3,14)	6 522,3 (3,66)	5 479,9 (3,84)	1 202,3 (3,76)
8. Afrika	4 029,9 (2,27)	5 703,4 (2,98)	5 554,0 (2,98)	5 469,0 (3,07)	3 699,9 (2,59)	768,8 (2,41)
9. Uni Eropa	12 499,6 (7,04)	14 132,2 (7,37)	13 708,1 (7,35)	12 691,4 (7,12)	11 282,8 (7,91)	2 727,9 (8,54)
(Jerman)	3 393,8 (1,91)	4 188,5 (2,19)	4 426,3 (2,37)	4 091,2 (2,30)	3 033,5 (2,13)	722,1 (2,26)
10. Eropa Lainnya	5 237,1 (2,95)	5 469,3 (2,86)	6 031,5 (3,23)	5 457,5 (3,06)	3 767,9 (2,64)	756,6 (2,37)
Jumlah	177 435,6 (100,00)	191 689,5 (100,00)	186 628,7 (100,00)	178 178,8 (100,00)	142 694,8 (100,00)	31 944,4 (100,00)

Sumber : Indikator Ekonomi April 2016, BPS

Gambar 6.7
Pertumbuhan, Distribusi, dan Nilai Impor Indonesia
Menurut Negara Asal, Tahun 2015



ASEAN, Tiongkok dan Jepang merupakan negara importir terbesar bagi Indonesia. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia tentunya lebih mudah melakukan aktivitas ekspor impor dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Tahun 2011, impor dari ASEAN mencapai 28,80 persen dari total impor, sementara tahun 2015 sebesar 24,67 persen. Sebagai salah satu negara tetangga di kawasan ASEAN, Singapura menjadi importir penting bagi Indonesia dengan kontribusi lebih dari 10 persen terhadap total impor. Nilai impor dari Singapura pada triwulan I 2016 sebesar US\$ 3,23 miliar atau 10,11 persen dari total impor Indonesia. Sementara itu, dalam periode 2011-2015, kontribusi nilai impor dari Tiongkok meningkat hingga 6 persen. Nilai impor dari Tiongkok pada tahun 2011 sebesar US\$ 26,21 miliar, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi US\$ 29,41 miliar atau meningkat US\$ 3,20 miliar selama lima tahun terakhir. Hingga triwulan I 2016, kontribusi impor dari Tiongkok mencapai 22,41 persen dengan nilai US\$ 7,16 miliar. Jepang merupakan salah satu negara importir terbesar bagi Indonesia dengan kontribusi 9,30 persen senilai US\$ 13,26 miliar dan pada triwulan I 2016 telah menembus angka US\$ 3,02 miliar.

Gambar 6.7 menunjukkan bahwa penurunan total nilai impor di tahun 2015 diikuti penurunan nilai impor di seluruh negara importir, ditandai dengan grafik pertumbuhan yang bernilai negatif. Pertumbuhan impor terendah terjadi di Afrika (-32,35 persen), ASEAN (-30,59 persen) dan negara-negara Eropa lainnya di luar Uni Eropa (-30,96 persen). Sementara dari sisi kontribusi dan besaran nilai, ASEAN, Tiongkok, dan Asia Lainnya masih mendominasi impor Indonesia di tahun 2015.

Neraca Perdagangan Indonesia

Tahun 2016, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 5,8-6,2 persen, meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,79 persen. Kondisi ini sejalan dengan perbaikan perekonomian global (Bappenas, 2015). Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia menunjukkan tren yang defisit sejak tahun 2012. Namun demikian, defisit tahun 2014 telah mengalami penurunan dibandingkan defisit terbesar tahun 2013 mencapai US\$ 4,08 miliar. Surplus neraca perdagangan non migas yang meningkat mampu menekan

**Tabel 6.9. Neraca Perdagangan Indonesia (juta US\$),
Tahun 2011–2016**

Tahun	Migas	Non Migas	Jumlah
2011	775,5 ^r	25 285,5 ^r	26 061,0
2012	- 5 585,5	3 916,3 ^r	- 1 669,2 ^r
2013	- 12 633,4 ^r	8 556,5	- 4 076,9 ^r
2014	- 15 943,1 ^r	13 744,3 ^r	- 2 198,8 ^r
2015	- 6 038,8	13 710,7	7 671,9
2016 (Jan-Maret)	- 436,2	2 094,4	1 658,2

Sumber : Indikator Ekonomi Maret 2016, BPS

defisit neraca perdagangan migas sehingga memperbaiki defisit total neraca perdagangan. Penurunan nilai impor berkontribusi terhadap peningkatan surplus neraca perdagangan non migas, yang berperan dalam perbaikan defisit neraca perdagangan. Krisis global yang melanda sejak tahun 2012 berimbas pada perekonomian yang lesu, dan menyebabkan pertumbuhan kinerja ekspor non migas bernilai negatif sejak tahun 2012 (Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2015).

Tahun 2015, neraca perdagangan Indonesia sudah menunjukkan surplus sebesar US\$ 7,67 miliar. Hal ini didukung penurunan defisit neraca perdagangan migas yang mencapai 62,12 persen dibandingkan tahun 2014. Penyusutan impor minyak karena harga minyak dunia yang lebih rendah dan turunnya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai dampak positif dari reformasi subsidi oleh pemerintah telah menopang perbaikan neraca perdagangan Indonesia. Namun, pemerintah tetap perlu waspada mengingat nilai positif dari surplus neraca perdagangan kumulatif tahun 2015 merupakan hasil dari impor yang semakin melemah dan ekspor yang tidak mengalami peningkatan. Penurunan impor terbesar terjadi pada impor bahan baku yang menggambarkan proyek-proyek investasi pemerintah maupun swasta belum berjalan maksimal. Peningkatan ekspor diprediksi akan sulit dicapai mengingat harga komoditas dan permintaan global masih rendah, serta perekonomian Tiongkok masih belum pulih hingga 2016 (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN SETJEN DPR RI). Hingga triwulan I 2016, neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus US\$ 1,66 miliar, dengan kontribusi defisit neraca perdagangan migas US\$ 0,44 miliar dan surplus neraca perdagangan non migas US\$ 2,09 miliar.

Untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, peningkatan ekspor harus dilakukan di antaranya melalui stabilisasi harga komoditas utama ekspor Indonesia dan peningkatan ekspor produk-produk bernilai tambah tinggi. Guna meningkatkan kapasitas dan kualitas produk industri mesin dalam upaya menekan impor, pemerintah memberikan dukungan berupa penyediaan bahan baku berupa bahan logam, termasuk paduan logam spesifik dan bahan komposit, plastik, dan karet. Untuk mengurangi impor migas, mengoptimalkan penggunaan biofuel merupakan langkah yang tepat. Guna mencapai target pemerintah untuk meningkatkan ekspor non migas sebesar 9 persen di tahun 2016, beberapa langkah yang ditempuh Kemendag yaitu: 1) deregulasi dan debirokratisasi untuk mempermudah ekspor; 2) membuka pasar ekspor di luar negeri melalui perjanjian perdagangan bebas, seperti *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dengan Uni Eropa, *European Free Trade Association* (EFTA), dan perjanjian-perjanjian bilateral (Agustinus, 2016).



7

Kinerja Sektor Moneter

Arah Kebijakan yang Dilakukan Pemerintah dan BI di Tahun 2015

Kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu pada tahun 2015 yang ditunjukkan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan ketidakpastian pasar keuangan global baik secara langsung maupun tidak langsung akan berimbas pada perekonomian Indonesia. Kondisi perekonomian dunia tersebut menjadi faktor eksternal yang selalu menghantui perekonomian nasional. Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2015 pun mulai menunjukkan adanya perlambatan kinerja ekonomi dan penurunan kinerja beberapa sektor keuangan. Melambatnya pertumbuhan ekonomi ditengarai karena kinerja ekspor Indonesia yang menurun akibat dari menurunnya permintaan produk-produk Indonesia dari negara-negara yang sedang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta menurunnya harga-harga komoditas dunia. Selain itu, kinerja pasar keuangan dalam negeri pun tampak menunjukkan adanya pelemahan terutama pada terdepresiasi nilai tukar rupiah. Faktor yang menjadi pemicu diantaranya ketidakpastian kenaikan suku bunga *Fed Fund Rate* (FFR), kekhawatiran negosiasi fiskal Yunani, dan devaluasi yuan. Sementara itu, faktor dari dalam negeri pun tidak luput turut menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi domestik.

Selama tahun 2015, sektor keuangan mampu menunjukkan kinerja yang baik terutama sistem pembayaran nasional dan pengelolaan uang rupiah. Tentunya dengan kinerja yang baik dapat mendukung kegiatan perekonomian nasional serta menjaga kestabilan sistem keuangan dan moneter. Sistem pembayaran yang telah dijalankan sudah mampu memproses transaksi keuangan dari berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Sementara itu, dari sisi pengelolaan uang rupiah, kinerja yang telah dicapai yaitu terpenuhinya kebutuhan uang tunai dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar. Bank Indonesia terus melakukan berbagai kebijakan demi mendukung baiknya kinerja sistem pembayaran nasional yaitu dengan berfokus pada penguatan infrastruktur dalam rangka meningkatkan keandalan dan keamanan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia juga menerapkan lima kebijakan umum yang terintegrasi guna memperkuat pengelolaan uang rupiah yaitu menjaga kecukupan kas Bank Indonesia, meningkatkan kualitas uang rupiah yang beredar di masyarakat, memperluas jaringan distribusi uang dan layanan kas, memperkuat komunikasi ciri keaslian uang, dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran uang palsu.

Dari sisi kondisi nilai tukar rupiah, pada tahun 2015 rupiah mengalami tekanan depresiasi terhadap dolar Amerika yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh faktor eksternal seperti normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, krisis utang Yunani, devaluasi nilai mata uang yuan, dan divergensi kebijakan moneter global. Sementara itu, faktor internal atau dari dalam negeri lebih dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik. Tekanan depresiasi rupiah terjadi pada awal tahun

hingga akhir triwulan III 2015 dengan puncaknya pada September 2015. Selanjutnya memasuki triwulan akhir 2015 rupiah mengalami fase stabilisasi karena didukung dengan langkah stabilisasi nilai tukar oleh Bank Indonesia, Pemerintah, dan OJK, serta meredanya ketidakpastian eksternal terkait waktu kenaikan suku bunga di AS.

Selanjutnya, perkembangan suku bunga domestik masih sesuai dengan arah kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Pada awal tahun 2015 Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 7,75 persen atau sama seperti akhir tahun 2014. Hal ini ditetapkan karena untuk menjaga target inflasi di kisaran 4,0 persen plus minus 1,0 persen pada 2015 dan 2016. Kebijakan ini juga searah dengan penurunan neraca berjalan ke arah yang lebih baik. Memasuki bulan Februari 2015 BI mulai menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 bps menjadi 7,50 persen. Keputusan BI tersebut dinilai masih konsisten dengan kondisi ekonomi saat ini yaitu menjaga inflasi. Angka BI rate ini pun bertahan sampai akhir tahun 2015. Sementara itu, kondisi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada awal tahun 2015 ditandai oleh likuiditas yang tetap terjaga. Namun demikian pada akhir tahun 2015 likuiditas di PUAB sedikit mengetat, walaupun secara umum masih tetap terjaga. Menurut BI, tekanan stabilitas makro ekonomi akan mereda sehingga terdapat kelonggaran kebijakan moneter Indonesia. Namun demikian, BI akan tetap berhati-hati dan mencermati risiko global di tengah tekanan pasar global.

Memasuki tahun 2016, peningkatan ekonomi pada akhir tahun 2015 diperkirakan akan tetap berlanjut pada tahun 2016. Di sisi lain, stabilitas sistem keuangan tetap solid, ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan. Bank Indonesia tetap mencermati risiko terhadap stabilitas makroekonomi yang dapat mengganggu pertumbuhan, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun faktor internal. Beberapa faktor eksternal yang perlu diwaspadai yaitu ketidakpastian ekonomi global masih cukup tinggi terutama bersumber dari risiko perekonomian Tiongkok, anjloknya harga minyak, serta ketidakpastian pasar keuangan global. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk memastikan pengendalian inflasi, penguatan stimulus pertumbuhan, dan reformasi struktural berjalan dengan baik sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ke depan dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.

Perkembangan Uang Beredar (M2)

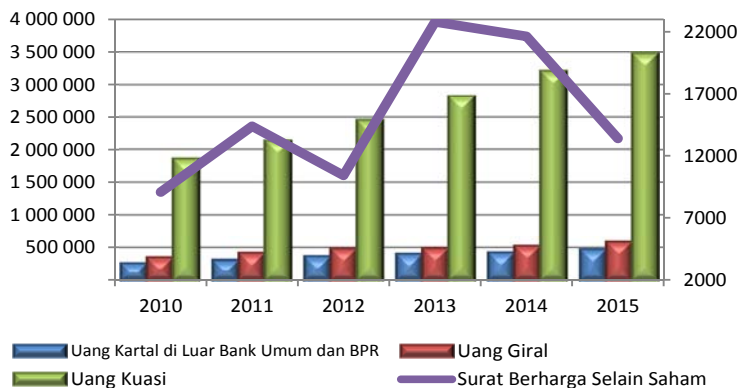
Salah satu instrumen untuk mengetahui kinerja sektor keuangan yaitu dengan instrumen jumlah uang yang beredar (M2) di masyarakat. Jumlah uang yang beredar (M2) selalu menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Hingga akhir periode tahun 2015 peningkatan laju uang beredar di masyarakat tercatat sebesar 8,95 persen (*y-o-y*) atau naik sebesar Rp 373,4 triliun. Peningkatan jumlah uang yang beredar di akhir tahun 2015 bila dibandingkan

pada akhir tahun 2014 disebabkan karena meningkatnya jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Tercatat jumlah uang kartal yang beredar mengalami peningkatan sebesar Rp 50,1 triliun (11,95 persen), uang giral bertambah sebesar Rp 62,9 triliun (12,04 persen), serta uang kuasi bertambah sebesar Rp 268,6 triliun (8,37 persen).

Tabel 7.1 menunjukkan bahwa jumlah uang yang beredar M2 pada akhir tahun 2014 sebesar Rp 4.173,3 triliun dan pada akhir tahun 2015 sebesar Rp 4.546,7 triliun. Bila dilihat menurut komponen uang beredar, uang kuasi merupakan penyumbang uang beredar yang paling besar. Pada tahun 2014 jumlah uang yang beredar disumbang oleh uang kuasi sebesar 76,90 persen, diikuti uang giral sebesar 12,53 persen, uang kartal sebesar 10,05 persen serta surat berharga lainnya sebesar 0,52 persen. Sementara itu, pada tahun 2015 jumlah uang yang beredar disumbang oleh uang kuasi sebesar 76,50 persen, diikuti uang giral sebesar 12,89 persen, uang kartal sebesar 10,30 persen serta surat berharga lainnya sebesar 0,29 persen.

Sepanjang tahun 2015 jumlah uang beredar tertinggi tercatat berada pada bulan Desember karena adanya permintaan dari masyarakat yang meningkat terkait libur natal dan libur akhir tahun (menyambut tahun baru). Namun demikian, bila dilihat dari pertumbuhan *y-o-y*-nya mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan kondisi akhir November. Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa jumlah uang yang beredar pada Desember 2015 hanya tumbuh 8,95 persen, lebih rendah dari November 2015 yang sebesar 9,21 persen. Perlambatan pertumbuhan uang yang beredar tersebut disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan uang kuasi atau Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari Simpanan Berjangka dan Tabungan (rupiah dan valas) serta Simpanan Giro Valuta Asing. Posisi uang kuasi pada akhir Desember 2015 tercatat sebesar Rp 3.478,1 triliun atau tumbuh melambat dari 9,26 persen (*y-o-y*) pada November 2015 menjadi 8,37 persen (*y-o-y*) pada Desember 2015. Perlambatan tersebut didorong oleh melambatnya pertumbuhan simpanan berjangka valas dan rupiah, tabungan valas dan giro valas.

Gambar 7.1
Jumlah Uang Beredar (miliar rupiah), Tahun 2010–2015



Sumber: SEKI Edisi April 2016, Bank Indonesia (data diolah)

Sementara itu, perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh stabil sebesar 8,0 persen (*y-o-y*). Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro dan tabungan yang secara keseluruhan meningkat, meskipun pertumbuhan simpanan berjangka melambat. Hal ini mengindikasikan terjadinya pergeseran dana simpanan masyarakat di perbankan dari yang sifatnya jangka menengah panjang kepada simpanan jangka pendek, ditengah kecenderungan kenaikan suku bunga simpanan.

Perlambatan pertumbuhan M2 yang terjadi pada akhir tahun 2015 itu masih bisa tertahan oleh pertumbuhan uang M1 yaitu uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral (giro berdenominasi rupiah) yang mengalami peningkatan. Posisi uang kartal dan giral pada akhir Desember 2015 tercatat sebesar Rp 1.055,3 triliun atau tumbuh meningkat menjadi 12,00 persen (*y-o-y*) dibanding bulan sebelumnya (10,00 persen *y-o-y*). Peningkatan tersebut ditopang oleh peningkatan pertumbuhan uang kartal sebagai respons dari tingginya permintaan uang kartal masyarakat pada akhir tahun terkait libur natal dan tahun baru.

Bila dilihat berdasarkan pertumbuhan M2 (*y-o-y*) setiap bulannya, pertumbuhan M2 pada Maret 2015 merupakan yang tertinggi bila dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Tercatat pertumbuhan M2 (*y-o-y*) pada bulan Maret 2015 sebesar 16,26 persen. Pertumbuhan M2 pada Maret 2015 ini juga dapat dikatakan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 16,04 persen (*y-o-y*). Sumber pertumbuhan M2 berasal dari pertumbuhan M1 sebesar 12,19 persen dan uang Kuasi sebesar 17,60 persen. Pertumbuhan M2 pada Maret 2015 dipengaruhi oleh operasi keuangan Pemerintah Pusat (Pempus) yang mengalami ekspansi terkait dengan tumbuhnya tagihan bersih kepada Pempus. Ekspansi Pempus tersebut antara lain berupa belanja subsidi dan pembayaran dana bagi hasil yang terealisasi pada Maret 2015. Tabel 7.1 menunjukkan bahwa posisi M2 pada bulan Maret 2015 tercatat sebesar Rp 4.246,4 triliun rupiah dengan komponen uang M1 sebesar Rp 957,6 triliun, uang kuasi sebesar Rp 3.275,5 triliun rupiah, serta surat berharga selain saham sebesar Rp 13,3 triliun.

Selanjutnya, jumlah M1 yang beredar tertinggi terjadi pada bulan September 2015 yaitu mencapai Rp 1.063,0 triliun yang terdiri dari uang kartal sebesar Rp 428,9 triliun dan uang giral sebesar Rp 634,2 triliun. Meskipun jumlah M1 yang beredar tertinggi sepanjang tahun 2015, pertumbuhan M1 (*y-o-y*) dapat dikatakan melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan M1 bulan sebelumnya. Pertumbuhan M1 pada bulan September 2015 sebesar 12,03 persen atau lebih rendah dengan pertumbuhan M1 bulan Agustus 2015 yang sebesar 14,57 persen, merupakan pertumbuhan M1 yang tertinggi disepanjang tahun 2015 dimana tidak terlepas dari meningkatnya uang giral yang cukup tinggi di atas 20 persen. Melambatnya pertumbuhan M1 tersebut disebabkan terutama oleh melambatnya pertumbuhan giro rupiah yang sejalan dengan perkiraan melemahnya konsumsi sebagaimana terindikasi dari Indeks Keyakinan Konsumen yang menurun pada September 2015.

Beranjak ke peredaran uang kartal, jumlah uang kartal yang beredar di masyarakat mencapai angka tertingginya di akhir tahun atau bulan Desember 2015. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan uang kartal di masyarakat pada akhir tahun terkait libur natal dan tahun baru. Tercatat uang kartal yang beredar mencapai Rp 469,4 triliun atau meningkat sebesar 11,95 persen (*y-o-y*). Pertumbuhan uang kartal (*y-o-y*) ini merupakan tertinggi sepanjang tahun 2015. Begitu juga dengan pertumbuhan tiap bulannya, bulan Desember mencatatkan pertumbuhan tertinggi yaitu uang kartal yang beredar dapat tumbuh sebesar 7,22 persen bila dibandingkan dengan bulan November 2015 yang jumlah uang kartal beredarnya sebesar Rp 437,8 triliun. Sementara itu, pertumbuhan uang kartal pada bulan Juli 2015 menjadi pertumbuhan tertinggi kedua yaitu sebesar 5,31 persen. Meningkatnya uang kartal yang beredar pada bulan Juli 2015 dibanding bulan Juni 2015 disebabkan karena

**Tabel 7.1 Perkembangan Uang Beredar (miliar rupiah),
Tahun 2014–Maret 2016 ¹**

Akhir Periode	M2					Jumlah
	M1			Uang Kuasi	Surat Berharga Selain Saham	
	Uang Kartal	Uang Giral	Jumlah			
2014						
Januari	380 070	462 608	842 678	2 787 449	22 223	3 652 349
Februari	367 652	466 881	834 532	2 787 035	13 493	3 635 060
Maret	377 438	476 065	853 502	2 785 176	13 852	3 652 531
April	372 342	508 129	880 470	2 828 686	12 726	3 721 882
Mei	380 474	526 253	906 727	2 860 135	14 094	3 780 955
Juni	381 638	564 080	945 718	2 903 415	8 829	3 857 962
Juli	452 788	465 778	918 566	2 959 732	9 110	3 887 407
Agustus	399 270	496 557	895 827	2 982 674	8 019	3 886 520
September	395 230	553 939	949 168	3 044 842	16 136	4 010 147
Oktober	396 113	544 236	940 349	3 066 421	17 719	4 024 489
Nopember	405 694	549 841	955 535	3 099 350	21 785	4 076 670
Desember	419 262	522 960	942 221	3 209 475	21 630	4 173 327
2015						
Januari	391 256	526 824	918 079	3 233 881	22 866	4 174 826
Februari	387 889	539 958	927 848	3 278 945	11 331	4 218 123
Maret	382 005	575 576	957 580	3 275 499	13 282	4 246 361
April	395 687	563 690	959 376	3 302 204	14 131	4 275 711
Mei	406 499	574 416	980 915	3 293 147	14 307	4 288 369
Juni	409 713	629 805	1 039 518	3 305 641	13 643	4 358 802
Juli	431 460	600 446	1 031 906	3 325 908	15 394	4 373 208
Agustus	423 101	603 222	1 026 323	3 362 148	15 615	4 404 085
September	428 860	634 178	1 063 039	3 426 343	19 221	4 508 603
Oktober	435 065	601 246	1 036 311	3 391 260	15 508	4 443 078
Nopember	437 756	613 435	1 051 191	3 386 209	14 925	4 452 325
Desember	469 379	585 906	1 055 285	3 478 059	13 399	4 546 743
2016						
Januari	439 872	606 385	1 046 257	3 436 492	15 613	4 498 361
Februari	422 149	613 401	1 035 551	3 473 033	13 368	4 521 951
Maret	420 140	644 524	1 064 664	3 482 969	13 441	4 561 074

Catatan : ¹ Akhir periode

Sumber : SEKI Edisi April 2016, Bank Indonesia

memasuki libur idul fitri dan memasuki tahun ajaran baru sekolah. Namun demikian, pertumbuhan *y-o-y*-nya justru mengalami kontraksi sebesar 4,71 persen. Tercatat pada Juli 2014 uang kartal yang beredar mencapai Rp 452,8 triliun, sedangkan pada Juli 2015 jumlah uang kartal yang beredar hanya Rp 431,5 triliun.

Sebagai salah satu komponen M1, uang giral mempunyai nilai yang lebih besar daripada uang kartal. Sepanjang tahun 2015 rata-rata komposisi uang giral pada akhir bulan tercatat sebesar 58,51 persen sedangkan uang kartal sebesar 41,49 persen. Tercatat hingga akhir tahun 2015 jumlah uang giral sebesar Rp 585,9 triliun atau mengalami penurunan sebesar 4,49 persen (Rp 27,5 triliun) bila dibandingkan dengan bulan November 2015 yang sebesar Rp 613,4 triliun. Namun, bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, uang giral mencatatkan pertumbuhan sebesar 12,04 persen, dimana jumlah uang giral pada Desember 2014 sebesar Rp 523,0 triliun.

Peredaran uang giral tertinggi sepanjang tahun 2015 tercatat berada pada bulan September 2015 yaitu sebesar Rp 634,2 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 5,13 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan meningkat sebesar 14,48 persen bila dibandingkan dengan September 2014. Sementara itu dari pertumbuhan uang giral pada akhir bulan, pertumbuhan tertinggi berada pada bulan Juni 2015 sebesar 9,64 persen, sedangkan pada bulan Oktober 2015 terjadi kontraksi tertinggi sebesar 5,19 persen. Bila dibandingkan secara *y-o-y*, pertumbuhan uang giral tertinggi terjadi berada pada bulan Juli 2015 sebesar 28,91 persen atau naik dari Rp 465,8 triliun pada Juli 2014 menjadi Rp 600,4 triliun pada Juli 2015.

Selanjutnya, uang kuasi yang merupakan komponen terbesar dibandingkan komponen lainnya pada M2 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,68 persen setiap bulannya sepanjang tahun 2015. pertumbuhan uang kuasi yang beredar tertinggi terjadi pada akhir tahun 2015 atau Desember 2015 yaitu sebesar 2,71 persen dengan volume uang kuasi sebesar Rp 3.478,1 triliun. Ini berarti bahwa terjadi peningkatan sebesar Rp 91,8 triliun dibandingkan pada November 2015 yang sebesar Rp 3.386,2 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh semakin banyaknya masyarakat yang menginvestasikan sebagian dari pendapatannya baik dalam bentuk deposito maupun tabungan dalam rupiah dan valuta asing.

Memasuki awal tahun 2016, seiring berakhirnya musim libur tahun baru maka peredaran M2 dan M1 selalu mengalami penurunan. Hal ini sudah rutin terjadi penurunan pada awal-awal tahun. Penurunan M2 pada akhir Januari 2016 sebesar 1,06 persen sedangkan M1 mengalami penurunan sebesar 0,86 persen. Tercatat jumlah uang beredar M2 pada awal tahun sebesar Rp 4.498,4 triliun sedangkan M1 sebesar Rp 1.046,3 triliun. Hingga akhir triwulan I atau Maret 2016 jumlah uang M1 dan M2 selalu menunjukkan peningkatan setiap bulannya. Volume uang M2 dan M1 yang beredar hingga akhir Maret 2016 masing-masing sebesar Rp 4.561,1 triliun dan Rp 1.064,7 triliun. Bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya M2 bisa tumbuh sebesar 0,86 persen sedangkan M1 tumbuh sebesar 2,81 persen.

Bila dibandingkan secara *y-o-y*, pertumbuhan M2 pada Maret 2016 meningkat sebesar 7,41 persen, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Februari 2016 yang sebesar 7,20 persen (*y-o-y*). Peningkatan pertumbuhan M2 bersumber dari pertumbuhan uang kuasi yang lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan Uang Kuasi terutama dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka berdenominasi rupiah. Pertumbuhan M2 juga dipengaruhi oleh akselerasi pertumbuhan kredit perbankan terutama dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan Kredit Modal Kerja (KMK). Salah satu faktor yang menyebabkan mendorong pertumbuhan penyaluran kredit perbankan yaitu pelonggaran kebijakan moneter, baik melalui penurunan BI rate dan GWM. Sementara itu, pertumbuhan M1 secara *y-o-y* pada akhir Maret 2016 sebesar 11,18 persen atau melambat bila dibandingkan pada bulan sebelumnya yang mencapai 11,61 persen karena melambatnya pertumbuhan uang giral.

Peredaran Uang Primer dan Komponennya

Banyaknya peredaran uang di masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait dengan peningkatan permintaan uang dari masyarakat. Permintaan masyarakat akan uang yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan hidup akan barang-barang konsumsi maupun pelayanan jasa masyarakat. Biasanya peningkatan kebutuhan hidup masyarakat terjadi karena faktor musiman seperti adanya kalender pendidikan, hari-hari libur nasional, maupun hari raya keagamaan. Seperti kalender pendidikan yang terjadi pada bulan Juli dimana merupakan awal tahun ajaran baru sekolah dimana kebutuhan masyarakat akan uang untuk membeli kebutuhan perlengkapan sekolah maupun untuk membayar biaya awal pendidikan. Terkait hari libur nasional, masyarakat cenderung melakukan perjalanan untuk rekreasi atau wisata sehingga kebutuhan uang untuk mencukupi kebutuhan selama perjalanannya semakin meningkat diantaranya untuk biaya transportasi, biaya tiket masuk tempat wisata, membeli oleh-oleh, maupun biaya akomodasi lainnya. Sementara itu, terkait hari raya keagamaan seperti pada masa bulan puasa Ramadhan, hari raya Idul Fitri, hari raya Natal, maupun hari raya keagamaan lainnya, kebutuhan masyarakat pun cenderung mengalami peningkatan. Biasanya masyarakat membeli berbagai macam barang dalam rangka persiapan perayaan keagamaan, tentunya uang yang dibutuhkan juga akan semakin meningkat.

Selain faktor musiman kondisi perekonomian dan faktor inflasi juga turut serta memberi dampak pada kenaikan peredaran uang. Membaiknya kondisi perekonomian di dalam negeri akan diikuti oleh kondisi ekonomi masyarakat yang baik pula. Hal tersebut dapat dilihat dari daya beli masyarakat yang semakin meningkat sehingga konsumsi masyarakat pun akan meningkat. Untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi itulah dibutuhkan uang sebagai alat pembayaran. Sementara faktor inflasi yang menyebabkan kenaikan harga-harga barang kebutuhan hidup, menyebabkan biaya atau pengeluaran masyarakat akan meningkat. Alhasil kebutuhan akan uang juga akan meningkat pula.

**Tabel 7.2 Perkembangan Uang Primer (miliar rupiah),
Tahun 2014–Maret 2016 ¹**

Akhir Periode	Uang Kartal Yang Diedarkan		Giro Bank	Giro Perusahaan & Perorangan	SBI	Jumlah
	Uang Kartal	Kas Bank				
2014						
Januari	380 070	78 553	256 170	139	66 569	781 500
Februari	367 652	74 830	248 006	449	64 230	755 167
Maret	377 438	70 925	249 988	243	72 771	771 365
April	372 342	77 083	254 640	792	73 724	778 580
Mei	380 474	79 906	255 312	555	72 477	788 723
Juni	381 638	83 231	258 843	848	70 234	794 794
Juli	452 788	111 736	266 783	864	59 975	892 146
Agustus	399 270	77 869	290 298	727	55 176	823 341
September	395 230	78 748	270 998	703	71 551	817 230
Oktober	396 113	81 468	277 864	1 391	93 105	849 940
Nopember	405 694	75 054	277 903	1 140	95 232	855 023
Desember	419 262	109 275	287 484	1 397	101 002	918 421
2015						
Januari	391 256	80 648	292 186	880	89 541	854 510
Februari	387 889	77 721	285 038	244	100 241	851 132
Maret	382 005	80 608	285 976	32	99 720	848 341
April	395 687	84 584	294 991	90	98 357	873 709
Mei	406 499	78 347	293 744	95	96 606	875 290
Juni	409 713	96 874	292 691	139	82 650	882 067
Juli	431 460	107 706	293 972	770	74 621	908 529
Agustus	423 101	90 910	298 519	758	74 718	888 006
September	428 860	89 440	302 056	65	66 076	886 497
Oktober	435 065	85 105	303 373	703	66 943	891 189
Nopember	437 756	88 847	317 666	32	50 870	895 171
Desember	469 534	117 228	308 756	366	50 031	945 916
2016						
Januari	439 872	88 662	285 308	35	70 911	884 788
Februari	422 149	89 060	289 438	36	79 393	880 077
Maret	420 140	88 410	254 276	100	101 323	864 248

Catatan : ¹ Akhir periode

Sumber : Sumber : SEKI Edisi April 2016, Bank Indonesia

Uang primer merupakan kewajiban bank sentral (BI) kepada bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR), dan sektor swasta (tidak termasuk Pemerintah Pusat dan luar negeri). Komponen uang primer terdiri dari uang kartal yang diedarkan (berupa uang kartal di bank umum dan BPR serta kas bank umum dan BPR), saldo giro positif bank umum pada BI (dalam rupiah), giro sektor swasta di BI, serta SBI dan SDBI yang digunakan dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum sekunder. Pada akhir tahun 2015 peredaran uang primer yang dikeluarkan oleh BI mencapai Rp 945,9 triliun. Angka ini juga merupakan pencapaian tertinggi selama tahun 2015. Jumlah uang primer yang beredar tersebut didominasi oleh uang kartal yang diedarkan sebesar Rp 586,8 triliun (62,03 persen) dan giro bank umum (32,64 persen). Bila dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2014, peredaran uang primer pada akhir tahun 2015 tumbuh sebesar 3,00 persen (*y-o-y*). Peningkatan ini disebabkan meningkatnya

uang kartal yang diedarkan sebesar 11,02 persen dan giro bank umum sebesar 7,40 persen. Secara keseluruhan pertumbuhan uang primer yang beredar lebih kecil dari pertumbuhan uang kartal yang diedarkan dan giro bank umum karena tertahan oleh penurunan SBI dan giro perusahaan/perorangan yaitu masing-masing sebesar 50,46 persen dan 73,80 persen.

Salah satu komponen uang primer yaitu uang kartal. Uang kartal merupakan uang kertas dan uang logam rupiah yang dikeluarkan dan diedarkan oleh BI sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal memang masih menjadi alat pembayaran yang sangat penting dan dominan digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran khususnya pada transaksi yang bernilai kecil. Dinamika pertumbuhan uang kartal yang diedarkan memiliki kecenderungan tidak terlepas dari perkembangan aktivitas perekonomian. Tren pertumbuhan uang kartal cenderung melambat pada awal tahun hingga pertengahan tahun 2015. Perlambatan tersebut tidak berlanjut setelah pertengahan tahun, namun justru menunjukkan adanya peningkatan. Peningkatan jumlah uang kartal yang diedarkan pada triwulan III tersebut sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi domestik pada periode tersebut. Mulai meningkatnya tren pertumbuhan uang kartal yang diedarkan ditandai dengan meningkatnya penarikan uang kartal oleh bank penyalur APBN pada periode yang sama seiring dengan membaiknya pertumbuhan konsumsi pemerintah. Sementara itu, *Cash in Vault* masih menunjukkan perlambatan sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga rupiah perbankan yang masih tertahan selama tahun 2015.

Bila dilihat berdasarkan setiap triwulan, pada Triwulan I 2015 secara umum perkembangan jumlah uang kartal yang diedarkan cenderung mengalami penurunan setiap bulannya. Pada bulan Januari 2015 jumlah uang kartal yang diedarkan tercatat sebesar Rp 471,9 triliun atau menurun sebesar 10,72 persen bila dibandingkan dengan bulan Desember 2014. Penurunan terus berlanjut pada bulan Februari dan Maret 2015. Hingga akhir bulan Maret 2015 uang kartal yang diedarkan tercatat sebesar Rp 462,6 triliun atau melambat sebesar 0,64 persen bila dibandingkan dengan bulan Februari 2015. Sementara itu bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, uang kartal yang diedarkan pada Triwulan I 2015 tumbuh sebesar 3,75 persen (*y-o-y*) atau menurun dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,83 persen (*y-o-y*). Hal ini sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2015 yaitu dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9 persen. Hal ini disebabkan karena adanya faktor siklikal dimana adanya arus balik dana perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia, pasca tingginya kebutuhan uang kartal pada periode Natal dan liburan akhir tahun 2014.

Memasuki triwulan II 2015, jumlah uang kartal yang diedarkan sebesar Rp 490,6 triliun atau tumbuh sebesar 7,06 persen (*y-o-y*) atau mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan pertumbuhan uang kartal yang diedarkan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,11 persen. Peningkatan pertumbuhan ini seiring dengan meningkatnya permintaan uang tunai dari sektor konsumsi rumah tangga karena memasuki periode bulan Ramadhan

2015. Secara bulanan posisi uang kartal yang diedarkan tertinggi terjadi pada bulan Juni sebagai awal memasuki bulan Ramadhan 2015 yaitu sebesar sebesar Rp 506,6 triliun atau tumbuh 4,48 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 484,8 triliun.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi domestik khususnya di sektor konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2015, perkembangan uang tunai yang beredar juga menunjukkan adanya perkembangan. Jumlah uang kartal yang diedarkan pada akhir triwulan III 2015 mencapai Rp 518,3 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 0,83 persen bila dibandingkan dengan bulan Agustus 2015 yang mencapai Rp 514,0 triliun. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dapat dikatakan tumbuh sebesar 6,70 persen ($q-t-q$), sedangkan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 ($y-o-y$) mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,68 persen. Selama triwulan III 2015 peredaran uang kartal tertinggi jatuh pada bulan Juli 2015 sebesar Rp 539,2 triliun, dimana merupakan bulan Ramadhan 2015 dan hari raya Idul Fitri 2015. BI juga mencatatkan bahwa posisi uang kartal yang diedarkan pada hari kerja terakhir Ramadhan 2015 tercatat sebesar Rp 604,2 triliun yg merupakan posisi tertinggi selama triwulan III 2015. Selanjutnya pasca Ramadhan dan Idul Fitri 2015 terjadi penurunan uang kartal yang diedarkan sebesar 4,66 persen menjadi sebesar Rp 514,0 triliun karena terjadinya arus balik dana perbankan ke BI.

Memasuki triwulan akhir 2015, perkembangan uang kartal yang diedarkan mengalami peningkatan setiap bulannya. Peningkatan secara perlahan terjadi pada bulan Oktober 2015 yaitu uang kartal yang diedarkan sebesar Rp 520,2 triliun atau meningkat sebesar 0,36 persen bila dibandingkan dengan akhir September 2015. Peningkatan tersebut terus terjadi hingga akhir Desember 2015 yang merupakan pertumbuhan tertinggi selama periode ini. Uang kartal yang diedarkan pada akhir Desember 2015 tercatat sebesar Rp 586,8 triliun atau meningkat sebesar 11,42 persen bila dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan jumlah uang kartal yang diedarkan di akhir tahun 2015 tersebut disebabkan oleh meningkatnya kegiatan ekonomi pada periode Natal dan liburan akhir tahun 2015.

Salah satu komponen pendukung uang primer lainnya adalah Giro Perusahaan dan Perorangan. Komponen ini memiliki sumbangan yang relatif kecil bila dibandingkan dengan komponen lainnya. Meskipun demikian, komponen ini tetap diperhitungkan untuk peredaran uang primer. Sepanjang tahun 2015, perkembangan Giro Perusahaan dan perorangan cenderung berfluktuatif. Pada akhir bulan Januari 2015, tercatat Giro Perusahaan dan Perorangan sebesar Rp 880 miliar yang merupakan perolehan nilai tertinggi sepanjang tahun 2015, kemudian semakin menurun hingga akhir Maret 2015 menjadi Rp 32 miliar. Pada awal triwulan II penurunan tidak berlanjut, justru menunjukkan peningkatan hingga awal triwulan III (Rp 770 miliar) kemudian berlanjut cenderung mengalami penurunan kembali pada bulan-bulan selanjutnya hingga akhir tahun dengan nilai Giro Perusahaan dan Perorangan sebesar Rp 366 miliar.

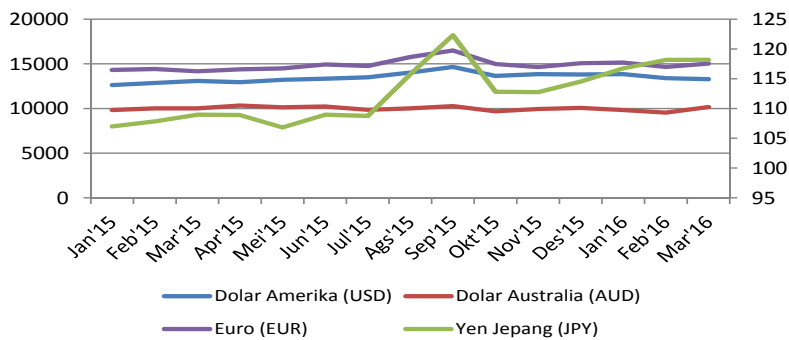
Memasuki awal tahun 2016, perkembangan pengelolaan uang rupiah secara umum tetap sejalan dengan perkembangan ekonomi domestik, khususnya dari sektor konsumsi rumah tangga. Pada akhir Triwulan I posisi uang kartal yang diedarkan sebesar Rp 508,6 triliun, atau tumbuh 9,93 persen (*y-o-y*), atau dapat dikatakan menurun dibandingkan pada akhir Triwulan IV 2015 sebesar Rp 586,8 triliun. Penurunan ini disebabkan karena dampak dari terjadinya arus balik uang kartal dari perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia setelah periode Natal dan liburan akhir tahun 2015. Periode ini merupakan masa libur telah usai, dimana transaksi pembayaran tunai, konsumsi rumah tangga lebih sedikit, masyarakat mungkin menyimpan/menabung kembali uangnya dan biasanya di awal tahun masyarakat penuh kehati-hatian dalam membelanjakan uangnya. Sementara itu, nilai Giro Perusahaan dan Perorangan pada awal tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan pada bulan Desember 2015. Pada akhir Januari 2016 tercatat nilai giro perusahaan dan perorangan sebesar Rp 35 miliar dan cenderung mengalami peningkatan hingga akhir triwulan I 2016 menjadi Rp 100 miliar.

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Perkembangan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap beberapa nilai mata uang asing sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian sistem keuangan global akibat dari adanya gejolak yang terjadi dari luar negeri. Beberapa faktor tersebut antara lain ketidakpastian waktu kenaikan *Federal Fund Rate (FFR)*, kekhawatiran atas krisis utang Yunani, kebijakan devaluasi mata uang yuan, serta divergensi kebijakan moneter global. Faktor-faktor tersebut menyebabkan volatilitas yang cukup tinggi di pasar keuangan global dan mengoreksi aliran masuk dana nonresiden ke aset keuangan. Selain itu, pergerakan nilai tukar rupiah juga mendapat tekanan dari adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik ditambah lagi menurunnya kinerja ekspor Indonesia. Secara umum sepanjang tahun 2015, nilai tukar rupiah cenderung mengalami depresiasi terhadap beberapa mata uang asing, terutama terhadap nilai mata uang dolar AS.

Tren depresiasi nilai tukar rupiah sudah dimulai pada awal tahun 2015. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan seiring penguatan dolar AS terhadap hampir semua mata uang. Pada akhir Januari 2015 nilai tukar rupiah berada di level Rp 12.625 per dolar AS atau mengalami depresiasi sebesar 1,49 persen terhadap nilai tukar rupiah pada akhir tahun 2014 yang berada di level Rp 12.440 per dolar AS. Sementara itu bila dibandingkan dengan posisinya pada akhir Januari 2014 (Rp 12.226 per dolar AS) dapat dikatakan nilai tukar mengalami depresiasi sebesar 3,26 persen. Terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus berlangsung hingga akhir triwulan I 2015 (Maret 2015) hingga berada di level Rp 13.084 per dolar AS atau mengalami pelemahan sebesar 1,72 persen (*q-t-q*) dan sebesar 14,73 persen (*y-o-y*). Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS disebabkan karena adanya penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang asing dunia lainnya akibat dari membaiknya perekonomian AS dan adanya kebijakan *Quantitative Easing ECB*.

Gambar 7.2
Perkembangan Nilai Tukar Mata Uang Asing,
Tahun 2015–Maret 2016



Sumber: SEKI Edisi April 2016, Bank Indonesia (data diolah)

Memasuki awal Triwulan II 2015 yaitu pada akhir April 2015 posisi rupiah kembali menguat seiring dengan koreksi dolar AS dan persepsi risiko perekonomian domestik yang membaik. Nilai tukar rupiah menguat ke level Rp 12.937 per dolar AS atau terapresiasi sebesar 1,12 persen bila dibandingkan pada bulan Maret 2015. Namun demikian, menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada bulan Maret 2015 tidak berlanjut pada dua bulan berikutnya. Justru nilai tukar rupiah mengalami pelemahan pada bulan Mei dan Juni 2015 yaitu masing-masing berada di level Rp13.211 per dolar AS dan Rp 13.332 per dolar AS. Bila dibandingkan dengan akhir triwulan sebelumnya, posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada akhir triwulan mengalami pelemahan sebesar 1,90 persen ($q-t-q$). Tekanan terhadap rupiah pada triwulan II ini dipengaruhi karena beberapa faktor baik eksternal maupun internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi nilai tukar rupiah diantaranya antisipasi investor atas rencana kenaikan suku bunga AS (FFR), dan *Quantitative Easing ECB*, serta dinamika negosiasi fiskal Yunani. Selain itu, reaksi pasar global terhadap keputusan Tiongkok yang melakukan depresiasi mata uang Yuan, semakin membuat nilai tukar rupiah terdepresiasi. Dari sisi internal, permintaan valas yang meningkat untuk pembayaran utang dan dividen sesuai pola musiman pada triwulan II 2015. Namun, tekanan yang dialami rupiah masih bisa tertahan oleh sentimen positif terkait kenaikan *outlook rating* Indonesia oleh S&P dari stable menjadi positif dan meningkatnya surplus neraca perdagangan.

Kondisi moneter global yang tidak pasti akibat devaluasi yuan, ketidakpastian kenaikan FFR, dan dinamika fiskal Yunani masih memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah pada triwulan III 2015. Dimulai di bulan Juli 2015, pelemahan rupiah berlanjut selama 3 bulan hingga September 2015. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada bulan Juli 2015 berada di level Rp 13.481 per dolar AS kemudian terus melemah hingga ke level Rp 14.657 per dolar AS pada akhir September 2015. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada akhir triwulan III ini merupakan posisi tertinggi selama tahun 2015.

Tabel. 7.3. Perkembangan Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah di Bank Indonesia, Tahun 2014–Maret 2016¹

Akhir Periode	Dolar Amerika (USD)	Dolar Australia (AUD)	Yen Jepang (JPY)	Euro EUR
2014				
Januari	12 226	10 669	120	16 689
Februari	11 634	10 433	114	15 946
Maret	11 404	10 594	112	15 674
April	11 532	10 699	113	15 922
Mei	11 611	10 818	114	15 794
Juni	11 969	11 265	118	16 333
Juli	11 591	10 914	114	15 608
Agustus	11 717	10 961	113	15 444
September	12 212	10 655	112	15 495
Oktober	12 082	10 663	110	15 222
Nopember	12 196	10 391	103	15 197
Desember	12 440	10 218	104	15 133
2015				
Januari	12 625	9 830	107	14 307
Februari	12 863	10 012	108	14 412
Maret	13 084	10 003	109	14 165
April	12 937	10 335	109	14 381
Mei	13 211	10 130	107	14 476
Juni	13 332	10 218	109	14 920
Juli	13 481	9 846	109	14 750
Agustus	14 027	10 005	116	15 761
September	14 657	10 270	122	16 492
Oktober	13 639	9 686	113	14 973
Nopember	13 840	9 939	113	14 640
Desember	13 795	10 064	115	15 070
2016				
Januari	13 846	9 827	117	15 139
Februari	13 395	9 541	118	14 647
Maret	13 276	10 162	118	15 030

Catatan :¹ Akhir periode

Sumber : Sumber : SEKI Edisi April 2016, Bank Indonesia

Pada posisi ini dapat dikatakan nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 4,49 persen (*m-t-m*), atau sebesar 9,94 persen (*q-t-q*), dan sebesar 20,02 persen (*y-o-y*). Menanggapi meningkatnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Bank Indonesia bersama dengan pemerintah dan OJK mengeluarkan serangkaian kebijakan stabilisasi dengan sinergi yang kuat antara kebijakan moneter dan reformasi struktural yaitu dengan implementasi kebijakan moneter yang berhati-hati, berbagai langkah stabilisasi nilai tukar, penguatan struktur pasar valas domestik, serta rangkaian paket kebijakan ekonomi.

Selanjutnya memasuki triwulan akhir 2015 pergerakan nilai tukar rupiah menunjukkan adanya tren menguat dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga seiring dengan meredanya faktor risiko eksternal. Rupiah bergerak stabil dengan tren menguat karena didorong oleh meningkatnya aliran modal asing dan persepsi positif terhadap ekonomi domestik. Selama triwulan IV 2015 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp 13.639 per dolar AS pada

bulan Oktober, di level Rp 13.840 per dolar AS pada bulan November dan di level Rp 13.795 per dolar AS di akhir Desember 2015. Pada akhir tahun inilah nilai tukar rupiah menguat sebesar 0,33 persen (*m-t-m*) bila dibandingkan posisi pada akhir November atau bila dibandingkan dengan triwulan III 2015 rupiah menguat sebesar 5,88 persen (*q-t-q*). Penguatan nilai tukar rupiah ini seperti disebutkan sebelumnya akibat meredanya faktor risiko eksternal yaitu meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global sejalan dengan hasil FOMC September 2015 yang sempat dovish, kenaikan FFR pada 17 Desember 2015 yang telah diantisipasi pasar dan pernyataan *the Fed* pasca kenaikan FFR bahwa normalisasi akan dilakukan secara gradual dan terbatas. Selain itu, di sisi domestik lebih disebabkan oleh membaiknya optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia seiring dengan dikeluarkannya rangkaian paket kebijakan pemerintah dan paket stabilisasi nilai tukar oleh Bank Indonesia. Faktor-faktor positif tersebut mendorong meningkatnya aliran modal masuk asing, khususnya ke pasar surat berharga negara, yang selanjutnya mendorong penguatan Rupiah. Namun demikian, bila dibandingkan dengan posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada akhir tahun 2014 dapat dikatakan melemah sebesar 10,89 persen (*y-o-y*).

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga diikuti dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang pada tahun 2015. Memasuki awal tahun 2015 saja nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang berada di level Rp 107 per yen Jepang atau melemah sebesar 2,88 persen (*m-t-m*) bila dibandingkan pada posisi Desember 2014. Namun, apabila dibandingkan dengan posisi di Januari 2014 nilai tukar rupiah justru menguat 10,83 persen terhadap yen Jepang. Berdasarkan tabel 7.3 di atas posisi nilai tukar rupiah terlemah berada di bulan September yaitu berada di level Rp 122 per yen Jepang atau melemah sebesar 5,17 persen (*m-t-m*) dibanding bulan Agustus 2015. Hal ini seiring dengan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap seluruh mata uang mayoritas di dunia sehingga berdampak pula dengan nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang. Pelemahan nilai tukar rupiah pada September 2015 merupakan pelemahan tertinggi kedua di tahun 2015 setelah bulan Agustus, dimana pada bulan Agustus nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang berada di posisi Rp 116 per yen Jepang (melemah 6,42 persen) dibanding Juli 2015 (Rp109 per yen Jepang). Pelemahan rupiah tidak berlanjut di triwulan akhir tahun 2015, dimana rupiah sedikit mengalami penguatan terhadap yen Jepang. Sejak bulan Oktober posisi rupiah terhadap yen mulai menguat ke level Rp 113 per yen Jepang dan berlanjut di bulan November, namun sedikit melemah kembali di akhir tahun ke level Rp 115 per yen Jepang. Penguatan rupiah pada bulan Oktober inilah yang merupakan penguatan tertinggi posisi rupiah terhadap Yen sepanjang tahun 2015 yaitu sebesar 7,38 persen (*m-t-m*).

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia sepanjang tahun 2015 cenderung berfluktuatif dengan tren sedikit melemah hingga akhir tahun. Pada awal Triwulan I 2015 yaitu pada bulan Januari 2015 nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia berada di level Rp 9.830 per dolar Australia dan mengalami depresiasi hingga bulan Maret 2015 ke level Rp 10.003 per dolar Australia. Pada akhir Maret ini tercatat rupiah terapresiasi sebesar 0,09

persen (*m-t-m*) dibandingkan Februari 2015 serta terapresiasi sebesar 2,10 persen (*q-t-q*) dibandingkan pada triwulan IV 2014. Memasuki awal triwulan II 2015 pada bulan April 2015, nilai tukar rupiah kembali mengalami pelemahan terhadap dolar Australia dan berada di level Rp 10.335 per dolar Australia. Ini merupakan posisi nilai tukar terlemah sepanjang tahun 2015. Namun demikian pelemahan tidak berlanjut memasuki bulan Mei 2015 rupiah cenderung menguat hingga akhir tahun 2015. Pada akhir Desember 2015 posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia berada di level Rp 10.064 per dolar Australia. Bila dibandingkan dengan bulan November 2015 posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia pada akhir Desember 2015 mengalami depresiasi sebesar 1,26 persen (*m-t-m*), sedangkan bila dibandingkan dengan akhir triwulan III 2015 rupiah terapresiasi sebesar 2,00 persen (*q-t-q*) dan terapresiasi sebesar 1,51 persen (*y-o-y*) dibandingkan posisi pada akhir tahun 2014.

Sebagaimana pergerakan posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang cenderung melemah, sepanjang tahun 2015 nilai tukar rupiah terhadap euro juga cenderung mengalami pelemahan. Pada Januari 2015 posisi nilai tukar rupiah terhadap euro berada di level Rp 14.307 per euro dan cenderung melemah hingga September 2015 menjadi Rp 16.492 per euro. Pada bulan September ini nilai tukar rupiah berada di posisi terlemah sepanjang tahun 2015 seperti dolar AS dan yen Jepang. Pada bulan September 2015 ini juga rupiah terhadap terdepresiasi sebesar 4,64 persen (*m-t-m*) terhadap posisi di bulan Agustus 2015. Bila dibandingkan dengan akhir triwulan II 2015 rupiah terdepresiasi sebesar 10,54 persen (*q-t-q*) dan terdepresiasi sebesar 6,43 persen (*y-o-y*) dibandingkan pada akhir triwulan III 2014. Selanjutnya pada triwulan IV tahun 2015 rupiah menunjukkan adanya penguatan di awal-awal triwulan dan kembali melemah di akhir triwulan. Rupiah sempat berada di posisi Rp 14.640 per euro pada bulan November 2015, namun tidak bertahan lama kembali melemah ke posisi Rp 15.070 per euro. Di akhir tahun ini posisi rupiah terhadap euro melemah sebesar 2,94 persen (*m-t-m*) dibanding November 2015, namun menguat sebesar 8,62 persen (*q-t-q*) terhadap triwulan III 2015 dan terapresiasi sebesar 0,42 persen terhadap triwulan IV tahun 2014.

Memasuki triwulan I tahun 2016, posisi nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing menunjukkan adanya penguatan rupiah terhadap dolar AS dan Euro serta pelemahan terhadap dolar Australia dan yen Jepang. Posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada akhir Januari 2016 berada di level Rp 13.846 per dolar AS dan mengalami penguatan hingga akhir Maret 2016 ke level Rp 13.276 per dolar AS. Hal ini menunjukkan bahwa rupiah menguat sebesar 3,76 persen (*q-t-q*) terhadap akhir Desember 2015. Beberapa faktor yang turut mendukung penguatan rupiah terhadap dolar AS yaitu persepsi positif terhadap perekonomian domestik akibat stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga dan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan. Selain itu, pasokan valas korporasi domestik yang berorientasi ekspor turut memberikan kontribusi dalam penguatan rupiah. Dari sisi eksternal, penguatan rupiah didorong oleh meredanya risiko di pasar keuangan global terkait kenaikan FFR dan berlanjutnya pelanggaran kebijakan moneter di beberapa negara maju.

Nilai tukar rupiah terhadap Euro pada akhir semester I 2016 yang berada di level Rp 15.030 per Euro juga dapat dikatakan mengalami penguatan sebesar 0,26 persen ($q-t-q$) bila dibandingkan dengan akhir tahun 2014. Sementara itu, untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia dan Yen Jepang mengalami pelemahan ($q-t-q$) masing-masing sebesar 0,97 persen (Rp 10.162 per dolar Australia) dan 2,61 persen (Rp 118 per Yen).

Pergerakan Suku Bunga

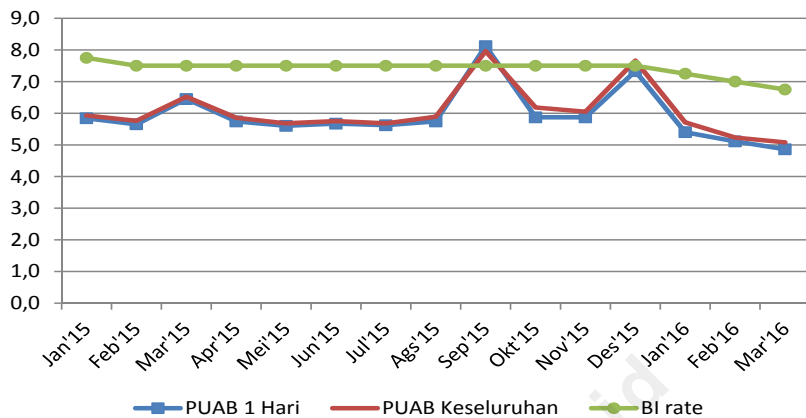
BI Rate merupakan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu sikap kebijakan moneter. BI Rate ini diumumkan ke publik yang selanjutnya menjadi acuan bagi industri perbankan Indonesia dalam menentukan tingkat suku bunga. Penetapan BI Rate ini tentu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dalam perekonomian, seperti inflasi. Apabila inflasi ke depan akan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, Bank Indonesia akan menaikkan BI Rate. Sebaliknya, Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Januari 2015, BI memutuskan untuk mempertahankan BI Rate di level 7,75 persen atau sama dengan angka di akhir tahun 2014. Pertahanan level BI Rate tersebut untuk menjaga target inflasi di kisaran 4 ± 1 persen pada tahun 2015-2016. Kebijakan ini juga searah dengan penurunan neraca transaksi berjalan ke arah yang lebih baik dan sehat. Akan tetapi, pada Februari 2015, BI menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 7,50 persen. Penurunan tersebut masih konsisten dengan kondisi perekonomian dalam menjaga stabilitas inflasi. Pengendalian inflasi yang rendah dan stabil dapat mengarah pada inflasi di bawah 4 persen.

Bank Indonesia terus mengalami penahanan BI Rate di level 7,50 persen hingga Desember tahun 2015. Selain terkait sasaran inflasi, keputusan tersebut dilakukan untuk mengarahkan defisit neraca berjalan ke tingkat yang lebih sehat di kisaran 2,5-3,0 persen terhadap PDB dalam jangka menengah. Sejalan dengan itu, BI memperkuat stabilitasi rupiah, bauran kebijakan tetap difokuskan pada menjaga stabilitas makro ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian di pasar global. Dalam menjaga inflasi dan memperkuat neraca pembayaran, BI berkomitmen untuk menjaga kebijakan moneter dan makro prudensial serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dalam percepatan reformasi struktural. Kebijakan Bank Indonesia untuk tidak merubah suku bunga acuan merupakan langkah yang tepat. Mempertahankan level suku bunga acuan merupakan upaya dalam menjaga pelemahan nilai rupiah, menjaga cadangan devisa dan keberlangsungan sektor riil domestik.

Fokus kebijakan BI dalam jangka pendek diarahkan pada langkah-langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian perekonomian global, dengan mengoptimalkan operasi moneter baik di pasar uang Rupiah maupun pasar valuta asing. Menurutnya, BI akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial

Gambar 7.3
Perkembangan PUAB Rupiah Pagi dan BI Rate, Tahun 2015–Maret 2016



Sumber : Sumber : SEKI Edisi April 2016, Bank Indonesia (data diolah)

untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi, khususnya stabilitas nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan dalam mendukung kesinambungan perekonomian. Selain itu, BI juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam mempercepat stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Termasuk, melanjutkan berbagai kebijakan struktural yang menjadi kunci perbaikan prospek ekonomi Indonesia ke depan.

Keputusan BI untuk tetap mempertahankan level suku bunga acuan sebesar 7,50 persen pada Desember 2015 sesuai dengan suku bunga *The Federal Reserves* sebesar 25 basis poin menjadi 0,50 persen. Walaupun adanya harapan penurunan suku bunga acuan dari sebagian pihak, BI tetap tidak merubah suku bunga acuan karena memandang ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter semakin terbuka dengan terjaganya stabilitas makroekonomi. Hal tersebut khusus pada inflasi akhir tahun 2015 yang akan berada di bawah 3 persen dan defisit transaksi berjalan yang akan berada pada kisaran 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian, BI akan mencermati perkembangan pasar keuangan global dan kondisi ekonomi domestik dalam jangka pendek ke depan. Selain itu, koordinasi para pemangku kebijakan seperti Bank Sentral dan pemerintah perlu terus diperkuat, sehingga kebijakan yang disusun mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan yang tetap terjaga.

Namun demikian, di awal tahun 2016 ini BI Rate terus mengalami penurunan sebesar 25 bps setiap bulannya. Pada Januari tahun 2016, BI Rate berada pada level 7,25 persen, kemudian menurun menjadi 7,00 persen pada Februari 2016, dan menurun lagi menjadi 6,75 persen pada Maret 2016. Keputusan BI untuk menurunkan BI Rate ini karena adanya ruang pelonggaran kebijakan moneter yang semakin terbuka dan ekonomi domestik yang membaik, khususnya karena terus menurunnya tekanan inflasi pada tahun

2016-2017. Selain itu, ketidakpastian pasar keuangan global semakin mereda. Masih lemahnya perekonomian dan rendahnya inflasi di Eropa dan Jepang mendorong Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Jepang terus melanjutkan pelonggaran kebijakan moneter, baik melalui injeksi likuiditas maupun kebijakan suku bunga negatif (Sawitri, 2016).

Pakar Ekonomi dari *Institute for Development Economic and Finance*, Eko Listianto menyatakan ada dua faktor yang mendorong BI untuk menurunkan suku bunga acuan, yaitu kondisi internal dan eksternal. Faktor internal tersebut antara lain inflasi yang masih berada dalam kisaran target BI, nilai tukar rupiah yang stabil dan menguat seiring adanya *capital inflow*, serta tren pertumbuhan ekonomi kuartalan yang meningkat sejalan dengan defisitnya transaksi berjalan yang terjaga. Kemudian, faktor eksternal yang mendorong penurunan suku bunga acuan adalah adanya sinyal sinyal penundaan kenaikan FFR (suku bunga Fed) dan jatuhnya harga minyak dunia.

Penurunan BI rate secara terukur ini diharapkan mampu memperkuat pelonggaran kebijakan makroprudensial dan penurunan Giro Wajib Minimum yang telah dilakukan sebelumnya. Tidak hanya itu, penurunan suku bunga acuan ini dapat mengurangi beban bunga untuk pinjaman sehingga biaya pelaku usaha dalam mendapatkan modal akan menurun. Berkurangnya beban peminjaman dana tersebut dapat mendorong perkembangan dunia usaha dunia usaha. Dengan demikian, penurunan BI rate ini dapat menggairahkan sektor investasi. Selain itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmito Hadi Wibowo, mengatakan bahwa menurunkannya suku bunga acuan juga dapat meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat Indonesia. Suku bunga yang rendah akan mendorong pemegang rekening atau pelaku perbankan untuk menggunakan uangnya, sehingga faktor tersebut akan memperbaiki dan meningkatkan *demand* domestik. Dengan demikian, peningkatan konsumsi itu dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sempat anjlok sebelumnya akibat bergejolaknya ekonomi global.

Bank Indonesia (BI) mengimplementasikan BI Rate pada operasi moneter melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan oleh perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan.

Perkembangan suku bunga memengaruhi dinamika likuiditas perekonomian yang tercermin pada likuiditas di PUAB dan perbankan. Selama triwulan I 2015, kondisi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) berada pada likuiditas yang terjaga. Rata-rata suku bunga PUAB O/N mengalami sedikit peningkatan dari 5,81 persen pada triwulan IV 2014 menjadi 5,84 persen pada triwulan I 2015. Pada tabel 7.4 di atas dapat dilihat bahwa secara rinci pada posisi akhir periode, posisi suku bunga PUAB Rupiah pagi dan sore 1 hari pada akhir triwulan I 2015 masing-masing sebesar 6,81 persen dan 6,45 persen.

Suku bunga tersebut lebih tinggi daripada akhir tahun 2014 yang suku bunga PUAB Rupiah pagi dan sore masing-masing sebesar 6,01 persen dan 6,12 persen. Sementara itu, posisi suku bunga PUAB Rupiah pagi dan sore secara keseluruhan pada akhir triwulan I 2015 masing-masing sebesar 6,84 persen dan 6,52 persen atau lebih tinggi daripada akhir tahun 2014 yang suku bunga PUAB Rupiah pagi dan sore masing-masing sebesar 6,16 persen dan 6,32 persen. Peningkatan tersebut seiring langkah antisipatif perbankan dalam menjaga kecukupan likuiditas terkait kondisi di sistem pembayaran. Namun, kondisi likuiditas secara industri masih likuid yang terlihat dari masih tingginya likuiditas *overnight* yang di tempatkan di *Deposit Facility* (DF).

Kemudian pada triwulan II dan triwulan III 2015, likuiditas di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) tetap terjaga. Rata-rata suku bunga PUAB O/N pada

Tabel 7.4 Perkembangan Suku Bunga PUAB, SBI, BI Rate, dan Volume SBI, Tahun 2014–Maret 2016

Akhir Periode	Pasar Uang Antar Bank Rupiah Pagi		Pasar Uang Antar Bank Rupiah Sore		BI Rate	SBI 9 Bulan	Volume SBI ¹ (Milyar Rp)
	1 Hari	Keseluruhan	1 Hari	Keseluruhan			
2014 Januari	5,89	6,10	5,88	6,22	7,50	7,23	91 447
Februari	5,86	6,15	5,86	6,22	7,50	7,17	91 857
Maret	5,85	6,02	5,89	6,27	7,50	7,13	103 510
April	5,85	6,10	5,85	6,24	7,50	7,14	110 566
Mei	5,85	5,97	5,85	6,22	7,50	7,15	114 343
Juni	5,86	6,07	5,87	6,19	7,50	7,14	109 957
Juli	6,53	6,76	6,55	6,69	7,50	7,09	85 272
Agustus	5,85	5,94	5,85	5,98	7,50	6,97	82 272
September	5,85	5,90	5,84	5,91	7,50	6,88	79 175
Oktober	5,80	5,84	5,81	5,86	7,50	6,85	81 730
Nopember	5,80	5,84	5,80	5,85	7,75	6,87	82 605
Desember	6,01	6,16	6,12	6,32	7,75	6,90	88 899
2015 Januari	5,85	5,91	5,84	5,93	7,75	6,93	88 290
Februari	5,65	5,75	5,65	5,76	7,50	6,67	87 290
Maret	6,81	6,84	6,45	6,52	7,50	6,65	87 290
April	5,80	5,89	5,74	5,86	7,50	6,65	77 290
Mei	5,60	5,75	5,60	5,68	7,50	6,65	69 290
Juni	5,63	5,76	5,67	5,75	7,50	6,65	64 290
Juli	5,63	5,75	5,62	5,68	7,50	6,65	52 015
Agustus	5,75	5,91	5,74	5,89	7,50	6,75	55 155
September	7,18	7,23	8,12	7,96	7,50	7,10	42 631
Oktober	5,96	6,25	5,87	6,18	7,50	7,10	39 016
Nopember	5,86	6,28	5,87	6,05	7,50	7,10	37 510
Desember	7,58	7,96	7,33	7,66	7,50	7,10	32 300
2016 Januari	5,40	5,66	5,40	5,71	7,25	6,65	38 237
Februari	5,14	5,31	5,11	5,23	7,00	6,55	47 414
Maret	4,89	5,22	4,86	5,08	6,75	6,60	67 534

Catatan : ¹ Akhir periode

Sumber : SEKI Edisi April 2016, Bank Indonesia

triwulan II 2015 mengalami penurunan, yaitu menjadi 5,66 persen. Suku bunga PUAB O/N turun mendekati DF Rate dipengaruhi oleh tekanan kebutuhan likuiditas yang menurun. Secara rinci, posisi suku bunga PUAB Rupiah pagi dan sore 1 hari pada akhir triwulan II 2015 mengalami penurunan bila dibanding pada akhir triwulan I 2015 yaitu masing-masing menjadi sebesar 5,63 persen dan 5,67 persen. Begitu juga halnya dengan posisi suku bunga PUAB Rupiah pagi dan sore secara keseluruhan yang mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 5,76 persen dan 5,75 persen.

Penurunan suku bunga PUAB pada triwulan II 2015 tidak berlanjut pada triwulan III 2015. Pada triwulan III 2015, rata-rata suku bunga PUAB O/N mengalami peningkatan menjadi 5,75 persen. Kenaikan suku bunga PUAB O/N adalah hasil dari strategi pengetatan likuiditas jangka pendek rupiah melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan *Foreign Exchange (FX) Swap*. Peningkatan suku bunga PUAB tampak terlihat jelas pada akhir periode triwulan III 2015 baik pada suku bunga PUAB Rupiah pagi dan sore 1 hari maupun secara keseluruhan. Posisi suku bunga PUAB Rupiah pagi dan sore 1 hari meningkat masing-masing menjadi sebesar 7,18 persen dan 8,12 persen, sedangkan suku bunga PUAB Rupiah pagi dan sore secara keseluruhan meningkat masing-masing menjadi sebesar 7,23 persen dan 7,96 persen.

Selanjutnya, meskipun secara umum likuiditas di PUAB tetap terjaga, likuiditas tersebut sedikit mengetat. Rata-rata suku bunga PUAB O/N pada triwulan IV 2015 mengalami peningkatan dari 5,85 persen pada triwulan III 2015 menjadi 5,97 persen. Peningkatan tersebut dipengaruhi kenaikan kebutuhan likuiditas pada Desember 2015. Secara lebih rinci pada akhir Desember 2015 peningkatan suku bunga PUAB terjadi pada suku bunga PUAB Rupiah pagi sedangkan suku bunga PUAB Rupiah sore cenderung mengalami penurunan bila dibanding pada akhir September 2015. Posisi suku bunga PUAB Rupiah pagi baik 1 hari maupun keseluruhan pada akhir Desember meningkat masing-masing menjadi sebesar 7,58 persen dan 7,96 persen, sedangkan suku bunga PUAB Rupiah sore untuk 1 hari dan keseluruhan menurun masing-masing menjadi sebesar 7,33 persen dan 7,66 persen.

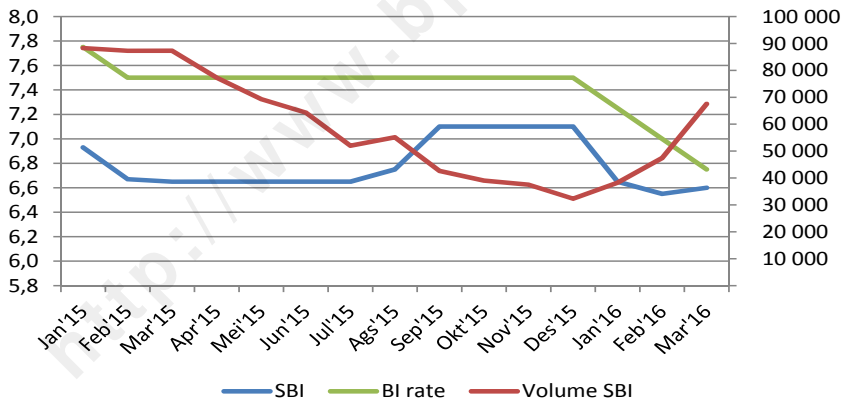
Meski demikian, likuiditas pasar uang mulai berangsur pulih pada Januari 2016 sejalan dengan masuknya kembali uang kartal dalam sistem perbankan dan ekspansi fiskal. Sikap pelonggaran kebijakan moneter baik melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) maupun penurunan suku bunga telah tercermin pada penurunan suku bunga PUAB pada triwulan I 2016. Kondisi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada triwulan I 2016 ditandai oleh likuiditas yang lebih longgar, dengan rata-rata suku bunga PUAB O/N yang menurun menjadi 5,26 persen.

Untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan secara seimbang, salah satu pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang dilakukan Bank Indonesia adalah pelaksanaan operasi moneter, melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan *Standing Facilities*. Salah satu instrumen dalam OPT sebagai langkah penyerapan akses likuiditas adalah penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

tenor 9 bulan. Ketika BI Rate berada di level 7,75 persen pada Januari 2015, bunga SBI berada pada level 6,93 persen dan mampu menyerap Rp 88,29 triliun uang yang beredar di masyarakat. Volume SBI pada bulan Januari 2015 adalah volume serapan terbesar sepanjang tahun 2015. Namun, volume SBI di sepanjang tahun 2015 terus cenderung bergerak menurun. Ketika suku bunga SBI menurun hingga mencapai 6,65 persen pada Juli 2015, volume uang yang terserap terdapat sebesar Rp 52,02 triliun. Kemudian, walaupun suku bunga SBI sudah meningkat perlahan dan stagnan menjadi 7,10 persen pada Desember 2015, SBI hanya mampu menyerap Rp 32,30 triliun uang di masyarakat.

Pada awal tahun 2016, BI Rate yang terus menurun 25 bps diikuti oleh SBI yang cenderung bergerak menurun. Akan tetapi, volume SBI pada triwulan I 2016 terus meningkat. Pada Januari 2016, walaupun SBI menurun menjadi 6,65 persen, volume SBI di bulan tersebut meningkat menjadi Rp 38,24 triliun rupiah. Bahkan disaat SBI berada di level 6,60 persen pada Maret 2016, volume uang yang terserap sebesar Rp 67,53 triliun. Dengan demikian, uang yang beredar di masyarakat pada triwulan I 2016 semakin berkurang.

Gambar 7.4
Perkembangan SBI, BI Rate, dan Volume SBI, Tahun 2015–Maret 2016



Sumber: SEKI Edisi April 2016, Bank Indonesia (data diolah)



8

Perkembangan Investasi dan Perdagangan Saham

Investasi sebagai salah satu komponen pembentuk PDB, memiliki pengaruh yang nyata terhadap perekonomian suatu negara. Semakin besar investasi akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai. Selain itu investor dari luar melihat bahwa Indonesia potensi-potensi yang menjadi kekuatan daya saing dengan negara lain yaitu sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja muda cukup banyak tersedia, pasar domestik yang besar dan terus tumbuh, serta dukungan pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi dan peran Indonesia di tingkat internasional. Didukung dengan stabilitas politik yang terjaga selama beberapa tahun menjadi modal Indonesia untuk dapat menarik investor dari luar negeri.

Untuk menarik investasi dalam dan luar negeri, Pemerintah telah menyiapkan enam langkah penguatan investasi. Pertama, BKPM akan meningkatkan kepastian hukum terkait investasi dan usaha. Kemudian, mengembangkan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi perijinan. Ketiga, pemerintah akan memberikan insentif dan memfasilitasi investasi. Keempat, mendirikan Forum Investasi yang terdiri dari pejabat lintas kementerian dan *stakeholders* untuk memonitor dan mengatasi permasalahan investasi. Kelima, mendorong terciptanya iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif. Dan terakhir, peningkatan persaingan usaha yang sehat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2015 meningkat 4,79 persen dari kuartal 1 hingga kuartal 4. Pertumbuhan ini didasari sejumlah peningkatan realisasi pajak, realisasi belanja pemerintah, maupun penguatan nilai tukar rupiah di akhir tahun. Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pertumbuhan tersebut merupakan dampak dari investasi yang terus masuk ke Indonesia. Selain investasi, peningkatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digunakan dalam pembelanjaan negara pun mampu mendongkrak pertumbuhan perekonomian di kuartal empat 2015. (Republika.co.id)

Peningkatan aliran investasi ini juga dibarengi dengan perbaikan kualitas investasi dalam hal peralihan investasi pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi, serta penyebaran lokasi investasi. Aliran investasi secara bertahap telah mengalami pergeseran dari investasi pada sumber daya alam seperti pertambangan, beralih pada industri manufaktur seperti kimia dasar, barang kimia dan investasi. Dari sisi lokasi, aliran investasi secara bertahap bergerak ke berbagai lokasi proyek di luar Jawa sesuai dengan Program Pemerintah melalui MP3EI yang mendorong pembangunan kawasan dan infrastruktur pendukung pada koridor-koridor di luar koridor Jawa. Apabila kecenderungan perbaikan pertumbuhan investasi ini dapat dipertahankan, maka investasi akan menjadi salah satu komponen utama pendorong pertumbuhan ekonomi.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

BKPM mencatat, kinerja perekonomian Indonesia dalam 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan, dimana investasi domestik yang terealisasi sepanjang tahun 2014 mencapai Rp. 156 126,16 miliar terjadi kenaikan 21,83

persen dibanding tahun 2013 yang baru mencapai Rp. 128 150,56 miliar. Peningkatan nilai investasi domestik tidak diikuti dengan meningkatnya jumlah proyek yang mampu menyerap nilai investasi tersebut, jumlah proyek justru mengalami penurunan yaitu dari 2.129 proyek pada tahun 2013 turun menjadi 1.652 proyek pada tahun 2014 atau turun sekitar 22,40 persen.

Jumlah investasi yang dialirkan oleh masyarakat ataupun perusahaan domestik sepanjang tahun 2015 mencapai Rp. 179.465,87 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 14,95 persen, kenaikan ini lebih tinggi dari kenaikan tahun sebelumnya. Begitupula dengan jumlah proyek yang mampu menyerap nilai investasi di tahun 2015 juga mengalami peningkatan tiga kali lipat lebih atau naik 208,72 persen menjadi 5.100 proyek.

Tabel 8.1. Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor (miliar rupiah), Tahun 2013–2015

Sektor	2013		2014		2015	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	356	6 953,37 (5,43)	263	13 379,94 (8,57)	474	13 112,83 (7,31)
Pertambangan	88	18 762,17 (14,64)	50	3 140,69 (2,01)	124	3 946,83 (2,20)
Industri	1 225	51 171,10 (39,93)	942	59 034,72 (37,81)	2 525	89 045,29 (49,62)
Listrik, Gas dan Air	85	25 831,29 (37,81)	68	36 296,78 (23,25)	247	21 946,84 (12,23)
Konstruksi	33	6 033,18 (4,71)	27	12 097,63 (7,75)	178	17 165,45 (9,56)
Perdagangan dan Reparasi Hotel & Restoran	153	3 606,69 (2,81)	142	2 249,22 (1,44)	920	5 403,89 (3,01)
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	91	13 178,42 (10,28)	46	15 715,00 (10,07)	213	21 333,87 (11,89)
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	26	2 152,36 (1,68)	45	13 111,80 (8,40)	212	6 509,94 (3,63)
Jasa Lainnya	72	461,96 (0,36)	69	1 100,37 (0,70)	207	1 000,92 (0,56)
Jumlah	2 129	128 150,56 (100,00)	1 652	156 126,16 (100,00)	5 100	179 465,87 (100,00)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

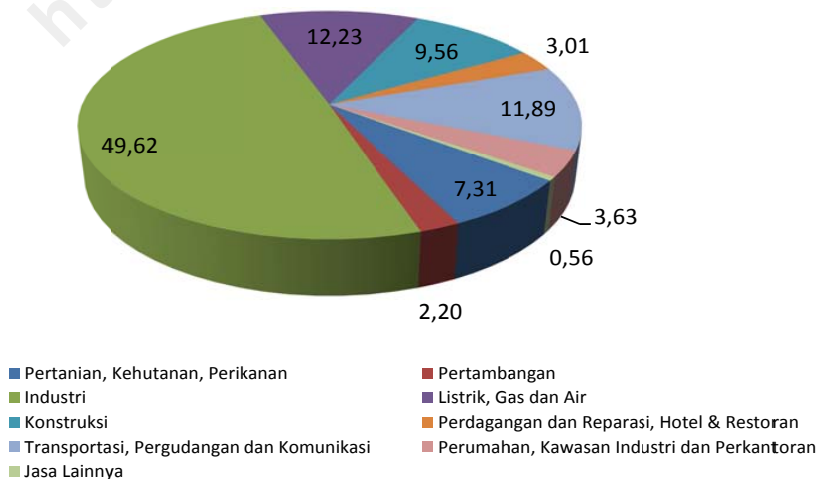
Jika dilihat nilai investasi domestik yang masuk menurut sektor, selama tiga tahun terakhir dari 2013 hingga akhir 2015 memperlihatkan bahwa realisasi nilai investasi PMDN mayoritas terserap pada sektor industri, dimana pada tahun 2013 mampu menyerap sebesar Rp. 51.171,10 miliar (39,93 persen), meningkat menjadi Rp. 59.034,72 miliar (37,81 persen) kemudian meningkat lagi di tahun 2015 menjadi Rp. 89.045,29 miliar (49,62 persen).

Peningkatan nilai investasi tidak diikuti dengan besarnya jumlah proyek di sektor industri, pada tahun 2013 jumlah proyek yang menyerap investasi domestik di sektor industri sebanyak 1.225 proyek, turun menjadi 942 proyek di tahun 2014, namun kembali meningkat menjadi 2.525 proyek pada tahun 2015.

Sektor yang cukup diminati investor domestik selain industri adalah sektor listrik, gas dan air. Pada tahun 2015 sektor listrik, gas dan air mampu menyerap investasi sebanyak Rp. 21.946,84 miliar (12,23 persen), meskipun terjadi penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 39,54 persen. Posisi ketiga adalah sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi, yang mampu menyerap investasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 21.333,87 (11,89 persen) atau meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 35,75 persen. Meskipun Indonesia sebagai negara agraris, dimana sebagian besar penduduk masih banyak yang bekerja di sektor tersebut, ternyata sektor pertanian belum mampu menarik banyak investor domestik untuk menanamkan modalnya. Pada tahun 2015 sektor pertanian hanya mampu menyerap investasi sebesar Rp. 13.112,83 miliar atau sekitar 7,31 persen dari total nilai investasi dimana terjadi penurunan 2,00 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 13.379,94 miliar.

Dari Tabel 8.1. terlihat bahwa disepanjang tahun 2015, semua sektor menunjukkan peningkatan jumlah proyeknya, namun tidak diikuti dengan nilai investasinya. Keadaan ini dialami sektor Listrik, Gas dan Air yang mengalami peningkatan 179 proyek (263,24 persen) yaitu dari 68 proyek tahun 2014 menjadi 247 proyek tahun 2015. Sektor yang juga mengalami peningkatan jumlah proyek namun tidak diikuti peningkatan nilai investasinya adalah sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 371,11 persen (167 proyek) yaitu dari 45 proyek pada tahun 2014 menjadi 212 proyek di tahun 2015.

Gambar 8.1
Nilai Investasi PMDN Yang Terealisasi Menurut Sektor (persen), Tahun 2015



Melihat kemajuan investasi dalam negeri, tampaknya perlu dipertahankan *treatment* yang telah berjalan dengan baik. Selain itu perlu ditingkatkan pula upaya-upaya untuk menjaga eksistensi perusahaan-perusahaan yang sudah ada, agar mereka tetap betah dan dapat menjalankan kegiatan usahanya di lokasi-lokasi tersebut dengan rasa aman. Salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi investasi bodong yang sering merugikan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tengah mempersiapkan paket kebijakan ekonomi jilid XIII. Dalam racikan paket kebijakan yang tengah digodok tersebut, pemerintah akan fokus memperpendek prosedur investasi yang harus dilalui pemodal. Selama ini deregulasi baru pada tingkat penyederhanaan izin investasi, izin usaha, logistik, ekspor, impor, masuk ke setiap sektor per sektor termasuk di daerah.

Sementara itu, pengembangan potensi daerah dibutuhkan keterpaduan seluruh pihak yang terkait. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat, dan stake holder bersama-sama dalam mengembangkan potensi daerah. Upaya pengembangan potensi wilayah memang harus dilakukan secara sinergi. Hal ini tidak akan mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah daerah saja tanpa didukung oleh pusat dan pihak lain.

Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus berusaha untuk mendorong pergeseran investasi dari Jawa ke luar Jawa. Namun hingga tahun 2015 Pulau Jawa masih menjadi primadona para investor domestik. Tercatat pada tahun 2013 sebesar 51,89 persen dari total investasi domestik

Tabel 8.2. Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Pulau (miliar rupiah), Tahun 2013–2015

Sektor	2013		2014		2015	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Sumatera	522	22 913,76 (17,88)	442	29 560,85 (18,93)	939	37 751,70 (21,04)
Jawa	1 085	66 495,67 (51,89)	914	97 057,09 (62,17)	3 155	103 758,36 (57,82)
Bali dan Nusa Tenggara	71	4 400,25 (3,43)	31	468,87 (0,30)	85	2 893,88 (1,61)
Kalimantan	305	28 713,61 (22,41)	143	21 419,54 (13,72)	433	20 007,12 (11,15)
Sulawesi	101	36 24,19 (2,83)	92	7 113,48 (4,56)	421	13 667,91 (7,62)
maluku dan Papua	45	2 003,12 (1,56)	30	506,32 (0,32)	67	1 386,90 (0,77)
Jumlah	2 129	128 150,59 (100,00)	1 652	156 126,16 (100,00)	5 100	179 465,87 (100,00)

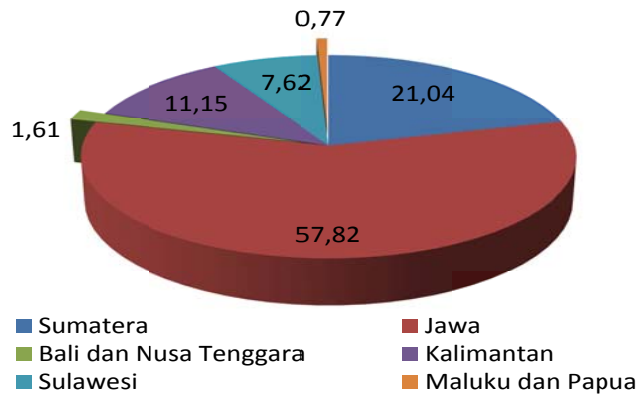
Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah
Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

terserap di Pulau Jawa dengan nilai investasi mencapai Rp. 66.495,7 miliar yang tersebar di 1.085 proyek. Secara kontribusi pada tahun 2014 investasi di Pulau Jawa mampu menyerap sekitar 62,17 persen dari total nilai investasi domestik, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika dilihat nilai investasinya mencapai Rp. 97.057,1 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 45,96 persen dibanding tahun 2013. Pulau Jawa semakin menunjukkan kinerjanya di tahun 2015, dimana mampu menyerap investasi domestik hingga 57,82 persen dengan nilai investasi mencapai Rp. 103.758,4 miliar atau terjadi peningkatan sebesar 6,90 persen dari tahun 2014.

Menengok perkembangan nilai investasi domestik di pulau-pulau lainnya, pada tahun 2014 Pulau Sumatera dan Sulawesi menunjukkan peningkatan, sedangkan Pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara serta Maluku dan Papua mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2013. Pada tahun 2014 Pulau Sumatera berada di posisi kedua setelah Pulau Jawa, begitu juga di tahun 2015 dengan nilai investasi sebesar Rp. 37.751,7 miliar (21,04 persen) yang tersebar di 939 proyek. Sementara, Pulau Kalimantan berada diposisi ketiga, investasi yang terserap di Pulau Kalimantan terus mengalami penurunan di tahun 2015, dengan nilai investasi hanya mencapai Rp. 20.007,1 miliar tau turun 6,59 persen. Walaupun Pulau Kalimantan mengalami penurunan nilai investasi, tetapi nilai investasi yang terserap masih cukup tinggi dibandingkan nilai investasi yang terserap di Pulau Bali dan Nusa Tenggara serta Maluku dan Papua.

Pulau Sulawesi pada tahun 2015 menunjukkan kinerja investasi yang sangat baik, dimana mampu menyerap investasi domestik sebesar Rp 13.667,9 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 92,14 persen dibanding tahun 2014. Dari nilai investasi sebesar itu mampu tersebar di 421 proyek padahal di tahun 2014 ada sekitar 32 proyek dengan nilai investasi yang sangat kecil. Investasi domestik yang masuk di kawasan timur Indonesia di Pulau Maluku dan Papua pada tahun 2015 hanya mencapai Rp 1.386,9 miliar, terjadi kenaikan yang sangat signifikan dari tahun lalu yaitu naik sebesar 173,93 persen, namun nilai investasi tersebut masih rendah dibanding tahun 2013.

Gambar 8.2
 Nilai Investasi PMDN Yang Terealisasi Menurut Pulau (persen), Tahun 2015



Penanaman Modal Asing (PMA)

Investasi asing yang masuk ke Indonesia dalam bentuk penanaman modal dapat bersifat positif dan negatif bagi pembangunan. Investasi akan bersifat positif jika investasi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu dapat menggerakkan atau meningkatkan sektor-sektor yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, investasi asing dapat bersifat negatif apabila terjadi penambahan/peningkatan permintaan konsumsi, dalam bentuk peningkatan impor, dimana pertumbuhan impor lebih pesat daripada pertumbuhan ekspor yang disebabkan oleh adanya PMA, maka akan terjadi defisit neraca perdagangan. Dalam hal ini berarti, kehadiran PMA memberi lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif terhadap negara tuan rumah.

Perkembangan investasi asing menunjukkan pergerakan yang searah dengan investasi domestik. Masuknya investasi asing ke Indonesia dalam 3 tahun terakhir menunjukkan pergerakan yang meningkat setiap tahunnya. Investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia pada tahun 2014 tercatat sebanyak US\$. 28.529,7 juta yang tersebar di 8.885 proyek. Nilai investasi asing ini lebih rendah atau menurun 0,31 persen jika dibanding tahun 2013 yang mencapai US\$. 28.617,5 juta dan tersebar di 9.612 proyek. Pada tahun 2015 investasi asing yang masuk di Indonesia meningkat lagi sebesar

Tabel 8.3. Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor (Juta US\$), Tahun 2013–2015

Sektor	2013		2014		2015	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	647	1 655,5 (5,78)	425	2 326,2 (8,15)	868	2 219,2 (7,58)
Pertambangan	820	4 816,4 (16,83)	552	4 665,1 (16,35)	1 066	4 017,2 (13,72)
Industri	3 322	15 858,8 (55,42)	3 075	13 019,3 (45,63)	7 184	11 763,1 (40,18)
Listrik, Gas dan Air	156	2 221,8 (7,76)	118	1 248,8 (4,38)	350	3 028,9 (10,35)
Konstruksi	146	526,8 (1,84)	147	1 383,6 (4,85)	358	954,5 (3,26)
Perdagangan dan Reparasi Hotel & Restoran	2 681	1 069,0 (3,74)	2 746	1 379,9 (4,84)	4 757	1 275,2 (4,36)
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	198	1 449,9 (5,07)	228	3 000,9 (10,52)	493	3 289,9 (11,24)
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	285	677,7 (2,37)	255	1 168,4 (4,10)	858	2 433,6 (8,31)
Jasa Lainnya	1 357	341,7 (1,19)	1 339	337,5 (1,18)	1 804	294,3 (1,01)
Jumlah	9 612	28 617,5 (100,00)	8 885	28 529,7 (100,00)	17 738	29 275,9 (100,00)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah
Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

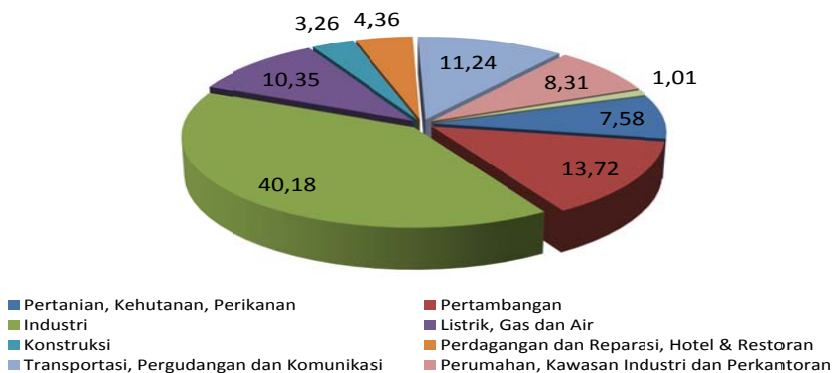
US\$ 29.275,9 juta, angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 2,62 persen bila dibandingkan dengan tahun 2014. Jumlah proyek investasi asing juga meningkat di tahun 2015 menjadi 17.738 proyek.

Sementara itu jika dilihat berdasarkan sektor, dalam 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor industri masih menjadi sektor yang sangat diminati oleh para investor asing yang menganggap bahwa sektor tersebut mampu memberikan keuntungan. Sektor lain yang cukup diminati oleh investor asing adalah sektor pertambangan dan sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi. Selain itu sektor yang mulai dilirik oleh investor asing dan menjanjikan ke depannya adalah sektor pertanian.

Sektor industri sebagai sektor yang cukup diminati investor asing dalam 3 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang menurun dalam penyerapan investasi, dimana pada tahun 2013 mampu menyerap investasi asing hingga 55,42 persen dari total investasi atau sebesar US\$ 15.858,8 juta yang tersebar di 3.322 proyek. Kinerja sektor industri pada tahun 2014 hanya mampu menyerap sekitar 45,63 persen saja dari total investasi asing yang masuk atau sekitar US\$ 13.019.3 juta menunjukkan penurunan 17,90 persen dari tahun lalu. Investasi yang terserap di sektor industri kembali mengalami penurunan sekitar 9,65 pada tahun 2015 yaitu hanya mampu menyerap sebesar US\$ 11.763,1 juta atau sekitar 40,18 persen dari total investasi asing yang masuk dan tersebar di 7.184 proyek.

Selain sektor industri investor asing sangat berminat menanamkan modalnya di sektor pertambangan, namun dalam tiga tahun terakhir nilai investasi asing yang terserap di sektor tersebut terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013 sektor pertambangan mampu menyerap investasi asing sebesar US\$ 4.816,4 juta yang tersebar di 820 proyek, di tahun 2014 sektor pertambangan hanya hanya mampu menyerap investasi sebesar US\$ 4.665,1 juta atau turun sekitar 3,14 persen. Pada tahun 2015 investasi asing yang terserap di sektor pertambangan kembali mengalami penurunan menjadi US\$ 4.017,2 juta atau turun 13,89 persen yang tersebar di 1.066 proyek.

Gambar 8.3
 Nilai Investasi PMA yang Terealisasi Menurut Sektor (persen), 2015



Selanjutnya, sektor yang cukup menjanjikan keuntungan bagi investor adalah sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, dimana pada tahun 2013 investasi asing yang terserap baru tercatat sebesar US\$ 1.449,9 juta atau sekitar 5,07 persen dari total investasi asing yang masuk. Pada tahun 2015 sektor Transportas, Pergudangan dan Komunikasi mampu menarik investasi asing sebesar US\$ 3.289,9 juta yang tersebar di 493 proyek atau terjadi kenaikan sekitar 9,63 persen dari investasi tahun lalu.

Untuk mendukung pertumbuhan investasasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Perpres No 13 dan 78 tahun 2010 dan No 12 tahun 2011 untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan mengingat akselerasi investasi belum sepenuhnya didukung perkembangan pada sisi infrastruktur yang merata, terutama infrastruktur di wilayah timur Indonesia yang masih minim. Selain itu, percepatan pembangunan ekonomi berbasis kawasan juga sudah mulai digulirkan dengan membentuk enam koridor spesifik, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua.

Belum meratanya pembangunan infrastruktur Indonesia terlihat dari investasi yang terserap menurut wilayah. Baik investasi domestik maupun investasi asing sebagian besar masih didominasi di kawasan Pulau Jawa, hal ini karena Pulau Jawa mempunyai daya Tarik bagi investor dan didukung oleh infrastruktur yang memadai. Investasi asing yang masuk di Pulau Jawa pada tahun 2015 menurun 0,02 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu dari US\$ 15.436,7 menjadi US\$ 15.433,0 juta. Berbanding terbalik dengan jumlah proyek justru terjadi peningkatan dari 6.202 proyek pada tahun 2014 naik menjadi 12.177 proyek atau meningkat 96,34 persen.

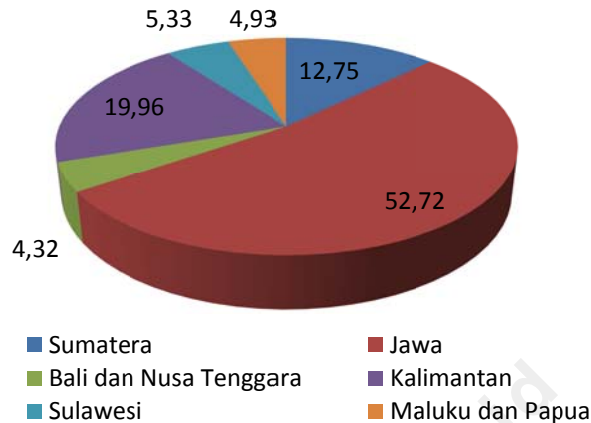
Tabel 8.4. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Yang Disetujui Pemerintah Menurut Pulau (Juta US \$), Tahun 2013–2015

Sektor	2013		2014		2015	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Sumatera	1 181	3 395,3 (11,86)	884	3 844,6 (13,48)	1 884	3 732,8 (12,75)
Jawa	6 059	17 326,4 (60,54)	6 202	15 436,7 (54,11)	12 177	15 433,0 (52,72)
Bali dan Nusa Tenggara	932	888,9 (3,11)	806	993,4 (3,48)	1 309	1 265,1 (4,32)
Kalimantan	849	2 773,4 (9,69)	571	4 673,6 (16,38)	1 195	5 842,9 (19,96)
Sulawesi	343	1 498,2 (5,24)	282	2 055,7 (7,21)	834	1 560,4 (5,33)
maluku dan Papua	248	2 735,4 (9,56)	140	1 525,8 (5,35)	339	1 441,9 (4,93)
Jumlah	9 612	28 617,5 (100,00)	8 885	28 529,7 (100,00)	17 738,0	29 275,9 (100,00)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Gambar 8.4
Nilai Investasi PMA yang Terealisasi Menurut Pulau (persen), 2015



Investasi asing yang terserap di Pulau Kalimantan sebesar US\$ 5.842,9 juta, dan di Pulau Bali dan Nusa Tenggara investasi asing yang terserap mencapai US\$ 1.265,1 juta pada tahun 2015, jika dibanding tahun 2014 masing-masing mengalami peningkatan, peningkatan 25,02 persen dan 27,35. Besarnya nilai investasi asing yang terserap di Pulau Kalimantan tersebar di 1.195 proyek sedangkan di Pulau Bali dan Nusa Tenggara tersebar di 1.309 proyek. Walaupun Pulau Sumatera mengalami penurunan dalam penyerapan investasi asing dibanding tahun 2014 sebesar 2,91 persen, namun masih menduduki posisi ketiga dalam hal penyerapan nilai investasi yaitu sebesar US\$. 3.732,8 juta yang terbagi dalam 1.884 proyek. Penurunan penyerapan investasi juga terjadi di Pulau Sulawesi, dari US\$ 2.055,7 juta di tahun 2014 menjadi US\$ 1.560,4 juta di tahun 2015 atau turun 24,09 persen. Sedangkan di Pulau Maluku dan Papua turun sebesar 5,50 persen menjadi US\$ 1.441,9 juta.

Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa efek merupakan tempat atau wadah bagi perusahaan-perusahaan yang menawarkan efek atau surat-surat berharga untuk diperjual belikan, dimana dana yang diperoleh dari penjualan efek tersebut digunakan oleh perusahaan sebagai tambahan modal dan pembiayaan untuk memperbesar usaha. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa efek merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun). Saat ini banyak perusahaan yang memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif untuk mendapatkan dana segar bagi pengembangan usahanya. Dalam beberapa tahun terakhir bursa efek atau pasar modal memperlihatkan kinerja yang sangat menggembirakan dan telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi emiten dan dunia usaha. Dana-dana yang diinvestasikan di bursa efek menjadi kian produktif yang sangat menjanjikan dan bisa menjadi andalan untuk berinvestasi.

Emiten adalah pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Semakin banyak emiten yang masuk di pasar bursa maka akan semakin banyak jumlah saham yang ditawarkan. Setiap emiten wajib membuat laporan, laporan emiten menjadi salah satu usaha yang baik untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kinerja emiten.

Perekonomian Indonesia yang tetap tumbuh di tengah pemulihan ekonomi global, telah mampu mendorong tingginya arus modal masuk ke bursa saham domestik. Dari sisi jumlah saham yang diperdagangkan disepanjang tahun 2012-2015, jumlah saham yang diperdagangkan mengalami fluktuatif, dimana jumlah saham yang diperdagangkan hingga akhir tahun 2013 mencapai sebanyak 1.342,66 miliar lembar atau meningkat 27,42 persen dari tahun lalu dan turun sebesar 1,16 persen menjadi 1.327,02 miliar lembar saham pada tahun 2014. Memasuki tahun 2015 jumlah saham yang diperdagangkan kembali menunjukkan peningkatan sebesar 8,99 persen menjadi 1.446,31 miliar lembar saham. Dari jumlah saham yang diperdagangkan di tahun 2013 diperoleh nilai transaksi mencapai Rp 1.522,12 triliun menunjukkan peningkatan sekitar 36,38 persen dari tahun lalu. Pada tahun 2014 dari saham yang diperdagangkan diperoleh nilai transaksi sebesar Rp 1,453,39 triliun atau turun sekitar 4,52 persen dan kembali mengalami penurunan di tahun 2015 sekitar 3,24 persen menjadi Rp 1.406,36 triliun, kenaikan dari jumlah saham yang diperdagangkan di tahun 2015 tidak diikuti dengan kenaikan nilai transaksinya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dihitung setiap hari dimana terjadi transaksi, dengan menggunakan harga saham terakhir yang terjadi di lantai bursa. Indeks Harga Saham merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga-harga saham. Sebagai besaran statistik, indeks harga saham juga sering digunakan untuk menggambarkan dan meramalkan kecenderungan pasar.

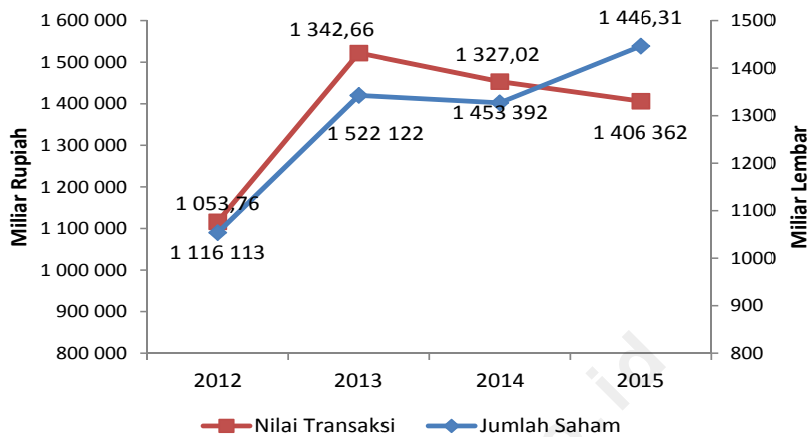
Seiring dengan masih tumbuh positif perekonomian domestik dan ditopang oleh kondisi makro ekonomi yang terjaga serta kebijakan moneter yang cenderung longgar dan semakin baiknya kinerja keuangan emiten dari hasil yang dilaporkan, kepercayaan pelaku pasar semakin kuat. Kinerja positif di pasar saham, terlihat pada pergerakan IHSG yang naik turun dari tahun 2012-2015.

Tabel 8.5. Transaksi dan Indeks Saham di Bursa Efek Indonesia, Tahun 2012–2015

Akhir Periode	Jumlah Saham yang Diperdagangkan (Miliar lembar)	Nilai Transaksi (Miliar Rupiah)	Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	Jumlah Emiten	Emisi Saham (miliar lembar)	Nilai Emisi (miliar rupiah)
2012	1 053,76	1 116 113	4 316,69	571	8 867,86	585,20
2013	1 342,66	1 522 122	4 274,18	603	8 978,03	642,52
2014	1 327,02	1 453 392	5 226,95	621	9 139,28	676,82
2015	1 446,31	1 406 362	4 593,01	636	54 759,43	3 132,53

Sumber: BEI dan SEKI

Gambar 8.5
Jumlah dan Nilai Transaksi Saham di Bursa Efek Indonesia, Tahun 2012-2015



Menutup tahun 2012 IHSG di tutup pada level 4.316,69 dan diakhir tahun 2013 IHSG turun pada level 4.274,18, IHSG meningkat diakhir penutupan tahun 2014 yaitu mencapai 5.226,95. Namun kembali mengalami penurunan sebesar 12,13 persen pada penutupan tahun 2015 menjadi 4.593,01.

Jumlah emiten yang terdaftar di BEI menunjukkan tren yang terus meningkat selama 2012-2015. Tahun 2012, jumlah emiten tercatat sebanyak 571 emiten dan terus bergerak naik menjadi 603 pada tahun 2013, berlanjut menjadi 621 emiten di tahun 2014. Pada tahun 2015, ada tambahan emiten sekitar 15 sehingga total menjadi 636 emiten. Kehadiran emiten baru mengindikasikan pasar saham masih menjadi alternatif penting bagi dunia usaha untuk mengakses dana murah dan menopang ekspansi usaha (Berita, 2015).

Bertambahnya jumlah emiten, diikuti pula dengan emisi saham yang diperdagangkan mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dari 8,87 triliun lembar pada tahun 2012 menjadi 9,14 triliun lembar pada tahun 2014. Jumlah emisi saham menunjukkan peningkatan yang sangat fantastis pada tahun 2015 dengan pertambahan sebesar 499,03 persen menjadi 54,76 triliun lembar. Hal ini dikarenakan adanya emiten baru yang menginvestasikan dananya dengan cara membeli saham yang mereka anggap lebih aman. Nilai emisi juga mencatatkan adanya pertumbuhan setiap tahun selama 2012-2015. Pada tahun 2012 nilai emisi saham tercatat sebesar Rp. 585,20 triliun dan tahun 2014 meningkat menjadi Rp 676,82 triliun atau naik 5,34 persen dibanding nilai emisi yang tercatat di tahun 2013 yaitu sekitar Rp 642,52 triliun. Kenaikan nilai emiten tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu mencapai 362,83 persen menjadi Rp 3.132, 53 triliun.

Investasi Asing yang Masuk ke Indonesia

Sejak diberlakukannya pasar bebas, investasi asing yang masuk ke Indonesia terus meningkat baik investasi langsung maupun investasi portofolio. Masuknya modal/investasi asing menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi dan dapat memberikan manfaat besar seperti penciptaan lapangan kerja, penambahan pajak, transfer teknologi, dan tumbuhnya sektor turunan lain. Namun di sisi lain, investasi asing dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan, baik ekonomi maupun sosial. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi, sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah bahwa investasi asing harus tetap di bawah kekuatan kendali negara, sehingga segala aktivitas bisnis dan operasi mereka selalu bisa dikontrol oleh negara.

Namun isu yang marak dan menimbulkan keresahan saat ini adalah semakin derasnya modal asing yang masuk ke Indonesia yang dikhawatirkan berdampak negatif. Aliran modal yang masuk dalam bentuk penanaman modal langsung (PMA) dan investasi asing di pasar modal terus meningkat. Bila kekuatan modal asing mendominasi perekonomian nasional, maka secara perlahan para investor asing pun akan menguasai secara langsung sumber-sumber ekonomi nasional, terutama kekayaan sumber daya alam.

Aliran modal asing yang masuk ke pasar modal Indonesia juga menunjukkan peningkatan. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, aliran modal asing yang masuk ke pasar saham terus meningkat. BEI mencatat saham yang dibeli oleh pihak asing pada tahun 2015 sudah diatas 200.000 juta lembar atau tepatnya sebanyak 239.364 juta lembar saham dengan nilai mencapai Rp. 596.329 miliar. Sementara itu, saham yang dijual oleh pihak asing sepanjang tahun 2015 mencapai 262.216 juta lembar saham dengan nilai mencapai Rp 618.918 miliar. Sehingga sampai akhir tahun 2015 nilai saham asing yang masuk ke lantai bursa mencapai Rp 22.589 miliar, terjadi penurunan sekitar 88,50 persen jika dibandingkan tahun 2014.

Tabel 8.6. Jumlah dan Nilai Perdagangan Saham yang Dilakukan oleh Investor Asing di Bursa Efek Indonesia, Tahun 2010–2015

Akhir Periode	Volume		Nilai	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
2012	211 942	214 089	482 785	466 904
2013	269 630	276 152	629 454	650 101
2014	275 988	281 644	611 016	568 419
2015	239 364	262 216	596 329	618 918

Sumber: Bapepam,

Terlihat bahwa pihak asing masih mendominasi dengan kuat terutama pada investasi langsung dalam bentuk penanaman modal. Semestinya persentase investor lokal harus lebih tinggi untuk dapat bersaing dan menahan gempuran profit taking asing. Diharapkan pemerintah harus mulai dapat membatasi investasi asing yang masuk. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan dibidang investasi harus dapat membatasi investasi asing dan bukan kebijakan investasi yang membuka lebar-lebar pintu investasi asing karena dinilai akan menempatkan Indonesia di bawah dominasi ekonomi asing. Seharusnya Indonesia menjadikan investasi asing sebagai pendukung atau pelengkap saja, bukan sebagai penopang utama sistem perekonomian nasional.

BKPM sebagai pengelola investasi langsung, dan PT BEI sebagai pengelola pasar modal harus dapat memotivasi, mengembangkan, dan meningkatkan jumlah pemodal/investor lokal untuk mampu menunjukkan bahwa mereka adalah lokomotif penopang stabilnya perekonomian, dan dapat menumbuhkan kegiatan perekonomian di Indonesia. Para investor lokal dapat menjadi tulang punggung bagi pengembangan pasar modal dan pasar saham nasional. Semakin banyak jumlah investor lokal beserta dananya yang diinvestasikan di pasar modal, maka akan mampu menjaga yang memanfaatkan SDA yang ada.



9

Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Sektor pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa negara. Sebagai penghasil devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, karena sektor pariwisata mampu membuka perluasan kesempatan serta lapangan kerja, dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya. Selain itu sektor pariwisata memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia. Ini berarti, pengembangan pariwisata di Indonesia tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat menarik yang dilatar belakangi oleh budaya, adat istiadat yang unik, dan kesenian yang dimiliki oleh setiap suku yang ada di Indonesia. Di samping itu, alamnya yang indah akan memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik itu alam pegunungan (pedesaan), alam bawah laut, maupun pantai.

Persoalan pariwisata Indonesia terletak pada promosi, pengemasan, juga penataan kawasan wisata dan infrastruktur. Promosi sangat penting, atas dasar itulah anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk mempromosikan Indonesia ke luar negeri cukup besar sekali sebagian digunakan untuk mem-branding Indonesia karena brand kita masih lemah. Selama ini orang luar negeri kenalnya Bali dibandingkan Indonesia, makanya *country branding* harus diperkuat. Dalam hal penataan, pemerintah melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, dan melakukan pembenahan pembangunan akomodasi penunjang pariwisata secara menyeluruh. Selain itu, pemerintah baik pusat maupun daerah dan *stakeholder* terkait melakukan pembenahan dan pembangunan secara menyeluruh kawasan wisata ditunjang dengan pembanguana infrastruktur menuju ke tempat-tempat wisata, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Pemerintah menargetkan jumlah kunjungan wisman pada tahun 2016 sebanyak 12 juta orang. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencapai target tersebut adalah melakukan terobosan regulasi dengan memperbanyak pemberian Bebas Visa Kunjungan (BVK) kepada negara-negara di luar Indonesia (Perpres Nomor 104 Tahun 2015). Melalui kebijakan ini diharapkan jumlah wisatawan yang datang akan meningkat 1 (satu) juta wisatawan mancanegara (wisman) dengan devisa sebesar US\$ 1 milyar. Terobosan lain yang juga digulirkan pemerintah yaitu deregulasi pariwisata dengan menghapus *Clearance Approval for Indonesia Territory* (CAIT/Perpres No. 105 Tahun 2015) akan meningkatkan jumlah kunjungan perahu pesiar (yacht) ke Indonesia dan menderegulasi terhadap asas cabotage untuk cruise atau kapal pesiar asing, dengan membolehkan penumpang naik turun di lima pelabuhan di Indonesia yaitu: Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Benoa (Bali), dan Soekarno-Hatta (Makassar). Promosi pariwisata ke berbagai negara pun juga terus digalakan. Tak ketinggalan, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus bekerjasama dengan Garuda Indonesia untuk membuka penerbangan langsung dari Tiongkok.

Untuk mencapai target yang sudah ditetapkan Kemenpar telah menyiapkan kalender event atau festival wisata di Indonesia yang dapat mendatangkan wisman. Ada 10 yang menjadi prioritas, yakni Festival Grebeg Sudiro, Dukungan Wisata Religi Dzikir Nasional, Gerhana Matahari Total, Festival Tambora, Festival Kuliner Nusantara, Lake Toba Ultra, Tour de Singkarak, Jakarta Marathon, Bono Surfing Expedition dan Musi Triboattoon. Selain itu ada 10 destinasi wisata yang diprioritaskan untuk dipromosikan adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Pulau Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo, dan Pulau Morotai. <http://www.bkn.go.id/berita/menteri-pariwisata-2016-target-kunjungan-12-juta-wisatawan-mancanegara-dan-260-juta-wisatawan-nusantara>

Posisi Indonesia di dunia pariwisata international tahun 2015 kini lebih signifikan. Menurut *World Economic Forum* (WEF) Indeks Daya Saing Pariwisata Indonesia berhasil naik ke peringkat 50 dari 141 negara di dunia. Tidak hanya mengalami kenaikan ranking di tingkat dunia, namun untuk tingkat Asia Pasifik, indeks daya saing pariwisata Indonesia juga naik berada di ranking 11. Posisi baru Indonesia ini, hanya satu tingkat di bawah negara Thailand yang rankingnya turun menjadi 10 di Asia Pasifik. Walaupun begitu di negara-negara ASEAN, Indonesia berada di posisi keempat setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dari empat negara di ASEAN yang tertinggi daya saingnya tersebut hanya Indonesia yang naik indeksnya secara bersamaan di tingkat Asia Pasifik dan dunia. Bisa diartikan juga bahwa Indonesia memiliki kekuatan yang bisa diandalkan untuk bersaing baik di tingkat regional dan global.

Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Melalui Pintu Masuk/ Bandara

Kondisi pariwisata Indonesia selama tahun 2015 cukup membaik. Selama tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sebanyak 10.230.775 orang. Jumlah ini terdiri dari wisman yang datang melalui 19 pintu masuk sebagai "*foreign visitor*" sebanyak 9.729.350 wisman dan sisanya adalah wisman yang datang melalui pintu perbatasan atau "*foreigners who enter throught the cross border post*" dan kunjungan singkat wisman selama setahun atau "*other short foreigner visitors in 1 year*". Angka kunjungan wisman 2015 tersebut melampaui target pemerintah yang ditetapkan sebesar 10 juta wisman. Pencapaian target tersebut tidak lepas dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan di tanah air serta peran dari seluruh *stakeholder* pariwisata dalam upayanya mempromosikan berbagai keindahan alam maupun budaya sebagai kekayaan bangsa dan dapat dimanfaatkan untuk menarik wisman untuk berkunjung ke Indonesia.

Dalam dunia bisnis selalu ada tantangan dan peluang. Dengan kondisi melemahnya rupiah, kunjungan wisman diharapkan meningkat mengingat biaya berwisata akan terasa lebih murah atau lebih banyak yang bisa dibelanjakan oleh wisman. Daya saing harga atau *price competitiveness* merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan wisman dalam menentukan destinasi wisata. Dalam hal ini, *World Economy Forum* (WEF) menetapkan Indonesia pada posisi ketiga di dunia dalam hal daya saing harga.

Kendati demikian, untuk mendulang devisa dari kunjungan wisman, diperlukan instrumen yang mempermudah kedatangan wisman yaitu melalui fasilitas bebas visa. Kebijakan bebas visa kunjungan singkat (BVK) merupakan salah satu strategi untuk mempercepat pertumbuhan kunjungan wisman. Negara tetangga seperti Malaysia sudah membebaskan visa bagi 164 negara dan Thailand 56 negara. Indonesia pada tahun 2015 menambah beberapa negara yang akan diberi bebas visa bagi warganya yang berkunjung ke Indonesia sehingga total menjadi 90 negara yang dibebaskan. Direncanakan pada tahun 2016 pemerintah akan memperbanyak BVK menjadi 174 negara yang dibebaskan.

Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia selama lima tahun terakhir selalu menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 7,65 juta orang, dan mengalami peningkatan terus hingga mencapai 10 juta lebih wisman pada tahun 2015. Bila dibandingkan dengan jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2014, jumlah kunjungan wisman selama tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 8,43 persen. Kenaikan jumlah kunjungan wisman tahun 2015 terjadi di sebagian pintu masuk utama. Kedatangan wisman melalui Bandara Internasional

**Tabel 9.1. Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia (orang),
Tahun 2010–2016**

Tahun	Bandara					Jumlah
	Soekarno Hatta (Jakarta)	Ngurah Rai (Bali)	Juanda (Surabaya)	Hang Nadim (P. Batam)	Lainnya	
2010	1 823 636	2 546 023	168 888	1 007 446	1 456 951	7 002 944
2011	1 933 022	2 788 706	185 815	1 161 581	1 580 607	7 649 731
2012	2 053 850	2 902 125	197 776	1 219 608	1 671 103	8 044 462
2013	2 240 502	3 241 889	225 041	1 336 430	1 758 267	8 802 129
2014	2 246 437	3 731 735	217 193	1 454 110	1 785 936	9 435 411
2015 ^x	2 368 628	3 936 066	204 200	1 585 719	2 136 162	10 230 775
Januari	172 119	289 678	15 562	117 824	175 883	771 066
Februari	174 752	333 632	14 196	122 526	187 894	833 000
Maret	208 043	295 449	16 589	127 567	179 421	827 069
April	164 649	310 984	16 263	129 910	165 476	787 282
Mei	194 668	288 048	17 572	152 272	185 470	838 030
Juni	179 184	358 749	15 209	135 956	169 261	858 359
Juli	181 438	383 280	17 602	113 115	165 268	860 703
Agustus	259 313	299 594	18 759	137 706	180 048	895 420
September	217 978	380 491	18 457	120 226	168 654	905 806
Oktober	203 532	368 026	16 107	126 819	147 021	861 505
Nopember	221 629	263 232	20 765	128 030	187 013	820 669
Desember	191 323	364 903	17 119	173 768	224 753	971 866
2016 ^x						
Januari	153 503	343 663	11 674	108 888	122 842	740 570
Februari	164 317	367 024	14 955	120 351	147 273	813 920
Maret	202 669	354 778	17 894	125 324	151 561	852 226

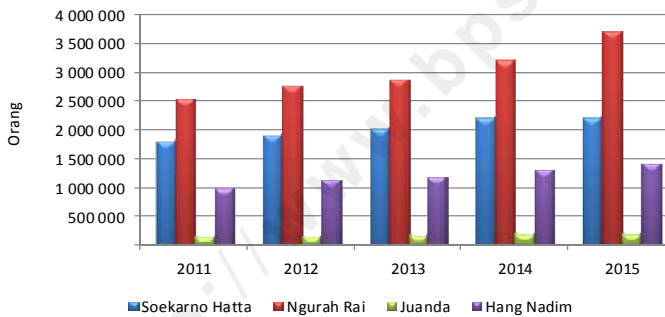
Catatan : x Angka sementara

Sumber : Diolah dari Dokumen Imigrasi

Ngurah Rai Bali mengalami peningkatan sebesar 5,48 persen sedangkan Hang Nadim Batam mengalami peningkatan sebesar 9,05 persen. Keadaan sebaliknya terjadi di Bandara Juanda Surabaya. Jumlah wisman yang masuk melalui Bandara Juanda Surabaya tercatat mengalami penurunan sebesar 5,98 persen.

Berdasarkan data yang diolah dari Dokumen Imigrasi, pada tahun 2015 jumlah wisman yang masuk ke Indonesia yang terbesar melalui bandara Ngurah Rai Bali mencapai 3,94 juta wisman atau sekitar 38,47 persen dari total wisman yang datang ke Indonesia. Dengan demikian, diantara 19 pintu masuk utama, Bandara Ngurah Rai, Bali, masih menjadi pintu utama kunjungan wisman. Bali merupakan tempat favorit berlibur bagi para wisman. Selanjutnya, wisman yang berkunjung ke Indonesia masuk melalui Bandara Soekarno Hatta mencapai 2,37 juta orang atau sekitar 23,15 persen dari total wisman yang datang ke Indonesia. Sementara itu, jumlah kedatangan wisman melalui Bandara Hang Nadim (Batam) sepanjang tahun 2015 mencapai hampir 1,59 juta orang atau sekitar 15,50 persen.

Gambar 9.1
Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Melalui Bandara (orang), Tahun 2011–2015



Jumlah kedatangan wisman ke Indonesia pada semester pertama 2015 terjadi penurunan pada bulan Maret dan April, sedangkan pada semester kedua penurunan wisman terjadi pada bulan Oktober dan November. Penurunan ini dikarenakan adanya bencana alam seperti adanya kebakaran hutan yang menyebabkan bencana kabut asap yang mengganggu penerbangan dan operasional bandara, terutama yang melanda tiga pulau besar di Indonesia yaitu Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Bencana kabut asap tidak hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat Indonesia, tetapi juga sampai mengganggu ke negara tetangga Singapura, Malaysia bahkan sampai ke Thailand. Selain itu letusan gunung yang terjadi di beberapa wilayah tujuan wisata membuat wisman berkurang.

Memasuki Triwulan I (Januari–Maret) 2016, jumlah kunjungan wisman mencapai 2,41 juta wisman atau turun 1,00 persen dibanding kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang berjumlah 2,43 juta wisman. Pada tahun 2016 Pemerintah menargetkan wisatawan mancanegara

sebanyak 12 juta orang. Dari jumlah wisman yang datang di triwulan I 2016 tersebut, Kemenpar optimis akan mampu mencapai target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 12 juta pada tahun 2016. Keyakinan pemerintah mampu untuk mendatangkan wisman ke Indonesia sesuai target, karena pemda dan Stake holder melihat di tahun 2016 banyak even. Sejumlah even besar yang terjadi pada semester I 2016 sangat mempengaruhi masuknya jumlah wisman ke Indonesia, diantaranya adalah adanya liburan Hari Raya Imlek jatuh pada awal Februari, gencarnya kegiatan *Wonderful Indonesia Festival (WIF)* di wilayah perbatasan NKRI untuk menjaring wisatawan *cross border*, serta adanya peristiwa Gerhana Matahari Total (GMT) pada 9 Maret yang menarik perhatian wisman dari seluruh dunia.

Berdasarkan pintu masuk utama kedatangan wisman, jumlah kunjungan wisman yang masuk melalui bandara Ngurah Rai (Bali) di tiga bulan pertama sudah mencapai 1.065.465 orang. Sementara itu, kedatangan wisman melalui Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta) sebanyak 520.489 orang, dan pintu masuk bandara Hang Nadim (P. Batam) sebanyak 354.563 orang wisman.

Profil Wisatawan Mancanegara

Profil wisatawan mancanegara (wisman) diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dimana sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 wisman laki-laki yang berkunjung ke Indonesia lebih dominan dibandingkan wisman perempuan, yaitu lebih dari 65 persen. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 6,19 juta orang atau sekitar 65,65 persen wisman berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 3,24 juta orang atau sekitar 34,35 persen wisman berjenis kelamin perempuan. Padahal jika ditilik lebih dalam lagi ternyata wisman perempuan memiliki rata-rata pengeluaran (*spending*) lebih besar dibandingkan wisman laki-laki, baik dari sisi per hari atau per kunjungan. Meski jurang perbedaan angka tidak terlalu besar bila dilihat dari jumlah kunjungan, tetapi *spending* lebih bermanfaat dan dapat menambah devisa bagi negara dengan banyaknya belanja yang dikeluarkan oleh wisman perempuan. Hal ini bisa menjadi perhatian pemerintah bagaimana membidik potensi wisman perempuan pada saat berkunjung ke setiap destinasi di Indonesia baik dari sisi jumlah kunjungan maupun *spending*.

Dilihat berdasarkan kelompok umur, selama 2010-2014 mayoritas wisman yang berkunjung ke Indonesia berada pada kelompok umur 25-34 tahun, yakni di atas 25 persen. Hingga tahun 2014 tercatat sekitar 2,41 juta orang atau sekitar 25,63 persen dari total wisman berapa pada kelompok umur ini. Peringkat kedua diduduki wisman pada kelompok umur 35-44 tahun yaitu sebesar 23,49 persen atau sekitar 2,19 juta orang. Apabila kedua kelompok umur digabungkan (25-44 tahun) maka jumlah wisman yang berkunjung pada kelompok umur ini mendominasi kedatangan wisman yaitu hampir 50 persen. Pada tahun 2010 persentase kelompok umur 25-44 tahun mencapai

Tabel 9.2. Profil Wisatawan Mancanegara (orang), Tahun 2009–2014

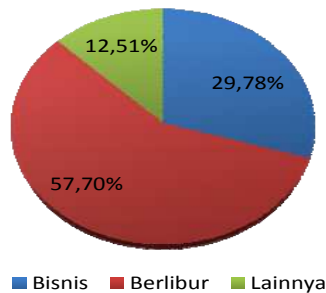
Karakteristik	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jenis Kelamin						
- Laki-Laki	4 210 706	4 724 416	5 122 117	5 366 423	5 843 025	6 194 005
- Perempuan	2 113 024	2 278 528	2 527 614	2 678 039	2 959 104	3 241 406
Kelompok Umur						
- Kurang dari 15	129 026	218 262	300 064	456 763	591 667	643 993
- 15-24	415 740	619 244	668 980	837 712	1 047 624	1 146 981
- 25-34	1 660 580	1 928 808	2 113 342	2 180 111	2 256 004	2 411 408
- 35-44	1 828 268	1 788 136	2 030 275	1 959 592	2 067 307	2 192 380
- 45-54	1 420 819	1 320 773	1 429 461	1 442 473	1 472 347	1 554 480
- 55-64	531 007	664 783	709 529	778 399	690 523	733 634
- Lebih dari 64	338 290	462 938	398 080	389 412	676 657	752 535
Maksud dan Kunjungan						
- Bisnis	1 978 434	2 182 880	2 333 902	2 447 344	2 734 361	2 810 055
- Berlibur	3 788 341	4 148 046	4 601 326	4 744 009	4 972 890	5 444 237
- Lainnya	556 955	672 018	714 503	853 109	1 094 878	1 180 619
Pekerjaan						
- Profesional	2 295 858	2 536 340	2 680 137	2 706 240	2 802 259	2 945 738
- Manajemen / Administrasi	1 344 390	1 661 967	1 767 310	1 831 933	1 900 857	1 979 944
- Sales/ Karyawan /Teknisi	1 262 577	1 032 455	1 142 366	1 224 613	1 369 348	1 516 111
- Lainnya	1 420 905	1 772 182	2 059 918	2 281 676	2 729 665	2 993 618

Sumber : Survei Profil Wisatawan Mancanegara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

55,17 persen dan mengalami penurunan hingga tahun 2014 menjadi sekitar 49,12 persen. Walaupun menurun, kelompok umur ini masih tetap menjadi mayoritas.

Jika dilihat dari tujuan kunjungan wisman ke Indonesia, para wisman yang datang berkunjung ke Indonesia didominasi oleh wisman yang bertujuan untuk berlibur atau wisata. Ini menandakan bahwa wilayah Indonesia menjadi incaran para turis untuk berlibur dan menjanjikan tempat wisata yang indah untuk di kunjungi. Pada tahun 2010 sebanyak 4,14 juta orang atau 59,23 persen wisman berkunjung untuk berlibur, kemudian meningkat menjadi 4,60 juta pada tahun 2011 dan meningkat terus hingga mencapai 4,97 juta orang pada tahun 2013 seiring dengan meningkatnya jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia. Hingga tahun 2014 jumlah wisman yang berkunjung untuk berlibur mencapai 5,44 juta orang atau sekitar 57,70 persen, sedangkan wisman yang berkunjung untuk berbisnis mencapai 2,81 juta orang atau sekitar 29,78 persen. Sementara itu, sisanya sekitar 12,51 persen atau 1,18 juta orang mempunyai tujuan selain untuk berbisnis dan berlibur.

Gambar 9.2
Persentase Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia
Menurut Tujuan Kunjungan, Tahun 2014



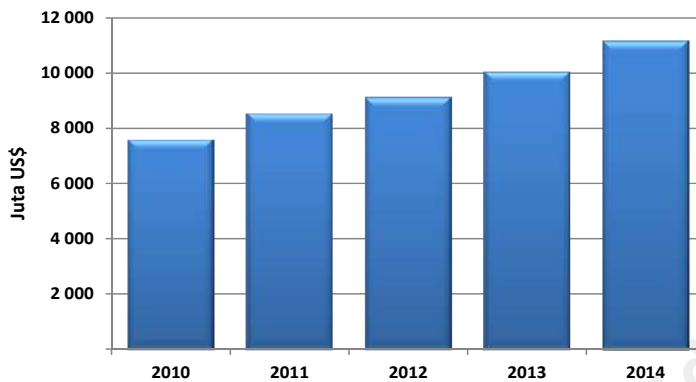
Jika dilihat dari jenis pekerjaan, sebagian besar wisman yang datang berkunjung ke Indonesia memiliki pekerjaan sebagai profesional. Tercatat pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 2,53 juta orang atau 36,22 persen. Selanjutnya mereka yang berprofesi sebagai manajemen/administrasi mencapai 1,66 juta orang (23,73 persen), sales/karyawan/teknisi mencapai 1,03 juta orang (14,74 persen), dan sisanya berprofesi lainnya (pelajar, ibu rumah tangga, militer, pegawai pemerintah, dan lainnya) sebanyak 1,77 juta orang atau sekitar 25,31 persen. Hingga tahun 2014 wisman yang berkunjung ke Indonesia dengan pekerjaannya sebagai professional masih terus mendominasi yaitu mencapai 2,94 juta orang (31,22 persen), diikuti mereka yang bekerja sebagai Manajemen/Administrasi sebanyak 1,97 juta orang (20,98 persen), dan mereka yang bekerja sebagai sales/karyawan/teknisi sebanyak 1,51 juta orang (16,07 persen).

Penerimaan Devisa dari Wisatawan Mancanegara

Potensi pariwisata di Indonesia amatlah besar, membentang dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua dengan semua keaneka ragam obyek pariwisata, beragam wisata budaya serta tersedianya fasilitas dan prasarana pendukung pariwisata, yang kesemuanya diharapkan dapat menarik semakin banyak lagi devisa negara, baik dari wisatawan mancanegara (wisman) ataupun wisatawan nusantara (wisnus). Selain itu juga Indonesia kaya dengan beragam masakan yang memiliki kandungan nilai cita rasa tinggi dalam wisata kulinernya. Selain menarik devisa, sektor pariwisata juga dapat mendatangkan kesempatan yang sangat luas dalam penciptaan lapangan kerja sehingga diharapkan penyerapan tenaga kerja semakin banyak dan mengurangi tingkat pengangguran.

Melihat semakin besarnya potensi pariwisata di dalam negeri, pemerintah berencana menjadikan sektor pariwisata sebagai andalan perolehan devisa. Pariwisata juga dianggap sebagai sektor yang mudah dapat menghasilkan devisa dibanding dengan banyak sektor lain, dan banyak negara berhasil memperoleh

Gambar 9.3
Penerimaan Devisa dari Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia (juta US\$), Tahun 2010–2014



devisa dari pariwisata. Pariwisata Indonesia memiliki banyak keunggulan dari sisi destinasi dan harga. Pemerintah juga sudah menetapkan bahwa selama lima tahun ke depan telah menargetkan devisa yang masuk dari sektor pariwisata sebesar Rp 260 triliun dengan target kunjungan wisman mencapai 20 juta orang. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi dari aspek kebijakan, pembangunan destinasi wisata yang bersaing, aksesibilitas ke tempat wisata, dan promosi Indonesia yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Peningkatan devisa negara tidak lepas dari peningkatan jumlah wisman yang datang ke Indonesia setiap tahunnya. Pada tahun 2010 devisa yang masuk dari sektor pariwisata mencapai US\$ 7,60 miliar dan meningkat menjadi US\$ 8,55 miliar pada tahun berikutnya. Bahkan pada tahun 2013 penerimaan devisa dari sektor pariwisata sudah melebihi angka US\$ 10 miliar. Hingga tahun 2014 jumlah penerimaan devisa negara mencapai US\$ 11,17 miliar. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata selama tahun 2010-2012 pariwisata menempati rangking ke-5 dalam penyumbang devisa. dan pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi rangking ke-4. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya devisa yang dihasilkan maka sektor pariwisata memang sangat berpotensi dan sangat penting untuk terus dikembangkan.

Dilihat berdasarkan negara asal tempat tinggal wisman, sebagian besar wisman yang datang ke Indonesia masih berasal dari negara tetangga yaitu Singapura, Malaysia dan Australia. Jumlah wisman dari ketiga negara tersebut secara total berjumlah 4,35 juta orang atau sekitar 46,14 persen dari total wisman pada tahun 2014. Ditambah pula jumlah wisman dari ketiga negara tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 secara total penerimaan devisa dari wisman ketiga negara tersebut mencapai US\$ 4 miliar atau sekitar 35,85 persen dari total devisa yang diperoleh. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa ketiga negara tersebut menjadi pasar yang potensial yang dapat terus memberikan devisa dengan tingkat kunjungan wisman.

Tabel 9.3. Penerimaan Devisa dari Wisatawan Menurut Negara Tempat Tinggal, Tahun 2010–2014

Negara	Penerimaan Devisa (Juta US \$)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Malaysia	864,34	930,85	972,16	1 002,53	1 053,89
Singapura	927,97	1 054,21	1 000,36	1 049,41	1 145,83
J a p a n	409,87	419,80	477,80	558,85	597,71
Korea, Rep.	251,05	295,82	290,37	381,83	420,89
Taiwan	184,76	188,15	204,52	231,09	254,66
Tiongkok	433,38	520,61	714,51	810,79	981,46
Australia	1 171,87	1 502,10	1 452,31	1 470,89	1 802,85
Amerika Serikat	252,23	317,28	312,55	363,91	406,57
Jerman	217,38	229,41	245,07	251,54	312,27
Belanda	269,20	263,02	243,16	280,64	320,03
Inggris	277,14	269,61	321,92	349,20	401,48
Lainnya	2 344,26	2 563,53	2 886,11	3 303,47	3 468,49
Jumlah	7 603,45	8 554,39	9 120,85	10 054,15	11 166,13

Sumber : Survei Pengeluaran Turis Asing, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Wisman asal Singapura yang berkunjung ke Indonesia menjadi urutan teratas atau terbanyak. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 1,73 juta orang yang datang berkunjung ke Indonesia dengan memberikan pemasukan devisa sebesar US\$ 1,14 miliar. Urutan kedua dipegang Malaysia dengan total kunjungan wisman sebanyak 1,48 juta orang dan memberikan sumbangan dalam pemasukan devisa negara sebanyak US\$ 1,05 miliar. Selanjutnya adalah turis asal Australia yang datang ke Indonesia sebanyak 1,12 juta orang dengan pemasukan devisa sebanyak US\$ 1,80 miliar. Walaupun dari sisi jumlah wisman dapat dikatakan wisman asal Australia lebih sedikit daripada Malaysia dan Singapura, namun dari sisi pemasukan devisa negara justru yang terbesar. Secara persentase pada tahun 2014 sumbangan devisa dari Australia mencapai 16,15 persen atau lebih besar dari Singapura dan Malaysia dengan sumbangan pemasukan devisa masing-masing 10,26 persen dan 9,44 persen.

Tiongkok adalah negara berikutnya yang belakangan ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesiannya mengalami peningkatan yang cukup pesat, bahkan posisinya pada tahun 2014 sudah berada di urutan ke-4 teratas setelah Singapura, Malaysia, dan Australia. Dari 19 negara yang menjadi fokus pasar pariwisata Indonesia, Tiongkok ditempatkan sebagai fokus pasar utama selain Australia, Jepang, Korea, dan Rusia. Pada tahun 2014 jumlah wisman dari Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia mencapai 926 ribu orang dengan pemasukan devisa ke negara sebanyak US\$ 981 juta. Kunjungan wisman dari Tiongkok yang selalu meningkat diharapkan akan terus berlangsung seiring dengan promosi wisata yang terus gencar digalakkan pemerintah Indonesia di Tiongkok. Kemenpar bersama pelaku bisnis pariwisata dan stakeholder pariwisata lainnya telah melakukan berbagai macam promosi ke Tiongkok di antaranya dengan menyelenggarakan

pameran pariwisata di mall kota-kota besar antara lain Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Ningbo, Hangzhou, dan Nanjing. Melakukan promosi dengan menyelenggarakan Pekan Promosi Kuliner Indonesia, pagelaran gamelan Indonesia pada *Beijing Modern Music Festival*. Selain itu melakukan promosi media digital (*online*) serta media cetak dan elektronik (televisi dan radio) serta berpartisipasi dalam bursa pariwisata internasional di Tiongkok antara lain *International Travel Expo (ITE)* di Hong Kong, dan *China International Tourism Mart (CITM)* yang tahun lalu berlangsung di kota Guangdong.

Selain dari segi promosi, salah satu upaya untuk meningkatkan kunjungan wisman dari Tiongkok yaitu upaya yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk. yaitu menambah jalur baru maupun menambah frekuensi penerbangan ke kota-kota besar di Tiongkok yang merupakan sumber wisman. Salah satu rute yang mendapat perhatian yaitu rute penerbangan Beijing-Denpasar. Sebagai informasi bahwa sebagian besar wisman dari Tiongkok memilih Bali sebagai tujuan wisata utamanya. Menurut mereka, Bali merupakan tempat favorit berlibur. Hal ini sesuai dengan hasil *polling 'Beijing People's Broadcasting 2011'* yang menyebutkan bahwa Bali merupakan salah satu dari 10 tujuan wisata dunia terfavorit masyarakat Tiongkok, selain Australia, Cape Town, Edinburgh, Hawaii, Madrid, Mesir, Air Terjun Niagara, Paris, dan Swiss.

Selain Tiongkok, negara di kawasan Asia Timur yang juga diharapkan terus meningkat jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia adalah negara Jepang dan Korea. Sebagai negara maju di kawasan Asia, Jepang dan Korea tentunya menjadi pasar yang harus diberi perhatian pemerintah. Oleh karena itu kedua negara tersebut menjadi fokus pasar utama pariwisata Indonesia. Pada tahun 2014 wisman dari Jepang yang berkunjung ke Indonesia mencapai 525 ribu orang dengan sumbangan pemasukan devisa sebesar US\$ 597 juta. Sementara itu tercatat sebanyak 370 ribu wisman dari Korea berkunjung ke Indonesia dengan memberikan pemasukan devisa sebesar US\$ 420 juta.

Selama periode 2010-2014 jumlah wisman dari tiga negara di Benua Eropa, yaitu Inggris, Jerman dan Belanda menjadi yang terbesar datang/berkunjung ke Indonesia. Pada tahun 2010 wisman asal ketiga negara tersebut mencapai 489 ribu orang dengan pemasukan devisa sebesar US\$ 763 juta dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2014 hingga mencapai 603 ribu orang dengan pemasukan devisa sebesar US\$ 1,03 miliar. Dari ketiga negara tersebut, pada tahun 2014 tercatat jumlah wisman dari Inggris menjadi yang terbanyak dengan jumlah wisman mencapai 249 ribu orang, diikuti Jerman sebanyak 184 ribu orang, dan Belanda sebanyak 169 ribu orang. Penerimaan devisa dari wisman ketiga negara tersebut juga mencatatkan hasil yang berbanding lurus dengan jumlah wisman. Devisa yang diperoleh dari wisman Inggris menjadi yang terbesar dengan pemasukan sebesar US\$ 401 juta. Namun, pada posisi kedua ternyata justru Belanda yang lebih besar dalam pemasukan devisa daripada Jerman. Tercatat pemasukan devisa dari wisman Belanda mencapai US\$ 320 juta sedangkan Jerman hanya sebesar US\$ 312 juta.

Tabel 9.4. Wisatawan yang Datang ke Indonesia Menurut Negara Tempat Tinggal, Tahun 2010–2014

Negara	Wisman (Orang)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Malaysia	1 277 476	1 302 237	1 335 531	1 430 989	1 485 643
Singapura	1 373 126	1 505 588	1 565 478	1 634 149	1 739 825
J a p a n	418 971	412 623	450 687	491 574	525 419
Korea, Rep.	274 999	306 061	311 618	343 627	370 142
Taiwan	213 442	221 877	216 535	245 288	244 003
Tiongkok	469 365	574 179	686 779	807 429	926 750
Australia	771 792	931 109	961 595	997 984	1 128 533
Amerika Serikat	180 361	204 275	212 851	234 134	251 380
Jerman	145 244	145 160	148 146	168 110	184 815
Belanda	151 836	159 063	146 591	158 181	169 308
Inggris	192 259	192 685	212 087	228 679	249 218
Lainnya	1 534 073	1 694 874	1 796 564	2 061 985	2 160 375
Jumlah	7 002 944	7 649 731	8 044 462	8 802 129	9 435 411

Sumber : Publikasi Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Terkait dengan harapan dari berbagai pihak agar sektor pariwisata dapat terus menarik perhatian dan meningkatkan kunjungan dari wisman dari berbagai negara, sekaligus dapat memberikan pemasukan devisa yang semakin besar, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan visa kunjungan singkat kepada beberapa negara. Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani enam paket kebijakan ekonomi yang salah satunya yaitu memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada wisatawan dari beberapa negara. Pembebasan visa kunjungan bagi wisatawan asing ke Indonesia tersebut masih kalah dari negara tetangga seperti Malaysia. Sebagaimana diketahui bahwa wisman yang berkunjung ke Malaysia sudah mencapai 26 juta orang sedangkan yang telah berkunjung ke Thailand mencapai 27 juta orang. Bandingkan dengan wisman yang berkunjung ke Indonesia yang pada tahun 2014 baru mencapai 9,43 juta orang. Namun demikian, Menteri Pariwisata tetap mempunyai mimpi bahwa jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada tahun 2019 akan mampu melebihi jumlah wisman yang berkunjung ke Malaysia dan Thailand.

Pengeluaran Wisatawan Mancanegara

Potensi pariwisata Indonesia sangat beraneka ragam mulai dari keindahan alam, kekayaan seni budaya dan adat istiadat masyarakat yang mampu menarik perhatian wisman. Selain itu, berbagai jenis kerajinan tangan dan batik yang dapat dimanfaatkan sebagai souvenir maupun beraneka ragam jenis olahan masakan daerah sebagai wisata kuliner juga turut menjadi primadona daya tarik tersendiri bagi wisman. Dengan semakin banyaknya daya tarik potensi wisata yang dimiliki, diharapkan para wisman yang telah

datang ke Indonesia akan lebih sering berkunjung dan tidak hanya sendiri tetapi akan datang kembali dengan mengajak kerabat atau sahabat menikmati keanekaragaman wisata di Indonesia.

Semakin banyak keanekaragaman wisata yang ditawarkan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain itu yang paling penting adalah dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan tentunya. akan memberikan dampak pada pengeluaran wisman selama berkunjung ke Indonesia. Semakin banyak tempat yang dikunjungi, semakin banyak barang-barang souvenir yang dibeli, ataupun semakin banyak kuliner yang dinikmati. Dari kondisi di atas akan memberi dampak yang positif dimana para wisman akan tinggal lebih lama di Indonesia dan pengeluaran wisman akan lebih banyak dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan devisa negara. Tercatat rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 pengeluaran wisman per kunjungan mencapai US\$ 1.133,81, meningkat menjadi US\$ 1.142,24 dan terus meningkat hingga tahun 2015 menjadi US\$ 1.208,79. Dengan demikian, selama periode 2012-2015 terjadi peningkatan pengeluaran wisman per kunjungan rata-rata sebesar 1,97 persen per tahun.

Tabel 9.5. Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Menurut Negara Asal (US\$), Tahun 2012–2015

Negara	Pengeluaran Wisman Per Kunjungan				Pengeluaran Wisman Per Hari			
	2012	2013	2014	2015*	2012	2013	2014	2015*
ASIA								
Malaysia	727,92	700,59	709,39	710,00	138,46	145,36	133,84	139,01
Singapura	639,01	642,17	658,59	658,74	149,54	154,15	158,25	153,34
Jepang	1 060,17	1 136,86	1 137,51	1 138,45	164,76	165,82	168,58	181,64
Rep. Korea	931,32	1 111,19	1 137,10	1 147,19	167,24	173,60	179,02	156,71
Taiwan	944,53	942,10	1043,67	904,47	154,31	163,05	177,30	142,08
Rep. Cina	1 040,38	1 004,17	1 059,04	1 059,27	164,96	161,66	168,74	161,04
Arab Saudi	1 424,47	1 444,82	1 568,81	2 241,37	163,89	187,80	211,52	182,70
Bangladesh	1 119,85	901,84	793,50	903,30	164,12	102,48	138,86	118,34
India	1 019,13	1 102,52	1 140,18	1 129,01	141,96	149,21	147,07	165,18
Srilangka	1 122,52	818,05	922,81	1 218,12	149,24	136,34	134,04	171,19
EROPA								
Jerman	1 645,25	1 496,26	1 689,64	1 576,24	131,42	118,70	135,46	104,67
Belanda	1 658,79	1 774,19	1 890,25	1 593,75	113,68	132,52	124,86	95,74
Inggris Raya	1 517,86	1 527,03	1 610,97	1 626,99	133,50	145,81	158,93	123,14
Spanyol	1 576,29	1 512,68	1 718,21	1 676,00	139,47	127,17	112,58	119,71
Norwegia	1 890,32	1 551,24	1 454,13	1 966,74	162,88	120,33	158,06	131,12
Swedia	1 669,93	1 873,87	1 632,11	1 436,15	110,30	146,02	112,34	88,12
AMERIKA								
Amerika Serikat	1 468,41	1 554,28	1 617,36	1 619,79	141,01	148,21	146,07	141,82
Kanada	1 432,73	1 696,36	1 989,32	1 594,32	126,17	142,08	141,93	107,98
Amerika Tengah	751,75	653,75	2 008,67	915,00	125,29	67,05	159,67	183,0
AUSTRALIA dan OCEANIA								
Australia	1 510,31	1 473,86	1 597,52	1 616,88	163,16	153,28	175,87	156,49
Selandia Baru	1 675,07	1 245,43	1 579,12	1 853,46	149,59	123,31	154,28	138,40
AFRIKA								
Mesir	1 001,88	1 024,50	1 267,22	1 268,50	78,58	178,17	253,44	126,52
Rata-rata	1 133,81	1 142,24	1 183,43	1 208,79	147,22	149,31	154,39	141,65

Catatan : * Angka sementara

Sumber : Survei Pengeluaran Turis Asing, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pada tahun 2015 tercatat bahwa pengeluaran wisman per kunjungan dari turis asal Arab Saudi adalah yang tertinggi dengan pengeluaran sebesar US\$ 2.241,37 diikuti turis asal negara-negara di Eropa seperti Norwegia (US\$ 1.966,74), Spanyol (1.676,00) dan Inggris Raya (US\$ 1.626,99). Meskipun jumlah wisman asal Singapura dan Malaysia yang berkunjung ke Indonesia merupakan yang terbesar bila dibandingkan dengan negara lain, justru rata-rata pengeluaran per kunjungannya dapat dikatakan lebih rendah. Bahkan dapat dikatakan terendah diantara para wisman yang berkunjung ke Indonesia. Pada tahun 2015 rata-rata pengeluaran wisman asal Singapura per kunjungan hanya sebesar US\$ 658,74 dan wisman asal Malaysia hanya sebesar US\$ 710,00 per kunjungan. Sementara itu, wisman asal Australia per kunjungan membelanjakan uangnya rata-rata US\$ 1.616,88.

Bila dilihat dari rata-rata pengeluaran wisman menurut negara asal per hari selama berada di Indonesia dari tahun 2012-2014 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 rata-rata uang yang dikeluarkan para wisman per hari sebesar US\$ 147,22, kemudian tahun berikutnya meningkat menjadi US\$ 149,31 dan tahun 2014 sebesar US\$ 154,39. Pada tahun 2015 rata-rata uang yang dibelanjakan atau dikeluarkan oleh wisman per hari mengalami penurunan yaitu hanya sebesar US\$ 141,65. Berdasarkan asal negara tempat tinggalnya, pengeluaran wisman rata-rata per hari tertinggi pada tahun 2015 adalah wisman asal Arab Saudi dengan rata-rata pengeluaran US\$ 182,70 disusul wisman asal Jepang mencapai US\$ 181,64. Peringkat berikutnya diduduki oleh wisman dari Srilangka dengan rata-rata pengeluaran per hari mencapai US\$ 171,19 disusul wisman asal India sebesar US\$ 165,18. Sementara itu, rata-rata uang yang dikeluarkan oleh wisman asal Swedia dan Belanda per harinya relatif lebih kecil dibawah US\$ 100 per hari bila dibandingkan dengan negara lain yaitu hanya sekitar US\$ 88,12 dan US\$ 95,74.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Lama Menginap

Fasilitas akomodasi yang baik juga sangat mendukung perkembangan kemajuan pariwisata Indonesia. Salah satu akomodasi yang sangat berperan penting dalam kemajuan tingkat pariwisata di tanah air adalah fasilitas menginap bagi para wisman seperti hotel baik hotel berbintang maupun hotel tidak berbintang. Untuk melihat tingkat perkembangan sektor pariwisata dapat diukur dari beberapa indikator yang mempengaruhinya, yaitu dengan melihat perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel dan Rata-rata Lama Menginap Wisatawan.

Selama kurun waktu 2011-2015, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di tanah air secara total selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. TPK hotel berbintang selama lima tahun terakhir selalu berada di atas 50 persen. Pada tahun 2011 TPK hotel berbintang mencapai 51,25 persen, TPK tahun 2012 sebesar 51,55 persen dan terus meningkat hingga tahun 2015 yaitu mencapai 53,16 persen. Provinsi yang memiliki TPK tertinggi adalah Provinsi Bali sebesar 59,90 persen dan TPK terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 32,38 persen.

Tabel 9.6. Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Menurut Provinsi (persen), Tahun 2011–2015

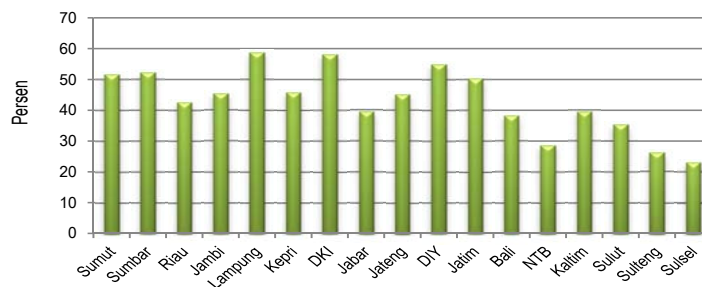
Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015 ^x
Aceh	49,18	45,03	44,57	50,56	51,12
Sumatera Utara	44,62	45,14	45,31	50,59	52,05
Sumatera Barat	49,64	50,48	54,05	52,65	51,49
Riau	47,46	46,52	41,76	43,42	46,56
Jambi	45,79	47,11	48,39	46,58	42,70
Sumatera Selatan	56,98	51,41	47,46	46,90	53,54
Bengkulu	40,07	40,74	46,56	48,71	49,94
Lampung	53,66	58,37	54,03	57,11	50,51
Kep. Bangka Belitung	48,01	44,86	41,71	40,19	32,38
Kepulauan Riau	46,95	48,42	49,17	48,18	53,62
DKI Jakarta	56,05	56,37	55,68	58,27	59,12
Jawa Barat	45,78	45,92	48,22	48,60	48,91
Jawa Tengah	44,22	48,58	49,92	46,89	46,54
DI Yogyakarta	50,86	55,45	56,48	57,28	58,36
Jawa Timur	47,81	47,44	46,22	50,81	51,64
Banten	37,88	37,83	52,60	48,77	52,50
Bali	59,32	58,63	59,22	59,88	59,90
Nusa Tenggara Barat	45,68	47,46	51,05	49,23	42,83
Nusa Tenggara Timur	43,39	40,62	39,48	40,81	44,68
Kalimantan Barat	47,01	54,19	54,27	49,48	50,08
Kalimantan Tengah	54,78	53,81	60,92	57,74	52,88
Kalimantan Selatan	55,63	52,71	52,65	50,66	49,11
Kalimantan Timur	58,18	59,47	61,24	56,73	55,65
Kalimantan Utara ¹	-	-	55,03
Sulawesi Utara	51,63	54,07	52,91	53,42	54,53
Sulawesi Tengah	65,14	63,55	69,77	53,82	59,18
Sulawesi Selatan	46,62	49,60	53,93	48,79	46,79
Sulawesi Tenggara	50,77	52,24	49,42	37,63	38,29
Gorontalo	80,81	74,09	56,12	41,98	34,34
Sulawesi Barat	50,58	42,93	34,44	31,35	36,97
Maluku	34,19	33,55	41,28	38,35	33,84
Maluku Utara	43,97	35,11	35,81	44,06	38,52
Papua Barat	48,40	52,48	51,78	49,38	42,51
Papua	52,04	50,69	49,81	49,18	47,85
Indonesia	51,25	51,55	52,22	52,56	53,16

Catatan : ^x Angka sementara

¹ Data tahun 2013-2014 masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur

Peningkatan TPK hotel berbintang ini tidak terlepas dari meningkatkan TPK hotel berbintang di sebagian besar provinsi di Indonesia. Tercatat TPK Hotel berbintang di 19 provinsi mengalami peningkatan, sementara 15 provinsi lainnya mengalami penurunan. Peningkatan TPK hotel berbintang tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 6,64 persen, lalu diikuti Provinsi Sulawesi Barat dan Kepulauan Riau masing-masing sebesar 5,62 persen dan 5,44 persen. Sementara dari 15 provinsi yang mengalami penurunan TPK hotel berbintang, yang tertinggi penurunannya terjadi di provinsi Kepulauan

Gambar 9.4
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada Hotel Berbintang
di 17 Provinsi (persen), Tahun 2015



Bangka Belitung turun sebesar 7,81 persen, dan penurunan terendah terjadi di Provinsi Jawa Tengah 0,35 persen.

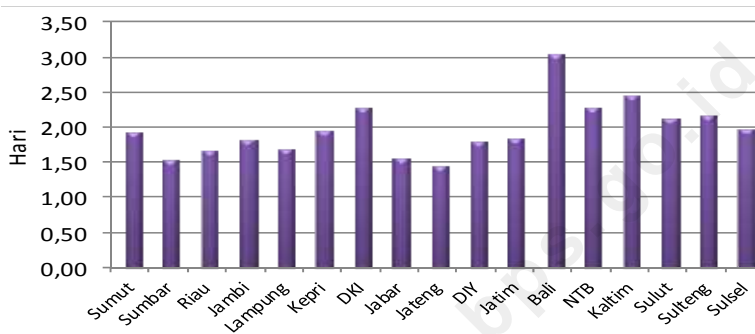
Tabel 9.6 juga menunjukkan bahwa pada tahun 2015 tercatat ada sebanyak 9 provinsi dengan angka TPK hotel berbintang di atas angka nasional. Angka TPK tertinggi tercatat di Provinsi Bali sebesar 59,90 persen, diikuti Provinsi Sulawesi Tengah 59,18 persen, dan Provinsi DKI Jakarta 59,12 persen, sedangkan 6 provinsi lainnya mencatatkan angka TPK berkisar antara 53,54 persen sampai 58,36 persen. Sisanya sebanyak 25 provinsi yang mencatatkan angka TPK hotel berbintang di bawah angka nasional. Angka TPK hotel berbintang terendah tercatat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 32,38 persen diikuti Provinsi Maluku 33,84 persen, sedangkan 23 provinsi lainnya mencatatkan angka TPK antara sebesar 34,34 persen sampai 52,88 persen.

Rata-rata lama menginap bagi tamu asing maupun tamu domestik merupakan indikator lain untuk mengetahui perkembangan sektor akomodasi. Selama periode 2011-2015 rata-rata lama menginap baik tamu asing maupun domestik pada hotel berbintang cenderung berfluktuasi. Jika dilihat secara nasional rata-rata lama menginap tamu pada hotel berbintang pada tahun 2011 mencapai 1,98 hari, kemudian turun pada tahun 2012 menjadi 1,93 hari. Rata-rata lama menginap kembali mengalami peningkatan dua tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2013 menjadi 1,98 hari dan tahun 2014 yang mencapai 2,15 hari, lalu kembali mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 2,05 hari. Selama 5 tahun terakhir pencapaian tertinggi rata-rata lama menginap tamu pada hotel berbintang terjadi pada tahun 2014.

Penurunan rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang tahun 2015 tidak lepas dari penurunan rata-rata lama menginap yang terjadi di 22 provinsi di Indonesia. Penurunan tertinggi rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu turun selama 0,64 hari, dari 2,94 hari tahun 2014 menjadi 2,30 hari pada tahun 2015. Penurunan yang cukup tinggi berikutnya terjadi di Provinsi Gorontalo 0,53 hari, Sumatera Barat dan Sulawesi Utara masing-masing mengalami penurunan yang sama yaitu 0,37 hari. Sementara provinsi yang menunjukkan peningkatan rata-rata

lama menginap tamu di hotel berbintang terjadi di 10 provinsi diantaranya Provinsi Maluku naik 1,13 hari, Aceh naik 0,47 hari, sedangkan sisanya mengalami kenaikan berkisar antara 0,04 hari sampai 0,37 hari. Untuk Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015 rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang sama dengan tahun sebelumnya. Sementara untuk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015 sebesar 2,20 hari sedangkan tahun 2014 data untuk rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintangnya masih gabung dengan provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 9.5
Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing dan Indonesia Pada Hotel Berbintang di 17 Provinsi (hari), Tahun 2015



Jika dilihat menurut provinsi, pada tahun 2015 terdapat hanya 14 provinsi yang mencatatkan rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang di atas angka nasional, sementara sisanya 20 provinsi masih berada di bawah angka nasional. Bali masih memiliki daya tarik pariwisata yang sangat memikat para wisatawan. Namun pada tahun 2015, rata-rata lama tamu menginap pada hotel berbintang di Provinsi Bali hanya mencapai 3,06 hari, kalah dengan rata-rata lama tamu menginap pada hotel berbintang di Provinsi Maluku yang mencapai 3,18 hari. Provinsi Maluku merupakan provinsi yang memiliki rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang tertinggi. Berikutnya, provinsi dengan pencapaian rata-rata lama menginap tertinggi berikutnya di Provinsi Aceh (2,88 hari) dan Papua (2,78 hari).

Tabel 9.7. Rata-Rata Lama Menginap Tamu Pada Hotel Bintang Menurut Provinsi (hari), Tahun 2011–2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015 ^x
Aceh	1,93	1,86	1,89	2,32	2,88
Sumatera Utara	1,77	1,54	1,54	1,76	1,95
Sumatera Barat	1,47	1,44	1,68	1,92	1,55
Riau	1,78	1,80	1,80	1,96	1,68
Jambi	1,59	1,71	2,10	1,99	1,85
Sumatera Selatan	1,83	1,76	1,76	2,09	1,99
Bengkulu	2,03	1,73	2,00	1,96	2,08
Lampung	1,70	1,65	1,67	2,06	1,71
Kep. Bangka Belitung	2,09	1,93	1,92	2,02	1,82
Kepulauan Riau	1,66	1,70	1,72	2,05	1,97
DKI Jakarta	2,02	1,99	1,94	2,25	2,29
Jawa Barat	1,58	1,59	1,69	1,67	1,57
Jawa Tengah	1,61	1,56	1,50	1,56	1,46
DI Yogyakarta	1,77	1,78	1,70	1,90	1,82
Jawa Timur	1,84	1,78	1,70	1,90	1,87
Banten	1,30	1,22	1,42	1,62	1,79
Bali	3,19	3,03	3,28	3,47	3,06
Nusa Tenggara Barat	2,41	2,66	2,83	2,94	2,30
Nusa Tenggara Timur	2,46	2,59	2,02	2,13	2,06
Kalimantan Barat	2,17	1,83	1,88	1,85	1,70
Kalimantan Tengah	1,96	1,75	1,78	1,77	1,64
Kalimantan Selatan	1,86	1,84	1,72	1,70	1,40
Kalimantan Timur	2,46	2,30	2,42	2,10	2,47
Kalimantan Utara ¹	-	-	2,20
Sulawesi Utara	2,00	2,12	2,26	2,50	2,13
Sulawesi Tengah	1,48	1,58	1,68	1,86	2,18
Sulawesi Selatan	1,87	1,87	1,86	1,84	2,00
Sulawesi Tenggara	1,90	2,22	1,99	1,87	1,74
Gorontalo	2,14	2,07	1,97	1,99	1,46
Sulawesi Barat	1,98	2,06	1,57	1,38	1,38
Maluku	2,52	2,33	2,56	2,05	3,18
Maluku Utara	2,17	1,71	2,17	2,46	2,33
Papua Barat	2,71	2,41	2,32	2,33	2,21
Papua	2,67	3,00	3,00	2,52	2,78
Indonesia	1,99	1,93	1,98	2,15	2,05

Catatan : ^x Angka sementara

¹ Data tahun 2013-2014 masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur



10

**Kondisi
Ketenagakerjaan**

Kemakmuran atau kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dan penggerak faktor produksi lainnya. Sumber daya manusia (SDM) berperan penting dalam pengelolaan sumber daya lainnya agar dipergunakan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith (1729-1790) juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah awal dari pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, modal (fisik) dan sumber daya lainnya baru mulai dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi tersebut. Dengan begitu, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi. Adam Smith mengakui bahwa keterampilan pekerja merupakan jantung dari kemakmuran suatu negara (Walen, 2010). Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan kunci untuk kemajuan ekonomi.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia membuat perusahaan melakukan efisiensi. Salah satunya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang marak dilakukan perusahaan di Indonesia belakangan ini (Gliemourinsie, 2016). Tidak hanya PHK, pergeseran dari buruh lokal ke buruh asing juga menjadi konsekuensi efisiensi yang dilakukan perusahaan akibat berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan demikian, kualitas dan keterampilan SDM di Indonesia harus diperhatikan agar mampu berkompetisi dengan tenaga kerja asing.

Akan tetapi, kualitas tenaga kerja Indonesia cenderung belum meningkat. Jumlah tenaga kerja profesional Indonesia yang memiliki sertifikat atau mengikuti sertifikasi profesi terbilang minim. Selain itu, sekitar 77 persen tenaga kerja Indonesia diketahui memiliki efektivitas kinerja dan efisiensi waktu dalam bekerja yang rendah (Yovanda, 2016). Pemerintah telah berupaya dalam penyerapan tenaga kerja dengan memanfaatkan investasi atau dikenal dengan Program Investasi Menciptakan Lapangan Kerja. Meskipun pemerintah telah berupaya menyelesaikan masalah pengangguran, pemerintah juga perlu membuat kebijakan dalam peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia. Program penyerapan tenaga kerja tersebut akan lebih dapat menyejahterakan rakyat, terutama tenaga kerja, apabila pemerintah dapat membangun kebijakan peningkatan kualitas SDM.

Analisis ketenagakerjaan dapat dilakukan dari beberapa indikator ketenagakerjaan, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Ketiga indikator ketenagakerjaan tersebut dikembangkan menurut daerah tempat tinggal yaitu perkotaan dan perdesaan. Indikator-indikator tersebut dapat memberikan informasi kondisi ketenagakerjaan Indonesia dan dapat menjadi dasar perencanaan pemerintah yang tepat.

Peningkatan Angkatan Kerja Beringan dengan Peningkatan Jumlah Pengangguran di Indonesia

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Angkatan kerja memberikan informasi jumlah penduduk

Tabel 10.1. Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2012– 2016

Tahun	Jenis Kelamin	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
2012 (Agustus)	L	70 001 131	4 279 203	74 280 334	13 925 072
	P	42 503 737	3 065 663	45 569 400	43 099 026
	L+P	112 504 868	7 344 866	119 849 734	57 024 098
2013 (Agustus)	L	70 335 241	4 508 503	74 843 744	14 931 437
	P	42 425 831	2 902 428	45 328 259	44 863 921
	L+P	112 761 072	7 410 931	120 172 003	59 795 358
2014 (Agustus)	L	71 463 307	4 362 787	75 826 094	15 475 420
	P	43 164 719	2 882 118	46 046 837	45 643 853
	L+P	114 628 026	7 244 905	121 872 931	61 119 273
2015 (Agustus)	L	72 150 588	4 660 004	76 810 592	16 053 422
	P	42 668 611	2 900 818	45 569 429	47 667 474
	L+P	114 819 199	7 560 822	122 380 021	63 720 896
2016 (Februari)	L	73 716 770	4 421 153	78 137 923	15 488 008
	P	46 930 927	2 603 019	49 533 946	44 440 757
	L+P	120 647 697	7 024 172	127 671 869	59 928 765

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

yang berpotensi untuk memproduksi barang dan jasa. Ketersediaan tenaga kerja merupakan salah satu yang menjadi daya tarik bagi para investor. Hal tersebut dikarenakan tenaga kerja merupakan faktor produksi utama yang dapat menggerakkan faktor produksi lainnya, seperti modal dan sumber daya alam.

Jumlah angkatan kerja di Indonesia terus meningkat. Meskipun demikian, peningkatan selama tahun 2012-2015 tidak terjadi secara signifikan. Jumlah angkatan kerja di Indonesia adalah 119,8 juta orang pada tahun 2012 menjadi 122,4 juta orang pada tahun 2015. Peningkatan tersebut menunjukkan laju pertumbuhan angkatan kerja adalah 0,70 persen setiap tahunnya. Bahkan hingga Februari tahun 2016 jumlah angkatan kerja terus meningkat dan mencapai 127,67 juta orang. Peningkatan jumlah angkatan kerja dapat disebabkan dari pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu dari tiga faktor komponen utama yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, angkatan kerja yang merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi dapat memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Angkatan kerja di Indonesia dari tahun ke tahun selalu didominasi oleh laki-laki. Persentase angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki cenderung meningkat selama tahun 2012-2015. Pada tahun 2015, sekitar 62,76 persen angkatan kerja di Indonesia adalah laki-laki, atau dengan perbandingan antara angkatan kerja laki-laki dan perempuan sekitar 6:4. Selama tahun 2012-2016 jumlah angkatan kerja laki-laki terus meningkat dengan peningkatan rata-

rata sebesar 1,12 persen setiap tahun. Sementara itu, jumlah angkatan kerja perempuan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015, jumlah angkatan kerja perempuan menurun sebesar 1,04 persen dibandingkan pada tahun 2014. Namun, jumlah angkatan kerja perempuan kembali meningkat pada Februari 2016 menjadi 49,53 juta orang.

Di Indonesia, jumlah penduduk yang bekerja selama tahun 2012-2015 terus meningkat rata-rata sebesar 0,68 persen setiap tahunnya. Dari seluruh angkatan kerja pada tahun 2012, dimana 93,87 persen diantaranya memiliki pekerjaan, pada tahun 2013 menurun menjadi 93,83 persen, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 94,06 persen, tetapi menurun kembali pada tahun 2015 menjadi 93,82 persen. Penurunan persentase penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja belum mampu mengikuti pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang terus terjadi di Indonesia. Akan tetapi, permasalahan tersebut tampaknya dapat diatasi oleh pemerintah seperti ditunjukkan dengan meningkatnya persentase angkatan yang bekerja di Februari 2016 menjadi 94,50 persen.

Sebagian besar pekerja di Indonesia adalah pekerja laki-laki. Selama tahun 2012-2015, lebih dari 60 persen pekerja adalah laki-laki. Tidak hanya itu, jumlah pekerja laki-laki juga terus meningkat, yaitu sebanyak 70 juta orang pada tahun 2012 menjadi 72,15 juta orang pada tahun 2015. Peningkatan jumlah pekerja laki-laki dari tahun 2012-2015 tersebut memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 1,01 persen per tahun. Namun demikian, jumlah pekerja perempuan lebih fluktuatif. Pada tahun 2012, pekerja perempuan ada sebanyak 42,5 juta orang kemudian menurun menjadi 42,43 juta orang pada tahun 2013. Selanjutnya, pekerja perempuan pada tahun 2014 meningkat menjadi 43,16 juta orang, namun kembali menurun pada tahun 2015 menjadi 42,67 juta orang. Persentase pekerja yang berjenis kelamin perempuan pun cenderung menurun dari 37,78 persen pada tahun 2012 menjadi 37,16 persen pada tahun 2015.

ILO menyatakan bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam pasar kerja disebabkan adanya diskriminasi yang dialami pekerja perempuan, dimana perempuan banyak yang menjadi pekerja rumah tangga dengan pendapatan yang tidak sebanding atau bahkan menjadi pekerja yang tidak dibayar. Selain itu, pekerja perempuan juga diketahui memiliki jam kerja yang lebih lama dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Kemajuan prestasi pendidikan kaum perempuan yang signifikan belum mampu meningkatkan secara signifikan posisi mereka di dunia pekerjaan (*International Labour Office*, 2016). Ketidaksetaraan gender dalam dunia kerja ini juga menjadi perhatian dalam salah satu tujuan di *Sustainable Development Goals*, yaitu tujuan 5. Tujuan tersebut memiliki agenda di tahun 2030 untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, salah satunya dibidang pekerjaan.

Partisipasi angkatan kerja juga dapat diukur dengan TPAK yang berguna untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja yang berpotensi

Tabel 10.2. Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2012–2016

Jenis Kelamin	2012 (Agustus)	2013 (Agustus)	2014 (Agustus)	2015 (Agustus)	2016 (Februari)
TPAK					
Laki-Laki	84,21	83,37	83,05	82,71	83,46
Perempuan	51,39	50,26	50,22	48,87	52,71
Total	67,76	66,77	66,60	65,76	68,06
TPT					
Laki-Laki	5,76	6,02	5,75	6,07	5,66
Perempuan	6,73	6,40	6,26	6,37	5,26
Total	6,13	6,17	5,94	6,18	5,50
TKK					
Laki-Laki	94,24	93,98	94,25	93,93	94,34
Perempuan	93,27	93,60	93,74	93,63	94,74
Total	93,87	93,83	94,06	93,82	94,50

Sumber : Keadaan Angkatan kerja di Indonesia, BPS

untuk aktif secara ekonomi di suatu negara. TPAK di Indonesia selama empat tahun terakhir (2012-2015) terus mengalami penurunan. TPAK pada tahun 2012 adalah 67,76 persen, turun menjadi 66,77 persen pada tahun 2013, kemudian turun kembali menjadi 66,60 persen pada tahun 2014, dan masih terus turun hingga tahun 2015 yang mencapai 65,76 persen. Nilai TPAK yang terus menurun menandakan bahwa ketersediaan penduduk usia kerja yang dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi (*labour supply*) semakin sedikit. Akan tetapi, *labour supply* pada Februari 2016 tumbuh kembali dengan meningkatnya TPAK menjadi 68,06 persen.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki selama tahun 2012-2015 terus mengalami penurunan. Selama tahun 2012-2014 TPAK untuk jenis kelamin laki-laki masih di atas 83 persen, namun TPAK laki-laki tahun 2015 sebesar 82,71 persen. Sementara itu, TPAK perempuan jauh dibawah TPAK laki-laki. Selama tahun 2012-2015, TPAK perempuan hanya sekitar 48 sampai 51 persen saja. Bahkan penurunan TPAK perempuan lebih signifikan dibandingkan penurunan TPAK laki-laki. TPAK perempuan menurun dari 51,39 persen pada tahun 2012 menjadi 50,26 persen pada tahun 2013. Kemudian TPAK perempuan terus menurun, yaitu 50,22 persen pada tahun 2014 dan 48,87 persen pada tahun 2015.

Kemudian, dari sisi klasifikasi daerah tempat tinggal, TPAK di perdesaan lebih besar daripada TPAK di perkotaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan penduduk yang berpotensi aktif untuk memproduksi barang dan jasa secara ekonomi di perdesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan. Perkembangan TPAK baik di perdesaan maupun di perkotaan tidak berbeda dengan perkembangan TPAK secara keseluruhan. TPAK di daerah perkotaan terus mengalami penurunan dari 65,17 persen pada tahun 2012 turun menjadi 63,88 persen pada tahun 2015. TPAK di perdesaan juga terus mengalami penurunan yaitu dari 70,42 persen di tahun 2012 menjadi 67,95 persen di tahun 2015.

Tabel 10.3. Indikator Ketenagakerjaan Menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2012–2016

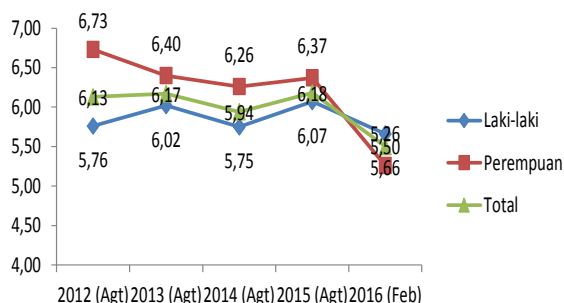
Daerah Tempat Tinggal	2012 (Agustus)	2013 (Agustus)	2014 (Agustus)	2015 (Agustus)	2016 (Februari)
TPAK					
Perkotaan	65,17	64,20	64,47	63,88	66,16
Perdesaan	70,42	69,42	68,80	67,95	70,32
Jumlah	67,76	66,77	66,60	65,76	68,06
TPT					
Perkotaan	7,74	7,31	7,12	7,31	6,53
Perdesaan	4,59	5,08	4,81	4,93	4,35
Jumlah	6,13	6,17	5,94	6,18	5,50
TKK					
Perkotaan	92,26	92,69	92,88	92,69	93,47
Perdesaan	95,41	94,92	95,19	95,07	95,65
Jumlah	93,87	93,83	94,06	93,82	94,50

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

Jumlah angkatan kerja berhubungan linier dengan penawaran tenaga kerja. Jika peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, pengangguran akan cenderung meningkat. Fenomena tersebut terjadi pada tahun 2015. Walaupun jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2014 menurun sebesar 2,24 persen dibandingkan tahun 2013, jumlah pengangguran di tahun 2015 meningkat kembali dan cukup signifikan. Jumlah pengangguran meningkat dari 7,24 juta orang pada tahun 2014 menjadi 7,56 juta orang pada tahun 2015 atau naik sebesar 4,36 persen, tetapi menurun kembali menjadi 7,02 juta orang pada Februari 2016 atau menurun sebesar 7,10 persen.

Kemudian, sebagian atau sekitar 60 persen pengangguran di Indonesia adalah laki-laki. Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Jumlah pengangguran berjenis kelamin laki-laki sempat menurun sebesar 3,23 persen pada tahun 2014. Akan tetapi jumlah pengangguran laki-laki meningkat kembali dari 4,36 juta orang pada tahun 2014 menjadi 4,66

Gambar 10.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin (persen), Tahun 2012–2016



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

juta orang pada tahun 2015. Sejalan dengan itu, jumlah pengangguran berjenis kelamin perempuan juga mengalami peningkatan di tahun 2015. Walaupun selama tahun 2012-2014 jumlah pengangguran perempuan terus menurun, di tahun 2015 jumlah pengangguran perempuan meningkat sebesar 0,65 persen.

Tingkat pengangguran di Indonesia dapat dilihat dari TPT. Angka TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Pada tahun 2013-2014, TPT di Indonesia mengalami penurunan yaitu dari 6,17 persen menjadi 5,94 persen. Pada tahun 2015, angka TPT nasional mengalami peningkatan menjadi 6,18 persen. TPT yang meningkat pada tahun 2015 menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan tenaga kerja masih minim sehingga banyak tenaga kerja yang tidak terserap. Dari situ, pemerintah terus berupaya menciptakan lapangan tenaga kerja di Indonesia agar mampu untuk terus menurunkan angka TPT. Upaya pemerintahpun membuahkan hasil, dimana pada Februari 2016 TPT Nasional dapat menurun hingga 5,50 persen.

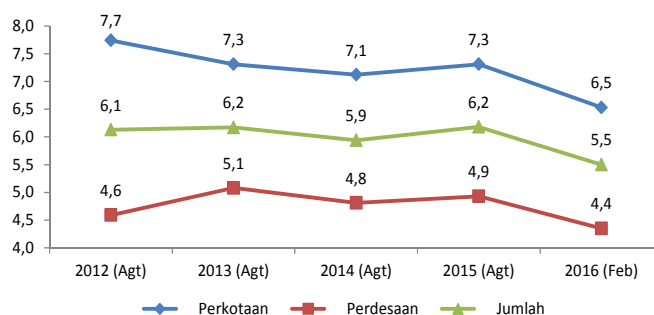
Kemudian, selama periode 2012-2015, TPT laki-laki lebih rendah daripada perempuan, yang berarti bahwa penyerapan tenaga kerja laki-laki lebih besar dibandingkan tenaga kerja perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat diskriminasi perempuan dalam pangsa pasar tenaga kerja. Kemudian, tren TPT laki-laki sejalan dengan tren TPT nasional. TPT laki-laki meningkat dari 5,76 persen pada tahun 2012 menjadi 6,02 persen pada tahun 2013. Namun, pada tahun 2014 TPT laki-laki menurun menjadi 5,75 persen, lalu meningkat kembali menjadi 6,07 persen pada tahun 2015. Untuk jenis kelamin perempuan, TPT selama tahun 2012-2014 terus menurun, tetapi TPT perempuan pada tahun 2015 meningkat dari 6,26 persen menjadi 6,37 persen. Peningkatan TPT perempuan tahun 2015 menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja perempuan dalam pangsa pasar mulai berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Akan tetapi, pada Februari 2016, ada peralihan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana TPT perempuan (5,26 persen) lebih rendah daripada TPT laki-laki (5,66 persen). Angka tersebut menandakan bahwa angkatan kerja perempuan lebih banyak terserap dibandingkan angkatan kerja laki-laki. Potensi dan keahlian kaum perempuan secara perlahan mulai dilirik pangsa pasar.

Selain dari TPT, peluang tenaga kerja juga dapat dilihat dari TKK. Angka TKK menggambarkan peluang penduduk yang termasuk angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Di tahun 2016, nilai TKK di Indonesia adalah 93,82 persen, yang berarti bahwa dari 100 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, 93 sampai 94 orang memiliki pekerjaan. TKK tahun 2015 tersebut lebih rendah dari TKK tahun 2014. Padahal TKK di Indonesia sudah meningkat dari 93,83 persen pada tahun 2013 menjadi 94,06 persen pada tahun 2014.

Selama tahun 2012-2015, TKK laki-laki lebih tinggi daripada TKK perempuan. TKK laki laki pada tahun 2012 adalah 94,24 persen menurun menjadi 93,98 persen pada tahun 2013, kemudian meningkat menjadi 94,25 persen pada tahun 2014, dan menurun kembali menjadi 93,93 persen pada

Gambar 10.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen),
Tahun 2012–2016



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

tahun 2015. Sementara itu, TKK perempuan terus meningkat selama tahun 2012-2014, tetapi TKK perempuan menurun pada tahun 2015, dari 93,74 persen menjadi 93,63 persen.

Sementara itu, dari sisi daerah tempat tinggal, selama tahun 2012-2014, penyerapan tenaga kerja di daerah perkotaan menunjukkan peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari TPT perkotaan terus mengalami penurunan, yaitu dari 7,74 persen pada tahun 2012 menjadi 7,12 persen pada 2014. Akan tetapi, pada tahun 2015, TPT di perkotaan kembali meningkat menjadi 7,31 persen. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa kemampuan lapangan kerja di daerah perkotaan untuk menyerap tenaga kerja kembali berkurang. Hal tersebut dapat terjadi karena lapangan kerja di daerah perkotaan tidak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang begitu cepat.

Selanjutnya, TPT di daerah perdesaan terlihat lebih fluktuatif. Walaupun pada tahun 2014, TPT daerah perdesaan sempat turun menjadi 4,81 persen, namun di tahun 2015 TPT daerah perdesaan meningkat kembali menjadi 4,91 persen. Sementara yang lebih menarik, TPT di daerah perdesaan lebih rendah daripada TPT angka nasional selama tahun 2012-2015. Rendahnya pengangguran di perdesaan dipengaruhi adanya urbanisasi yang dilakukan tenaga kerja dari desa untuk mengadu nasib di perkotaan. Kebijakan pemerintah yang cenderung bersifat sentralisasi menyebabkan kesenjangan perekonomian antara perkotaan dan perdesaan. Perkotaan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi akan menarik penduduk mendatanginya dengan harapan lebih mudah memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Supaya tidak terus terjadi urbanisasi, pembangunan di perdesaan harus lebih diperhatikan agar tersedianya lapangan kerja bagi tenaga kerja di wilayah tersebut dan mampu memiliki daya tarik bagi tenaga kerja di luar wilayah. Pembangunan tersebut dapat dimulai dari potensi yang biasanya ada di perdesaan, seperti pembangunan pertanian dan dapat dimulai juga dengan menunjang pengembangan industri mikro kecil di daerah perdesaan.

Dari sudut pandang kesempatan kerja, TKK di daerah perkotaan meningkat selama tahun 2012-2014 tetapi menurun di tahun 2015. TKK di daerah perkotaan menurun dari 92,88 persen pada tahun 2014 menjadi 92,69 persen pada tahun 2015. Penurunan nilai TKK tersebut menandakan bahwa kesempatan angkatan kerja di daerah perkotaan untuk terserap ke pasar kerja semakin kecil. Sementara itu, TKK di daerah perdesaan selama tahun 2012-2015 cenderung tidak stabil. Namun tidak berbeda dengan perkotaan, TKK di daerah perdesaan juga menurun dari 95,19 persen pada tahun 2014 menjadi 95,07 persen pada tahun 2015.

Variasi Kondisi Ketenagakerjaan di 33 Provinsi Indonesia

Indikator ketenagakerjaan juga dapat disajikan berdasarkan provinsi. Jumlah provinsi dengan TPAK di atas angka nasional terus mengalami peningkatan, yaitu ada sebanyak 13 provinsi pada tahun 2013, meningkat menjadi 19 provinsi pada tahun 2014, kemudian meningkat kembali menjadi 21 provinsi pada tahun 2015, dan meningkat lagi menjadi 22 provinsi pada Februari 2016. Selanjutnya, di tahun 2015, provinsi dengan TPAK tertinggi adalah Papua, yaitu sebesar 79,57 persen. Di sisi lain, Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan TPAK terendah di tahun 2015, yang hanya mencapai 60,34 persen. Akan tetapi, pada Februari 2016, Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan TPAK terendah, yaitu sebesar 61,64 persen.

Selanjutnya, Bali merupakan provinsi dengan nilai TKK tertinggi selama tiga tahun berturut-turut di bulan Agustus (tahun 2013-2015) hingga Februari 2016. TKK Bali pada tahun 2015 sebesar 98,01 persen berarti dari 100 angkatan kerja di Bali, 98 orang diantaranya memiliki pekerjaan. Provinsi Bali merupakan provinsi yang memiliki potensi di bidang pariwisata. Sektor pariwisata di Bali cenderung terus berkembang dan telah menjadi penunjang utama perekonomian provinsi tersebut. Sektor pariwisata juga sangat berperan dalam penciptaan lapangan kerja. Hal tersebut dapat terlihat dari 30,17 persen pekerja di Bali merupakan pekerja di lapangan usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel. Lapangan usaha tersebut sangat erat sebagai kegiatan penunjang pariwisata. Selain itu, tingginya nilai TKK di Bali juga akibat dari upaya pemerintah provinsi Bali untuk terus menggalakkan program-program yang terdapat pada Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Bali. BLK Bali secara rutin mengadakan kegiatan *job fair* sebagai tempat pertemuan antara pencari kerja dengan lowongan kerja di provinsi tersebut.

Sementara itu, provinsi dengan TKK terendah pada tahun 2015 adalah Provinsi Aceh dan Maluku, dengan nilai TKK sebesar 90,07 persen. Sebelumnya Aceh merupakan provinsi dengan TKK terendah pada tahun 2013 dan Maluku merupakan provinsi dengan TKK terendah pada tahun 2014. Kesempatan kerja yang rendah di di Provinsi Maluku ini menunjukkan bahwa penyediaan lapangan kerja di Maluku belum mampu mengimbangi kenaikan jumlah angkatan kerja yang dapat terlihat dari meningkatnya TPAK Maluku dari 60,91 persen pada tahun 2013 menjadi 64,47 persen pada tahun 2014.

Tabel 10.4. Indikator Ketenagakerjaan Menurut Provinsi, Tahun 2013–2016

Provinsi	TPAK				TKK				TPT			
	2013 (Agt)	2014 (Agt)	2015 (Agt)	2016 (Feb)	2013 (Agt)	2014 (Agt)	2015 (Agt)	2016 (Feb)	2013 (Agt)	2014 (Agt)	2015 (Agt)	2016 (Feb)
Aceh	62,24	63,06	63,44	64,24	89,88	90,98	90,07	91,87	10,12	9,02	9,93	8,13
Sumatera Utara	70,62	67,07	67,28	68,87	93,55	93,77	93,29	93,51	6,45	6,23	6,71	6,49
Sumatera Barat	62,92	65,19	64,56	70,34	92,98	93,50	93,11	94,19	7,02	6,50	6,89	5,81
Riau	63,44	63,31	63,22	67,01	94,52	93,44	92,17	94,06	5,48	6,56	7,83	5,94
Jambi	62,68	65,58	66,14	68,53	95,24	94,92	95,66	95,34	4,76	5,08	4,34	4,66
Sumatera Selatan	66,75	68,85	68,53	70,01	95,16	95,04	93,93	96,06	4,84	4,96	6,07	3,94
Bengkulu	67,59	68,28	70,67	73,59	95,39	96,53	95,09	96,16	4,61	3,47	4,91	3,84
Lampung	64,84	66,98	65,60	68,63	94,31	95,21	94,86	95,46	5,69	4,79	5,14	4,54
Kep.Bangka Belitung	65,38	65,45	66,71	68,06	96,35	94,86	93,71	93,83	3,65	5,14	6,29	6,17
Kepulauan Riau	65,92	65,94	65,07	65,58	94,37	93,31	93,80	90,97	5,63	6,69	6,20	9,03
DKI Jakarta	67,79	66,61	66,39	68,79	91,37	91,53	92,77	94,23	8,63	8,47	7,23	5,77
Jawa Barat	62,82	62,76	60,34	64,43	90,84	91,55	91,28	91,43	9,16	8,45	8,72	8,57
Jawa Tengah	70,43	69,68	67,86	69,89	93,99	94,32	95,01	95,80	6,01	5,68	4,99	4,20
D.I. Yogyakarta	69,29	71,05	68,38	72,20	96,76	96,67	95,93	97,19	3,24	3,33	4,07	2,81
Jawa Timur	69,78	68,12	67,84	68,27	95,70	95,81	95,53	95,86	4,30	4,19	4,47	4,14
Banten	63,55	63,83	62,24	65,56	90,46	90,93	90,45	92,05	9,54	9,07	9,55	7,95
Bali	74,93	74,90	75,51	75,28	98,17	98,10	98,01	97,88	1,83	1,90	1,99	2,12
Nusa Tenggara Barat	65,42	66,62	66,54	69,71	94,70	94,25	94,31	96,34	5,30	5,75	5,69	3,66
Nusa Tenggara Timur	68,15	68,91	69,25	72,63	96,75	96,74	96,17	96,41	3,25	3,26	3,83	3,59
Kalimantan Barat	69,53	69,92	69,68	70,75	96,01	95,96	94,85	95,42	3,99	4,04	5,15	4,58
Kalimantan Tengah	68,50	68,55	71,11	70,97	97,00	96,76	95,46	96,33	3,00	3,24	4,54	3,67
Kalimantan Selatan	69,31	69,46	69,73	71,30	96,34	96,20	95,08	96,37	3,66	3,80	4,92	3,63
Kalimantan Timur	63,50	64,10	62,39	66,06	92,05	92,62	92,50	91,14	7,95	7,38	7,50	8,86
Kalimantan Utara	-	-	63,45	62,96	-	-	94,32	96,08	-	-	5,68	3,92
Sulawesi Utara	59,41	59,99	61,28	65,55	93,21	92,46	90,97	92,18	6,79	7,54	9,03	7,82
Sulawesi Tengah	65,56	66,76	67,51	72,20	95,81	96,32	95,90	96,54	4,19	3,68	4,10	3,46
Sulawesi Selatan	60,32	62,03	60,94	61,64	94,90	94,92	94,05	94,89	5,10	5,08	5,95	5,11
Sulawesi Tenggara	65,91	66,87	68,35	71,92	95,62	95,57	94,45	96,22	4,38	4,43	5,55	3,78
Gorontalo	61,46	62,83	63,65	68,60	95,85	95,82	95,35	96,12	4,15	4,18	4,65	3,88
Sulawesi Barat	66,83	71,05	70,27	72,30	97,65	97,92	96,65	97,28	2,35	2,08	3,35	2,72
Maluku	61,93	60,91	64,47	64,33	90,09	89,49	90,07	93,02	9,91	10,51	9,93	6,98
Maluku Utara	64,35	63,87	66,43	67,83	96,20	94,71	93,95	96,57	3,80	5,29	6,05	3,43
Papua Barat	66,69	68,29	68,68	71,50	95,60	94,98	91,92	94,27	4,40	5,02	8,08	5,73
Papua	77,70	78,66	79,57	78,77	96,85	96,56	96,01	97,03	3,15	3,44	3,99	2,97
Indonesia	66,77	66,60	65,76	68,06	93,83	94,06	93,82	94,50	6,17	5,94	6,18	5,50

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

Peningkatan TPAK di Aceh tidak meningkat terlalu signifikan, yaitu dari 63,06 persen pada tahun 2014 menjadi 63,44 persen pada tahun 2015 membuat Provinsi Aceh belum mampu mempertahankan dan meningkatkan penyediaan kesempatan kerja. Pengangguran tersebut terjadi karena kurangnya perhatian untuk melihat peluang lapangan kerja yang sesuai dengan sumber daya alam dan karakteristik penduduk Aceh.

Tidak hanya itu, pemerintah juga harus menghadirkan pihak swasta untuk berinvestasi karena sektor investasi dinilai mampu menyerap tenaga kerja. Selain pemerintah, peran lembaga perguruan tinggi di Provinsi Aceh juga sangat mempengaruhi penekanan jumlah pengangguran. Lembaga perguruan tinggi atau lembaga pendidikan harus dapat menghasilkan lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja dan berjiwa wirausaha (Serambi Indonesia, 2015).

Meskipun Maluku merupakan provinsi dengan TTK terendah selama dua tahun berturut-turut, Maluku perlahan berupaya menurunkan angka pengangguran. TPT Maluku pada tahun 2015 adalah 9,93 persen, menurun dari TPT pada tahun 2014 yang sebesar 10,51 persen. Berbeda dengan Maluku, tingkat pengangguran di Provinsi Aceh mengalami peningkatan. TPT Provinsi Aceh meningkat dari 9,02 persen pada tahun 2014 menjadi 9,93 persen pada tahun 2015.

Kualitas Pendidikan Pekerja Indonesia

Kualitas tenaga kerja adalah materi yang sangat penting dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif. Sebagai pemeran utama dalam pembangunan negara, SDM harus mampu berdaya saing dengan negara lainnya. Peningkatan daya saing SDM dapat dilakukan melalui pelatihan kerja. Pendidikan juga sangat menentukan kualitas tenaga kerja tersebut.

Tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh pekerja lulusan SD ke bawah. Masih banyaknya tenaga kerja dengan pendidikan rendah menandakan bahwa kualitas tenaga kerja di Indonesia juga rendah dan dapat berdampak pada hasil produktivitas pekerja yang kurang baik. Meski demikian, persentase pekerja lulusan SD mulai berkurang secara perlahan, yaitu dari 48,96 persen pada tahun 2012 menjadi 47,72 persen pada tahun 2013, kemudian menurun kembali menjadi 47,07 persen pada tahun 2014, lalu menurun menjadi 44,27 persen pada tahun 2015, dan terus menurun hingga 43,46 persen pada Februari 2016.

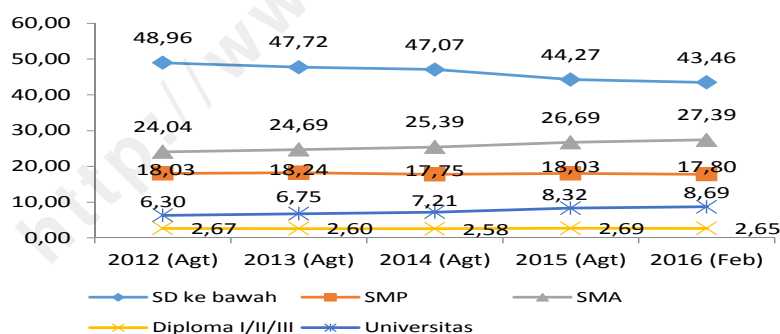
Tabel 10.5. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2012–2016

Tingkat Pendidikan	2012 (Agustus)	2013 (Agustus)	2014 (Agustus)	2015 (Agustus)	2016 (Februari)
SD ke bawah	48,96	47,72	47,07	44,27	43,46
SMP	18,03	18,24	17,75	18,03	17,80
SMA	24,04	24,69	25,39	26,69	27,39
Diploma I/II/III	2,67	2,60	2,58	2,69	2,65
Universitas	6,30	6,75	7,21	8,32	8,69

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS

Sementara itu, persentase pekerja dengan pendidikan terakhir SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, Diploma I/II/III, dan universitas cenderung terus mengalami peningkatan. Selama tahun 2014-2015, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dan memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA meningkat sebesar 5,12 persen, kemudian tingkat pendidikan terakhir Diploma I/II/III meningkat sebesar 4,19 persen, dan peningkatan yang paling signifikan adalah pekerja dengan pendidikan terakhir universitas/S1 yaitu sebesar 15,39 persen. Persentase pekerja berpendidikan universitas meningkat dari 7,21 persen menjadi 8,32 persen. Bahkan pada Februari 2016, persentase tersebut terus meningkat hingga 8,69 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja di bidang pendidikan perlahan sudah mulai bergeser ke jenjang yang lebih tinggi dan meningkat. Akan tetapi, pekerja lulusan Diploma I/II/III, masih sangat minim dan memiliki persentase terkecil dibandingkan pendidikan lainnya, yaitu sebesar 2,69 persen pada tahun 2015. Padahal para lulusan vokasi tersebut dapat menjadi andalan untuk bersaing global. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan keahlian terapan tertentu dan memiliki penguasaan praktik yang lebih baik, sehingga lulusan vokasi dapat memenuhi kompetensi tenaga profesional yang dibutuhkan pangsa pasar kerja (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2016). Oleh karena itu, pekerja berpendidikan diploma atau vokasi ini harus dipertimbangkan untuk diserap dalam dunia kerja terutama untuk bidang industri.

Gambar 10.3
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2012–2016



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Masih Menjadi Lapangan Usaha Andalan Penyerapan Tenaga Kerja

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Kesempatan kerja yang disediakan di lapangan usaha tersebut lebih banyak dibandingkan lapangan usaha lainnya. Besarnya kesempatan kerja tersebut didukung oleh potensi pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam Statistik Indonesia 2015, luas hutan dan perairan di Indonesia pada

tahun 2013 adalah 129.425.000 hektar atau mencapai 67,73 persen dari luas Indonesia. Potensi tersebut yang membuat penduduk Indonesia banyak menggantungkan kegiatan perekonomiannya di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Namun demikian, distribusi pekerja pada lapangan usaha ini terus mengalami penurunan. Pada tahun 2012, persentase pekerja yang bekerja pada lapangan usaha ini terdapat 35,19 persen, menurun menjadi 34,78 persen pada tahun 2013, kemudian menurun lagi menjadi 34,00 persen pada tahun 2014, lalu turun lagi menjadi 32,88 persen pada tahun 2015, dan terus menurun hingga 31,74 persen pada Februari 2016.

Tabel 10.6. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Tahun 2012–2016

Lapangan Pekerjaan	2012 (Agst)	2013 (Agst)	2014 (Ags)	2015 (Agst)	2016 (Feb)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35,19	34,78	34,00	32,88	31,74
B. Pertambangan dan Penggalian	1,42	1,26	1,25	1,15	1,08
C. Industri Pengolahan	14,35	13,79	13,63	13,53	13,65
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,17	0,18	0,18	0,23
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,16	0,19	0,23	0,29
F. Konstruksi	6,09	5,63	6,35	7,15	6,39
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,42	18,61	18,27	18,59	20,02
H. Transportasi dan Pergudangan	4,08	4,10	4,02	4,02	3,91
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,36	3,76	4,20	4,56	4,67
J. Informasi dan Komunikasi	0,48	0,48	0,50	0,47	0,53
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,24	1,33	1,32	1,45	1,43
L. Real Estate	0,19	0,17	0,23	0,25	0,26
M,N. Jasa Perusahaan	1,00	1,09	1,11	1,19	1,12
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,19	3,24	3,20	3,51	3,64
P. Jasa Pendidikan	4,49	4,48	4,74	4,88	4,76
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10	1,14	1,16	1,27	1,36
R,S,T,U. Jasa lainnya	5,08	5,79	5,66	4,68	4,92

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

Selanjutnya, penyerapan tenaga kerja terbanyak kedua terdapat pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Penyerapan pada lapangan usaha ini juga meningkat dari 18,27

persen pada tahun 2014 menjadi 18,59 persen pada tahun 2015. Dari data tersebut terlihat bahwa serapan tenaga kerja perdagangan perlahan mulai menguat. Dari situ terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja di Indonesia mulai menunjukkan pergeseran dari sektor pertanian ke sektor perdagangan.

Upah Sebagai Gambaran Tingkat Kesejahteraan Pekerja

Upah merupakan topik penting yang sangat beriringan dengan ketenagakerjaan. Kesejahteraan suatu penduduk atau tenaga kerja tidak hanya dilihat dari kesempatan atau lapangan kerja yang ada tetapi juga besaran upah yang diperoleh, karena upah sangat menentukan keadaan ekonomi pekerja. Adam Smith mengatakan bahwa upah yang dibayarkan pada pekerja harus cukup dan memungkinkan mereka untuk hidup dan menghidupi keluarganya.

Dalam *Subsistence Theory* yang dikemukakan David Ricardo (1772-1823), ketersediaan tenaga kerja mempengaruhi upah subsisten yaitu upah yang dibutuhkan untuk kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Jika upah pekerja diatas upah subsisten, jumlah pekerja akan meningkat dan akan membawa turunnya tingkat upah. Sebaliknya, jika upah pekerja dibawah upah subsisten, jumlah pekerja akan turun dan akan membawa meningkatnya upah (*Encyclopaedia Britannica*, 2016). Upah subsisten ini juga biasa dikenal dengan upah minimum.

Upah minimum adalah salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi setiap pekerja/buruh. Keadaan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Bahkan hal mengenai upah pekerja juga disebutkan dalam UUD 1945 dalam Pasal 28D ayat (2) bahwa, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Oleh karena itu, sebagai imbalan jasa pekerja, upah yang diberikan haruslah sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan serta tetap mengikuti peraturan upah minimum yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003, pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum adalah salah satu kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh dan terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten kota. Selain itu, upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.

Bahkan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 78/2015 tentang pengupahan diupayakan dapat menguntungkan kalangan pekerja/buruh. Provinsi yang melaporkan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2016 dan menerapkan formula sesuai PP Pengupahan menunjukkan kenaikan UMP mencapai 11,5 persen.

Kenaikan tersebut telah sesuai dengan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, UMP provinsi yang belum mengikuti formula dalam PP pengupahan mengalami kenaikan cukup kecil, yaitu mulai dari 6 persen hingga 9 persen. Tidak hanya itu, PP pengupahan tersebut juga mengatur pendapatan non-upah, seperti bonus, THR, dan lain lain yang menjadi hak buruh. Dengan adanya PP tersebut, pemerintah berharap dunia usaha bisa berkembang dan memperluas kesempatan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2015).

UMP 2016 Provinsi DKI Jakarta merupakan UMP yang tertinggi, yaitu sebesar Rp.3.100.000,-. Penghitungan UMP di provinsi DKI Jakarta sudah tidak berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tetapi dengan mengkalikan upah minimum tahun berjalan dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. UMP 2016 tersebut naik sebesar 14,81 persen dari UMP 2015. Walaupun dalam penetapan UMP 2016 telah menggunakan formula sesuai PP Pengupahan, angka pertumbuhannya lebih dari 11,5 persen. Hal tersebut dikarenakan adanya keinginan dari unsur serikat pekerja DKI Jakarta untuk tetap menggunakan KHL dalam penetapan UMP, sehingga UMP 2016 DKI Jakarta ditetapkan dengan mengambil nilai tengah. Sarman Simanjourang, anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, mengutarakan angka tersebut diharapkan merupakan langkah yang adil bagi pengusaha dan buruh (Deny, 2015).

Tabel 10.7. Rata-Rata UMP, KHL dan Pertumbuhan UMP (ribu rupiah), Tahun 2007–2016

Tahun	Rata-Rata UMP	Rata-Rata KHL	Pertumbuhan UMP (%)
2007	673,26	766,35	11,71
2008	743,17	849,18	10,38
2009	841,53	1 010,37	13,24
2010	908,82	1 068,40	8,00
2011	988,83	1 123,74	8,80
2012	1 088,9	1 299,69	10,12
2013	1 355,33	1 478,63	24,47
2014	1 579,56	1 667,90	16,54
2015	1 776,17	1 821,72	12,45
2016	1 997,82	...	12,48

Sumber : Kementerian Ketenagakerjaan

Rata-rata UMP 2016 yang disajikan dalam analisis ini mencakup 31 provinsi, di dalamnya termasuk Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, rata-rata UMP tersebut juga termasuk Provinsi Jawa Barat yang menjadi provinsi terbaru yang memberlakukan UMP. Rata-rata UMP 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 12,48 persen. Pertumbuhan tersebut tidak berbeda secara signifikan dengan pertumbuhan UMP 2014.

Selanjutnya, selama tahun 2007 hingga tahun 2015 rata-rata KHL lebih tinggi dari rata-rata UMP. Hal tersebut menunjukkan bahwa upah yang diterima pekerja belum mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja. Dengan adanya formula pengupahan yang baru ini, diharapkan upah minimum yang ditetapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja Indonesia.

Tabel 10.8. Distribusi Pekerja Menurut Upah dan Daerah (persen), Tahun 2013–2016

Daerah Tempat Tinggal	Upah (Rp)				Rata- Rata Upah (Rp)
	< 200 000	200 000 - 599 999	600 000 - 999 999	> 999 999	
Tahun 2013 (Agt)					
Perkotaan	1,32	11,43	17,36	69,89	1 949 416
Perdesaan	4,06	25,66	25,00	45,28	1 204 901
Perkotaan+Perdesaan	2,32	16,60	20,13	60,94	1 678 816
Tahun 2014 (Agt)					
Perkotaan	1,93	14,21	16,31	67,55	2 003 700
Perdesaan	2,77	22,56	26,21	48,46	1 307 027
Perkotaan+Perdesaan	2,24	17,29	19,97	60,50	1 746 304
Tahun 2015 (Agt)					
Perkotaan	2,42	14,65	13,45	69,48	2 132 961
Perdesaan	3,89	23,34	20,96	51,81	1 346 632
Perkotaan+Perdesaan	2,93	17,67	16,07	63,33	1 859 170
Tahun 2016 (Feb)					
Perkotaan	0,99	7,75	11,90	79,36	2 221 909
Perdesaan	2,21	17,21	20,83	59,75	1 502 885
Perkotaan+Perdesaan	1,42	11,07	15,04	72,48	1 969 385

Catatan: Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS

Rasio rata-rata upah daerah perkotaan terhadap daerah perdesaan selalu lebih besar dari satu, yang berarti bahwa rata-rata upah perkotaan lebih besar daripada rata-rata upah perdesaan. Selama tahun 2013-2014, angka rasio tersebut pun cukup fluktuatif, yaitu sebesar 1,62 persen di tahun 2013, kemudian menurun menjadi 1,53 persen di tahun 2014, lalu meningkat menjadi 1,58 persen di tahun 2015, dan menurun kembali menjadi 1,48 persen di Februari 2016. Padahal selisih besarnya upah antara perkotaan dan perdesaan akan mendorong terjadinya arus migrasi dari desa ke kota. Fenomena tersebut akan menyebabkan menjamurnya pengangguran dan kegiatan sektor informal di daerah perkotaan (Todaro & Smith, 2006).

Untuk pekerja seluruhnya, persentase terbesar terdapat pada pekerja yang menerima upah satu juta rupiah atau lebih. Persentase tersebut juga meningkat secara perlahan, yaitu dari 60,94 persen pada tahun 2013 menjadi 63,33 persen pada tahun 2015. Kemudian persentase pekerja yang menerima upah Rp.600.000 – Rp.999.999 terus menurun, yaitu dari 20,13 persen (tahun

2013), menjadi 19,97 persen (tahun 2014), lalu menurun menjadi 16,07 persen (tahun 2015), dan terus menurun hingga 15,04 persen (Februari 2016). Di sisi lain, pekerja yang menerima upah kurang dari Rp.599.999,- cenderung meningkat. Pekerja dengan upah Rp.200.000 – Rp.599.999,- meningkat dari 16,60 persen pada tahun 2013 menjadi 17,67 persen pada tahun 2015 dan pekerja dengan upah kurang dari Rp.200.000,- meningkat dari 2,32 persen pada tahun 2013 menjadi 2,93 persen pada tahun 2015.

Selanjutnya, dari sisi upah, kesejahteraan pekerja perkotaan lebih baik dibandingkan pekerja perdesaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan distribusi pekerja perkotaan dengan upah minimal satu juta rupiah lebih besar daripada distribusi pekerja perdesaan. Sudah hampir 70 persen pekerja perkotaan menerima upah minimal satu juta rupiah, sedangkan pekerja perdesaan dengan upah tersebut hanya mencapai sekitar 50 persen. Namun demikian, pekerja perdesaan dengan upah minimal satu juta rupiah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mulai dari 45,28 persen (tahun 2013), menjadi 48,46 persen (tahun 2014), meningkat menjadi 51,81 persen (tahun 2015), dan masih meningkat menjadi 59,75 persen (Februari tahun 2016).

Tidak berbeda dengan keadaan agregat, pekerja di daerah perkotaan yang menerima upah kurang dari Rp.599.999,- juga terus mengalami peningkatan. Pekerja perkotaan dengan upah Rp.200.000 – Rp.599.999 meningkat dari 11,43 persen (tahun 2013) menjadi 14,65 persen (tahun 2015). Kemudian pekerja perkotaan dengan upah kurang dari Rp.200.000,- meningkat dari 1,32 persen (tahun 2013) menjadi 2,42 persen (tahun 2015). Di sisi lain, distribusi pekerja perdesaan menurut kelompok tingkat upah cenderung fluktuatif. Pekerja perdesaan dengan upah Rp.600.000 – Rp.999.999 meningkat dari 25,00 persen pada tahun 2013 menjadi 26,21 persen pada tahun 2014, kemudian menurun hingga 20,96 persen pada tahun 2015, dan menurun sedikit menjadi 20,83 persen pada Februari 2016.

Berdasarkan jenis kelamin, rata-rata upah untuk pekerja laki-laki selalu lebih besar daripada pekerja perempuan. Namun demikian perbedaan upah antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan lambat laun mulai berkurang. Hal tersebut ditunjukkan dari rasio upah antara pekerja laki-laki dan perempuan yang perlahan mulai menurun. Pada tahun 2013, rasio tersebut sebesar 1,26, kemudian menurun menjadi 1,25 pada tahun 2014, dan terus menurun hingga angka 1,16 pada tahun 2015. Angka rasio upah antara pekerja laki-laki dan perempuan menandakan mulai hilangnya kesenjangan atau diskriminasi diantara keduanya.

Kesetaraan gender dalam upah tenaga kerja juga dapat terlihat dari pertumbuhan rata-rata upah pekerja wanita yang lebih cepat dibandingkan tenaga kerja laki-laki. Selama tahun 2013-2015, rata-rata pertumbuhan upah pekerja perempuan adalah 8,32 persen setiap tahunnya, sedangkan rata-rata pertumbuhan upah pekerja laki-laki adalah 3,99 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan upah pekerja perempuan yang lebih cepat dapat memungkinkan adanya kesamaan upah yang diterima pekerja perempuan dan laki-laki di waktu yang akan datang.

Fakta tersebut sesuai dengan standar perburuhan internasional tentang kesetaraan gender yang diatur oleh ILO. Upah yang adil untuk pekerjaan ini telah dijelaskan dalam Konvensi ILO no.100 tahun 1950. Prinsip kesetaraan upah bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang setara nilainya mengacu pada tarif upah yang telah ditetapkan tanpa adanya diskriminasi. Upah yang adil tersebut ditentukan hanya berdasarkan sifat dan beban pekerjaan secara aktual. Selain kebijakan ILO, kesetaraan upah ini juga menjadi tujuan dalam SDGs. Dalam tujuan 5 SDGs, kesetaraan gender dapat dicapai dengan melihat mulai memudarnya kesenjangan gender dalam upah.

Tabel 10.9. Distribusi Pekerja Menurut Upah dan Jenis Kelamin* (persen), Tahun 2013–2016

Jenis Kelamin	Besar Upah (Rp)				Rata- Rata Upah (Rp)
	< 200 000	200 000 - 599 999	600 000 - 999 999	> 999 999	
Tahun 2013 (Agt)					
Laki-Laki	1,19	11,85	20,36	66,60	1 797 956
Perempuan	4,70	26,62	19,65	49,03	1 427 856
Laki-Laki+Perempuan	2,32	16,60	20,13	60,94	1 678 816
Tahun 2014 (Agt)					
Laki-Laki	1,17	12,27	19,70	66,86	1 868 203
Perempuan	4,50	27,85	20,52	47,13	1 490 202
Laki-Laki+Perempuan	2,24	17,29	19,97	60,50	1 746 304
Tahun 2015 (Agt)					
Laki-Laki	2,18	14,31	15,71	67,81	1 944 251
Perempuan	4,56	24,94	16,85	53,65	1 675 269
Laki-Laki+Perempuan	2,93	17,67	16,07	63,33	1 859 170
Tahun 2016 (Feb)					
Laki-Laki	0,77	6,54	13,16	79,53	2 110 702
Perempuan	2,73	20,15	18,79	58,32	1 685 895
Laki-Laki+Perempuan	1,42	11,07	15,04	72,48	1 969 385

Catatan: * Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian
Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS

Sebagian besar pekerja laki-laki menerima upah satu juta rupiah atau lebih, yakni sebesar 66,60 persen pada tahun 2013 dan naik menjadi 67,81 persen pada tahun 2015. Di sisi lain, pekerja wanita yang menerima upah satu juta rupiah atau lebih, persentasenya jauh di bawah pekerja laki-laki. Meskipun demikian, angka persentasenya meningkat cukup signifikan, yaitu dari 49,03 persen pada tahun 2013 menjadi 53,65 persen pada tahun 2015. Tidak hanya itu, selama tahun 2013-2015, persentase pekerja perempuan yang menerima upah kurang dari satu juta rupiah cenderung terus mengalami penurunan di semua kelompok upah, sedangkan distribusi pekerja laki-laki cukup fluktuatif di setiap kelompok upah.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Belum Mampu Menciptakan Lapangan Kerja Memadai

Ketersediaan lapangan pekerjaan sangat bergantung pada pengusaha atau produsen. Sebagai salah satu input dalam proses produksi, tenaga kerja berperan penting dalam memproduksi barang atau jasa yang akan dihasilkan oleh produsen. Dengan demikian, peningkatan permintaan konsumen akan suatu barang akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebagai salah satu input dalam proses produksi.

Konsumsi masyarakat merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi. Permintaan output secara agregat dapat diukur dari gambaran pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terlihat dari pertumbuhan PDB/PDRB. Oleh karena itu, perbandingan antara laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi atau yang biasa disebut elastisitas kesempatan kerja dapat memberikan informasi dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2013-2015, elastisitas kesempatan kerja Indonesia adalah 0,22 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa elastisitas kesempatan

Tabel 10.10. Elastisitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Tahun 2013–2015

Kategori Lapangan Usaha	Rata-Rata Laju		Elastisitas Kesempatan Kerja
	Pertumbuhan PDB (%)	Kesempatan Kerja (%)	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,13	-2,35	-0,57
B. Pertambangan dan Penggalian	-2,23	-9,28	4,17
C. Industri Pengolahan	4,43	-1,88	-0,42
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,37	0,69	0,20
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,52	28,47	4,37
F. Konstruksi	6,81	9,45	1,39
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,81	1,50	0,39
H. Transportasi dan Pergudangan	7,02	0,34	0,05
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,06	17,70	3,50
J. Informasi dan Komunikasi	10,08	0,45	0,04
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6,59	9,25	1,40
L. Real Estate	4,91	15,91	3,24
M,N. Jasa Perusahaan	8,74	10,21	1,17
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,55	5,92	1,67
P. Jasa Pendidikan	6,49	5,37	0,83
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,53	8,64	1,15
R,S,T,U. Jasa lainnya	8,50	-3,08	-0,36
Jumlah	4,56	1,02	0,22

Sumber : Diolah dari data sakernas dan PDB

kerja Indonesia bersifat inelastis, karena bernilai kurang dari satu persen. Hal tersebut menandakan bahwa persentase perubahan permintaan tenaga kerja lebih kecil daripada persentase perubahan PDB. Nilai Elastisitas Kesempatan Kerja yang sebesar 0,22 persen berarti bahwa peningkatan satu persen pada PDB akan meningkatkan 0,22 persen penciptaan kesempatan kerja. Namun demikian, angka tersebut sudah perlahan meningkat dibandingkan angka elastis kesempatan kerja tahun 2012-2014 yang sebesar 0,18 persen. Selain ditinjau dari keseluruhan perekonomian, elastisitas juga dapat ditinjau dari masing-masing lapangan usaha.

Hampir setengah dari 17 kategori lapangan usaha memiliki angka elastisitas kesempatan kerja yang inelastis. Tidak hanya itu, terdapat tiga lapangan usaha di Indonesia yang angka elastis kesempatan kerja tahun 2013-2015 bernilai negatif, antara lain kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, dan jasa lainnya. Dari ketiga kategori tersebut, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kategori dengan nilai elastisitas negatif terbesar, yaitu -0,57 persen. Angka tersebut berarti bahwa setiap peningkatan PDB di kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1 persen, akan mengurangi 0,57 persen ketersediaan lapangan pekerjaan.

Namun demikian, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang adalah kategori dengan angka elastisitas kesempatan kerja tertinggi, yaitu 4,37 persen, artinya setiap peningkatan satu persen PDB pada kategori lapangan usaha tersebut akan meningkatkan 4,37 persen ketersediaan lapangan pekerjaan. Angka elastisitas kesempatan kerja 2013-2015 pada masing-masing lapangan usaha ini lebih baik dibandingkan elastisitas kesempatan kerja 2012-2014. Lapangan usaha yang memiliki angka elastisitas kesempatan kerja lebih dari 1 persen atau bersifat elastis meningkat dari 3 lapangan usaha menjadi 9 lapangan usaha. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PDB mampu meningkatkan permintaan tenaga kerja lebih besar di setiap lapangan usaha.

Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Terus Meningkat

Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu ukuran tercapainya tujuan ekonomi. Produktivitas ini sangat erat kaitannya dengan konsep ekonomis. Produktivitas menjadi ukuran suatu usaha untuk menghasilkan barang atau jasa. Tenaga kerja sebagai salah satu input dalam proses produksi adalah faktor penting dalam mengukur produktivitas. Oleh karena itu produktivitas tenaga kerja merupakan momok yang tidak pernah ada habisnya untuk dibahas dan dibuat kebijakan oleh pemerintah.

Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa produktivitas dan daya saing menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi-JK. Peningkatan produktivitas diharapkan mampu mengembangkan situasi ekonomi, peningkatan daya saing, dan tingkat kesejahteraan pekerja di Indonesia. Selain tercantum di Nawacita agenda keenam, peningkatan produktivitas tenaga kerja ini juga terdapat

**Tabel 10.11. Produktivitas Menurut Provinsi dan Komoditas (juta rupiah per pekerja),
Tahun 2011– 2014**

Propinsi	2011 ¹	2012 ¹	2013 ¹	2014
Aceh	60,44	63,35	66,19	67,53
Sumatera Utara	68,14	70,93	77,32	89,06
Sumatera Barat	57,84	63,02	71,27	76,61
Riau	210,13	232,72	245,01	269,88
Jambi	74,29	80,10	94,49	103,19
Sumatera Selatan	66,33	70,70	80,00	83,52
Bengkulu	38,44	42,41	48,63	52,07
Lampung	50,48	53,27	58,88	62,89
Bangka Belitung	73,57	77,54	84,33	93,33
Kepulauan Riau	166,26	180,71	202,35	223,16
DKI Jakarta	270,33	283,89	331,40	380,07
Jawa Barat	58,69	60,61	67,21	72,07
Jawa Tengah	43,77	45,64	50,57	55,93
D.I. Yogyakarta	38,79	40,53	45,03	47,77
Jawa Timur	60,69	64,57	70,70	79,80
Banten	69,96	72,54	81,10	89,16
Bali	48,45	52,38	59,94	68,84
Nusa Tenggara Barat	34,54	34,24	36,22	39,28
Nusa Tenggara Timur	24,02	25,89	29,14	31,55
Kalimantan Barat	44,82	48,70	54,61	59,26
Kalimantan Tengah	61,05	66,02	72,87	77,85
Kalimantan Selatan	55,62	58,20	63,29	70,47
Kalimantan Timur	338,65	342,60	323,42	309,95
Sulawesi Utara	60,14	65,65	73,62	82,20
Sulawesi Tengah	50,11	56,89	64,42	69,79
Sulawesi Selatan	59,60	66,73	76,61	85,09
Sulawesi Tenggara	58,39	65,05	71,24	75,78
Gorontalo	39,09	43,20	48,22	52,60
Sulawesi Barat	37,59	39,55	46,29	49,33
Maluku	34,53	40,21	46,20	52,74
Maluku Utara	40,05	42,96	47,12	52,75
Papua Barat	133,65	136,44	147,46	154,02
Papua	74,62	75,93	76,79	76,16
Indonesia	72,85	77,09	85,25	93,34

Catatan: ¹ Data PDB yang digunakan dalam perhitungan direvisi disesuaikan dengan seri 2010

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional dan Statistik Indonesia

dalam kebijakan pemerintah lainnya. Strategi percepatan peningkatan produktivitas kerja tersebut diupayakan melalui penguatan kurikulum lembaga pendidikan.

Kebijakan pemerintah Indonesia sepertinya sudah menuai hasil. Selama tahun 2011-2014, produktivitas pekerja di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, produktivitas pekerja di Indonesia adalah 72,85 juta per pekerja meningkat menjadi 93,34 juta per pekerja. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan produktivitas pekerja Indonesia selama tahun tersebut adalah 8,62 persen setiap tahunnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya kualitas pekerja di Indonesia terus membaik sehingga nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan pun meningkat.

Hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami peningkatan produktivitas pekerja selama tahun 2011-2014. Akan tetapi, terdapat satu provinsi dimana produktivitas pekerja selama tahun tersebut malah menurun, yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2011, produktivitas pekerja di Kalimantan Timur adalah 338,65 juta per pekerja menurun menjadi 309,95 juta per pekerja atau menurun sebesar 8,47 persen. Padahal, pada tahun 2011 dan 2012, angka produktivitas pekerja di Kalimantan Timur adalah angka tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Namun di tahun 2013 dan 2014, produktivitas pekerja tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 331,40 juta per pekerja pada tahun 2013 dan 380,07 juta per pekerja pada tahun 2014. Di sisi lain, Nusa Tenggara Timur (NTT) selalu menjadi provinsi dengan produktivitas pekerja terendah. Meskipun demikian, NTT terus berusaha bangkit yang ditunjukkan dengan meningkatnya produktivitas pekerja di provinsi tersebut dengan laju pertumbuhan melebihi angka nasional, yaitu 9,52 persen setiap tahunnya.

Ditinjau dari masing-masing lapangan usaha, produktivitas pekerja selama tahun 2012-2015 adalah lapangan usaha *Real Estate*. Setiap tahunnya, produktivitas pekerja di lapangan usaha tersebut selalu melebihi angka satu miliar rupiah. Bahkan, angka produktivitas pekerja di lapangan usaha *real*

Tabel 10.12. Produktivitas Menurut Lapangan Pekerjaan (juta rupiah per pekerja), Tahun 2012–2015

Lapangan Pekerjaan	2012	2013	2014	2015
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,10	32,51	36,17	41,33
B. Pertambangan dan Penggalian	624,95	737,86	726,77	667,56
C. Industri Pengolahan	114,51	129,10	142,08	154,81
D. Pengadaan Listrik dan Gas	481,78	510,01	561,30	652,26
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	40,75	38,98	35,32	32,18
F. Konstruksi	117,53	142,69	143,12	145,39
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	54,94	60,10	67,83	71,86
H. Transportasi dan Pergudangan	68,23	81,10	101,29	125,28
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	66,81	68,22	66,64	65,25
J. Informasi dan Komunikasi	580,37	633,44	647,91	751,60
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	229,08	247,49	270,04	278,27
L. Real Estate	1 102,51	1 345,84	1 104,29	1 137,52
M,N. Jasa Perusahaan	113,60	117,29	130,53	139,32
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	94,81	101,83	110,43	111,84
P. Jasa Pendidikan	53,54	60,99	63,02	69,34
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69,72	75,30	82,09	84,54
R,S,T,U. Jasa lainnya	21,45	21,48	25,22	35,50

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan PDB

estate terus mengalami peningkatan, yaitu dari 1,10 miliar per pekerja pada tahun 2012 menjadi 1,14 miliar per pekerja pada tahun 2015. Peningkatan tersebut menunjukkan laju pertumbuhan sebesar 6,70 persen setiap tahunnya. Walaupun lapangan usaha real estate hanya memberikan kontribusi sebesar 2,86 persen untuk PDB Nasional tahun 2015, kontribusi tersebut perlahan meningkat dari tahun ke tahun, dimana kontribusi pada tahun 2014 sebesar 2,79 persen. Dari situ terlihat bahwa, sektor real estate memiliki prospek yang menjamin ditambah dengan produktivitas tenaga kerjanya yang sangat tinggi. Dengan demikian, prioritas utama pemerintah untuk peningkatan produktivitas dan daya saing di sektor real estate akan sangat mudah dicapai.

Namun demikian, terdapat lapangan usaha yang mengalami peningkatan produktivitas pekerja sangat signifikan, yaitu lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Pada tahun 2012, produktivitas pekerja di lapangan usaha tersebut adalah 68,23 juta per pekerja kemudian meningkat hampir dua kali lipat di tahun 2015, yaitu sebesar 125,28 persen. Peningkatan tersebut menunjukkan laju pertumbuhan yang cukup cepat, yaitu 22,45 persen setiap tahunnya.

Sementara itu, di tahun 2014, lapangan usaha dengan produktivitas pekerja terendah adalah lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Menjadi lapangan usaha dengan produktivitas pekerja terendah disebabkan dari terus menurunnya angka produktivitas di lapangan usaha tersebut. Pada tahun 2012, produktivitas pekerja di lapangan usaha tersebut adalah sebesar 40,75 juta per pekerja kemudian menurun menjadi 32,18 juta per pekerja pada tahun 2015, atau mengalami penurunan sebesar 21,04 persen. Padahal di tahun-tahun sebelumnya lapangan usaha jasa lainnya adalah lapangan usaha dengan produktivitas pekerja terendah.

Pergeseran dari Sektor Informal ke Sektor Formal

Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja lebih banyak di lapangan pekerja informal dibandingkan formal, walaupun selama tahun 2012-2015 jumlah pekerja formal terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, jumlah pekerja formal sebanyak 44,82 juta pekerja meningkat menjadi 48,5 juta pekerja pada tahun 2015. Sementara itu, jumlah pekerja informal selama tahun 2012-2015 mulai mengalami penurunan, yaitu dari 67,68 juta pekerja di tahun 2012 menjadi 66,31 juta pekerja di tahun 2015.

Meskipun jumlah pekerja informal sudah mulai menurun, pekerja di Indonesia masih lebih banyak pekerja informal dibandingkan pekerja formal. Besarnya pekerja sektor informal ini merupakan dampak dari kecilnya kesempatan kerja yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia. Walaupun ekonomi Indonesia terus tumbuh, lapangan kerja belum tentu meningkat. Hal tersebut dikarenakan padatnya modal teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Dengan demikian, keberadaan sumber daya manusia tergantikan oleh mesin. Selain itu, urbanisasi yang cepat dan masif juga sangat mempengaruhi keberadaan sektor informal, karena

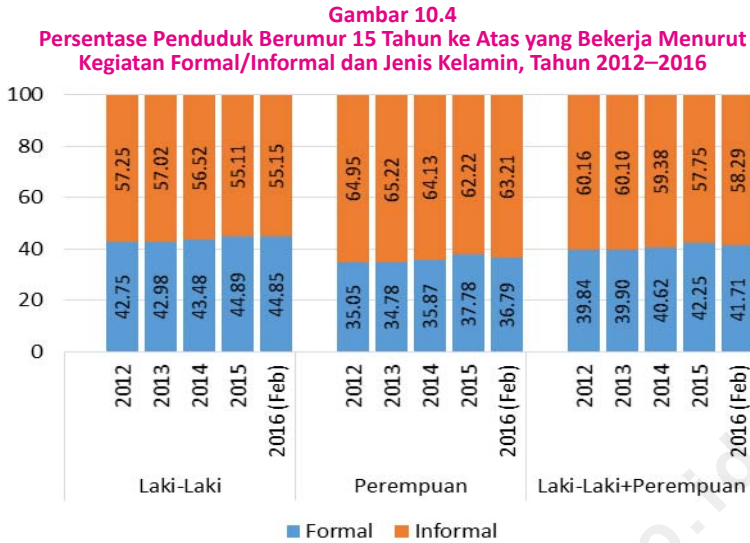
Tabel 10.13. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Kegiatan Formal/Informal dan Jenis Kelamin, Tahun 2012–2016

Jenis Kelamin	Formal	Informal
Tahun 2012 (Agt)		
Laki-Laki	29.926.555	40.074.576
Perempuan	14.898.147	27.605.590
Laki-Laki+Perempuan	44.824.702	67.680.166
Tahun 2013 (Agt)		
Laki-Laki	30.228.652	40.106.589
Perempuan	14.757.764	27.668.067
Laki-Laki+Perempuan	44.986.416	67.774.656
Tahun 2014 (Agt)		
Laki-Laki	31.073.842	40.389.465
Perempuan	15.485.035	27.679.684
Laki-Laki+Perempuan	46.558.877	68.069.149
Tahun 2015 (Agt)		
Laki-Laki	32.386.435	39.764.153
Perempuan	16.120.295	26.548.316
Laki-Laki+Perempuan	48.506.730	66.312.469
Tahun 2016 (Feb)		
Laki-Laki	33.060.043	40.656.727
Perempuan	17.265.080	29.665.847
Laki-Laki+Perempuan	50.325.123	70.322.574

Sumber : Diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional

para imigran umumnya memiliki keterampilan dan pendidikan yang minim membuat mereka sulit mendapat pekerjaan yang diharapkan, membuat para pelaku urbanisasi bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, buruh harian, pembantu rumah tangga, dan sebagainya yang tidak membutuhkan keterampilan.

Selama tahun 2012-2015, persentase pekerja sektor formal terus meningkat. Bahkan peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015 cukup signifikan dibandingkan perubahan di tahun sebelumnya, yaitu dari 40,62 persen di tahun 2014 menjadi 42,25 persen di tahun 2015. Namun pada Februari 2016, persentase pekerja formal menurun menjadi 41,71 persen. Sebaliknya, persentase pekerja informal cenderung terus mengalami penurunan. Penurunan signifikan juga terjadi antara tahun 2014 dan tahun 2015, yaitu dari 59,38 persen (2014) menjadi 57,75 persen (2015), dan kemudian meningkat menjadi 58,29 persen pada Februari 2016.



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan lebih banyak yang bekerja di sektor informal. Selama tahun 2012-2015, laki-laki yang bekerja di sektor informal sekitar 55 persen sampai 57 persen. Di sisi lain, perempuan yang bekerja di sektor informal ada sebesar 64,95 persen pada tahun 2012 dan terus menurun sampai 62,22 persen pada tahun 2015. Kemudian, berdasarkan data tahun 2015 terlihat bahwa persentase pekerja laki-laki di kegiatan informal cenderung stabil, sedangkan pekerja perempuan di sektor informal meningkat sebesar satu persen, menjadi 63,21 persen.

Kecenderungan bekerja di sektor informal tersebut merupakan salah satu musabab dari tantangan bagi perempuan di Indonesia, yaitu memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif (Midjan, 2007). Dalam dunia kerja, masih terdapat beberapa pandangan untuk menempatkan perempuan sebagai subordinasi dari peran laki-laki, sehingga memberi kesan bahwa perempuan bekerja untuk mencari nafkah tambahan (Rahayu, 2008). Selain itu, kecenderungan ini juga disebabkan dari peran perempuan dalam pekerjaan rumah tangga. Dengan demikian untuk menutupi kekurangan pendapatan keluarga, perempuan lebih memilih terlibat dalam ekonomi informal.

Sementara itu, berdasarkan tren tersebut dapat memungkinkan bahwa di masa mendatang jumlah pekerja formal dan informal akan sama atau bahkan jumlah pekerja formal lebih banyak dibandingkan jumlah pekerja informal. Dengan kata lain, di masa mendatang perlindungan tenaga kerja akan lebih terjamin.

Pemerintah Indonesia juga telah berupaya untuk mendorong pekerja informal untuk menjadi pekerja formal agar lebih terlindungi. Upaya pemerintah tersebut dapat terlihat dari dukungan program *International Labor Organization (ILO)* untuk menjalankan transisi ekonomi dari sektor informal ke formal. Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengutarakan bahwa transisi ini ditekankan pada upaya peningkatan aspek perlindungan pekerja, perbaikan kondisi kerja, penciptaan lapangan kerja serta menjaga keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, perumusan kebijakan penciptaan lapangan kerja dalam ekonomi formal harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar proses transisi dapat dilakukan secara bertahap/gradual (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2015). Namun demikian, hal tersebut bukan berarti perlindungan pekerja informal tidak diperhatikan. Pemerintah RI nantinya akan secara bertahap memperluas Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sampai pada pekerja di sektor informal. Pentingnya menjamin perlindungan pekerja sektor informal karena sektor informal merupakan usaha dengan kekuatan dan elastisitas yang dapat menyangga ekonomi kerakyatan.



11

Penutup

Pada April 2015, IMF dalam *World Economic Outlook (WEO)* memperkirakan bahwa perekonomian dunia dapat tumbuh sebesar 3,5 persen atau meningkat dari tahun 2014 yang menunjukkan besaran 3,4 persen. Optimisme pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut didasari karena proyeksi semakin menguatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju yang tumbuh sekitar 2,4 persen. Namun demikian, IMF juga memproyeksikan bahwa nilai pertumbuhan ekonomi dunia tersebut akan terganggu dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang yang akan mengalami perlambatan pada tahun 2015 menjadi 4,3 persen.

Ternyata, kekhawatiran melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara berkembang menjadi kenyataan. Realisasi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2015 hanya mencapai 3,1 persen. Hal ini menandakan bahwa kinerja perekonomian dunia tidak sesuai dengan proyeksi yang dikeluarkan IMF pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,5 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai proyeksi ini disebabkan karena terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Walaupun, pertumbuhan ekonomi di negara maju mengalami peningkatan, besaran peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mampu mengimbangi besarnya perlambatan pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Alhasil perekonomian dunia pun semakin menunjukkan perlambatan.

Meskipun sesuai dengan proyeksi awal bahwa perekonomian negara maju pada tahun 2015 akan menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan, namun realisasi pertumbuhan ekonomi negara maju pada tahun 2015 yang sebesar 1,9 persen masih dibawah proyeksi awal sebesar 2,4 persen. Pertumbuhan ekonomi negara maju pada tahun 2015 yang sebesar 1,9 persen ini berada di bawah besaran pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi negara maju di tahun 2015 lebih tinggi.

Pergerakan/pertumbuhan ekonomi global yang terjadi pada tahun 2015 dan negara-negara maju dan berkembang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia, dimana saat ini belum beranjak membaik, sementara berbagai isu dari faktor eksternal terus menekan perekonomian domestik. Pemerintah harus bersikap hati-hati dan waspada terhadap faktor eksternal dan internal yang sewaktu-waktu dapat memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian Indonesia.

Kebijakan perekonomian di tahun 2015 disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pencapaian pembangunan pertumbuhan ekonomi yang dapat menjamin pemerataan dan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin dan ketimpangan antar penduduk serta ketimpangan wilayah antara Pulau Jawa dan Luar Jawa.

Dalam APBNP 2015 ditargetkan penerimaan negara sebesar Rp 1.761,64 triliun dan belanja Negara sebesar Rp 1.984,15 triliun, ternyata pendapatan negara masih mengalami defisit sebesar Rp 2.225,51 triliun, berarti pemerintah masih belum mampu menekan atau mengurangi belanja

negara. Target pemerintah untuk penerimaan negara dan hibah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Penerimaan negara bersumber dari pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah.

APBN 2016 disusun oleh pemerintah dengan penuh kehati-hatian berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal, serta direncanakan dan dibuat seefisien mungkin dalam pengelolaan sumber daya produktif dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan. Pemerintah memproyeksikan dalam APBN 2016 penerimaan negara sebesar Rp 1.822,54 triliun atau lebih tinggi 3,46 persen dari APBNP 2015. Sedangkan belanja negara diproyeksikan mencapai Rp 2.095,72 triliun lebih tinggi 5,62 persen dari tahun lalu. Postur APBN 2016 menunjukkan bahwa masih terjadi defisit anggaran sekitar 2,1 persen dari PDB atau sebesar Rp 273,18 triliun.

Pajak masih menjadi primadona penerimaan negara, dimana pada APBN 2016, direncanakan pemasukan dari pajak sebesar Rp 1.546,66 triliun atau terjadi peningkatan sebesar 3,85 persen dari APBNP 2015. Namun pemerintah mematok target penerimaan pajak sebesar Rp 1.368 triliun, atau 11 persen lebih tinggi dari realisasi penerimaan pajak tahun 2015.

Salah satu program pemerintahan Jokowi-JK adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Untuk mewujudkan program tersebut maka sejak pemerintahan Jokowi-JK mulai menyediakan anggaran dalam APBNP 2015 yaitu dana desa yang tujuannya adalah dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum di desa yang dapat membuat desa tersebut maju. Dalam APBNP 2015 untuk pos anggaran baru dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,77 triliun.

Anggaran belanja negara yang mendapat perhatian cukup tinggi dari pemerintah adalah pengeluaran untuk daerah, pada anggaran tahun lalu ditargetkan sebesar Rp 664,60 triliun dan untuk tahun anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp 770,17 triliun atau naik sekitar 15,88 persen. Pengeluaran untuk daerah sebagian digunakan untuk meningkatkan alokasi dana desa, dimana pada tahun 2016 alokasi untuk dana desa naik hingga 126,24 persen dari tahun lalu atau sebesar Rp 46,98 triliun dari dan diluar transfer ke daerah.

Selain itu yang cukup mendapat perhatian pemerintah dalam menyusun anggaran di tahun 2016 adalah anggaran untuk kesehatan, dimana untuk pertama kali pemerintah mencoba pemenuhan anggaran kesehatan ditetapkan sebesar 5 persen dari belanja negara serta mempertahankan pemenuhan anggaran untuk pendidikan tetap sebesar 20 persen dari belanja negara.

Berdasarkan APBN tahun 2016, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mencapai 5,3 persen, sementara Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,2-5,6 persen, dan Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen perkiraan ini masih sejalan dengan target pemerintah 5,3 persen.

Dari sisi pemerintah, ada lima langkah yang disiapkan untuk memperbaiki perekonomian tahun 2016 terutama memastikan penyerapan anggaran lebih cepat, sehingga pembangunan infrastruktur berdampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Lima langkah tersebut antara lain meningkatkan anggaran transfer ke daerah secara signifikan. Langkah kedua, melanjutkan pengalihan belanja yang kurang produktif dan tidak tepat sasaran, seperti subsidi listrik ke belanja yang lebih produktif. Ketiga, pemenuhan anggaran kesehatan 5 persen dari APBN yang pertama kalinya diwujudkan di tahun depan. Keempat, memperkuat dan memperluas program perlindungan sosial ke masyarakat yang kurang mampu. Kelima, memperluas kredit usaha rakyat (KUR) untuk mendukung usaha menengah, kecil, dan mikro melalui peningkatan anggaran subsidi bunga.

Ekspor merupakan salah satu komponen pembentuk perekonomian nasional. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, tentunya tidak lepas dari aktivitas perdagangan internasional yaitu ekspor impor. Melalui aktivitas ekspor, negara dapat melakukan pertukaran barang dan jasa untuk saling melengkapi kebutuhan rakyatnya. Kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2015 mencapai US\$ 150,37 miliar pada tahun 2015, mengalami penurunan sebesar US\$ 25,61 miliar atau turun sekitar 14,55 persen dibandingkan tahun lalu.

Untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri yang tidak mampu mencukupi, dan mengisi stok kekosongan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri dapat dilakukan pemerintah melalui impor. Namun demikian pemerintah tetap harus menekan impor barang-barang yang akan masuk ke dalam negeri dan menghindari barang-barang impor yang bersifat konsumtif. Nilai impor Indonesia tahun 2015, mencapai nilai US\$ 142,69 miliar atau menurun 19,92 persen dibandingkan tahun 2014. Kinerja impor menurun sejak tahun 2013. Oleh sebab itu, percepatan pembangunan infrastruktur diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian, termasuk aktivitas ekspor impor (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN SETJEN DPR RI). Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah menetapkan target kinerja ekspor tahun 2016 diperkirakan meningkat 8,3-9,4 persen dengan kenaikan ekspor non migas sebesar 7,2-8,5 persen. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan ekspor non migas yaitu dengan meningkatkan daya saing produk olahan ekspor non migas. Ditinjau dari sisi permintaan, permintaan eksternal diperkirakan mendorong pertumbuhan ekspor hingga mencapai 4,8-5,2 persen. Neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan surplus sebesar US\$ 7,67 miliar. Hal ini didukung penurunan defisit neraca perdagangan migas yang mencapai 62,12 persen dibandingkan tahun 2014.

Selama tahun 2015, sektor keuangan mampu menunjukkan kinerja yang baik terutama sistem pembayaran nasional dan pengelolaan uang rupiah. Dalam menghadapi kondisi perekonomian yang terjadi saat ini, BI dan pemerintah mempertimbangkan kondisi terkini, serta prospek dan resiko perekonomian ke depan, merespon dengan berbagai kebijakan. Pada awal tahun 2015 Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga

acuan atau BI Rate di level 7,75 persen atau sama seperti akhir tahun 2014. Hal ini ditetapkan karena untuk menjaga target inflasi di kisaran 4,0 persen \pm 1,0 persen pada 2015 dan 2016. Memasuki bulan Februari 2015 BI mulai menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 bps menjadi 7,50 persen. Keputusan BI tersebut dinilai masih konsisten dengan kondisi ekonomi saat ini yaitu menjaga inflasi. Angka BI rate ini pun bertahan sampai akhir tahun 2015.

Sepanjang tahun 2015, nilai tukar rupiah cenderung mengalami depresiasi terhadap beberapa mata uang asing, terutama terhadap nilai mata uang dolar AS. Tren depresiasi nilai tukar rupiah sudah dimulai pada awal tahun 2015. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan seiring penguatan dolar AS terhadap hampir semua mata uang. Pada akhir Januari 2015 nilai tukar rupiah berada di level Rp 12.625 per dolar AS atau mengalami depresiasi sebesar 1,49 persen terhadap nilai tukar rupiah pada akhir tahun 2014 yang berada di level Rp 12.440 per dolar AS. Terdepresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus berlangsung hingga akhir triwulan I 2015 (Maret 2015) hingga berada di level Rp 13.084 per dolar AS atau mengalami pelemahan sebesar 1,72 persen ($q-t-q$) dan sebesar 14,73 persen ($y-o-y$).

Selanjutnya memasuki triwulan akhir 2015 pergerakan nilai tukar rupiah sempat menunjukkan adanya tren menguat dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga seiring dengan meredanya faktor risiko eksternal. Karena didorong oleh meningkatnya aliran modal asing dan persepsi positif terhadap ekonomi domestik. Selama triwulan IV 2015 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp 13.639 per dolar AS pada bulan Oktober, dan melemah atau mengalami tekanan pada bulan November 2015 di level Rp 13.840 per dolar AS. Kurs rupiah pada penutupan tahun 2015 menguat sebesar 0,33 persen (mtm) bila dibandingkan posisi pada akhir November atau bila dibandingkan dengan triwulan III 2015 rupiah menguat sebesar 5,88 persen ($q-t-q$) menguat sebesar 0,33 persen (mtm) bila dibandingkan posisi pada akhir November atau bila dibandingkan dengan triwulan III 2015 rupiah menguat sebesar 5,88 persen ($q-t-q$) berada di level Rp 13.795 per dolar AS.

Investasi sebagai salah satu komponen pembentuk PDB, memiliki pengaruh yang nyata terhadap perekonomian suatu negara. Semakin besar investasi akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai. Untuk menarik investasi dalam dan luar negeri, pemerintah telah menyiapkan enam langkah penguatan investasi. Pertama, BKPM akan meningkatkan kepastian hukum terkait investasi dan usaha. Kemudian, mengembangkan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi perijinan. Ketiga, pemerintah akan memberikan insentif dan memfasilitasi investasi. Keempat, mendirikan Forum Investasi yang terdiri dari pejabat lintas kementerian dan *stakeholders* untuk memonitor dan mengatasi permasalahan investasi. Kelima, mendorong terciptanya iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif. Dan terakhir, peningkatan persaingan usaha yang sehat.

Dalam 3 tahun terakhir BKPM mencatat bahwa investasi domestik menunjukkan peningkatan, dimana investasi yang terealisasi sepanjang tahun

2014 mencapai Rp 156 126,16 miliar atau terjadi kenaikan 21,83 persen dibanding tahun 2013 yang baru mencapai Rp 128 150,56 miliar. Jumlah investasi yang dialirkan oleh masyarakat ataupun perusahaan domestik sepanjang tahun 2015 mencapai Rp 179.465,87 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 14,95 persen.

Investasi asing yang masuk ke Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan atau pergerakan yang searah dengan investasi domestik. Investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia pada tahun 2014 tercatat sebanyak US\$ 28.529,7 juta yang tersebar di 8.885 proyek. Nilai investasi asing ini lebih rendah atau menurun 0,31 persen jika dibanding tahun 2013 yang mencapai US\$ 28.617,5 juta dan tersebar di 9.612 proyek. Pada tahun 2015 investasi asing yang masuk di Indonesia meningkat lagi sebesar US\$ 29.275,9 juta, angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 2,62 persen bila dibandingkan dengan tahun 2014. Jumlah proyek investasi asing juga meningkat di tahun 2015 menjadi 17.738 proyek.

Sektor pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa negara. Sebagai penghasil devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, karena sektor pariwisata mampu membuka perluasan kesempatan serta lapangan kerja, dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya. Selain itu sektor pariwisata memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.

Sepanjang tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sebanyak 10,23 juta orang. Jumlah ini terdiri dari wisman yang datang melalui 19 pintu masuk sebagai "*foreign visitor*" sebanyak 9,73 juta wisman dan sisanya adalah wisman yang datang melalui pintu perbatasan atau "*foreigners who enter throught the cross border post*" dan kunjungan singkat wisman selama setahun atau "*other short foreigner visitors in 1 year*". Angka kunjungan wisman 2015 tersebut melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 10 juta wisman serta angka proyeksi sebesar 10,02 juta wisman.

Pemerintah menargetkan jumlah kunjungan wisman pada tahun 2016 sebanyak 12 juta orang. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencapai target tersebut adalah melakukan terobosan regulasi dengan memperbanyak pemberian Bebas Visa Kunjungan (BVK) kepada negara-negara di luar Indonesia (Perpres Nomor 104 Tahun 2015). Melalui kebijakan ini diharapkan jumlah wisatawan yang datang akan meningkat 1 (satu) juta wisatawan mancanegara (wisman) dengan devisa sebesar US\$ 1 milyar.

Posisi Indonesia di dunia pariwisata international tahun 2015 kini lebih signifikan. Menurut *World Economic Forum (WEF)* Indeks Daya Saing Pariwisata Indonesia berhasil naik ke peringkat 50 dari 141 negara di dunia. Tidak hanya mengalami kenaikan rangking di tingkat dunia, namun untuk tingkat Asia Pasifik, indeks daya saing pariwisata Indonesia juga naik berada di rangking 11.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia membuat perusahaan melakukan efisiensi. Salah satunya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang marak dilakukan perusahaan di Indonesia belakangan ini (*Glienmourinsie*, 2016). Tidak hanya PHK, pergeseran dari buruh lokal ke buruh asing juga menjadi konsekuensi efisiensi yang dilakukan perusahaan akibat berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan demikian, kualitas dan keterampilan SDM di Indonesia harus diperhatikan agar mampu berkompetisi dengan tenaga kerja asing.

Jumlah angkatan kerja di Indonesia terus meningkat, selama tahun 2012-2015. Jumlah angkatan kerja di Indonesia adalah 119,8 juta orang pada tahun 2012 menjadi 122,4 juta orang pada tahun 2015. Peningkatan tersebut menunjukkan laju pertumbuhan angkatan kerja adalah 0,70 persen setiap tahunnya. Bahkan hingga Februari tahun 2016 jumlah angkatan kerja terus meningkat dan mencapai 127,67 juta orang. Peningkatan jumlah angkatan kerja dapat disebabkan dari pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu dari tiga faktor komponen utama yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, jumlah penduduk yang bekerja selama tahun 2012-2015 terus meningkat rata-rata sebesar 0,68 persen setiap tahunnya. Dari seluruh angkatan kerja pada tahun 2012, dimana 93,87 persen diantaranya memiliki pekerjaan, pada tahun 2013 menurun menjadi 93,83 persen, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 94,06 persen, tetapi menurun kembali pada tahun 2015 menjadi 93,82 persen.

Salah satu indikator ketenagakerjaan adalah TPAK yang berguna untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja yang berpotensi untuk aktif secara ekonomi di suatu negara. TPAK di Indonesia selama empat tahun terakhir (2012-2015) terus mengalami penurunan. TPAK pada tahun 2012 adalah 67,76 persen, turun menjadi 65,76 persen pada tahun 2015. Nilai TPAK yang terus menurun menandakan bahwa ketersediaan penduduk usia kerja yang dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi (*labour supply*) semakin sedikit. Akan tetapi, *labour supply* pada Februari 2016 tumbuh kembali dengan meningkatnya TPAK menjadi 68,06 persen.

Pada Februari 2016 TPAK laki-laki mencapai 83,46 persen dan TPAK perempuan mencapai 52,71 persen. Akan tetapi, pada Februari 2016, ada peralihan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana TPT perempuan (5,26 persen) lebih rendah daripada TPT laki-laki (5,66 persen). Angka tersebut menandakan bahwa angkatan kerja perempuan lebih banyak terserap dibandingkan angkatan kerja laki-laki. Potensi dan keahlian kaum perempuan secara perlahan mulai dilirik pangsa pasar.

Tingkat pengangguran di Indonesia dapat dilihat dari TPT. Pada tahun 2013-2014, TPT di Indonesia mengalami penurunan yaitu dari 6,17 persen menjadi 5,94 persen. Pada tahun 2015, angka TPT nasional mengalami peningkatan menjadi 6,18 persen. TPT yang meningkat pada tahun 2015

menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan tenaga kerja masih minim sehingga banyak tenaga kerja yang tidak terserap. Dari situ, pemerintah terus berupaya menciptakan lapangan tenaga kerja di Indonesia agar mampu untuk terus menurunkan angka TPT. Upaya pemerintah pun membuahkan hasil, dimana pada Februari 2016 TPT Nasional dapat menurun hingga 5,50 persen.

World Economic Forum telah merilis *Global Competitiveness Report* 2015-2016 pada bulan September 2015. Dalam laporan tersebut, menilai bahwa indeks daya saing Indonesia tercatat berada di peringkat ke-37 dari 140 negara. Peringkat Indonesia ini berada di atas negara-negara seperti Portugal yang berada di peringkat 38, Italia di peringkat 43, Rusia di peringkat 45, Afrika Selatan di peringkat 49, India di peringkat 55, dan Brazil yang berada di peringkat 75. Sedangkan di level ASEAN sendiri, Indonesia berada di peringkat ke empat masih berada di bawah tiga negara tetangga, yaitu Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 18 dan Thailand yang berada di peringkat 32.

Dengan mencermati kondisi perekonomian yang berjalan disepanjang tahun 2015 dan menghadapi kondisi perekonomian di tahun 2016 pemerintah harus mampu mengoptimalkan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN dan harus mampu memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Melalui anggaran yang tersedia pemerintah dapat terus melanjutkan program-program yang sudah ditetapkan dalam menjamin percepatan pembangunan infrastruktur agar dapat memacu berkembangnya sektor ekonomi produktif. Pembangunan yang dilakukan bisa menjawab tantangan persaingan dengan negara lain selain itu mampu mengatasi kesenjangan serta mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Pemerintah dalam menjalankan pembangunan harus bergandeng tangan dengan semua pihak termasuk swasta dan masyarakat.

Kondisi perekonomian dunia yang belum sepenuhnya pulih diikuti oleh kondisi perekonomian negara-negara maju semoga masih dapat membawa dampak positif pada perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2016. Pemerintah berharap mampu merespon kondisi eksternal dan internal yang akan terjadi disepanjang tahun 2016, diharapkan dapat lebih memanfaatkan momentum dan mengoptimalkan upaya dalam menjamin percepatan pembangunan infrastruktur agar dapat memacu berkembangnya sektor ekonomi produktif, guna mengatasi masalah kesenjangan serta mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi. Pemerintah Indonesia semoga mampu menghadapi segala tantangan di tahun 2016, selain itu juga dapat memanfaatkan peluang dan momentum yang ada. Dengan mengoptimalkan anggaran, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada pemerintah diharapkan mampu menghadapi segala tantangan dan memanfaatkan peluang guna mewujudkan kemandirian ekonomi produktif.

Investasi masih sangat diperlukan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke depan, untuk itu kedepannya investasi yang terkumpul diutamakan untuk sektor padat modal daripada padat karya hendaknya mulai dibatasi. Pemerintah dalam menyusun program dan kebijaksanaan yang terkait dengan target dan sasaran yang akan dicapai seharusnya melibatkan peran dari lintas kementerian, pemerintah daerah, pengusaha, pekerja dan semua lapisan masyarakat.

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- ADB, *Asian Development Outlook 2016* dari www.adb.org
- ADB. 2015. *Asian Development Outlook 2016 Financing Asia's Future Growth*. Manila: ADB
- Analisis Data Pokok Kelautan dan Perikanan, 2015
- Bloom, David E. dan Richard B. Freeman. 1986. *The effects of rapid Population Growth on Labor Supply, and Employment in Developing Countries*. *Population and Development Review* 12(3).
- Bank Indonesia. 2016. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank Indonesia Februari 2016.
- Bank Indonesia, Laporan perekonomian Indonesia 2016. BI. Dari www.bi.go.id
- Bank Indonesia, Laporan Kebijakan Moneter Triwulanan I - IV, Tahun 2015
- Bank Indonesia. 2015. Perkembangan Ekonomi Keuangan Dan Kerja Sama Internasional Triwulan I -III 2015. Jakarta : BI
- Bank Indonesia. 2016. Perkembangan Ekonomi Keuangan Dan Kerja Sama Internasional Triwulan IV - 2015. Jakarta : BI
- Bank Indonesia. 2016. Laporan Perekonomian Indonesia 2014. Jakarta : BI
- Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI), berbagai edisi
- BPS, Berita Resmi Statistik berbagai edisi 2015 dan 2016
- BPS, Indikator Ekonomi berbagai edisi 2015
- BPS, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi berbagai edisi 2015, Jakarta
- BPS, Statistik Indonesia 2016
- Branch, Kathryn. 1994. *Are women worth as much as men?: Employment inequities, gender roles, and public policy*. *Duke Journal Of Gender Law & Policy*, Vol.1 No.119.
- Bloom, David E. dan Richard B. Freeman. 1986. *The effects of rapid Population Growth on Labor Supply, and Employment in Developing Countries*. *Population and Development Review* 12(3).
- European Comission. 2013. *Tackling the gender pay gap in the european union*. Luxembourg: *Publications Office of the European Union*.
- IMF. 2014. *World Economic Outlook October 2015 Legacies, Clouds, Uncertainties*. Washington : IMF
- IMF. 2015. *World Economic Outlook Update January 2014 Cross Currents*. Washington : IMF
- IMF. 2015. *World Economic Outlook April 2015 Uneven Growth: Short- and Long-Term Factors*. Washington : IMF
- IMF. 2015. *The Global Competitiveness Report 2014–2015*. Washington : IMF
- Kelautan dan Perikanan Dalam Angka, 2014
- Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
- Penina Mayaut atau Ella Syafputri . 2014. Anggota DPD RI: bangun listrik untuk kesejahteraan rakyat. Diakses melalui <http://www.antaranews.com> pada tanggal 29 Mei 2015.
- Potensi Desa (Podes) 2013
- Republik Indonesia. Tahun 2015. Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 4279. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Selfiani Hasanah. 25 September 2014. Produktivitas Tenaga Kerja RI masih rendah. Jakarta. Diakses dari <http://economy.okezone.com> diakses pada tanggal 1 Juni 2015.

Todaro, Michael P. 1971. *Income Expectations, Rural-Urban Migration and Employment in Africa*. *International Labour Review*, Vol.104 No.5.

UN. 2015. *Monthly Bulletin of Statistics Issue* No. 1124. Vol. LXIX. No. 2 February 2015. New York : UN

World Bank. 2014. *Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia*.
www.imf.org
<http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/04/07/menkeu-mau-maju-naikkan-upah-buruh>
<http://ugm.ac.id/id/berita/9598-bank.dunia.prediksikan.pertumbuhan.ekonomi.indonesia.2015.capai.52.persen>
<http://finance.detik.com/read/2015/01/07>
<http://www.bkpm.go.id/>
<http://www.businessnews.co.id/ekonomi-bisnis/indonesia-masih-menarik-di-mata-investor.php>
<http://investar.idx.co.id/news-events/news/2014/03/06/jejak-positif-pasar-saham-2013/>
<http://nasional.kompas.com/read/2015/03/16/19454251/Indonesia.Bebaskan.Visa.untuk.45.Negara>
<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/peringkat-34-dari-144-negara-indeks-daya-saing-indonesia-kembali-meningkat>
<http://economy.okezone.com/read/2015/04/29/20/1141826/bi-sebut-2014-jadi-tahun-terberat-untuk-ekonomi-ri>
<http://economy.okezone.com/read/2015/01/12/20/1091244/tantangan-eksternal-ekonomi-indonesia-di-2015>
<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/pelemahan-ekonomi-global-dan-inflasi-tantangan-perekonomian-indonesia-2015>
<http://swa.co.id/business-research/tahun-2015-ekonomi-indonesia-hadapi-tantangan-berat>
<http://setkab.go.id/pelemahan-ekonomi-2015/>
<http://www.adb.org/id/news/adb-president-praises-indonesias-reform-progress-highlights-need-action-economic-challenges>
<http://www.tribunnews.com/travel/2014/11/13/daya-saing-wisata-indonesia-tempati-peringkat-ke-70-dari-140-negara>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046,

E-mail : bpsHQ@bps.go.id Homepage : <http://www.bps.go.id>

ISSN 1858-0963



9 771858 109635 4